

**ANALISIS KETERKAITAN POLA PENGANGGARAN,
SEKTOR UNGGULAN, DAN SUMBERDAYA DASAR UNTUK
OPTIMALISASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
(Studi Kasus Kota Batu Provinsi Jawa Timur)**

FATCHURRAHMAN ASSIDIQI



**SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2005**

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis Analisis Keterkaitan Pola Penganggaran, Sektor Unggulan, dan Sumberdaya Dasar untuk Optimalisasi Kinerja Pembangunan Daerah (Studi Kasus Kota Batu Provinsi Jawa Timur) adalah karya saya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Bogor, Oktober 2005

Fatchurrahman Assidiqqi
NIM A253040024

ABSTRAK

FATCHURRAHMAN ASSIDIQQI. Analisis Keterkaitan Pola Penganggaran, Sektor Unggulan, dan Sumberdaya Dasar untuk Optimalisasi Kinerja Pembangunan Daerah (Studi Kasus Kota Batu Propinsi Jawa Timur). Dibimbing oleh H.R. SUNSUN SAEFULHAKIM dan FREDIAN TONNY NASDIAN.

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi yang ditandai dengan pemberlakuan UU No. 22/1999 *juncto* UU No. 32/2004 dan UU No. 25/1999 *juncto* UU No.33/2004 telah memberikan kesempatan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dirinya sendiri melalui *local self government* dan untuk melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan karakteristik lokalnya.

Dengan desentralisasi, maka pemerintah daerah dan kota harus menyusun perencanaan pembangunannya sendiri. Ada tiga elemen dalam perencanaan pembangunan daerah yaitu fisik, sosial, dan fiskal, dimana ketiganya merupakan hal-hal yang saling membutuhkan dan tidak bisa dipisahkan. Kesuksesan sebuah proses perencanaan sangat tergantung kepada keseimbangan yang tepat antara ketiganya serta kompetensi dalam menggabungkan ketiga hal tersebut.

Dalam penelitian ini dianalisis keterkaitan pola penganggaran, sektor unggulan, dan sumberdaya dasar untuk optimalisasi kinerja pembangunan daerah di Kota Batu. Sektor unggulan dianalisis dengan menggunakan metode Input-Output, pola penganggaran dianalisis dengan metode *Analysis Hierarchy Process* (AHP) dan sumberdaya dasar dianalisis dengan metode SWOT.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pola penganggaran belanja pembangunan Kota Batu selama ini belum sepenuhnya memperhatikan sektor unggulan dan sumberdaya yang ada di Kota Batu, meskipun hasil analisis sistem mekanisme penyusunan belanja pembangunan APBD Kota Batu menunjukkan bahwa sektor unggulan menjadi prioritas utama dalam penyusunan APBD Kota Batu. Jika melihat struktur APBD Kota Batu terlihat bahwa dukungan anggaran terhadap pengembangan sektor unggulan sangat lemah.

Sektor unggulan di Kota Batu yang memberikan *multiplier effects* yang tinggi terhadap pendapatan, penyerapan tenaga kerja, dan kesejahteraan masyarakat adalah sektor industri, restoran, bangunan, hotel, energi, dan perdagangan. Sedangkan sumberdaya dasarnya adalah kondisi tanahnya sebagian besar sesuai untuk lahan pertanian dan tersedia dalam jumlah cukup luas, terdapat banyak sumber mata air dengan kapasitas debit air yang besar, banyak terdapat kawasan wisata alam dan buatan, banyak terdapat *home industry*, adanya dukungan sarana akomodasi, transportasi, komunikasi, dan perbankan serta potensi tenaga kerja dan kualitas sumberdaya manusia di bidang pertanian.

Pemerintah Kota Batu dituntut harus mampu menggali dan mengembangkan keunggulan lokal serta menciptakan sinergi antar kawasan di Kota Batu dengan didukung oleh pola penganggaran yang tepat dan harus meninjau ulang kebijakan pembangunannya khususnya mengenai penyusunan pola penganggarnya dengan memperhatikan sektor unggulan dan sumberdaya yang ada. Pembangunan Kota Batu semestinya diarahkan kepada peningkatan daya saing produk dengan lebih mengutamakan program pemberdayaan masyarakat perdesaan agar mampu mandiri dan bersaing dalam persaingan global.

**ANALISIS KETERKAITAN POLA PENGANGGARAN,
SEKTOR UNGGULAN, DAN SUMBERDAYA DASAR UNTUK
OPTIMALISASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
(Studi Kasus Kota Batu Provinsi Jawa Timur)**

FATCHURRAHMAN ASSIDIQI

Tesis
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Sains pada
Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah

**SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2005**

Judul Tesis : Analisis Keterkaitan Pola Penganggaran, Sektor Unggulan, dan Sumberdaya Dasar untuk Optimalisasi Kinerja Pembangunan Daerah (Studi Kasus Kota Batu Provinsi Jawa Timur)
Nama : Fatchurrahman Assidiqqi
NIM : A253040024

Disetujui
Komisi Pembimbing

Dr. Ir. H. R. Sunsun Saefulhakim, M.Agr
Ketua

Ir. Fredian Tonny Nasdian, MS
Anggota

Diketahui

Ketua Program Studi
Ilmu Perencanaan Wilayah

Dekan Sekolah Pascasarjana

Dr. Ir. Ernani Rustiadi, M.Agr

Prof. Dr. Ir. Sjafrida Manuwoto, M.Sc

Tanggal Ujian : 25 Oktober 2005

Tanggal Lulus :

Kupersembahkan karya kecil ini untuk:

- ❖ *Ibu dan Bapak Malang yang selalu mendo'akan dan memberikan dorongan semangat*
- ❖ *Ibu dan Bapak Jatiroto yang selalu mendo'akan dan setia mengasuh Irul dan Raihan*
 - ❖ *Kakak-kakak dan adik-adik atas segala bantuannya*
- ❖ *Istri tercinta, Wulandari, atas segala pengertian, kesabaran, do'a, dan kasih sayang*
 - ❖ *Anak-anak tersayang, Irul dan Raihan*

PRAKATA

Segala puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah rabb seluruh alam. Saya bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Muhammad rasul Allah. Shalawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan orang yang mengikutinya.

Tesis dengan judul Analisis Keterkaitan Pola Penganggaran, Sektor Unggulan, dan Sumberdaya Dasar untuk Optimalisasi Kinerja Pembangunan Daerah (Studi Kasus Kota Batu Provinsi Jawa Timur) disusun sebagai rangkaian tugas penyelesaian pendidikan S-2 program studi Ilmu Perencanaan Wilayah di Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Penelitian yang dilaksanakan bertujuan untuk menganalisis keterkaitan pola penganggaran, sektor unggulan, dan sumberdaya dasar untuk optimalisasi kinerja pembangunan daerah Kota Batu. Diharapkan tesis ini dapat memberikan masukan dan informasi yang berarti bagi para pengambil keputusan dalam menentukan arah pembangunan atau penyempurnaan kebijakan pengembangan wilayah dan pembangunan daerah yang telah ada di Kota Batu.

Saya memohon kepada Allah agar memberi kebaikan untuk Dr. Ir. H. R. Sunsun Saefulhakim, M.Agr, Ir. Fredian Tonny Nasdian MS, dan Dr. Ir. Noer Azam Achsan yang telah memberikan doa, bimbingan, arahan, nasehat, dan lain-lain. Permohonan yang sama saya sampaikan untuk semua yang telah membantu. Pula, kepada Saudara yang berkenan membaca hasil penelitian ini dan telah dituntut oleh amanah ilmiah untuk memberikan kritik dan saran untuk penyempurnaan tesis ini.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Bappenas dan Direktur Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan S2 di Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada ayah, ibu, istri dan anak-anak serta seluruh keluarga, atas segala doa dan kasih sayang.

Jika terdapat kebenaran, semata-mata dari Allah, jika terdapat kekhilafan atau kesalahan, maka itu dari diri saya. Saya senantiasa memohon kepada Allah semoga mengampuni, menerima jerih payah ini, menjadikannya amal jariyah, dan membawa manfaat serta kebaikan bagi semua. Tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah.

Wabillahittaufig wal hidayah. Wassalam.

Bogor, Oktober 2005

Fatchurrahman Assidiqqi

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Tuban pada tanggal 10 Desember 1973 dari Bapak Drs. H. Muhammad Saleh dan Ibu Nur Inajati SAg. Penulis adalah putra pertama dari 5 bersaudara.

Tahun 1992 penulis lulus dari SMA Negeri I Probolinggo dan pada tahun yang sama penulis lulus seleksi masuk STAN Program Diploma III Keuangan Jakarta Spesialisasi Anggaran dan menamatkan pendidikan tahun 1995. Kemudian pada tahun 1997 melanjutkan pendidikan sarjana di Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Andalas Padang dan lulus tahun 1999. Pada tahun 2004 penulis menerima beasiswa dari Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Bappenas untuk melanjutkan pendidikan S2 di Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah Institut Pertanian Bogor.

Penulis bekerja di Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Padang dari tahun 1995 s/d 2000. Kemudian bertugas di Direktorat Pembinaan Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan Jakarta dari tahun 2000 s/d Juni 2005. Sejak bulan Agustus 2005 penulis bekerja di Direktorat Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan.

Penulis menikah dengan Wulandari, SE pada tanggal 31 Oktober 1999 dan telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki yaitu Muhammad Khairul Imam Assidiqqi yang lahir pada tanggal 30 Oktober 2000 dan Muhammad Raihan Assidiqqi yang lahir pada tanggal 30 Oktober 2003.

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PENDAHULUAN	
Latar Belakang.....	1
Perumusan Masalah.....	7
Tujuan Penelitian.....	11
Manfaat Penelitian.....	11
Batasan Penelitian.....	12
Penelitian Sebelumnya.....	12
TINJAUAN PUSTAKA	
Sektor Unggulan.....	13
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	16
Sistem Mekanisme Penyusunan APBD.....	23
Sumberdaya Dasar	25
Perencanaan Pengembangan Wilayah.....	26
Analisis Input-Output.....	31
Proses Hierarki Analitik.....	36
METODOLOGI PENELITIAN	
Kerangka Pemikiran.....	39
Tempat dan Waktu Penelitian.....	44
Metode Pengumpulan dan Jenis data.....	44
Spesifikasi Data.....	46
Metode Analisis	46
GAMBARAN UMUM WILAYAH	
Kondisi Fisik Kota Batu.....	57
Visi, Misi, Strategi, dan Tujuan Pembangunan Kota Batu.....	62
Kondisi Sosial Budaya Kota Batu.....	63
Kebijakan Perwilayahan dan Pengembangan Tata Ruang Kota Batu.....	67

Halaman

STRUKTUR KETERKAITAN ANTAR SEKTOR

Struktur Output..... 71

Struktur Nilai Tambah Bruto..... 72

Derajat Kepekaan (Keterkaitan ke Depan)..... 73

Daya Penyebaran (Keterkaitan ke Belakang)..... 75

Angka Pengganda Output..... 77

Angka Pengganda Pendapatan..... 78

Angka Pengganda Tenaga Kerja..... 79

Angka Pengganda Pajak Tak Langsung Neto..... 80

Angka Pengganda Nilai Tambah Total..... 81

Kontribusi Sektor dalam PDRB..... 84

Penentuan Sektor Unggulan..... 84

Ikhtisar..... 89

SISTEM MEKANISME PENYUSUNAN DAN STRUKTUR BELANJA PEMBANGUNAN APBD

Sistem Mekanisme Penyusunan Belanja Pembangunan APBD..... 93

Struktur Belanja Pembangunan APBD..... 102

Ikhtisar..... 106

SUMBERDAYA DASAR POTENSIAL

Hasil Analisis SWOT..... 111

Sumberdaya Potensial..... 131

Ikhtisar..... 135

KETERKAITAN POLA PENGANGGARAN, SEKTOR UNGGULAN, DAN SUMBERDAYA DASAR..... 136

ARAHAN OPTIMALISASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BATU..... 141

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan..... 145

Saran..... 146

DAFTAR PUSTAKA..... 147

LAMPIRAN..... 151

DAFTAR TABEL

	Halaman
1 Perubahan pangsa PDRB Kota Batu tahun 1999-2003 atas dasar harga berlaku dan harga konstan tahun 1993 (%).....	4
2 Jumlah pekerja menurut lapangan usaha tahun 2003 (jiwa).....	5
3 Luas lahan menurut penggunaan di Kota Batu tahun 2003 (Ha).....	6
4 Kontribusi dan total masing-masing pengeluaran Pemerintah Daerah Kota Batu tahun 2002-2003 (ribu rupiah).....	7
5 Keterkaitan antarsektor.....	15
6 Ringkasan APBD sistem tradisional.....	18
7 Ringkasan APBD berbasis kinerja.....	19
8 Jenis dan sumber data yang diperlukan berdasarkan tujuan penelitian.....	45
9 Matriks SWOT.....	55
10 Letak topografi, luas, dan ketinggian desa/kelurahan di Kota Batu	58
11 Kemiringan lahan dan peruntukannya.....	59
12 Luas lahan menurut jenis tanah tiap kecamatan di Kota Batu (Ha)...	60
13 Luas lahan menurut penggunaan pada tiap kecamatan di Kota Batu (Ha) tahun 2003.....	60
14 Karakteristik cuaca Kota Batu tahun 2003.....	61
15 Penyebaran penduduk antar desa di Kota Batu tahun 2004 (jiwa)....	64
16 Jumlah penduduk Kota Batu tahun 2004 berdasarkan usia (jiwa).....	65
17 Jumlah penduduk Kota Batu menurut mata pencaharian tahun 2004.....	66
18 Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas dirinci menurut lapangan usaha tahun 2003.....	67
19 Sektor berdasarkan nilai output di Kota Batu tahun 2003	71

	Halaman
20	Sektor berdasarkan nilai tambah bruto di Kota Batu tahun 2003..... 72
21	Derajat kepekaan (keterkaitan ke depan)..... 74
22	Daya penyebaran (keterkaitan ke belakang)..... 76
23	Angka pengganda output Kota Batu tahun 2003..... 77
24	Angka pengganda pendapatan Kota Batu tahun 2003..... 79
25	Angka pengganda tenaga kerja Kota Batu tahun 2003..... 80
26	Angka pengganda pajak tak langsung neto Kota Batu tahun 2003..... 81
27	Angka pengganda nilai tambah total Kota Batu tahun 2003..... 82
28	Rangkuman Analisis Input-Output Kota Batu tahun 2003..... 83
29	Kontribusi masing-masing sektor dalam PDRB Kota Batu tahun 2003 atas dasar harga berlaku dan konstan (juta rupiah)..... 84
30	Eigenvalue..... 86
31	<i>Communalities</i> dan <i>Factor Loading</i> 87
32	<i>Factor score</i> 88
33	Sektor unggulan..... 89
34	Matriks keterkaitan antarsektor..... 89
35	Matriks sektor yang dikembangkan berdasarkan skenario kebijakan pembangunan pengembangan wilayah Kota Batu..... 91
36	Struktur belanja pembangunan APBD Kota Batu tahun 2002 dan 2003 (Rp)..... 102
37	Persentase masing-masing sektor dalam struktur belanja pembangunan APBD Kota Batu tahun 2002 dan 2003 (%)..... 109
38	Identifikasi variabel kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.... 132
39	Matriks SWOT..... 133
40	Sektor unggulan, sumberdaya dasar, dan dukungan anggaran..... 138

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1 Fungsi belanja pelayanan publik.....	22
2 Hubungan antara pengembangan wilayah, sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan teknologi	28
3 Struktur dasar tabel transaksi Input-Output.....	35
4 Kerangka pemikiran.....	42
5 Diagram alir penelitian.....	43
6 Indeks derajat kepekaan dan daya penyebaran	51
7 Struktur proses hierarki analitik.....	56
8 Gambar <i>Factor Loading</i> , Faktor 1 Vs Faktor 2.....	88
9 Aspek yang dipertimbangkan dan menentukan dalam penyusunan belanja pembangunan APBD Kota Batu.....	93
10 Kriteria dalam aspek teknis perencanaan dan bobot nilainya.....	94
11 Kriteria dalam aspek nonteknis politis dan bobot nilainya.....	95
12 Perbandingan skala prioritas antara sektor unggulan dan pemberdayaan masyarakat.....	96
13 Perbandingan skala prioritas antara sektor unggulan dan pembangunan berkelanjutan.....	97
14 Perbandingan skala prioritas antara pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.....	98
15 Perbandingan skala prioritas antara sektor unggulan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan kriteria dalam aspek teknis perencanaan.....	98
16 Perbandingan skala prioritas antara sektor unggulan dan pembangunan berkelanjutan berdasarkan kriteria dalam aspek teknis perencanaan.....	99

Halaman

17 Perbandingan skala prioritas antara pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan berdasarkan kriteria dalam aspek teknis perencanaan..... 100

18 Perbandingan skala prioritas antara sektor unggulan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan kriteria dalam aspek nonteknis politis..... 100

19 Perbandingan skala prioritas antara sektor unggulan dan pembangunan berkelanjutan berdasarkan kriteria dalam aspek nonteknis politis..... 101

20 Perbandingan skala prioritas antara pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan berdasarkan kriteria dalam aspek nonteknis politis..... 101

21 Nilai bobot yang menunjukkan skala prioritas dalam penyusunan belanja pembangunan APBD Kota Batu..... 106

22 Hasil proses hierarki analitik beserta nilai bobot kriteria..... 107

Halaman ini merupakan bagian dari dokumen yang diterbitkan oleh IPB University dan merupakan sumber daya intelektual yang tidak dapat dipisahkan dari IPB University. Penggunaan yang tidak sah atau pelanggaran hak cipta akan dikenakan sanksi hukum yang berlaku. IPB University tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat penggunaan yang tidak sah atau pelanggaran hak cipta ini. IPB University.

DAFTAR LAMPIRAN

		Halaman
1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2001.....	152
2	Perincian 16 sektor.....	164
3	Prosedur <i>updating</i> Tabel Input-Output Jawa Timur tahun 2003.....	166
4	Prosedur pendugaan Tabel Input-Output Kota Batu tahun 2003.....	176
5	Peta rencana struktur pusat pelayanan Kota Batu	186
6	Tabel Input-Output Kota Batu atas dasar harga produsen tahun 2003, 16x16 sektor (juta rupiah).....	187

Hal Cipta Mitra IPB University
 1. Dilakukan dengan sebagian atau seluruh karya kita IPB
 2. Berfungsi sebagai sumber informasi, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan untuk
 3. Berfungsi sebagai sumber informasi, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan untuk
 4. Berfungsi sebagai sumber informasi, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan untuk
 5. Berfungsi sebagai sumber informasi, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan untuk
 6. Berfungsi sebagai sumber informasi, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan untuk

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagai akibat diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 *juncto* No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 *juncto* No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka terjadi perubahan sistem pemerintahan dari sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik menjadi sistem pemerintahan yang bersifat desentralistik (otonomi daerah). Dengan diterbitkannya undang-undang tersebut maka kewenangan pemerintah daerah sepenuhnya dapat dilaksanakan, baik mengenai urusan di bidang pemerintahan maupun di bidang keuangan yang harus dilakukan dengan sistem manajemen yang profesional. Dalam hal ini pemerintah daerah dituntut lebih untuk menyiapkan rencana pembangunan, menentukan sektor unggulan atau prioritasnya, dan penyusunan anggaran berbasis kinerja.

Pemberlakuan otonomi daerah mengisyaratkan adanya pengakuan terhadap keanekaragaman sumberdaya yang dimiliki daerah dengan memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengatur dirinya sendiri melalui *local self government* dan untuk melaksanakan model pembangunan yang sesuai dengan karakteristik lokalnya (*local specific*). Selain itu, diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah tersebut akan mempunyai implikasi yang luas dalam sistem perencanaan pembangunan di daerah. Pemerintah daerah akan memiliki kewenangan yang lebih besar di dalam merencanakan arah pembangunannya. Di sisi lain, pemerintah daerah akan semakin dituntut untuk lebih mandiri di dalam memecahkan masalah-masalah pembangunan di daerahnya.

Otonomi daerah juga mengisyaratkan semakin pentingnya pendekatan pembangunan dengan basis pengembangan wilayah pendekatan pembangunan dengan pendekatan sektoral. Pembangunan berbasis pengembangan wilayah memandang pentingnya keterpaduan intersektoral, interspasial, serta antar pelaku pembangunan di dalam dan antardaerah (Saefulhakim 2004).

Hasil Cipta: Penerapan Undang-Undang
1. Dilihat sebagai bagian dari sejarah bangsa ini yang menunjukkan dan memprediksi kondisi
2. Berfungsi sebagai alat komunikasi, pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan pengembangan ilmu
3. Menghasilkan karya-karya intelektual yang bermanfaat bagi masyarakat
4. Menghasilkan karya-karya intelektual yang bermanfaat bagi masyarakat
5. Menghasilkan karya-karya intelektual yang bermanfaat bagi masyarakat
6. Menghasilkan karya-karya intelektual yang bermanfaat bagi masyarakat
7. Menghasilkan karya-karya intelektual yang bermanfaat bagi masyarakat
8. Menghasilkan karya-karya intelektual yang bermanfaat bagi masyarakat
9. Menghasilkan karya-karya intelektual yang bermanfaat bagi masyarakat
10. Menghasilkan karya-karya intelektual yang bermanfaat bagi masyarakat

Keterpaduan intersektoral menuntut adanya keterkaitan fungsional dan sinergi antar sektor-sektor pembangunan, sehingga setiap program pembangunan di dalam kelembagaan sektoral selalu dilaksanakan dalam kerangka pembangunan wilayah. Salah satu bentuk dari terjadinya kegagalan pemerintahan (*government failure*) di masa lalu adalah kegagalan di dalam menciptakan keterpaduan intersektoral yang sinergis di dalam kerangka pembangunan wilayah. Lembaga-lembaga sektoral di tingkat daerah sering kali hanya menjadi perpanjangan dari lembaga-lembaga sektoral di tingkat pusat dengan sasaran pembangunan, pendekatan, dan perilaku yang tidak sinergis dengan lembaga-lembaga sektoral di tingkat daerah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah harus memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peranserta masyarakat, pemerataan, keadilan, dan memperhatikan potensi serta keanekaragaman daerah. Dampak kewenangan tersebut telah memposisikan daerah sebagai daerah otonom yang mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan aspirasi masyarakat.

Sejalan dengan semangat otonomi daerah yang juga didukung dengan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 *juncto* No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka pemerintah daerah dituntut untuk dapat mewujudkan *good governance* yang mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tuntutan masyarakat kepada pemerintah daerah terhadap pelayanan publik yang ekonomis, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan responsif semakin besar. Keleluasaan penggunaan dana yang telah meningkat cukup signifikan, harus mendapatkan pengelolaan yang baik, yaitu melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat atau melalui penyelenggaraan pembangunan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga sudah sewajarnya apabila timbul tuntutan terhadap reformasi pengelolaan keuangan daerah guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik yang sesuai dengan keinginan masyarakat.

Sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik merupakan elemen penting untuk mewujudkan *good governance*. Pengelolaan keuangan daerah yang tepat, efisien, efektif, dan bertanggung jawab membutuhkan adanya transparansi dalam proses penyusunan anggaran dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumberdaya

ekonomi yang ada. Sehingga mempengaruhi sistem penganggaran yang ada di berbagai daerah untuk lebih berpihak kepada kepentingan publik.

Tanpa penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang tepat, maka dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan daerah, dan menimbulkan persepsi yang keliru mengenai orientasi pengeluaran lebih difokuskan bagi kesejahteraan aparatur dibandingkan dengan kesejahteraan masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota, kabupaten dan provinsi tahun 2002 di hampir seluruh Indonesia menunjukkan bahwa persentase alokasi belanja rutin berkisar antara 60-70%, sedangkan sisanya sekitar 30-40% untuk belanja pembangunan. Bahkan ada beberapa daerah yang hanya mengalokasikan tidak lebih dari 20% alokasi anggarannya untuk kegiatan pembangunan. Alokasi belanja pembangunan inilah yang diyakini masyarakat sebagai belanja kepentingan publik, sedangkan belanja rutin hanya diperuntukkan bagi kegiatan aparatur.

Dengan adanya undang-undang tersebut, maka prakarsa untuk melaksanakan perencanaan pembangunan daerah harus banyak datang dari daerah sendiri. Para perencana daerah diharapkan dapat menyusun rencana-rencana pembangunan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal. Identifikasi dan pengembangan sektor-sektor unggulan merupakan langkah strategis bagi daerah karena beberapa alasan berikut:

1. Sektor unggulan dapat dijadikan arah, sasaran, dan prioritas pembangunan daerah agar pembangunan dapat berlangsung dengan lebih efektif dan efisien, terutama karena keterbatasan sumberdaya daerah. Alokasi sumberdaya tidak mungkin diterima secara merata pada seluruh sektor yang ada, tetapi harus difokuskan pada sektor tertentu berdasarkan skala prioritas.
2. Sektor unggulan dapat berfungsi sebagai motor penggerak sektor-sektor perekonomian secara keseluruhan. Selain memacu sektor secara internal, sektor unggulan juga dapat mendorong pertumbuhan sektor-sektor lainnya dengan adanya keterkaitan antarsektor.
3. Mengingat posisi strategis yang dimiliki suatu daerah baik dilihat dari letak geografis maupun posisinya sebagai titik-titik pertumbuhan (aglomerasi) maka

sektor unggulan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah-daerah sekitarnya (*hinterland*).

Kota Batu merupakan kota termuda di Jawa Timur yang terbentuk pada tahun 2001 berdasarkan Undang-Undang nomor 11 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lampiran 1). Kota ini sebelumnya merupakan Kota Administratif dengan kabupaten induk adalah Kabupaten Malang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kota Administratif Batu. Sebagai kota yang baru terbentuk, Kota Batu sedang giat membangun. Namun dalam pelaksanaan pembangunan wilayah, Pemerintah Kota Batu lebih menerapkan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan saja dan bertumpu pada sektor non pertanian serta belum sepenuhnya memperhatikan keterkaitan antarsektor.

Tabel 1 Perubahan pangsa PDRB Kota Batu tahun 1999-2003 atas dasar harga berlaku dan harga konstan tahun 1993 (%)

SEKTOR	HARGA BERLAKU					HARGA KONSTAN TAHUN 1993				
	1999	2000	2001	2002	2003	1999	2000	2001	2002	2003
1. Sektor primer	17.24	16.29	16.19	15.16	15.03	16.01	15.48	15.69	15.20	15.18
A. Pertanian	16.92	15.96	15.86	14.82	14.70	15.77	15.23	15.44	14.95	14.94
B. Pertambangan dan penggalian	0.32	0.33	0.33	0.33	0.32	0.24	0.25	0.25	0.25	0.24
2. Sektor sekunder	17.49	17.57	17.35	17.45	16.35	17.07	17.22	17.01	16.72	15.54
A. Industri pengolahan	14.15	14.21	13.99	13.81	12.43	13.20	13.30	13.11	12.67	11.34
B. Listrik dan air bersih	1.63	1.71	1.75	1.93	2.11	2.14	2.27	2.29	2.39	2.51
C. Bangunan	1.71	1.65	1.61	1.70	1.81	1.73	1.65	1.61	1.66	1.69
3. Sektor tersier	65.27	66.14	66.46	67.40	68.63	66.92	67.29	67.30	68.07	69.28
A. Perdagangan, hotel, dan restoran	43.56	44.23	44.19	44.66	45.00	43.44	43.71	43.46	43.73	43.91
B. Angkutan dan komunikasi	4.42	4.45	4.55	4.57	4.71	5.67	5.69	5.79	5.77	6.03
C. Keuangan, dan jasa perusahaan	4.50	4.64	4.72	4.79	4.89	5.23	5.31	5.31	5.33	5.43
D. Jasa-jasa	12.79	12.82	13.01	13.38	14.03	12.58	12.58	12.73	13.24	13.91

Sumber: BPS Kota Batu (2004a) dan diolah Sendiri.

Dari Tabel 1 di atas mengenai perubahan pangsa PDRB Kota Batu tahun 1999-2003 atas dasar harga konstan dan berlaku terlihat bahwa sektor primer (pertanian, pertambangan dan penggalian) mengalami penurunan dari 17.24% di tahun 1999 menjadi 15.03%. Memang sektor ini pada tahun 2001 sempat berubah

arah dan meningkat kembali pangasanya untuk PDRB harga konstan tetapi pada periode tahun berikutnya kembali mengalami penurunan.

Untuk sektor sekunder (industri pengolahan, listrik, gas, air, dan bangunan) yang semula diharapkan dapat menjadi motor penggerak (*prime mover*) perekonomian bersama sektor tersier (perdagangan, hotel, restoran, angkutan dan komunikasi, keuangan, dan jasa-jasa) mengalami fluktuasi dan turun drastis di tahun 2003 dengan pangsa PDRB sebesar 16.35%.

Sedangkan pangsa sektor tersier, baik atas dasar harga berlaku maupun konstan, terus mengalami kenaikan secara konsisten dari 65.27% di tahun 1999 menjadi 68.63% di tahun 2003 (untuk atas dasar harga berlaku) dan dari 66.92% di tahun 1999 menjadi 69.28% di tahun 2003 (untuk atas dasar harga konstan).

Tabel 2 Jumlah pekerja menurut lapangan usaha tahun 2003 (jiwa)

No.	Pekerjan	Jumlah	Persen
1.	Pertanian	26 686	30.73
2.	Perkebunan	826	0.95
3.	Perikanan	105	0.12
4.	Peternakan	1 358	1.56
5.	Pertanian lainnya	8 391	9.66
6.	Industri pengelola	4 914	5.66
7.	Perdagangan, hotel, dan restoran	12 056	13.88
8.	Jasa-jasa	19 334	22.26
9.	Angkutan	2 691	3.10
10.	Lainnya	10 493	12.08
Total		86 854	100

Sumber: BPS dan Bapeko Batu (2004).

Perekonomian Kota Batu didominasi oleh sektor pertanian. Dari Tabel 2 di atas terlihat bahwa jumlah penduduk Kota Batu yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 86 854 atau sebesar 43.02%. Jika dilihat dari PDRB Kota Batu pada tahun 2003, sektor pertanian hanya menyumbang sebesar 14.7% atas dasar harga berlaku dan 14.94% atas dasar harga konstan (Tabel 1). Permasalahan yang dialami dalam pembangunan ekonomi di Kota Batu adalah rendahnya nilai tambah hampir di semua sektor ekonomi karena lemahnya keterkaitan antarsektor tersebut. Bahan mentah kebanyakan dijual ke luar daerah, sehingga nilai tambah yang tercipta dari pengolahan bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi akan dinikmati oleh daerah lain di luar Kota Batu .

Komoditas pertanian yang dihasilkan di Kota Batu bersumber dari pertanian rakyat dalam skala kecil seperti padi, palawija, hortikultura, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan yang dihasilkan oleh ribuan petani di setiap pelosok pedesaan. Akibatnya agak sulit dalam proses pemasaran dan pengolahan hasil di tempat produksi sehingga lebih banyak dijual dalam bentuk bahan mentah ke luar daerah. Sebagian dari komoditas hasil pertanian tersebut dikonsumsi sendiri oleh penduduk Kota Batu setelah dilakukan pengolahan secara sederhana.

Sebagian besar penduduk Kota Batu tinggal di pedesaan yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Ironisnya, sektor pertanian hanya memberikan nilai tambah yang kecil jika dibandingkan dengan sektor lain di perkotaan sehingga sebagian petani di Kota Batu hidup di bawah garis kemiskinan. Sementara itu, seperti terlihat dalam Tabel 3 berikut ini, Kota Batu mempunyai potensi sumberdaya alam yang sebagian besar berada di pedesaan yang selama ini belum sepenuhnya dikelola secara optimal. Potensi tersebut seandainya dikelola dengan tepat, efektif, dan efisien semestinya mampu memberikan kontribusi yang cukup berarti dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat (LPEM Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang 2004a).

Tabel 3 Luas lahan menurut penggunaan di Kota Batu tahun 2003 (Ha)

No	Penggunaan	Total	Persen
1	Permukiman	2 812.47	14
2	Sawah	2 681.00	13
3	Tegalan dan Kebun	5 604.70	29
4	Rumput dan Belukar	2 228.61	11
5	Hutan	6 425.00	32
6	Lain-lain	156.94	1
Total		19 908.72	100

Sumber: BPS dan Bapeko Batu (2004).

Sementara itu dari Tabel 4 di bawah terlihat bahwa pengeluaran pembangunan Kota Batu tahun 2003 mendapatkan alokasi 48.8% dari total pengeluaran. Sektor pembangunan perhubungan mendapatkan alokasi 7.55%, sektor aparaturnya sebesar 10.74%, dan sektor pembangunan daerah sebesar 7.5%. Sedangkan untuk sektor lainnya berkisar antara 1–3%.

Tabel 4 Kontribusi dan total masing-masing pengeluaran Pemerintah Daerah Kota Batu tahun 2002-2003 (ribu rupiah)

Jenis Pengeluaran	2002	Persen	2003	Persen
A. Pengeluaran Rutin	15 336 424.80	33.44	62 242 697	51.20
1. Belanja Pegawai	2 734 061.60	5.96	31 512 102	25.92
2. Belanja Barang	3 438 061.00	7.50	8 102 710	6.66
3. Biaya Pemeliharaan	725 987.80	1.58	1 775 565	1.46
4. Perjalanan Dinas	555 896.20	1.21	1 229 017	1.01
5. Belanja Lain-Lain	3 530 752.10	7.70	11 211 386	9.22
6. Angsuran	0.00	0.00	0	0
7. Bantuan	0.00	0.00	0	0
8. Pengeluaran Tidak Termasuk Bagian Lain	3 648 151.60	7.95	5 981 447	4.92
9. Pengeluaran Tidak Disangka	703 514.50	1.53	2 430 470	2.00
B. Pengeluaran Pembangunan	30 523 892.90	66.56	59 332 672	48.80
1. Sektor Industri	144 950.00	0.32	305 000	0.25
2. Sektor Pertanian dan Kehutanan	504 815.00	1.10	1 860 730	1.53
3. Sektor Air dan Irigasi	233 323.90	0.51	1 065 079	0.88
4. Sektor Tenaga Kerja	124 893.70	0.27	220 000	0.18
5. Sektor Perdagangan	103 900.00	0.23	1 610 000	1.32
6. Sektor Perhubungan	3 660 100.00	7.98	9 183 460	7.55
7. Sektor Pertambangan	24 999.50	0.05	0	0
8. Sektor Pariwisata	407 650.00	0.89	2 300 465	1.89
9. Sektor Pembangunan Daerah	4 203 780.00	9.17	9 119 064	7.50
10. Sektor Lingkungan Hidup	409 790.00	0.89	1 430 875	1.18
11. Sektor Pendidikan	927 805.00	2.02	4 316 198	3.55
12. Sektor Kependudukan	127 500.00	0.28	673 630	0.55
13. Sektor Kesehatan	469 027.90	1.02	2 938 595	2.42
14. Sektor Perumahan	831 276.00	1.81	1 714 997	1.41
15. Sektor Agama	434 975.00	0.95	2 845 500	2.34
16. Sektor Iptek	417 648.00	0.91	1 408 850	1.16
17. Sektor Hukum	264 990.00	0.58	725 000	0.60
18. Sektor Aparat Pemerintah	15 113 326.90	32.96	13 056 935	10.74
19. Sektor Politik	2 019 142.00	4.40	3 275 000	2.69
20. Sektor Keamanan	100 000.00	0.22	1 283 294	1.06
Jumlah	45 860 317.70	100	121 575 369	100

Sumber: BPS Kota Batu (2004b).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka perlu untuk mengetahui keterkaitan pola penganggaran, sektor unggulan, dan sumberdaya dasar untuk optimalisasi kinerja pembangunan daerah Kota Batu.

Perumusan Masalah

Pembangunan hendaknya tidak hanya mementingkan pertumbuhan tetapi juga harus diikuti dengan pemerataan, penciptaan, dan perolehan kesempatan kerja serta tidak terganggunya ekosistem, karena pembangunan yang berorientasi

hanya pada pertumbuhan seringkali justru membawa dampak terjadinya kesenjangan baik di sektor ekonomi maupun spasial antarwilayah serta selalu diikuti kesenjangan pendapatan antargolongan masyarakat.

Hakikat pembangunan adalah upaya terkoordinasi untuk menciptakan keadaan dimana tersedia lebih banyak alternatif yang sah bagi setiap warga negara, untuk mencapai kesejahteraan yang selalu lebih tinggi dari waktu ke waktu. Pembangunan nasional haruslah diletakkan pada kerangka pembangunan sektoral dan pembangunan regional yang terpadu berdasarkan karakteristik dan potensi wilayah. Pelaksanaan pembangunan perlu dilakukan pendekatan tata ruang wilayah pembangunan, dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, kesatuan geografis, dan homogenitas.

Secara umum Kota Batu dapat dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu daerah lereng atau bukit dengan proporsi lebih luas dan daerah dataran. Oleh karena itu, keadaan topografi Kota Batu memiliki dua karakteristik yang berbeda, yaitu sebelah utara dan barat merupakan daerah ketinggian yang bergelombang dan berbukit, sedangkan daerah timur dan selatan merupakan daerah yang relatif datar meskipun masih berada pada ketinggian 700 meter di atas permukaan laut.

Keadaan klimatologi Kota Batu memiliki suhu minimum 24-18°C dan suhu maksimum 32-28°C dengan kelembaban udara sekitar 75-98% dan curah hujan rata-rata 298 mm per bulan dengan hari hujan rata-rata 6 hari per bulan sehingga tidak ada perubahan musim yang drastis antara musim kemarau dan penghujan. Temperatur rata-rata berkisar antara 20-24°C yang merupakan temperatur ideal untuk menunjang kegiatan pertanian, perkebunan, dan peternakan. Dari segi potensi pertanian, industri, dan perdagangan, serta pariwisata, Kota Batu mempunyai prospek yang baik bagi pemenuhan kebutuhan pasar di dalam dan luar negeri.

Dalam pelaksanaan pembangunan wilayah, Pemerintah Kota Batu lebih menerapkan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan saja sehingga menimbulkan sedikitnya empat fenomena, yaitu (LPEM Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang 2004b):

1. Terdapat kesenjangan antara kawasan perdesaan dan perkotaan dimana tingkat perkembangan ekonomi perdesaan jauh tertinggal dibandingkan

dengan kawasan perkotaan. Hal ini karena ketidakpaduan pembangunan antarsektor. Perkembangan sektor pertanian relatif tertinggal dibandingkan dengan sektor lainnya. Akibatnya, kegiatan ekonomi di perdesaan kurang bergairah, dan lapangan kerja yang ada di perdesaan tidak mampu menampung jumlah angkatan kerja yang ada.

2. Terjadinya kemiskinan struktural, kesenjangan sosial desa-kota, meningkatnya arus urbanisasi, dan tingkat kesejahteraan masyarakat desa yang rendah yang ditandai dengan rendahnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, kepemilikan aset produksi, pemukiman dan prasarana perdesaan lainnya.
3. Terjadinya eksploitasi sumberdaya alam terutama air yang melebihi daya dukungnya dan tidak memperdulikan kelestarian sumberdaya alam.
4. Kebijakan pembangunan masa lalu yang lebih bersifat *top down*, telah mengakibatkan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah sangat besar, sementara potensi sosial ekonomi perdesaan belum digali dan dikembangkan secara optimal dan objektif.

Dapat dimaklumi bahwa kondisi umum Kota Batu saat ini masih dihadapkan pada kondisi yang menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat perdesaan rendah. Fenomena umum tentang rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat perdesaan antara lain ditunjukkan:

1. Ketimpangan kepemilikan atau penguasaan lahan. Sebagian kecil masyarakat menguasai sebagian besar lahan dan sebagai akibatnya sebagian besar masyarakat tidak memiliki lahan sehingga hidup dalam kemiskinan.
2. Pembangunan yang berorientasi pertumbuhan telah menimbulkan dampak berupa kesenjangan yang semakin lebar dalam hal pendapatan dan kesejahteraan antara masyarakat desa dan kota.
3. Tekanan populasi telah mengakibatkan eksploitasi sumberdaya alam yang melebihi daya dukung sumberdaya alam yang bersangkutan.
4. Program pembangunan yang tidak menyeluruh.
5. Minimnya keberadaan prasarana, akses produksi, akses modal dan akses pasar yang diperparah oleh mekanisme tataniaga pertanian yang kurang berpihak kepada masyarakat petani.

yang tinggi terhadap pendapatan, penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat?

3. Bagaimana sistem mekanisme penyusunan belanja pembangunan APBD Kota Batu?
4. Bagaimana struktur belanja pembangunan APBD Kota Batu dikaitkan dengan sektor unggulan, sumberdaya potensial, dan prioritas pembangunan daerah?
5. Apa sumberdaya dasar yang potensial di Kota Batu?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dijabarkan ke dalam tujuan umum, yaitu untuk mengkaji keterkaitan pola penganggaran, sektor unggulan, dan sumberdaya dasar untuk optimalisasi kinerja pembangunan daerah Kota Batu dan tujuan khusus, yaitu untuk:

1. Menganalisis keterkaitan pola penganggaran, sektor unggulan, dan sumberdaya dasar untuk optimalisasi kinerja pembangunan daerah Kota Batu.
2. Menganalisis sektor ekonomi yang memiliki struktur keterkaitan antarsektor yang kuat (sektor unggulan) di Kota Batu sehingga memberikan *multiplier effects* yang tinggi terhadap pendapatan, penyerapan tenaga kerja, dan kesejahteraan masyarakat.
3. Menganalisis sistem mekanisme penyusunan belanja pembangunan APBD Kota Batu.
4. Menganalisis struktur belanja pembangunan APBD Kota Batu dikaitkan dengan sektor unggulan, sumberdaya potensial, dan prioritas pembangunan daerah.
5. Menganalisis sumberdaya dasar yang potensial di Kota Batu.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan masukan dan informasi bagi para pengambil keputusan dalam menentukan arah pembangunan dan menyempurnakan kebijakan pengembangan wilayah dan pembangunan daerah yang telah ada di Kota Batu.

2. Memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah dan dapat menjadi pertimbangan bagi pengambil keputusan dalam penentuan kebijakan pengembangan wilayah Kota Batu.

Batasan Penelitian

Agar penelitian tetap terfokus kepada tujuan penelitian yang hendak dicapai, perlu ditetapkan batasan-batasan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mekanisme penyusunan APBD Kota Batu dalam penelitian ini lebih ditekankan kepada masalah bagaimana mekanisme penetapan plafon dan prioritas pembangunan.
2. Dalam analisis pola penganggaran dalam penelitian ini hanya dibatasi pada belanja pembangunan sedangkan belanja rutin tidak dilakukan.
3. Sumberdaya dasar yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.

Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya mengenai pengembangan wilayah Kota Batu pernah dilakukan oleh Totok Hendarto dengan judul Dampak Konservasi Lahan Kritis Pada Komoditi Tanaman Apel Terhadap Kesejahteraan Petani, Masyarakat dan Pengembangan Wilayah di Kota Administratif Batu. Dalam penelitian tersebut menekankan kepada Analisis Ekonomi Konservasi Lahan, Analisis Finansial Konservasi Lahan, Analisis Kelembagaan Konservasi Lahan dan Saluran Pemasaran Komoditi Apel untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat serta untuk pengembangan wilayah Kota Batu. Untuk analisisnya digunakan metode Net Benefit Cost Ratio (NBCR). Penelitian ini tidak menyinggung permasalahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antara pola penganggaran, sektor unggulan, dan sumberdaya dasar untuk optimalisasi kinerja pembangunan daerah Kota Batu. Analisis yang digunakan adalah Analisis Input-Output, Analisis Komponen Utama, SWOT, dan Proses Hierarki Analitik.

TINJAUAN PUSTAKA

Sektor Unggulan

Kebijakan ekonomi saat ini pengembangannya diarahkan pada sektor-sektor ekonomi unggulan yang sarat dengan kepentingan masyarakat luas dan terkait dengan potensi masyarakat serta sekaligus sesuai dengan sumberdaya ekonomi lokal. Peranan sektor unggulan semakin strategis, karena merupakan sektor yang mampu memberikan kontribusi yang berarti terhadap perolehan devisa. Jika dikaitkan dengan kecenderungan lain yang semakin mengemuka, yakni kesinambungan pembangunan dan otonomi daerah yang berdasarkan pada kemandirian lokal, maka sektor unggulan dapat memberi kontribusi yang sangat bermakna terhadap kemampuan suatu daerah, termasuk masyarakat dan kelembagaan, terutama untuk memperbesar kemampuan pembiayaan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Sektor unggulan perekonomian ialah sektor yang memiliki ketangguhan dan kemampuan tinggi sehingga dijadikan sebagai tumpuan harapan pembangunan ekonomi. Sektor unggulan merupakan tulang punggung dan penggerak perekonomian, sehingga dapat juga disebut sebagai sektor kunci atau sektor pemimpin perekonomian suatu wilayah. Dengan demikian, sektor unggulan merupakan refleksi dari suatu struktur perekonomian, sehingga dapat pula dipandang sebagai salah satu aspek penciri atau karakteristik dari suatu perekonomian (Deptan 2005).

Secara umum, syarat keharusan agar suatu sektor layak dijadikan sebagai unggulan perekonomian ialah memiliki kontribusi yang dominan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam pencapaian tujuan pembangunan. Secara rinci ada lima syarat suatu sektor dapat dikatakan sebagai sektor unggulan perekonomian, yaitu tangguh, progresif, ukurannya cukup besar, artikulatif, dan responsif. Kelima syarat khusus tersebut harus dipenuhi agar suatu sektor dapat menjadi sektor unggulan perekonomian.

Berkaitan dengan pengembangan wilayah, maka diperlukan penentuan sektor unggulan sebagai acuan dalam pengembangan wilayah. Untuk itu

penentuan potensi-potensi unggulan dapat dilakukan dengan berdasar pada kriteria berikut (Mubyarto 1989):

1. Jumlah tenaga kerja dan sumber-sumberdaya lainnya yang dipergunakan atau bisa dipakai secara langsung maupun tidak langsung.
2. Kontribusi secara langsung ataupun tidak langsung terhadap pendapatan dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
3. Kesesuaian lahan dimana karakter lahan harus disesuaikan dengan karakteristik sektor tersebut dan ketersediaannya harus mampu menampung laju pertumbuhan sektor tersebut.

Berdasarkan kriteria di atas, maka dalam identifikasi sektor unggulan digolongkan ke dalam empat kategori sebagai berikut (Mubyarto 1989):

1. Sektor unggulan, yaitu sektor yang mempunyai peranan yang sangat besar dalam usaha peningkatan pertumbuhan suatu wilayah dimana dapat dilihat dari tingginya nilai *share* dan pertumbuhannya atau dapat ditentukan dengan semua kriteria penentu yang ada.
2. Sektor dominan, yaitu sektor yang sangat diusahakan atau dikelola oleh masyarakat karena mempunyai pertumbuhan yang besar tetapi peran dalam perkembangan suatu wilayah masih kurang.
3. Sektor potensial, yaitu sektor yang mempunyai peran yang besar terhadap perkembangan suatu wilayah, tetapi pertumbuhannya masih kurang sehingga perlu mendapatkan perlakuan atau penanganan untuk dikembangkan menjadi sektor unggulan.
4. Sektor stagnan, yaitu sektor yang mempunyai laju pertumbuhan yang rendah dan jarang diusahakan oleh masyarakat sehingga peran atau manfaat terhadap usaha perkembangan suatu wilayah kurang.

Untuk mengoptimalkan peranan sektor unggulan yang ada dalam usaha pengembangan suatu wilayah, maka diperlukan usaha-usaha keterpaduan dari potensi-potensi yang ada, meliputi usaha:

1. Memadukan sistem pengembangan sektor unggulan dan sektor potensial yang memiliki karakteristik sama untuk memberikan nilai tambah pada sektor pemacu.
2. Menentukan kawasan pusat pengelolaan bagi sektor-sektor potensial.

3. Meningkatkan akses antar pusat-pusat pertumbuhan.
4. Memberikan rangsangan berupa penyediaan sarana dan prasarana.

Melalui model Input-Output dapat diidentifikasi sektor-sektor yang mampu mendorong pertumbuhan sektor-sektor lain dengan cepat atau sering dikenal dengan istilah sektor unggulan. Proses identifikasi tersebut menggunakan analisis keterkaitan antarsektor (*interindustrial linkages analysis*). Keterkaitan tersebut berupa keterkaitan ke depan (*forward linkages*) maupun keterkaitan ke belakang (*backward analysis*). Dalam hal ini sektor unggulan diartikan sebagai sektor yang mempunyai tingkat keterkaitan ke depan dan ke belakang yang tinggi. Disebut sektor unggulan karena sektor tersebut mampu mendorong pertumbuhan atau perkembangan bagi sektor-sektor lainnya, baik sektor yang menyuplai inputnya maupun sektor yang memanfaatkan output sektor unggulan tersebut sebagai input dalam proses produksinya (PSEKP Universitas Gadjah Mada 2003).

Sektor yang mempunyai keterkaitan ke depan tinggi berarti pada daerah tersebut merupakan pasar output yang potensial bagi sektor tersebut. Sektor yang mempunyai keterkaitan ke belakang tinggi berarti pada daerah tersebut merupakan penyedia input yang potensial bagi sektor tersebut. Dengan memanfaatkan matriks dalam Tabel 5 di bawah ini maka dapat ditentukan sektor apa yang memiliki keterkaitan ke depan maupun ke belakang yang tinggi maupun sektor yang hanya tinggi salah satu keterkaitannya saja. Selain itu, dapat juga diketahui sektor-sektor mana yang mempunyai nilai keterkaitan ke depan dan ke belakang yang rendah (*footloose*, bukan pasar bagi output maupun penyedia input pada daerah tersebut).

Tabel 5 Keterkaitan antarsektor

		Forward	
		Tinggi	Rendah
Backward	Tinggi	Forward tinggi, Backward tinggi (cenderung terjadi konglomerasi)	Forward rendah , Backward Tinggi (cenderung berresiko tinggi, pasar terbatas)
	Rendah	Forward tinggi, Backward rendah (cenderung prospektif, pasar terjamin)	Forward rendah, Backward rendah (<i>footloose</i>)

Sumber: PSEKP Universitas Gadjah Mada (2003).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu perkiraan pendapatan dan belanja daerah yang diharapkan akan terjadi dalam jangka waktu tertentu, dinyatakan dalam satuan mata uang, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Dengan kata lain APBD adalah anggaran suatu daerah yang di dalamnya memuat rencana kegiatan suatu daerah, sumber-sumber penerimaan daerah dan pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan.

APBD pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat yang sesuai tujuan otonomi daerah (Wahid 2001). Karenanya APBD harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. APBD merupakan sarana untuk mengevaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat sehingga APBD harus dapat memberikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Juga setiap dana yang diperoleh, penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

Selain hal tersebut di atas, APBD adalah rencana pengeluaran untuk menghasilkan barang dan jasa yang mempunyai dampak meningkatkan kapasitas produksi baik berupa fisik maupun non fisik yang sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Tujuan penggunaan anggaran pembangunan adalah untuk membiayai proyek dan program yang diprioritaskan dalam rangka:

1. Menyelesaikan pembangunan sarana dan prasarana yang langsung mendukung kegiatan ekonomi masyarakat dan mempunyai dampak yang luas dan besar.
2. Memperluas lapangan kerja produktif dengan kualitas yang meningkat dan dalam jumlah yang besar.
3. Menunjang secara langsung maupun tidak langsung program penyediaan bahan pokok, pelayanan kesehatan, dan pengembangan pendidikan.
4. Mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang merupakan unsur strategis dalam melaksanakan pembangunan.
5. Menjaga dan meningkatkan efisiensi pemanfaatan sarana dan prasarana yang telah dibangun.

6. Meningkatkan dan mengoptimalkan penggunaan produksi dalam negeri serta meningkatkan keikutsertaan usaha ekonomi kecil, menengah, dan koperasi.
7. Memanfaatkan dan meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mencerdaskan bangsa.
8. Mendukung upaya-upaya pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Kebijakan pengeluaran pembangunan daerah agar dapat efektif, maka (Khoirunurrofik 2002):

1. Pengelolaan anggaran diarahkan kepada sektor-sektor yang dapat mendistribusikan serta mengalokasikan anggaran ke sektor lain. Dengan melihat kinerja pembangunan sektoral, kebijakan dan pengelolaan anggaran diarahkan kepada sektor yang mempunyai kinerja lebih dari satu.
2. Dengan memperhatikan keterkaitan terpadu dari semua sektor pembangunan, dapat diciptakan suatu sektor yang saling kait-mengait dengan sektor lain.
3. Penyusunan program suatu sektor harus dapat mencakup semua aspek yang ada di sektor lain.
4. Sektor industri dan sektor pembangunan daerah merupakan sektor yang banyak mengalokasikan anggarannya ke sektor lain.

APBD mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut (Barata dan Trihartanto 2004):

1. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

6. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Sesuai amanat Ayat 1 Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000, format APBD mengikuti format anggaran defisit dimana struktur APBD terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Jadi, komponen anggaran yang baru adalah pembiayaan. Timbulnya komponen pembiayaan merupakan konsekuensi logis dari digunakannya format anggaran defisit, dimana surplus atau defisit yang terjadi akan masuk ke dalam komponen pembiayaan. Hal ini berbeda dengan format anggaran sebelumnya, yaitu format anggaran berimbang dan dinamis yang tidak mengungkapkan adanya defisit yang harus ditutup dari berbagai sumber pembiayaan.

Adapun ringkasan APBD yang menganut sistem tradisional dan APBD berbasis kinerja dapat dilihat dalam Tabel 6 dan Tabel 7 berikut ini:

Tabel 6 Ringkasan APBD sistem tradisional

Penerimaan	Pengeluaran
Pendapatan	Belanja Rutin
1. Sisa Lebih Anggaran tahun	1. Belanja Administrasi Umum
2. Pendapatan Asli Daerah	a. Belanja Pegawai
a. Pajak Daerah	b. Belanja Barang
b. Retribusi Daerah	c. Belanja Perjalanan Dinas
c. Bagian Laba BUMD	d. Belanja Pemeliharaan
d. Lain-lain	2. Belanja O & P
3. Dana Perimbangan	a. Pemeliharaan Sarana
a. Bagi Hasil	b. Pemeliharaan Prasarana
b. Dana Alokasi Umum	3. Biaya Transfer
c. Dana Alokasi Khusus	b. Angsuran Pinjaman
4. Lain-lain Pendapatan Daerah	c. Bantuan
	d. Dana Perimbangan
	e. Cadangan
	4. Pengeluaran Tidak Disangka
Pinjaman Daerah	Belanja Pembangunan
	1. Belanja Publik
	b. Belanja Modal
	c. Belanja Non Modal
	2. Belanja Aparatur
	a. Belanja Modal
	b. Belanja Non Modal
Total Penerimaan	Total Pengeluaran

Sumber: Khoirunurrofik (2002).

Tabel 7 Ringkasan APBD berbasis kinerja

No.	Uraian	Jumlah
I	Pendapatan	
1.1	Pendapatan Asli Daerah	
1.1.1	Pajak Daerah	
1.1.2	Retribusi Daerah	
1.1.3	Bagian Laba BUMD	
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli daerah	
1.2	Dana Perimbangan	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	
1.2.2	Dana Alokasi Umum	
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	
1.2.4	Dana Perimbangan dari Provinsi	
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
1.3.1	Dana Kontingensi	
	Jumlah Pendapatan	
II	Belanja	
2.1	Aparatur Daerah	
2.1.1	Belanja Administrasi Umum	
2.1.1.1	Belanja Pegawai	
2.1.1.2	Belanja Barang dan jasa	
2.1.1.3	Belanja Perjalanan Dinas	
2.1.1.4	Belanja Pemeliharaan	
2.1.2	Belanja Operasional & Pemeliharaan	
2.1.2.1	Belanja Pegawai	
2.1.2.2	Belanja Barang dan jasa	
2.1.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	
2.1.2.4	Belanja Pemeliharaan	
2.1.3	Belanja Modal	
	Jumlah belanja Aparatur Daerah	
2.2	Pelayanan Publik	
2.2.1	Belanja Administrasi Umum	
2.2.1.1	Belanja Pegawai	
2.2.1.2	Belanja Barang dan jasa	
2.2.1.3	Belanja Perjalanan Dinas	
2.2.1.4	Belanja Pemeliharaan	
2.2.2	Belanja Operasional & Pemeliharaan	
2.2.2.1	Belanja Pegawai	
2.2.2.2	Belanja Barang dan jasa	
2.2.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	
2.2.2.4	Belanja Pemeliharaan	
2.2.3	Belanja Modal	
2.3	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	
2.4	Belanja Tidak Tersangka	
	Jumlah Belanja Pelayanan Publik	
	Jumlah Belanja	
	Defisit	
III	Pembiayaan	
3.1	Penerimaan Daerah	
3.1.1	Sisa Lebih perhitungan Anggaran Tahun Lalu	
3.1.2	Transfer dari Dana Cadangan	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	
3.1.4	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan	
	Jumlah Penerimaan Daerah	
3.2	Pengeluaran Daerah	
3.2.1	Transfer ke Dana Cadangan	
3.2.2	Penyertaan Modal	
3.2.3	Pembayaran Utang Pokok Yang Jatuh Tempo	
3.2.4	Sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun Berjalan	
	Jumlah Pengeluaran Daerah	
	Jumlah Pembiayaan	

Sumber : Barata dan Trihartanto (2004).

Dari sisi struktur anggaran ada perbedaan yang substansial antara anggaran kinerja dengan sistem anggaran sebelumnya. Istilah pendapatan, belanja, dan pembiayaan sangat terkait dengan struktur teknis APBD. Struktur berdasarkan pendekatan kinerja dibagi menjadi 3 pos, yaitu pos pendapatan, pos belanja, dan pos pembiayaan. Sedangkan pada struktur anggaran yang lama, yang disebut sebagai struktur anggaran berimbang dan dinamis, strukturnya hanya ada 2 pos, yaitu pos pendapatan dan pos belanja. Perubahan struktur anggaran ini sangat terkait dengan upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Dengan sistem anggaran lama ternyata terjadi pembiasan baik pos pendapatan maupun belanja, karena ada beberapa obyek yang seharusnya masuk ke pos pembiayaan.

Pendapatan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok pendapatan asli daerah (PAD), kelompok dana perimbangan, dan kelompok lain-lain pendapatan (Nazaruddin 2004). PAD adalah pendapatan yang dipungut oleh daerah yang bersangkutan sesuai dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan. Jenis-jenis PAD antara lain pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba hasil usaha daerah atau laba BUMD, dan lain-lain PAD. Besar kecilnya PAD akan mempengaruhi otonomi daerah dalam melaksanakan kebijakannya. Semakin besar PAD, maka kemampuan daerah akan lebih besar dan ketergantungan kepada pemerintah pusat maupun provinsi semakin berkurang. Obyek PAD untuk provinsi antara lain adalah pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan retribusi pelayanan kesehatan.

Kelompok pendapatan yang kedua adalah dana perimbangan. Dana perimbangan pada prinsipnya merupakan pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat yang kemudian "didaerahkan". Dana perimbangan ini antara lain adalah bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK). Bagi hasil pajak dan bukan pajak adalah pendapatan pemerintah pusat yang kemudian dibagikan dengan pemerintah daerah, misalnya pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri. Sedang DAU adalah pendapatan yang merupakan transfer langsung dari pemerintah pusat dengan menggunakan formula tertentu, seperti luas wilayah, jumlah penduduk miskin, PAD, dan lain-lain. Sedang DAK diberikan kepada daerah tanpa formula tertentu

dan khusus untuk kebutuhan tertentu, misalnya DAK untuk reboisasi, infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Selanjutnya pendapatan di luar PAD dan dana perimbangan adalah lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan ini misalnya dana kontinjensi atau dana tanggap darurat.

Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Dari sifatnya belanja dapat dibagi menjadi dua (Nazaruddin 2004), yaitu:

1. Belanja langsung, yaitu belanja yang besar kecilnya dipengaruhi secara langsung oleh adanya kegiatan. Semakin banyak volume kegiatan maka akan semakin meningkat belanjanya.
2. Belanja tidak langsung, yaitu belanja yang besar kecilnya tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya kegiatan.

Pos belanja secara teknis dibagi menjadi beberapa kelompok belanja, yaitu:

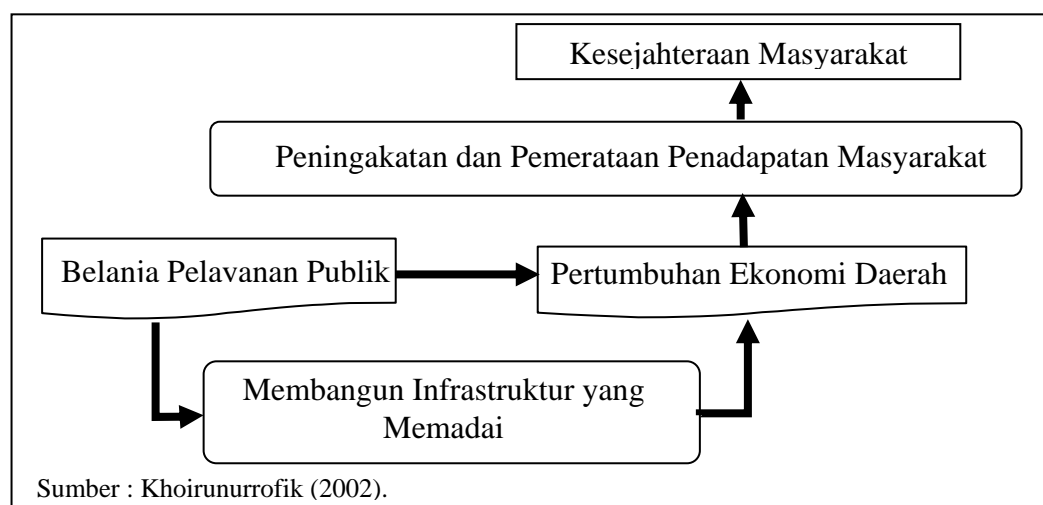
1. Belanja administrasi umum (BAU): konsep ini lain dengan apa yang disebut sebagai belanja rutin. BAU adalah belanja tidak langsung dan tidak menambah aset tetap.
2. Belanja operasi dan pemeliharaan (BOP) adalah belanja langsung dan tetapi tidak menambah aset. BOP merupakan belanja yang berbentuk kegiatan, tetapi tidak menambah aset.
3. Belanja modal (BM), adalah belanja langsung dan menambah aset. Belanja ini misalnya untuk membeli kendaraan dan membangun gedung dan jalan.
4. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan adalah belanja yang bersifat transfer langsung tanpa indikator kinerja. Belanja ini misalnya untuk provinsi adalah alokasi bagi hasil pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor ke kabupaten dan kota, bantuan kepada organisasi sosial kemasyarakatan, klub olahraga, organisasi profesi, dan lain-lain;
5. Belanja tidak terduga, yaitu belanja yang dialokasikan untuk mendanai kebutuhan daerah yang mendesak untuk dilaksanakan, tetapi belum ada anggarannya.

Pos pembiayaan adalah suatu transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja. Jika pendapatan lebih kecil dari belanja akan terjadi defisit. Defisit tersebut kemudian ditutup oleh

pembiayaan. Sedangkan jika terjadi surplus, yaitu pendapatan lebih besar dibanding belanja, maka surplus tersebut juga akan dimanfaatkan oleh pos pembiayaan. Adanya pos pembiayaan ini diharapkan sistem anggaran kinerja dapat lebih akuntabel dan transparan. Obyek yang ada pada pembiayaan, dalam struktur anggaran sebelumnya sebenarnya telah ada, tetapi muncul di pos pendapatan atau di pos belanja. Padahal peruntukannya bukan untuk pos tersebut.

Pos pembiayaan dibagi menjadi dua kelompok (Nazaruddin 2004), yaitu penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan pembiayaan terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu, transfer dari dana cadangan, hutang atau penjualan obligasi, dan penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari transfer ke dana cadangan, penyertaan modal, pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, dan sisa lebih tahun anggaran berjalan.

Belanja pelayanan publik adalah pengeluaran yang digunakan untuk membiayai berbagai program atau proyek dan menambah investasi kekayaan daerah. Pada umumnya biaya pembangunan tersebut sudah diprogramkan dalam daftar isian daerah yang diperuntukkan pada kebutuhan pembangunan sektor dan subsektor. Dengan adanya pengeluaran pelayanan publik diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan dan pemerataan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti yang terlihat dalam Gambar 1 berikut ini:



Gambar 1 Fungsi belanja pelayanan publik.

Sistem Mekanisme Penyusunan APBD

Sebagai instrumen kebijakan, APBD menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. APBD digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Dalam kaitan ini, proses penyusunan dan pelaksanaan APBD hendaknya difokuskan pada upaya untuk mendukung pelaksanaan program dan aktivitas yang menjadi preferensi daerah yang bersangkutan. Untuk memperlancar pelaksanaan program dan aktivitas yang telah direncanakan dan untuk mempermudah pengendalian, pemerintah daerah dapat membentuk pusat-pusat pertanggungjawaban sebagai unit pelaksana.

Di era otonomi daerah ini penyusunan APBD menjadi urusan strategis bagi daerah. Pada masa orde baru otoritas ini dipegang secara sentralistis pada eksekutif, yaitu pemerintah pusat. Sedangkan pemerintah daerah bersama DPRD hanya bertugas mengalokasikan sebagian kecil dari APBD, sekitar 10% bagi daerah miskin dan sekitar 20% bagi daerah kaya, yaitu porsi pendapatan asli daerah (PAD). Sekarang ini, wewenang untuk menentukan prioritas kebijakan yang ditunjukkan dalam APBD sepenuhnya menjadi otoritas daerah.

Tahapan penyusunan anggaran adalah tahap penyusunan yang dilakukan oleh eksekutif untuk anggaran pemerintah daerah dan oleh legislatif untuk anggaran DPRD. Penyusunan ini memerlukan waktu 6 bulan. Setelah disusun, RABPD pemerintah daerah disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD untuk selanjutnya dibahas dan disahkan. Periode pembahasan dan pengesahan ini memerlukan waktu hingga 3 bulan. Selanjutnya setelah disahkan menjadi peraturan daerah, APBD resmi berlaku hingga satu tahun mendatang untuk dipertanggungjawabkan kepada DPRD.

Untuk menerapkan penyusunan anggaran berdasarkan kinerja yang menggambarkan klasifikasi anggaran berdasarkan kegiatan dan fungsi, maka anggaran harus disusun oleh setiap satuan kerja yang mewakili fungsi pemerintahan daerah dengan mengacu pada rencana strategis (renstra). Renstra

ini harus disusun oleh satuan kerja dalam koherensi dengan program pembangunan jangka panjang daerah (propeda). Berdasarkan renstra, setiap satuan kerja menyusun usulan otorisasi kredit anggaran (OKA) yang mencakup: OKA pendapatan, belanja operasi, belanja modal, usulan lembaran kerja (LK), dan petunjuk operasional (PO). Jika pemerintah daerah masih mengeluarkan rencana pembangunan tahunan daerah (repetada), maka seluruh OKA yang disusun berdasarkan renstra ini masih harus disesuaikan sedapat mungkin dengan repetada (Depkeu 2005).

Setelah usulan OKA, LK, dan PO disusun, masing-masing satuan kerja menyerahkan usulan OKA, LK, dan OKA tersebut kepada Unit Anggaran untuk dikonsolidasikan menjadi OKA konsolidasi pemda. Pengkonsolidasian OKA oleh Unit Anggaran dimaksudkan tidak saja untuk merekam seluruh kegiatan dan dana yang diusulkan oleh masing-masing satuan kerja, melainkan juga untuk meyakinkan apakah usulan kegiatan telah sesuai dengan target rencana yang telah ditetapkan dalam renstra. Sesudah konsolidasi OKA, Unit Anggaran menyusun *draft* RAPBD dan menyerahkannya ke Panitia Anggaran

Panitia Anggaran yang terdiri atas Bappeda, Unit Pengawasan Daerah, Unit Keuangan, Unit Perlengkapan, dan Unit Pembinaan Pendapatan Daerah, melakukan penelaahan terhadap *draft* RAPBD. Penelaahan anggaran ini jauh lebih mendalam dan mencakup pertimbangan yang lebih luas seperti kesesuaian dengan program pembangunan nasional, repetada, prediksi pendapatan daerah, evaluasi teknis pelaksanaan, dukungan kelembagaan dan sumberdaya manusia, dan keselarasan antarwilayah serta arah pembangunan nasional.

Hasil penelaahan oleh Panitia Anggaran berupa RAPBD diserahkan kepada Unit Anggaran untuk dibahas secara bersama dengan Panitia Anggaran DPRD. Jika ada yang perlu diperbaiki dalam RAPBD, maka Panitia Anggaran memperbaiki RAPBD tersebut. Hasil perbaikan tersebut dibahas lagi untuk disetujui DPRD menjadi APBD. APBD yang telah disetujui oleh DPRD kemudian diserahkan ke Unit Anggaran.

APBD selanjutnya disahkan oleh pemerintah daerah dan DPRD. APBD yang telah disahkan didistribusikan ke: (1) Unit Perbendaharaan sebagai acuan

dalam penerbitan Surat Perintah Membayar; (2) Unit Pembukuan sebagai dokumen sumber untuk pembukuan APBD; dan (3) Arsip di Unit Anggaran.

Setelah APBD disahkan oleh pemerintah daerah dan DPRD, Unit Anggaran dan satuan kerja melakukan pembahasan Otorisasi Kredit Anggaran (OKA), Lembaran Kerja (LK), dan Petunjuk Operasi (PO). Selanjutnya OKA, LK, dan PO yang telah disetujui didistribusikan ke: (1) Satuan kerja untuk pengajuan Surat Permintaan Pembayaran; (2) Unit Perbendaharaan untuk penerbitan Surat Perintah Membayar; (3) Unit Pembukuan sebagai dokumen sumber pembukuan alokasi anggaran; dan (4) satu Arsip di Unit Anggaran.

Berdasarkan OKA, PO, dan LK, Unit Perbendaharaan menyusun Surat Keputusan Otorisasi (SKO) dalam rangka pengendalian kas daerah. Berdasarkan APBD, Unit Pembukuan melakukan proses akuntansi anggaran. Sedangkan OKA, PO, dan LK digunakan oleh Unit Pembukuan sebagai dasar melakukan proses Akuntansi Alokasi Anggaran (Depkeu 2005).

Sumberdaya Dasar

Potensi wilayah merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah dan merupakan salah satu dasar yang sangat menentukan dalam menyusun kebijakan pembangunan daerah. Sumberdaya dasar adalah sumberdaya yang berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan pembangunan wilayah, yang ada dan ditemukenali serta yang bersumber di dalam wilayah otoritas yang bersangkutan (Christanto 2002). Sumberdaya dasar merupakan anasir penting dalam pelaksanaan pengembangan wilayah. Ada empat sumberdaya dasar yang berperan langsung dalam proses pembangunan daerah, yaitu:

1. Sumberdaya alam yang terkait dengan potensi fisik wilayah, yaitu seluruh cadangan aset yang disediakan oleh lingkungan baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Sumberdaya alam adalah sesuatu yang masih terdapat di dalam maupun di luar permukaan bumi yang sifatnya masih potensial dan belum dilibatkan dalam proses produksi untuk meningkatkan tersedianya barang dan jasa dalam perekonomian. Sumberdaya alam dan lingkungan merupakan input produksi yang secara nyata memberikan

kontribusi yang besar terhadap keberlanjutan sistem pendukung kehidupan secara umum.

2. Sumberdaya manusia, yaitu sumberdaya yang merupakan potensi tersendiri dalam pembangunan. Sumberdaya manusia selain merupakan subjek pembangunan juga sekaligus sebagai obyek pembangunan. Sumberdaya manusia merupakan kunci sukses dalam setiap pelaksanaan pembangunan baik dalam skala kecil, menengah, maupun besar. Dalam rangka peningkatan keberhasilan pelaksanaan pembangunan tersebut, maka diperlukan kualitas sumberdaya manusia yang memadai. Peningkatan kualitas yang dibarengi oleh peningkatan kuantitas sumberdaya manusia yang berkualitas di tingkat regional perlu dilakukan dan harus mendapatkan perhatian yang serius dalam penanganannya sehingga potensinya dapat dimanfaatkan secara baik dan benar. Pembangunan regional bukanlah membangun fisik daerah semata-mata, melainkan inti pembangunan daerah adalah membangun sumberdaya manusia.
3. Sumberdaya buatan, yaitu segala sesuatu yang dibuat oleh manusia berupa hasil, benda, sifat dan keadaan yang dapat dihargai seperti mesin, pabrik, bangunan, jalan, jembatan, infrastruktur dan teknologi. Selain itu dapat diartikan sebagai hasil pengembangan dari sumberdaya alam untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kemampuan daya dukungnya. Secara fisik sumberdaya buatan dapat diukur dengan mudah sehingga sumberdaya ini cenderung dikembangkan dalam pembangunan.
4. Modal sosial, yaitu tata nilai dan kelembagaan dalam masyarakat baik formal maupun non formal yang berpengaruh dalam proses pembangunan. Modal sosial didefinisikan sebagai institusi sosial yang melibatkan jaringan (*networks*), norma-norma (*norms*), dan kepercayaan sosial (*social trust*) yang mendorong pada sebuah kolaborasi sosial untuk kepentingan bersama.

Perencanaan Pengembangan Wilayah

Selama beberapa tahun terakhir ini paradigma pembangunan negara kita telah mengalami pergeseran dan perubahan-perubahan yang mendasar. Kegagalan demi kegagalan sebagai akibat kesalahan dalam menjalankan dan menerapkan model dalam proses pembangunan telah banyak menimbulkan dampak masalah

pembangunan yang semakin besar dan kompleks. Hal ini mulai menyadarkan pemerintah untuk merubah paradigma pembangunan yang sebelumnya lebih menekankan kepada pertumbuhan di sektor ekonomi dan bersifat sentralistik (*production centered development*) kepada paradigma pembangunan yang lebih menekankan pembangunan sosial dan lebih bersifat desentralistik atau pembangunan yang berpusat pada masyarakat (*people centered development*).

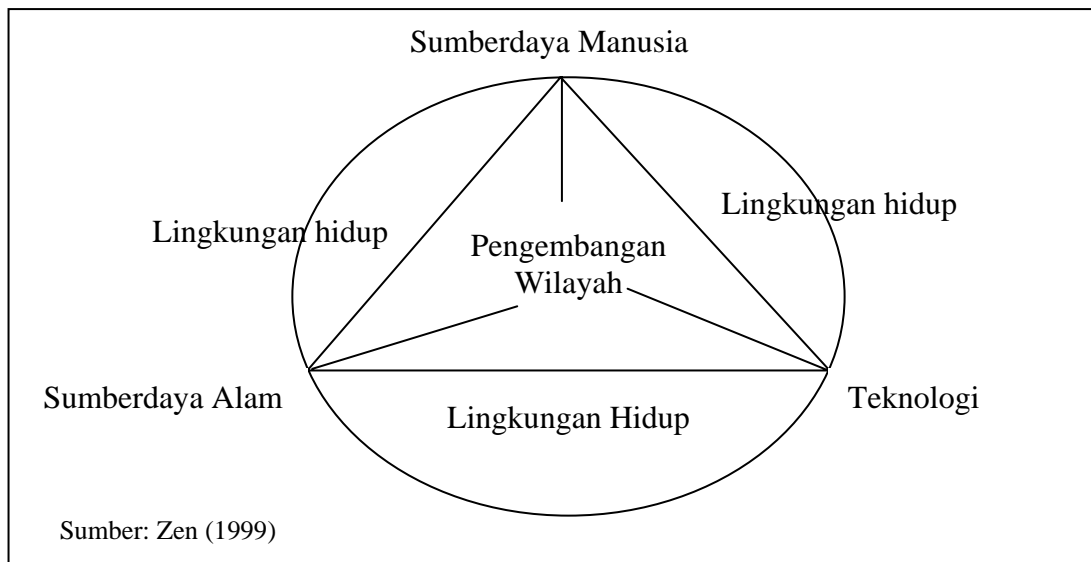
Dalam paradigma pembangunan yang berpusat pada masyarakat, pemerataan pembangunan ditingkatkan untuk mengurangi berbagai ketimpangan ekonomi dan sosial antardaerah, antarsektor, dan antarkelompok ekonomi (Mubyarto 1999). Satu pendekatan pembangunan dikenal dengan nama pendekatan wilayah yang berbeda dengan pendekatan pusat pertumbuhan dan pendekatan sektoral. Pendekatan ini berorientasi pada pemerataan dan keadilan, dan bertujuan menutup jurang kesenjangan ekonomi dan sosial, baik antarkelompok dalam masyarakat maupun antardaerah.

Pengembangan wilayah merupakan upaya untuk memacu perkembangan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan antarwilayah, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup pada suatu wilayah. Pengembangan wilayah sangat diperlukan karena kondisi sosial ekonomi, budaya, dan geografis yang sangat berbeda antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Pada dasarnya pengembangan wilayah harus disesuaikan dengan potensi, kondisi, dan permasalahan wilayah bersangkutan (Riyadi 2002).

Apabila kita memandang suatu wilayah, minimal ada tiga komponen wilayah yang perlu diperhatikan yaitu: sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan teknologi yang selanjutnya disebut sebagai tiga pilar pengembangan wilayah (Nachrowi 1999). Pengembangan wilayah merupakan interaksi antara tiga pilar pengembangan wilayah tersebut. Suatu wilayah yang mempunyai sumberdaya alam yang cukup kaya dan sumberdaya manusia yang mampu memanfaatkan dan mengembangkan teknologi akan cepat berkembang dibandingkan dengan wilayah lain yang tidak cukup mempunyai sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang unggul.

Menurut Zen (1999), konsep pengembangan wilayah sebenarnya adalah konsep memberdayakan masyarakat setempat terutama dalam memanfaatkan

sumberdaya alam dan lingkungan setempat dengan menggunakan metode, cara, dan teknologi yang dimilikinya. Dengan kata lain, pengembangan wilayah adalah usaha mengawinkan secara harmonis sumberdaya alam, manusia, dan teknologi dengan memperhitungkan daya tampung lingkungan itu sendiri. Kesemuanya itu disebut memberdayakan masyarakat (seperti terlihat dalam Gambar 2).



Gambar 2 Hubungan antara pengembangan wilayah, sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan teknologi.

Tujuan pembangunan wilayah mengandung dua sisi yang berkaitan, yaitu sisi sosial ekonomi dan sisi ekologis lingkungan. Di sisi sosial ekonomi, pengembangan wilayah adalah upaya memberikan kesejahteraan kualitas hidup masyarakat, misalnya menciptakan pusat-pusat produksi, memberikan kemudahan prasarana dan pelayanan logistik, dan sebagainya. Di sisi lain secara ekologis lingkungan, pengembangan wilayah juga bertujuan untuk menjaga keseimbangan lingkungan sebagai akibat adanya campur tangan manusia terhadap lingkungan.

Secara nasional tujuan pengembangan wilayah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna sumberdaya yang tersebar di wilayah Indonesia guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional (Ary 1999). Untuk itu arah dan kebijaksanaan pengembangan wilayah adalah:

1. Pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tetap memperkuat kesatuan dan ketahanan nasional.

2. Pembangunan sektoral dilakukan secara saling memperkuat untuk meningkatkan pertumbuhan, pemerataan, dan kesatuan wilayah nasional serta pembangunan yang berkelanjutan.
3. Perkembangan wilayah diupayakan saling terkait dan menguatkan sesuai dengan potensi wilayah.

Pengembangan wilayah menurut Prod'homme dalam Triutomo (1999), merupakan program yang menyeluruh dan terpadu dari semua kegiatan dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada dan kontribusinya pada pembangunan suatu wilayah. Dari definisi di atas tersirat ada beberapa kata kunci yang harus terdapat dalam pengembangan wilayah, yaitu: (1) Program yang menyeluruh dan terpadu; (2) Sumberdaya yang tersedia dan kontribusinya terhadap daerah; dan (3) Suatu wilayah tertentu.

Beberapa pemikiran yang dapat dikembangkan untuk strategi pengembangan wilayah di masa mendatang antara lain adalah (Riyadi 2000):

1. Alokasi sumberdaya yang lebih seimbang.

Berbagai deregulasi di sektor riil dan moneter telah dilakukan pemerintah dalam rangka efisiensi di segala bidang. Namun dari berbagai studi yang telah dilakukan ternyata upaya tersebut masih cenderung menguntungkan Pulau Jawa dan kawasan-kawasan cepat berkembang lainnya. UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah membuka kewenangan yang semakin besar bagi pemerintah daerah dalam merencanakan dan menggunakan sumber-sumber keuangannya. Untuk itu, perlu pula dilakukan reformasi fiskal yang mendukung alokasi sumberdaya yang lebih baik terutama ke kawasan-kawasan yang belum berkembang, termasuk diantaranya reformasi di bidang perpajakan. Deregulasi sektor riil juga perlu memperhatikan perkembangan kemampuan daerah.

2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia di daerah.

Pendekatan pembangunan sektoral yang telah meningkatkan standar kualitas manusia Indonesia sampai pada taraf tertentu, pada masa mendatang perlu diikuti oleh pendekatan pembangunan yang lebih memperhatikan kondisi dan aspirasi wilayah. Strategi pembangunan manusia di masa mendatang harus mampu mengidentifikasi jenis pendidikan dan pelatihan yang dapat

menempatkan tenaga kerja dan lulusan terdidik dalam pasar peluang kerja yang senantiasa menuntut adanya peningkatan keahlian.

3. Pengembangan kelembagaan dan aparat daerah.

Struktur kelembagaan dan aparat pemerintah daerah selama ini mencerminkan sistem pemerintahan berjenjang. Walaupun provinsi, kabupaten, atau kota juga berfungsi sebagai daerah otonom, yang mempunyai kewenangan dalam mengatur daerahnya sendiri, namun dalam berbagai implementasi pelaksanaan pembangunan selama ini, daerah lebih kepada “menunggu” petunjuk dari pusat. Proses pengambilan keputusan yang demikian kemudian berkembang menjadikan aparat daerah lebih melayani aparat pusat daripada melayani masyarakat daerahnya.

Dalam era demokratisasi yang semakin berkembang seperti sekarang ini, yang ditunjang oleh berbagai peraturan perundang-undangan mengenai desentralisasi yang lebih lengkap, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mampu melaksanakan kewenangan yang semakin besar dalam menata pembangunan daerahnya. Semakin lengkapnya perangkat peraturan dan perundang-undangan mengenai penataan ruang di setiap provinsi, kabupaten, atau kota dapat menjadi acuan aparat daerah untuk mengelola berbagai unsur ruang secara optimal, dan mengembangkan konsep pembangunan yang berkelanjutan.

4. Pelayanan masyarakat yang efisien

Untuk kepentingan stabilitas ekonomi dan politik, selama ini pemerintah memegang kendali yang lebih besar terhadap sumber-sumber penerimaan dan berbagai kebijaksanaan pelayanan masyarakat. Hal ini dilakukan mengingat kebutuhan dasar masih sangat kurang, resiko investasi masih sangat besar, dan tingkat pendidikan rata-rata manusia di daerah masih rendah. Dengan semakin meningkatnya kemampuan kelembagaan dan kualitas aparat di daerah, sudah masanya sekarang untuk memperbesar kewenangan daerah dalam menata pembangunan di daerah. Keterlibatan pihak swasta sebagai mitra kerja sekaligus sebagai pelaku pembangunan perlu diperbesar, sejalan dengan kewenangan daerah yang semakin besar dalam merencanakan dan

melaksanakan pembangunan daerahnya. Hal ini ditujukan agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih efektif dan efisien.

Perencanaan pembangunan wilayah sebaiknya menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan sektoral dan pendekatan regional (Tarigan 2002). Pendekatan sektoral biasanya kurang memperhatikan aspek ruang secara keseluruhan sedangkan pendekatan regional lebih bersifat spasial dan merupakan jembatan untuk mengaitkan perencanaan pembangunan dengan rencana tata ruang. Rencana tata ruang berisikan kondisi ruang atau penggunaan lahan saat penyusunannya dan kondisi ruang yang akan dituju.

Rencana pembangunan wilayah merencanakan berbagai kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dan nantinya dituangkan lagi dalam rencana tahunan yang semestinya langsung terkait dengan anggaran. Dengan demikian, cukup jelas bahwa rencana pembangunan wilayah semestinya mengacu kepada rencana kondisi ruang yang dituju seperti tertera pada rencana tata ruang.

Pendekatan sektoral adalah pendekatan dimana seluruh kegiatan ekonomi di dalam suatu wilayah perencanaan dikelompokkan atas sektor-sektor. Selanjutnya setiap sektor dianalisis satu per satu. Setiap sektor dilihat potensi dan peluangnya, menetapkan apa yang dapat ditingkatkan, dan dimana lokasi dari kegiatan peningkatan tersebut. Analisis sektoral tidaklah berarti satu sektor dengan sektor lainnya terpisah total dalam analisis. Salah satu pendekatan sektoral yang sekaligus melihat kaitan pertumbuhan suatu sektor dengan sektor lainnya dan sebaliknya, dikenal dengan nama analisis Input-Output (Tarigan 2002).

Analisis Input-Output

Teori Input-Output pertama kali dikembangkan oleh Wassily Leontief pada akhir dekade tahun 1930-an (Nazara 1997). Analisis Input-Output merupakan suatu model matematis untuk menelaah struktur perekonomian yang saling kait-mengait antarsektor atau kegiatan ekonomi. Idenya sangat sederhana namun mampu menjadi salah satu alat analisis yang ampuh dalam melihat hubungan antarsektor dalam perekonomian. Dasar pendekatannya adalah hubungan interdependensi antara suatu sektor dengan sektor lainnya dalam perekonomian adalah sedemikian rupa sehingga dapat dinyatakan dalam sepasang persamaan

linear, sedangkan struktur perekonomian terlihat pada besarnya angka-angka koefisien ketergantungan interdependensi. Model ini merupakan varian terbaik ekuilibrium atau keseimbangan umum (Nasution 1996).

Sebagai varian terbaik, model ini mempunyai tiga unsur utama, yaitu:

1. Analisis Input-Output, memusatkan perhatiannya pada perekonomian dalam keadaan ekuilibrium dimana unsur ini tidak ditemukan di dalam analisis ekuilibrium parsial.
2. Tidak memusatkan pada analisis permintaan tetapi pada masalah teknis produksi.
3. Analisis ini didasarkan atas penelitian empirik.

Penggunaan analisis Input-Output pada dasarnya dapat digunakan untuk berbagai keperluan di dalam perencanaan pembangunan wilayah, antara lain untuk mengetahui (BPS 1999; PSEKP Universitas Gadjah Mada 2003; Saefulhakim 2004):

1. Struktur Perekonomian.

Tabel Input-Output secara simultan menggambarkan hubungan permintaan dan penawaran pada tingkat keseimbangan. Dimana dalam kondisi struktur perekonomian yang seimbang baik interaksi interdependensi antar segenap struktur ekonomi maupun kecenderungan perkembangannya dapat diketahui. Tabel ini memberikan gambaran menyeluruh struktur suatu perekonomian regional yang mencakup struktur output dan nilai tambah masing-masing sektor yang dapat mencerminkan peranan suatu sektor dalam perekonomian. Tabel ini juga dapat memberikan gambaran realitas keterkaitan antarkegiatan sektor produktif dalam suatu wilayah perekonomian.

2. Peramalan Ekonomi

Tabel ini menyediakan informasi yang lengkap dan menyeluruh tentang struktur penggunaan barang dan jasa pada masing-masing sektor serta pola distribusi produksi yang dihasilkan sehingga dapat digunakan sebagai suatu dasar berbagai perencanaan dan analisis produksi, konsumsi, pembentukan modal, ekspor, dan impor.

Hubungan antara permintaan akhir dengan tingkat output merupakan hubungan yang bersifat linear. Atas dasar hubungan yang demikian ini maka

dengan melalui suatu perlakuan, maka akan dapat dilihat tingkat output pertumbuhan ekonomi di masa mendatang. Model ini memberikan kepada setiap sektor perekonomian perkiraan tentang tingkat produksi dan impor yang sesuai dengan perkiraan permintaan akhir.

3. Akibat dari Permintaan Akhir

Melalui proses pengolahan data maka dari tabel Input-Output dapat dihasilkan berbagai jenis nilai koefisien, yang masing-masing mempunyai fungsi analisis sesuai dengan aspek perekonomian yang dikaji. Atas dasar fungsi-fungsi koefisien tersebut maka melalui tabel Input-Output dapat diperkirakan dampak permintaan akhir dan perubahannya terhadap berbagai output sektor produksi, nilai tambah, pendapatan masyarakat, kebutuhan tenaga kerja, pajak, kebutuhan impor, dan kemungkinan substitusinya, dan sebagainya.

4. Kelayakan dan Kepekaan Sektoral

Tabel ini juga dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kelayakan ekonomi pengembangan sektoral sekaligus derajat kepekaan sektoral. Oleh karena itu dapat diketahui pula besaran nilai berbagai sektor yang secara nyata mempunyai pengaruh terkuat dan peka terhadap pertumbuhan perekonomian wilayah.

Secara teknis tabel Input-Output dapat dimanfaatkan untuk (PSEKP Universitas Gadjah Mada 2003):

1. Sebagai dasar estimasi PDRB suatu daerah dan sebagai data dasar penyusunan tahun dasar baru penghitungan PDRB.
2. Sebagai analisis berbagai kebijakan di bidang ekonomi secara makro dalam mengantisipasi perubahan penyediaan dan permintaan barang dan jasa.

Suatu tabel Input-Output disusun berdasarkan asumsi-asumsi tertentu, antara lain sebagai berikut (BPS 1999; Saefulhakim 2004):

1. Asumsi Homogenitas yang mensyaratkan bahwa tiap sektor memproduksi suatu output tunggal dengan struktur input tunggal atau aktivitas ekonomi yang dikategorikan ke dalam suatu sektor tertentu diasumsikan memiliki karakteristik sistem produksi, yakni struktur input dan output yang homogen dan tidak ada substitusi input antara kegiatan satu dengan kegiatan lainnya.

2. Asumsi Linieritas atau Proporsionalitas yang mensyaratkan bahwa dalam proses produksi, hubungan antara input dengan output merupakan fungsi linier, yaitu tiap jenis input yang diserap oleh sektor tertentu naik atau turun sebanding dengan kenaikan atau penurunan output sektor tersebut, dan proporsi Input-Output suatu sektor tetap, tidak bergantung pada skala produksi atau output.
3. Asumsi Aditivitas, yaitu suatu asumsi yang menyebutkan bahwa efek total pelaksanaan produksi di berbagai sektor dihasilkan oleh masing-masing sektor secara terpisah dan kinerja sistem produksi suatu sektor ditentukan oleh kinerja sistem produksi sektor-sektor lainnya, namun pengaruh dari masing-masing sektor tersebut bersifat sendiri-sendiri dan tidak bersifat interaktif.

Keunggulan analisis Input-Output dibandingkan analisis lainnya adalah:

1. Kemampuan model Input-Output untuk melihat sektor demi sektor dalam perekonomian sampai pada tingkat yang sangat rinci sehingga membuat analisis ini cocok untuk proses perencanaan.
2. Kemampuan menganalisis keterkaitan dan hubungan antarsektor dalam suatu perekonomian. Hubungan antarsektor ini menjadi penting sejak analisis pembangunan ekonomi tidak hanya mementingkan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga mulai melihat pembagian pertumbuhan antarfaktor produksi dan juga sumber-sumber pertumbuhan itu sendiri.

Kelemahan analisis Input-Output dibandingkan analisis lainnya adalah (PSEKP Universitas Gadjah Mada 2003):

1. Analisis Input-Output sebagai model kuantitatif memiliki keterbatasan, yaitu bahwa koefisien input atau koefisien teknis diasumsikan tetap selama periode analisis. Karena koefisien teknis dianggap konstan, maka teknologi yang digunakan oleh sektor-sektor ekonomi dalam proses produksi pun dianggap konstan. Akibatnya perubahan kuantitas dan harga input akan selalu sebanding dengan perubahan kuantitas dan harga output.
2. Analisis Input-Output tidak mampu menjelaskan masalah distribusi pendapatan dalam suatu perekonomian karena dalam model Input-Output tidak terdapat elemen yang dapat mencerminkan distribusi pendapatan.

3. Analisis Input-Output tidak mampu menjawab bagaimana tujuan yang ditetapkan dengan cara yang paling mungkin, dimana pilihan tersebut dihadapkan pada sumberdaya tertentu. Analisis Input-Output hanya mampu menjawab pertanyaan mengenai apakah daerah mempunyai sumberdaya yang cukup untuk mencapai target yang ingin dicapai.

Struktur dasar dari Tabel Transaksi Input-Output dapat digambarkan dalam Gambar 3 sebagai berikut:

		Permintaan Internal Wilayah									Permintaan Eksternal Wilayah	Total Output	
		Permintaan Antara						Permintaan Akhir					
		<i>I</i>	2	...	<i>J</i>	...	<i>n</i>	<i>C</i>	<i>G</i>	<i>I</i>	<i>E</i>		
Input Internal Wilayah	Input Antara	1	X_{11}	X_{1j}	...	X_{1n}	C_1	G_1	I_1	E_1	X_1
		2	X_{21}	X_{2j}	...	X_{2n}	C_2	G_2	I_2	E_2	X_2
		⋮
		<i>i</i>	X_{ij}	C_i	G_i	I_i	E_i	X_i
		⋮
		<i>n</i>	X_{n1}	X_{nj}	...	X_{nn}	C_n	G_n	I_n	E_n	X_n
	Nilai Tambah	<i>W</i>	W_1	W_j	...	W_n	C_W	G_W	I_W	E_W	W
		<i>T</i>	T_1	T_j	...	T_n	C_T	G_T	I_T	E_T	T
		<i>S</i>	S_1	S_j	...	S_n	C_S	G_S	I_S	E_S	S
Input Eksternal Wilayah	<i>M</i>	M_1	M_j	...	M_n	C_M	G_M	I_M	...	M	
	Total Input	X_1	X_j	...	X_n	C	G	I	E	X	

Gambar 3 Struktur dasar tabel transaksi Input-Output.

Keterangan:

i, j : Sektor ekonomi: $i=1,2,\dots,n$; $j=1,2,\dots,n$.

X_{ij} : Banyaknya output sektor i yang digunakan sebagai input sektor j .

X_i : Total output sektor i ; X_j : total input sektor j ; untuk sektor yang sama ($i=j$), total output sama dengan total input ($X_i=X_j$).

C_i : Permintaan konsumsi rumah tangga terhadap output sektor i .

G_i : Permintaan konsumsi (pengeluaran belanja rutin) pemerintah terhadap output sektor i .

I_i : Permintaan pembentukan modal tetap neto (investasi) dari output sektor i ; output sektor i yang menjadi barang modal.

- E_i : Ekspor barang dan jasa sektor i , output sektor i yang diekspor atau dijual ke luar wilayah, permintaan wilayah eksternal terhadap output sektor i .
 Y_i : Total permintaan akhir terhadap output sektor i ($Y_i = C_i + G_i + I_i + E_i$).
 W_j : Pendapatan (upah dan gaji) rumah tangga dari sektor j , nilai tambah sektor j yang dialokasikan sebagai upah dan gaji anggota rumah tangga yang bekerja di sektor j .
 T_j : Pendapatan pemerintah (pajak tak langsung) dari sektor j , nilai tambah sektor j yang menjadi pendapatan asli daerah dari sektor j .
 S_j : Surplus usaha sektor j , nilai tambah sektor j yang menjadi surplus usaha.
 M_j : Impor sektor j , komponen input produksi sektor j yang diperoleh atau dibeli dari luar wilayah.

Dalam metode Input-Output, output yang diproduksi oleh suatu sektor i didistribusikan ke dua pemakai, yaitu pemakai yang menggunakan output tersebut untuk proses produksi lebih lanjut (sektor produksi) dan pemakai yang menggunakan output tersebut untuk pemakaian akhir. Bagi pemakai pertama, output sektor i merupakan bahan baku atau input antara, sedangkan bagi pemakai kedua, output sektor i merupakan permintaan akhir. Dalam input antara dapat terjadi arus perpindahan barang antarsektor misalnya dari sektor i ke sektor j dan dapat pula terjadi perpindahan dalam sektor itu sendiri.

Pada hakekatnya model Input-Output dikembangkan untuk menganalisis dan mengukur hubungan antar berbagai sektor produksi dan konsumsi dalam perekonomian wilayah. Ketergantungan antarsektor dalam sistem tertentu dijabarkan melalui persamaan linear. Hasil analisis Input-Output menunjukkan sektor-sektor kunci dalam perekonomian yang menjadi pertimbangan utama untuk dikembangkan yang pada akhirnya menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi.

Proses Hierarki Analitik

Metode Proses Hierarki Analitik atau Analytic Hierarchy Process (AHP), yaitu suatu pendekatan yang digunakan berdasarkan analisis kebijakan yang bertujuan untuk memecahkan masalah sehingga mendapatkan penyelesaian yang tepat dan optimal. Metode ini dikembangkan untuk mengorganisasi informasi dan penilaian (*judgement*) dalam memilih alternatif yang paling disukai (Saaty 1983). Dengan menggunakan AHP, suatu persoalan akan dipecahkan dalam suatu kerangka berpikir yang terorganisir, sehingga memungkinkan dapat diekspresikan untuk mengambil keputusan yang efektif atas persoalan tersebut.

Prinsip kerja AHP adalah menyederhanakan suatu persoalan kompleks yang tidak terstruktur, tidak stratejik, dan statik menjadi bagian-bagiannya serta menata

dalam suatu hierarki. Kemudian tingkat kepentingan setiap variabel diberi numerik secara subjektif tentang arti penting variabel tersebut secara relatif dibandingkan dengan variabel yang lain. Dari berbagai pertimbangan tersebut kemudian dilakukan sintesis untuk menetapkan variabel yang memiliki prioritas tinggi dan berperan untuk mempengaruhi hasil pada sistem tersebut.

AHP memiliki banyak keunggulan dalam menjelaskan proses pengambilan keputusan, karena dapat digambarkan secara grafis, sehingga mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Dengan AHP, proses keputusan kompleks dapat diuraikan menjadi keputusan-keputusan lebih kecil yang dapat ditangani dengan mudah. Selain itu, AHP juga menguji konsistensi penilaian, bila terjadi penyimpangan yang terlalu jauh dari nilai konsistensi sempurna, maka hal ini menunjukkan bahwa penilaian perlu diperbaiki, atau hierarki harus distruktur ulang (Marimin 2004).

Dalam menyelesaikan persoalan dengan menggunakan AHP ada beberapa prinsip yang harus dipahami, diantaranya adalah:

- a. *Decomposition*, setelah persoalan didefinisikan, maka perlu dilakukan dekomposisi, yaitu memecahkan persoalan yang utuh menjadi unsur-unsur.
- b. *Comparative judgement*, prinsip ini berarti membuat penilaian tentang kepentingan relatif dua elemen pada suatu tingkat tertentu dalam kaitannya dengan tingkat di atasnya. Penilaian ini merupakan inti dari AHP, karena akan berpengaruh terhadap prioritas-prioritas elemen-elemen. Hasil penilaian akan lebih baik jika disajikan dalam bentuk matriks yang dinamakan matriks *pairwise comparison*.
- c. *Synthesis of priority*, dari setiap matriks *pairwise comparison* kemudian dicari *eigenvector*-nya untuk mendapatkan *local priority*. Karena matriks *pairwise comparison* ada di setiap tingkat, maka untuk mendapatkan *global priority* harus dilakukan sintesis diantara *local priority*. Prosedur melakukan sintesis berbeda dengan bentuk hierarki. Pengurutan elemen-elemen menurut kepentingan relatif melalui sintesis dinamakan *priority setting*.
- d. *Logical consistency*, konsistensi memiliki dua makna, pertama adalah bahwa objek-objek yang serupa dapat dikelompokkan sesuai dengan keseragaman

dan relevansi, dan yang kedua adalah tingkat hubungan antara objek didasarkan pada kriteria tertentu.



METODOLOGI PENELITIAN

Kerangka Pemikiran

Seiring dengan perubahan situasi yang ada saat ini, pendekatan pengembangan wilayah akan menghadapi tantangan yang semakin kompleks dengan adanya pergeseran-pergeseran paradigma diantaranya: globalisasi, otonomi daerah, tuntutan adanya *good governance* dan pemberdayaan masyarakat, kelayakan ekonomi, transparansi, akomodatif, terpadu, keberlanjutan, dan penentuan skala prioritas.

Selama kurun waktu tiga dasawarsa Pemerintah Indonesia menganut paradigma pembangunan yang bersifat *product centered development* dimana pembangunan lebih ditekankan kepada terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang sasaran utamanya adalah peningkatan produksi barang dan jasa. Nuansa yang terjadi di masyarakat adalah sistem pemerintahan yang sentralistik, yang bersifat pemaksaan dan pengerahan atau mobilisasi, penaklukan, eksploitasi, dan dalam tataran nasional sehingga menyebabkan terjadi pembangunan yang tidak berkelanjutan.

Implikasi dari pembangunan yang bersifat produksi ini adalah terjadinya ketimpangan spasial antarwilayah, disparitas pendapatan dan distribusi pendapatan, eksploitasi sumberdaya alam serta ketergantungan yang besar terhadap pemerintah pusat. Kegagalan demi kegagalan sebagai akibat kesalahan dalam menjalankan dan menerapkan model pembangunan telah menyadarkan pemerintah untuk mengubah paradigma pembangunan.

Upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan menjalankan otonomi daerah yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 *juncto* No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 *juncto* No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sejalan dengan diberlakukannya undang-undang tersebut maka sejak saat itu di Indonesia telah terjadi perubahan yang gradual dalam konsep pembangunan nasional. Pergeseran paradigma pembangunan ini setidaknya terlihat dari aspek perencanaan, aspek pengelolaan seluruh sumberdaya, dan aspek kelembagaannya.

Dalam hal aspek perencanaan, telah terjadi perubahan pendekatan dari yang bersifat *top-down* menjadi bersifat *bottom-up*. Hal ini berarti bahwa pembangunan nasional selain harus tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga akan memberi konsekuensi lebih berorientasi pada kebutuhan pembangunan daerah. Artinya, pemerintah daerah mempunyai kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pembangunan dengan menggali dan memanfaatkan potensi sumberdaya dan sumber dana secara optimal (Bappenas 2004).

Dengan demikian, daerah akan memutuskan sendiri pola dan bentuk kawasan yang akan diandalkan untuk dikembangkannya, maupun sektor atau produk-produk potensi daerah yang akan diunggulkannya untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah. Perubahan paradigma pembangunan dari sentralistik ke desentralistik tersebut di atas, juga akan memberikan implikasi bahwa pemerintah daerah harus mampu mengelola seluruh sumber dana untuk membiayai pembangunan daerahnya. Peran pemerintah pusat yang semula bersifat sektoral secara bertahap beralih ke pemerintah daerah dengan pendekatan regional yang lebih bersifat lintas sektoral. Dalam hal ini, kelembagaan lokal dalam pembangunan ekonomi daerah akan semakin penting dan diakui keberadaannya.

Konsep keterpaduan program pembangunan ekonomi wilayah menjadi semakin penting dalam era otonomi daerah. Sudah seharusnya bahwa output dari suatu program pembangunan bisa menjadi input bagi program pembangunan lainnya. Dalam perekonomian yang lebih luas hubungan antarkegiatan ekonomi juga menunjukkan keterkaitan yang semakin kuat dan dinamis. Jenis kegiatan baru akan muncul untuk mengisi kekosongan mata rantai kegiatan yang semakin panjang dan kait-mengait. Kemajuan di suatu sektor tidak mungkin dapat dicapai tanpa dukungan sektor lainnya. Begitu juga sebaliknya, hilangnya kegiatan suatu sektor akan berdampak terhadap kegiatan sektor lainnya (Muchdie 2002).

Keterkaitan antarsektor diperlukan untuk menciptakan pembangunan yang seimbang. Strategi pembangunan seimbang diartikan pembangunan berbagai jenis industri secara berbarengan sehingga industri tersebut saling menciptakan pasar bagi yang lain. Selain itu strategi pembangunan seimbang ini dapat juga diartikan sebagai keseimbangan pembangunan di berbagai sektor (Arsyad 1999). Strategi

pembangunan seimbang ini mengharuskan adanya pembangunan serentak dan harmonis di berbagai sektor ekonomi sehingga semua sektor bisa tumbuh bersama.

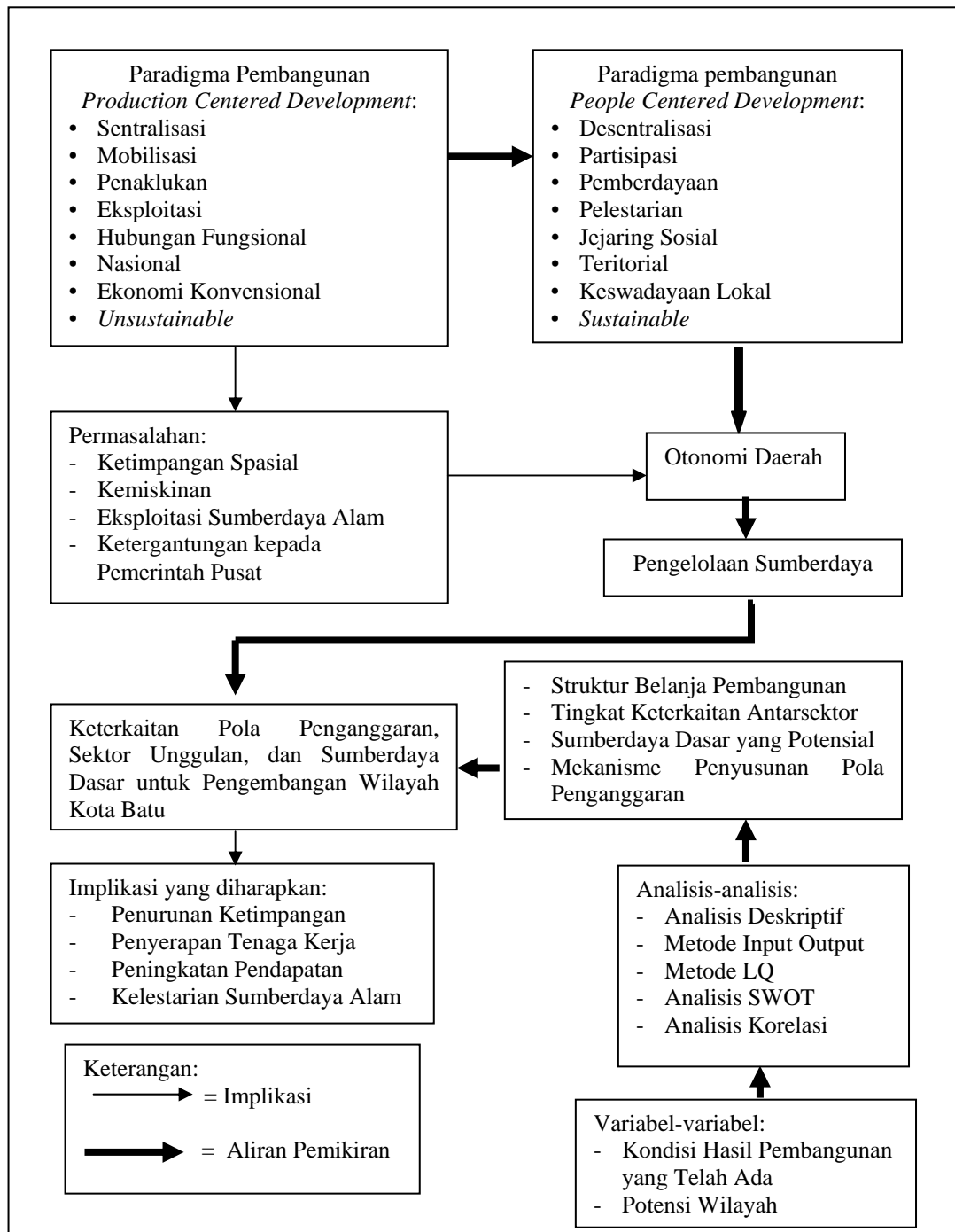
Oleh karena itu, diperlukan suatu keseimbangan antara sisi permintaan dan sisi penawaran. Sisi penawaran memberikan tekanan pada pembangunan serentak dari semua sektor yang saling berkaitan dan berfungsi meningkatkan penawaran. Sedangkan sisi permintaan berhubungan dengan kesempatan kerja yang lebih besar dan penambahan pendapatan agar permintaan barang dan jasa dapat tumbuh.

Keterpaduan dalam pelaksanaan arah dan kebijakan pengembangan wilayah dirasakan penting mengingat kebijakan yang dilaksanakan secara tidak terkoordinasi akan menghasilkan sasaran-sasaran yang berbeda satu sama lain, membingungkan masyarakat, dan pada gilirannya akan mengakibatkan rendahnya efektivitas pelaksanaan kebijakan. Dari dimensi waktu, program ini juga penting untuk menghindari timbulnya *conflicting target* terutama dalam kebijakan jangka pendek.

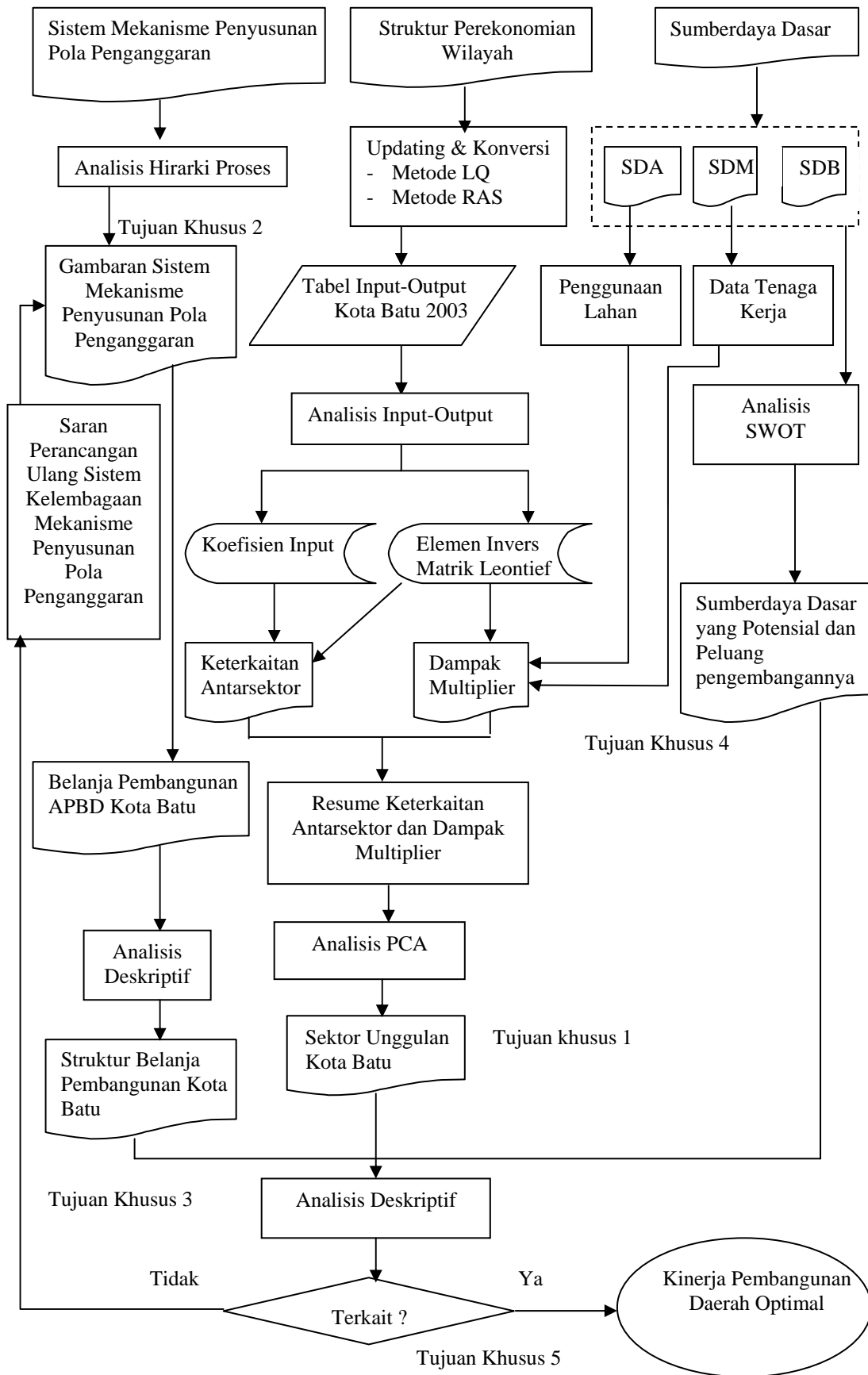
Anggaran tidak dapat dipisahkan dari sistem perencanaan, di samping memang anggaran itu sendiri merupakan sebuah rencana. Dalam suatu sistem perencanaan, anggaran merupakan muara akhir. Perencanaan dimulai dari perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan tahunan. Anggaran merupakan salah satu instrumen utama dalam melaksanakan suatu kebijakan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anggaran pada hakekatnya merupakan cerminan dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan berfungsi sebagai instrumen utama untuk melaksanakan kebijakan. Sehingga dapat disimpulkan pula, jika masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan berkeinginan untuk mengetahui kebijakan yang diambil oleh pemerintah, maka dapat melihat dokumen anggarannya. Di sanalah kebijakan terdeskripsikan secara operasional. Pada dokumen anggaran ini pula suatu kebijakan dapat digambarkan secara lebih lengkap, karena memuat tujuan kebijakan, instrumen kebijakan, dan yang paling penting adalah target kebijakan. Dengan demikian dokumen anggaran dapat menggambarkan suatu kebijakan secara komprehensif, baik dari sisi kualitatif maupun kuantitatif.

Gambar 4 dan Gambar 5 di bawah ini menjelaskan mengenai kerangka pemikiran dan diagram alir penelitian.



Gambar 4 Kerangka pemikiran.



Gambar 5 Diagram alir penelitian.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian mengambil lokasi di Kota Batu Provinsi Jawa Timur. Penelitian dilaksanakan dari bulan Maret sampai dengan bulan Agustus 2005. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian data sekunder yang diperlukan pada instansi Pemerintah Kota Batu, Bappeda Kota Batu, dan BPS Kota Batu serta penelitian lapangan yang dilakukan dengan tujuan untuk melihat atau mengadakan observasi secara langsung hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai oleh Kota Batu.

Metode Pengumpulan dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan metode studi lapangan, yaitu dengan mengadakan wawancara dan mengajukan pertanyaan berstruktur berbentuk kuesioner dengan pihak-pihak terkait dalam hal ini adalah pejabat di lingkungan Kantor Walikota Batu, Ketua dan Anggota DPRD Kota Batu, Pejabat Bappeda Kota Batu, para tokoh masyarakat, dan masyarakat Kota Batu berkenaan dengan mekanisme penyusunan pola penganggaran pembangunan Kota Batu. Metode pengumpulan data sekunder dilakukan dengan metode studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari data-data publikasi BPS Kota Batu dan Provinsi Jawa Timur, Bappeda Kota Batu, dan Pemerintah Kota Batu serta data-data lain yang dapat menunjang penelitian.

Adapun jenis dan sumber data yang diperlukan berdasarkan tujuan penelitian tercantum dalam Tabel 8 berikut:

Tabel 8 Jenis dan sumber data yang diperlukan berdasarkan tujuan penelitian

No.	Tujuan	Data	Sumber Data	Pendekatan Analitis	Output
1.	Mengetahui keterkaitan pola penganggaran, sektor unggulan, dan sumberdaya dasar untuk optimalisasi kinerja pembangunan daerah.	- APBD Kota Batu - Sektor unggulan - Sumberdaya dasar	- Pemko Batu - Bappeko Batu	Deskriptif	Apakah terdapat keterkaitan pola penganggaran, sektor unggulan dan sumberdaya dasar untuk optimalisasi kinerja pembangunan daerah
2.	Menganalisis sistem mekanisme penyusunan pola penganggaran Kota Batu.	- Mekanisme Penyusunan Anggaran	- DPRD Kota Batu - Pemko Batu	AHP	Gambaran sistem mekanisme penyusunan pola penganggaran Kota Batu.
3.	Menganalisis struktur belanja pembangunan Kota Batu	- APBD Kota Batu	- Pemko Batu	Deskriptif	Struktur belanja pembangunan Kota Batu
4.	Menganalisis sektor ekonomi yang memiliki struktur keterkaitan antarsektor yang kuat (sektor unggulan) di Kota Batu sehingga memberikan <i>multiplier effects</i> yang tinggi terhadap pendapatan, penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat.	- Tabel I-O Jawa Timur 2003 (<i>Updating</i> dari Tabel I-O Jawa Timur 2000) - PDRB Kota Batu tahun 1999-2003 - Tabel I-O Kota Batu tahun 2003 (diturunkan dari Tabel I-O Jawa Timur 2003)	- BPS Jatim - BPS Kota Batu - Bappeda Jatim - Bappeko Batu	Metode - LQ - I-O - RAS - PCA	Keterkaitan antarsektor dan sektor unggulan
5.	Menganalisis sumberdaya dasar yang potensial.	- Potensi wilayah	- BPS Kota Batu - Bappeko Batu - Tokoh masyarakat	SWOT	Sumberdaya dasar yang potensial.

Sumber: Diolah sendiri.

Spesifikasi Data

Data yang digunakan dalam menyusun tabel Input-Output adalah Tabel Input-Output Provinsi Jawa Timur tahun 2000 yang terdiri dari 100 sektor kegiatan ekonomi (BPS Jawa Timur 2002) yang kemudian direklasifikasi menjadi Tabel Input-Output Provinsi Jawa Timur tahun 2000 yang terdiri dari 44 sektor kegiatan ekonomi. Kemudian dilakukan proses *updating* dengan metode RAS Non Linear Programming dengan menggunakan software General Algebraic Modelling System (GAMS) 386 sehingga akan dihasilkan Tabel Input-Output Provinsi Jawa Timur tahun 2003 yang terdiri dari 44 sektor kegiatan ekonomi. Selanjutnya dengan Metode Location Quotient (LQ) disusun Tabel Input-Output Kota Batu tahun 2003 yang terdiri dari 44 sektor. Dari rincian 44 sektor tersebut akan direklasifikasi dengan cara mengelompokkan sektor usaha sejenis sehingga hanya terdapat sebanyak 16 sektor sebagaimana diuraikan dalam Lampiran 2.

Metode Analisis

Adapun beberapa alat analisis yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode RAS

Metode RAS merupakan salah satu metode untuk memproyeksikan suatu tabel Input-Output yang baru dengan menggunakan koefisien-koefisien tabel Input-Output yang lama. Metode ini dikembangkan untuk menghasilkan matriks teknologi suatu tahun tertentu dengan menggunakan matriks teknologi di masa lalu, tanpa harus melakukan survei yang mendetil untuk mendapatkan matriks teknologi tersebut. Teknik ini disebut metode RAS karena metode pendugaan atau proyeksi digunakan untuk menghasilkan suatu tabel Input-Output yang baru didasarkan pada matriks r , A , dan s .

Pada prinsipnya metode RAS berupaya menghasilkan matriks teknologi pada tahun 1, yang dinotasikan dengan $A(1)$, dengan berdasarkan suatu matriks teknologi pada tahun 0, yang dinotasikan dengan $A(0)$ tanpa harus memiliki n^2+n informasi di tahun 1 tersebut. Informasi yang diperlukan di tahun 1 adalah informasi mengenai tiga vektor saja. Pertama, vektor kolom berdimensi $n \times 1$ yang merupakan penjumlahan setiap baris matriks di tahun 1. Vektor ini dinotasikan dengan $U(1)$. Kedua, vektor baris berdimensi $1 \times n$ yang merupakan

penjumlahan setiap kolom matriks di tahun 1. Vektor ini dinotasikan dengan $V(1)$. Ketiga, matriks X di tahun 1 yang dinotasikan dengan $X(1)$.

Dalam penelitian ini, untuk melakukan *updating* Tabel Input-Output Jawa Timur tahun 2003 dan pendugaan Tabel Input-Output Kota Batu tahun 2003 dengan dasar Tabel Input-Output Jawa Timur tahun 2000 digunakan software GAMS386 dengan prosedur sebagaimana tercantum dalam di dalam Lampiran 3 dan Lampiran 4.

2. Metode Location Quotient (LQ)

Metode Location Quotient (LQ) merupakan suatu indeks untuk membandingkan pangsa subwilayah dalam aktivitas tertentu dengan pangsa total aktivitas tersebut dalam total aktivitas wilayah. Secara lebih operasional, LQ didefinisikan sebagai rasio persentase dari total aktivitas pada subwilayah ke- i terhadap persentase aktivitas total terhadap wilayah yang diamati. Asumsi yang digunakan dalam analisis ini adalah bahwa: (1) kondisi geografis relatif seragam, (2) pola-pola aktivitas bersifat seragam, dan (3) setiap aktivitas menghasilkan produk yang sama.

Penggunaan metode Location Quotient (LQ) di dalam penelitian ini adalah untuk menurunkan atau mengkonversi koefisien teknologi Tabel Input-Output Jawa Timur tahun 2003 menjadi koefisien teknologi Tabel Input-Output Kota Batu 2003. Secara matematis, persamaan dari metode Location Quotient (LQ) dapat dirumuskan sebagai:

$$LQ_{ij} = \frac{X_{ij} / X_i}{X_{.j} / X_{..}} \quad (1)$$

Dimana:

- X_{ij} : output sektor j pada tingkat kota atau kabupaten i
- X_i : total output tingkat kota atau kabupaten i
- $X_{.j}$: output sektor j pada tingkat provinsi
- $X_{..}$: total output tingkat provinsi

Untuk dapat menginterpretasikan hasil analisis LQ, maka digunakan parameter sebagai berikut:

- a. Jika nilai $LQ_{ij} > 1$, maka hal ini menunjukkan terjadinya konsentrasi suatu aktivitas di subwilayah ke- i secara relatif dibandingkan dengan total wilayah atau terjadi pemusatan aktivitas di subwilayah ke- i .

- b. Jika nilai $LQ_{ij} = 1$, maka subwilayah ke- i tersebut mempunyai pangsa aktivitas setara dengan pangsa total atau konsentrasi aktivitas di wilayah ke- i sama dengan rata-rata total wilayah.
- c. Jika nilai $LQ_{ij} < 1$, maka subwilayah ke- i tersebut mempunyai pangsa relatif lebih kecil dibandingkan dengan aktivitas yang secara umum ditemukan diseluruh wilayah.

3. Model Input-Output (I-O)

Untuk menganalisis keterkaitan antarsektor yang membentuk struktur ekonomi di suatu wilayah sebagai dasar untuk membuat prioritas pembangunan dan mencerminkan pendekatan analisis sistem secara makro dapat dilakukan dengan menggunakan teori Input-Output. Mengingat survey untuk melakukan pembuatan tabel Input-Output membutuhkan biaya yang sangat besar dan tenaga ahli yang berpengalaman, maka dapat diterima penggunaan teknik Input-Output Nonsurvey selama masih mengikuti kaidah-kaidah yang ada. Tabel Input-Output Kota Batu atas dasar survey sampai sekarang ini belum dibuat sehingga dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menurunkan tabel Input-Output Provinsi Jawa Timur tahun 2000 dengan mengikuti metode Location Quotient dan RAS.

Untuk keperluan analisis, parameter yang paling utama adalah koefisien teknologi a_{ij} yang secara matematis diformulasikan sebagai berikut:

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j} \text{ atau } X_{ij} = a_{ij} \cdot X_j \quad (2)$$

dimana:

a_{ij} : rasio antara banyaknya output sektor i yang digunakan sebagai input sektor j ($=X_{ij}$) terhadap total input sektor j ($=X_j$).

Dengan demikian, tabel I-O secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} a_{11}X_1 + a_{12}X_2 + \dots + a_{1j}X_j + \dots + a_{1n}X_n + Y_1 &= X_1 \\ a_{21}X_1 + a_{22}X_2 + \dots + a_{2j}X_j + \dots + a_{2n}X_n + Y_2 &= X_2 \\ &\vdots \\ a_{i1}X_1 + a_{i2}X_2 + \dots + a_{ij}X_j + \dots + a_{in}X_n + Y_i &= X_i \\ &\vdots \\ a_{n1}X_1 + a_{n2}X_2 + \dots + a_{nj}X_n + \dots + a_{nn}X_n + Y_n &= X_n \end{aligned} \quad (3)$$

atau

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \vdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \vdots & a_{2n} \\ & & a_{ij} & \\ & & & \\ a_{n1} & a_{n2} & & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_i \\ X_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ Y_i \\ Y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_i \\ X_n \end{bmatrix} \quad (4)$$

Dengan notasi matriks dirumuskan sebagai berikut:

$$AX + Y = X \quad (5)$$

Matriks A merupakan matriks koefisien hubungan langsung antarsektor (koefisien teknologi), dengan demikian maka

$$\begin{aligned} X - AX &= Y \\ (I - A)X &= Y \\ X &= (I - A)^{-1} \cdot Y \end{aligned} \quad (6)$$

Matriks $(I-A)$ dikenal sebagai matriks Leontief, merupakan parameter penting di dalam analisis I-O. Invers matriks tersebut, matriks $(I-A)^{-1}$ atau B adalah matriks invers Leontief (matriks saling hubungan langsung dan tidak langsung antarsektor). Karena $(I - A)^{-1} Y = BY$, maka peningkatan produksi (X) merupakan akibat tarikan permintaan akhir Y . Gradien peningkatannya ditentukan oleh elemen-elemen matriks B .

Berikut ini beberapa istilah teknis analisis Input-Output yang umum digunakan:

- Kaitan langsung ke belakang atau *direct backward linkage* (a_{*j}): menunjukkan efek langsung dari perubahan output (tingkat produksi) suatu sektor terhadap total tingkat produksi sektor-sektor yang menyediakan input bagi sektor tersebut.

$$a_{*j} = \sum_i^n a_{ij} \quad (7)$$

Untuk kebutuhan mengukur secara relatif (pembandingan dengan sektor lainnya), a_{*j} kemudian dinormalisasikan menjadi \underline{a}_{*j} yang merupakan rasio antara kaitan langsung ke belakang sektor j dengan rata-rata kaitan langsung ke belakang untuk sektor-sektor lainnya.

$$\underline{a}_{*j} = \frac{a_{*j}}{\frac{1}{n} \sum_j a_{*j}} = \frac{na_{*j}}{\sum_j a_{*j}} \quad (8)$$

Nilai $\underline{a}_{*j} > 1$ menunjukkan bahwa sektor j memiliki kaitan ke belakang yang kuat dalam pengertian memiliki pengaruh langsung yang kuat terhadap pertumbuhan sektor-sektor lain.

- b. Kaitan langsung ke depan atau *direct forward linkage* (a_{i*}): menunjukkan efek langsung dari perubahan output (tingkat produksi) suatu sektor terhadap total tingkat produksi sektor-sektor yang menggunakan output sektor tersebut.

$$a_{i*} = \sum_j a_{ij} \quad (9)$$

Untuk kebutuhan mengukur secara relatif (perbandingan dengan sektor lainnya), a_{i*} kemudian dinormalisasikan menjadi \underline{a}_{i*} yang merupakan rasio antara kaitan langsung ke depan sektor i dengan rata-rata kaitan langsung ke depan untuk sektor-sektor lainnya.

$$\underline{a}_{i*} = \frac{a_{i*}}{\frac{1}{n} \sum_i a_{i*}} = \frac{na_{i*}}{\sum_i a_{i*}} \quad (10)$$

- c. Daya Penyebaran (b_{*j}) atau kaitan langsung dan tidak langsung ke belakang (*direct and indirect backward linkage*) menunjukkan pengaruh langsung dan tidak langsung dari kenaikan permintaan akhir terhadap satu unit output sektor tertentu, pada peningkatan total output seluruh sektor perekonomian. Parameter ini menunjukkan kekuatan suatu sektor dalam mendorong peningkatan seluruh sektor perekonomian, secara matematis diformulasikan sebagai berikut:

$$b_{*j} = \sum_i b_{ij} \quad (11)$$

dimana b_{ij} adalah elemen-elemen invers matriks Leontief $B=(I-A)^{-1}$.

Untuk kebutuhan mengukur secara relatif (perbandingan dengan sektor lainnya), b_{*j} kemudian dinormalisasikan menjadi \underline{b}_{*j} yang merupakan rasio antara kaitan langsung dan tidak langsung ke depan sektor j dengan rata-rata kaitan langsung dan tidak langsung ke depan untuk sektor-sektor lainnya.

$$\underline{b}_{*j} = \frac{b_{*j}}{\frac{1}{n} \sum_j b_{*j}} = \frac{nb_{*j}}{\sum_j b_{*j}} \quad (12)$$

- d. Derajat Kepekaan (b_{i*}) atau kaitan langsung dan tak langsung ke depan (*direct and indirect forward linkage*):

$$b_{i*} = \sum_j b_{ij} \quad (13)$$

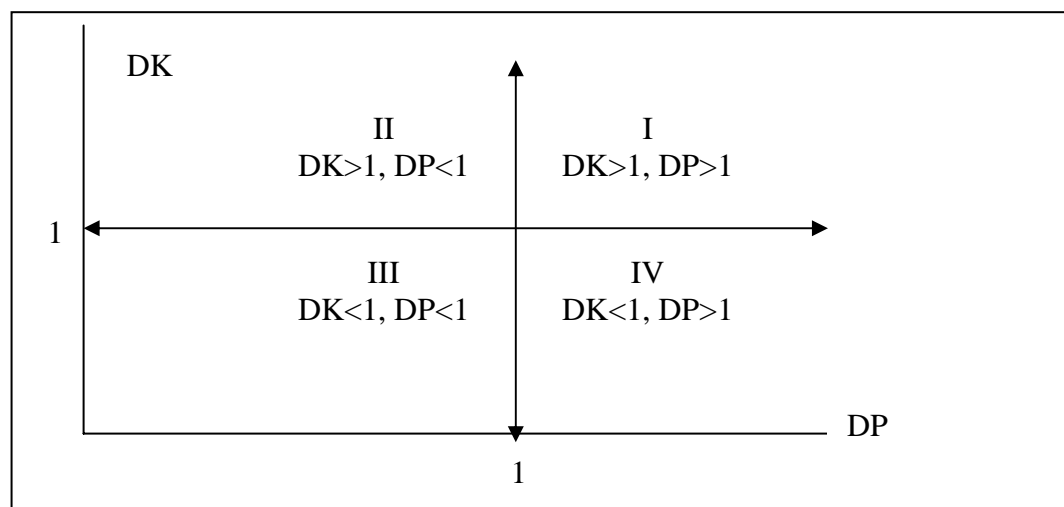
Untuk kebutuhan mengukur secara relatif (perbandingan dengan sektor lainnya), b_{i*} kemudian dinormalisasikan menjadi \underline{b}_{i*} yang merupakan rasio antara kaitan langsung dan tidak langsung ke depan sektor i dengan rata-rata kaitan langsung dan tidak langsung ke depan untuk sektor-sektor lainnya.

$$\underline{b}_{i*} = \frac{b_{i*}}{\frac{1}{n} \sum_i b_{i*}} = \frac{nb_{i*}}{\sum_i b_{i*}} \quad (14)$$

Analisis daya penyebaran dan derajat kepekaan lebih memberikan manfaat bila ditunjukkan dalam bentuk empat kuadran, dimana sektor-sektor ditempatkan pada kuadran yang bersesuaian dengan indeks daya penyebaran (DP) dan derajat kepekaan (DK), yaitu:

- (1) Pada kuadran I adalah sektor yang mempunyai indeks $DP > 1$ dan $DK > 1$.
- (2) Pada kuadran II adalah sektor yang mempunyai indeks $DP < 1$ dan $DK > 1$.
- (3) Pada kuadran III adalah sektor yang mempunyai indeks $DP < 1$ dan $DK < 1$.
- (4) Pada kuadran IV adalah sektor yang mempunyai indeks $DP > 1$ dan $DK < 1$.

Bila digambarkan sebagai berikut:



Gambar 6 Indeks derajat kepekaan dan daya penyebaran.

Sektor-sektor yang mempunyai derajat kepekaan tinggi memberikan indikasi bahwa sektor tersebut mempunyai daya dorong yang kuat dibandingkan sektor lainnya. Sedangkan sektor-sektor yang mempunyai daya penyebaran tinggi memberikan indikasi bahwa sektor tersebut mempunyai ketergantungan yang tinggi terhadap sektor lainnya.

e. Multiplier:

Dalam hal ini, paling tidak dikenal dua tipe multiplier, yakni: Multiplier Tipe I dan Multiplier Tipe II. Multiplier Tipe I dihitung berdasarkan inverse matriks Leontief, $(I-A)^{-1}$, dimana sektor rumah tangga diperlakukan secara *exogenous*. Bila sektor rumah tangga dimasukkan dalam matriks saling ketergantungan, dengan menambah satu baris berupa pendapatan rumah tangga dan satu kolom berupa pengeluaran rumah tangga, yang berarti sektor rumah tangga diperlakukan secara endogenous dalam sistem, maka multiplier yang diperoleh adalah Multiplier Tipe II. Dalam Multiplier Tipe II, bukan hanya Dampak Langsung dan Tidak Langsung yang dihitung tetapi termasuk pula Dampak Induksi, yakni dampak dari perubahan pola konsumsi rumah tangga akibat peningkatan pendapatan terhadap kinerja sistem perekonomian wilayah.. Untuk keperluan analisis, dapat dihitung berbagai jenis multiplier baik untuk Multiplier Tipe I maupun Multiplier Tipe II, antara lain:

- (1) *Output Multiplier*, oM_j , yaitu dampak peningkatan permintaan akhir atas output sektor j terhadap peningkatan total output seluruh sektor di wilayah penelitian. Angka yang diperoleh sama dengan angka keterkaitan langsung dan tidak langsung ke belakang seperti yang telah diuraikan di atas.

$${}^oM_j = \sum_i b_{ij} \quad (15)$$

b_{ij} : elemen inverse matriks Leontief

- (2) *Income Multiplier*, ${}^I M_j$, yaitu dampak peningkatan permintaan akhir atas output sektor j terhadap peningkatan total pendapatan rumah tangga secara keseluruhan di wilayah penelitian.

$${}^I M_j = \frac{1}{{}^I v_j} \sum_i {}^I v_i b_{ij} \quad (16)$$

${}^I v_i$: rasio pendapatan rumahtangga dari sektor i terhadap total output sektor i .

untuk $i=j$, maka ${}^L v_i = {}^L v_j$ (17)

b_{ij} : elemen inverse matriks Leontief

- (3) *Total Value-Added Multiplier* atau multiplier PDRB, ${}^{GDP} M_j$, adalah dampak peningkatan permintaan akhir atas output sektor j terhadap peningkatan PDRB wilayah penelitian.

$${}^{GDP} M_j = \frac{1}{{}^{GDP} v_j} \sum_i {}^{GDP} v_i b_{ij} \quad (18)$$

${}^{GDP} v_i$: rasio Produk Domestik Regional Bruto dari sektor i terhadap total output sektor i . Untuk $i=j$, maka ${}^{GDP} v_i = {}^{GDP} v_j$

b_{ij} : elemen inverse matriks Leontief

- (4) *Employment Multiplier*, ${}^E M_j$, adalah dampak peningkatan permintaan akhir atas output sektor j terhadap peningkatan total kesempatan kerja di wilayah penelitian.

$${}^E M_j = \frac{1}{{}^E v_j} \sum_i {}^E v_i b_{ij} \quad (19)$$

${}^E v_i$: rasio jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor i terhadap total output sektor i . Untuk $i=j$, maka ${}^E v_i = {}^E v_j$ (20)

b_{ij} : elemen inverse matriks Leontief

4. Principal Components Analysis (PCA)

Analisis PCA merupakan salah satu analisis yang dapat digunakan untuk menentukan sektor unggulan. Metode ini menganalisis variabel-variabel kriteria sektor unggulan untuk mendapatkan akar ciri (*eigenvalue*) dari masing-masing faktor komponen utama (*factor loading*) sebagai faktor pembobot. *Factor score* dari masing-masing faktor komponen utama kemudian dikalikan dengan nilai pembobot sehingga didapatkan skor masing-masing sektor.

Salah satu tujuan dasar dari penggunaan metode ini adalah:

- Ortogonalisasi Variabel: mentransformasikan suatu struktur data dengan variabel-variabel yang saling berkorelasi menjadi struktur data baru dengan variabel-variabel baru yang tidak saling berkorelasi.
- Penyederhanaan Variabel: banyaknya variabel baru yang dihasilkan, jauh lebih sedikit dari pada variabel asalnya, tapi total kandungan informasinya (total ragamnya) relatif tidak berubah.

Algoritma ortogonalisasi dengan PCA adalah mencari variabel baru Z , yang merupakan kombinasi linear dari variabel-variabel baku Y yang ragamnya paling tinggi. Artinya, informasi yang terkandung dalam variabel-variabel Y semaksimal mungkin terserap dalam variabel baru Z tersebut. Karena $Z=Yb$, maka yang dicari adalah vektor koefisien pembobot b . Karena banyak sekali kemungkinan vektor b yang dapat memaksimalkan ragam Z , maka yang dibatasi hanya vektor b yang bersifat baku, yakni $b'b=1$.

Secara matematis, algoritma PCA ini dapat ditulis sebagai permasalahan optimisasi sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \max \quad & Z'Z = b'Y'Yb \\ \text{s.t.} \quad & b'b = 1 \end{aligned} \quad (21)$$

$$L = b'Y'Yb - \lambda(b'b - 1) \quad (22)$$

Syarat perlu untuk mendapatkan solusi, adalah:

$$\frac{\partial L}{\partial b} = 2Y'Yb - 2\lambda b = 0 \quad (23)$$

$$Y'Yb = \lambda b \quad \text{atau} \quad Rb = \lambda b \quad (24)$$

dimana:

$\lambda = \text{Eigenvalue}$ atau ciri akar dari matriks korelasi antarvariabel asal.

$B = \text{Eigenvector}$ untuk faktor komponen utama dari matriks korelasi antarvariabel asal.

$R =$ Jumlah variabel yang dianalisis.

Dalam analisis ini, data yang dipakai adalah hasil perhitungan Input-Output Kota Batu tahun 2003, yaitu : (1) Angka pengganda pendapatan; (2) Angka pengganda tenaga kerja; (3) Angka pengganda pajak tak langsung; (4) Derajat kepekaan; (5) Daya penyebaran; dan (6) Angka pengganda nilai tambah total.

5. Analisis SWOT

Analisis SWOT merupakan salah satu bentuk analisis yang bertujuan untuk memformulasikan dan membuat rekomendasi sehingga dapat diambil tindakan yang tepat, memadai, dan sesuai dengan kondisi atau informasi yang diperoleh. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan

(*strength*) dan peluang (*opportunities*) tetapi secara bersamaan meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*).

Analisis ini merupakan alat untuk memaksimalkan peranan faktor yang bersifat positif, meminimalisasikan kelemahan yang ada dan menekan dampak ancaman yang timbul. Analisis dengan metode ini dilakukan dengan empat buah matriks SWOT dengan tahapan analisis yang akan dilakukan sebagai berikut:

- a. Mendaftar kekuatan internal, kelemahan internal, peluang eksternal, dan ancaman eksternal dari masing-masing desa dan kelurahan.
- b. Mencocokkan kekuatan internal dengan peluang eksternal dan mencatat dalam strategi S-O.
- c. Mencocokkan kelemahan internal dengan peluang eksternal dan mencatat dalam strategi W-O.
- d. Mencocokkan kekuatan internal dengan ancaman eksternal dan mencatat dalam strategi S-T.
- e. Mencocokkan kelemahan internal dengan ancaman eksternal dan mencatat dalam strategi W-T.
- f. Peluang-peluang yang terbentuk kemudian diverbalkan menjadi alternatif rencana pengembangan wilayah bersangkutan.

Tabel 9 Matriks SWOT

Internal audit	Kekuatan (<i>Strength</i>)	Kelemahan (<i>Weakness</i>)
Eksternal Environment		
Peluang (<i>Opportunity</i>)	Strategi SO	Strategi WO
Ancaman (<i>Threat</i>)	Strategi ST	Strategi WT

Sumber: David (2002).

Keterangan:

- SO : Memanfaatkan kekuatan secara maksimal untuk meraih peluang
- ST : Memanfaatkan kekuatan secara maksimal untuk mengantisipasi ancaman dan berusaha menjadikannya sebagai peluang.
- WO : Meminimalkan kelemahan untuk meraih peluang.
- WT : Meminimalkan kelemahan untuk menghindar dari ancaman.

Sumber data yang digunakan dalam analisis SWOT ini berasal dari studi data sekunder hasil kajian yang ada keterkaitannya dengan potensi sumberdaya dasar di Kota Batu data primer yang didapatkan dari identifikasi dengan cara

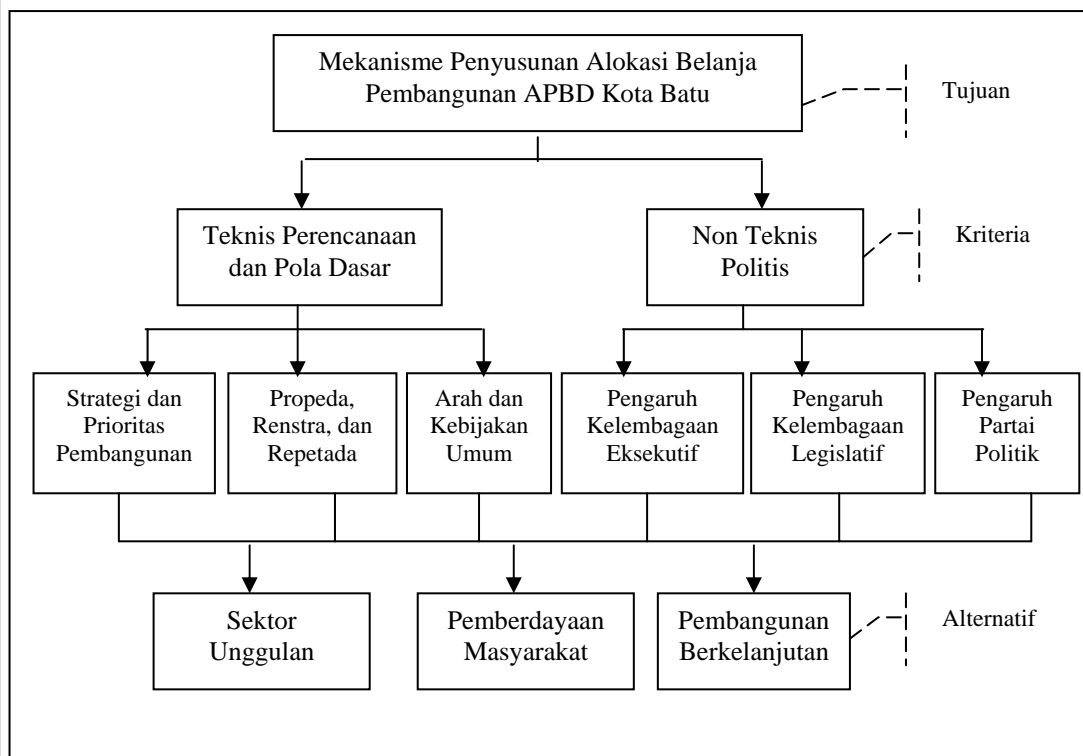
mengadakan wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat dan perangkat desa/kelurahan di Kota Batu serta melakukan pengamatan di lapangan untuk mencocokkan data sekunder dengan kenyataan di lapangan.

6. Proses Hierarki Analitik (Analytic Hierarchy Process)

Dalam proses hierarki analitik ini menggunakan data primer yang dikumpulkan dengan menggunakan serangkaian pertanyaan terstruktur (kuisisioner) yang disebar kepada para informan. Informan dalam penelitian ini adalah para pakar yang mengetahui seluk beluk mengenai penyusunan anggaran, berpengalaman, dan terlibat langsung dalam kegiatan penyusunan anggaran. Informan dipilih secara sengaja dengan jumlah 10 orang yang terdiri dari 4 pejabat Pemerintah Kota Batu yang tergabung dalam Tim Anggaran dan 6 anggota DPRD Kota Batu yang tergabung dalam Panitia Anggaran.

Dalam penelitian ini, data dan informasi dianalisis dengan menggunakan program software Expert Choice 2000 yang merupakan software komputer untuk menentukan pilihan-pilihan dalam pengambilan keputusan dengan multikriteria yang berdasarkan metode pengambilan keputusan.

Adapun hierarki penelitian ini disajikan dalam Gambar 7 sebagai berikut:



Gambar 7 Struktur proses hierarki analitik.

GAMBARAN UMUM WILAYAH

Kondisi Fisik Kota Batu

Kota Batu merupakan kota termuda di Jawa Timur yang terbentuk pada tahun 2001 berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu. Kota yang terkenal dengan julukan *de Klein Switzerland* (Swiss Kecil) ini sebelumnya merupakan kota administratif dengan kabupaten induk adalah Kabupaten Malang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kota Administratif Batu. Secara geografis Kota Batu terletak pada posisi antara 7°44'55,11" sampai dengan 8°26'35,45" Lintang Selatan dan 122°17'10,90" sampai dengan 122°57'00,00" Bujur Timur. Secara fisik, posisi kota ini nyaris terletak di tengah-tengah Provinsi Jawa Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto dan Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan.
- Sebelah timur : Kecamatan Karangploso dan Dau Kabupaten Malang.
- Sebelah selatan : Kecamatan Dau dan Wagir Kabupaten Malang.
- Sebelah barat : Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.

Secara administratif pemerintahan terdiri dari 3 kecamatan, 19 desa dan 4 kelurahan, 225 RW, dan 1 049 RT. Kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Batu adalah kecamatan Batu, Bumiaji, dan Junrejo. Luas wilayah adalah 19 908.72 ha atau sekitar 0.42% dari total luas Provinsi Jawa Timur. Kecamatan Batu memiliki luas wilayah 4 545.81 ha atau 0.23% dari seluruh luas Kota Batu, Kecamatan Bumiaji memiliki luas wilayah 12 797.89 ha atau 0.64% dari seluruh luas Kota Batu, dan Kecamatan Junrejo memiliki luas wilayah 2 565.02 ha atau 0.13% dari seluruh luas Kota Batu (BPS dan Bapeko Kota Batu 2004).

Berdasarkan topografis wilayah, Kota Batu berada pada ketinggian 700-3000 meter di atas permukaan laut (dpl). Pusat kota merupakan lembah yang dikelilingi oleh Gunung Welirang, Gunung Arjuno, dan Gunung Biru (sebelah utara); Gunung Panderman dan Gunung Butak (sebelah selatan); Gunung Petungamplak, Gunung Argowayang, dan Gunung Pasang (sebelah barat laut); Gunung Kelet (sebelah barat); dan Gunung Kawi (sebelah barat daya). Kondisi

morfologis menyebabkan model pemukiman *enclave* di sebelah barat dan membentuk aksesibilitas yang memusat di Kecamatan Batu. Sedangkan wilayahnya dibagi tiga, yaitu: berupa dataran tinggi dengan bentuk wilayah datar sampai berombak, berombak sampai berbukit, dan bentuk berbukit sampai bergunung. Rincian mengenai letak topografi, luas, dan ketinggian desa dan kelurahan di Kota Batu disajikan dalam Tabel 10 berikut ini adalah:

Tabel 10 Letak topografi, luas, dan ketinggian desa/kelurahan di Kota Batu

No.	Desa dan Kelurahan	Topografis	Luas (Km ²)	Ketinggian Dpl (m)
I	Kecamatan Batu	Datar dan berbukit	45.46	650-1 100
1	Oro-Oro Ombo	Berbukit	16.92	900
2	Temas	Datar	4.61	650
3	Sisir	Berbukit	2.63	765
4	Ngaglik	Berbukit	3.2	700
5	Pesanggrahan	Datar	6.99	950
6	Songgokerto	Berbukit	5.67	1 100
7	Sumberejo	Datar	2.92	700
8	Sidomulyo	Datar	2.52	850
II	Kecamatan Junrejo	Datar dan berbukit	25.65	600-800
1	Tlekung	Berbukit	8.73	750
2	Junrejo	Datar	3.52	700
3	Mojorejo	Datar	1.93	800
4	Torongrejo	Berbukit	3.39	700
5	Beji	Datar	2.41	670
6	Pendem	Datar	3.60	600
7	Dadaprejo	Datar	2.07	600
III	Kecamatan Bumiaji	Berbukit	127.98	700-3 000
1	Pandanrejo	Datar	6.28	800
2	Bumiaji	Berbukit	8.45	910
3	Bulukerto	Berbukit	10.07	900
4	Gunungsari	Berbukit	6.88	1 000
5	Punten	Berbukit	2.46	950
6	Tulungrejo	Berbukit	70.24	3 000
7	Sumbergondo	Berbukit	13.79	1 100
8	Giripurno	Berbukit	9.81	700

Sumber: Bapeko Batu (2003) dan BPS Kota Batu (2002a,2002b, dan 2002c).

Secara khusus keadaan topografi menjadikan Kota Batu memiliki dua karakteristik yang berbeda, yaitu sebelah utara dan barat merupakan daerah dengan ketinggian yang bergelombang dan berbukit, sedangkan daerah timur dan selatan merupakan daerah yang relatif datar meskipun masih berada pada

ketinggian 700 meter di atas permukaan laut. Kecuali di daerah Desa Pendem dan Dadaprejo yang membentuk lembah pada Sungai Brantas dan anak sungainya.

Sebagian besar wilayah Kota Batu mempunyai kemiringan (*slope*) lahan sebesar 25-40% dan kemiringan di atas 40%. Rincian mengenai kemiringan lahan disajikan dalam Tabel 11 berikut ini adalah:

Tabel 11 Kemiringan lahan dan peruntukannya

No.	Kemiringan	Luas (ha)	Peruntukan
1.	0-8°	2 207.31	Kawasan yang layak untuk kegiatan pemukiman, budidaya pertanian hortikultura dan tanaman pangan.
2.	8-15°	2 223.73	Kawasan yang layak untuk pengembangan pertanian perkebunan.
3.	15-25°	1 799.37	Kawasan yang layak untuk hutan produksi.
4.	25-40°	4 529.85	Kawasan yang layak untuk hutan lindung.
5.	Di atas 40°	4 493.33	Kawasan lindung mutlak.

Sumber: Dinas Pertanian Kota Batu.

Berdasarkan kondisi geologi, struktur tanah di Kota Batu merupakan wilayah yang subur untuk pertanian karena jenis tanahnya merupakan endapan vulkanik dari sederetan gunung yang mengelilingi Kota Batu. Dilihat dari jenis tanahnya, Kota Batu terdapat empat jenis tanah, yaitu:

1. Andosol dengan asosiasinya: Jenis tanah ini berwarna coklat, coklat kekuning-kuningan bersifat netral sampai asam. Produktifitasnya sedang hingga tinggi dan cocok untuk tegalan, kebun campuran, pertanian hortikultura, dan hutan.
2. Kambisol dengan asosiasinya: Jenis tanah dengan horison kambik, atau epipedon umbrik atau mollik. Tidak ada gejala hidromorfik (pengaruh air).
3. Alluvial dengan asosiasinya: Jenis tanah ini berwarna kelabu, coklat, dan hitam sehingga sifatnya beraneka ragam. Produktifitasnya rendah hingga tinggi dan cocok untuk pertanian.
4. Latosol dengan asosiasinya: Jenis tanah ini sifatnya agak masam hingga netral, warna beraneka ragam, dan cocok untuk untuk tegalan, kebun, pertanian hortikultura, dan hutan.

Adapun rincian luas lahan menurut jenis tanah tiap kecamatan di Kota Batu disajikan dalam Tabel 12 sebagai berikut:

Tabel 12 Luas lahan menurut jenis tanah tiap kecamatan di Kota Batu (Ha)

Nama Kecamatan	Andosol	Kambisol	Alluvial	Latosol	Luas
Batu	1 831.04	889.31	239.86	260.34	3 220.55
Bumiaji	1 526.19	741.25	199.93	217.00	2 684.37
Junrejo	2 873.89	1 395.81	376.48	408.61	5 054.79
Luas	6 231.12	3 027.37	816.27	885.95	10 959.71

Sumber: BPS dan Bapeko Kota Batu (2004).

Secara keseluruhan keberadaan kawasan nonterbangun lebih terkonsentrasi di Kecamatan Bumiaji. Hal ini juga bisa dilihat dari struktur mata pencaharian penduduk Kecamatan Bumiaji yang dominan bekerja di sektor pertanian sebesar 70.60% dari jumlah penduduk yang bekerja. Sedangkan kawasan terbangun dengan luas 2 812.47 ha atau 14% dari luas keseluruhan Kota Batu lebih terkonsentrasi di Kecamatan Batu dengan kepadatan tertinggi di kawasan pusat kota. Kawasan terbangun di Kecamatan Bumiaji dan Junrejo lebih cenderung mengikuti sistem jaringan jalan yang dominan membentuk pola linier dan grid. Pola penggunaan tanah di Kota Batu dapat dilihat dalam Tabel 13 berikut ini:

Tabel 13 Luas Lahan menurut penggunaan pada tiap kecamatan di Kota Batu (Ha) tahun 2003

Penggunaan	Batu	Persen	Junrejo	Persen	Bumiaji	Persen	Total	Persen
Permukiman	1 136.35	24.99	515.99	20.12	1 160.13	9.07	2 812.47	14
Sawah	654.00	14.39	1.141.00	44.48	886.00	6.92	2 681.00	13
Tegalan/kebun	1 911.79	42.06	719.80	28.06	2 973.11	23.23	5 604.70	29
Rumput	827.47	18.20	184.77	7.20	1 216.37	9.51	2 228.61	11
Hutan	-	-	-	-	6 425.00	50.20	6 425.00	32
Lain-lain	16.20	0.36	3.46	0.14	137.28	1.07	156.94	1
Total	4 545.81	100	2 565.02	100	12 797.89	100	19 908.72	100

Sumber: BPS dan Bapeko Kota Batu (2004).

Keadaan klimatologi Kota Batu memiliki suhu minimum 19.1–15.1°C dan suhu maksimum 27.4–25.6°C dengan kelembaban udara sekitar 32–96%. Pada Tahun 2003, musim hujan dimulai pada bulan Oktober dan diakhiri pada bulan Mei. Kondisi cuaca tahun 2003 relatif kering dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sebab jumlah curah hujan maupun hari hujan mengalami penurunan. Rata-rata curah hujan pada tahun 2003, tercatat pada pengamatan stasiun

Klimatologi Karangploso hanya mencapai 127 mm dengan rata-rata hari hujan sebanyak 146 hari. Sementara pada periode sebelumnya, yaitu tahun 2002, rata-rata tinggi curah hujan mencapai 139 mm dengan jumlah hari hujan mencapai 112 hari. Tingkat kelembaban udara di Kota Batu berkisar antara 32% pada bulan Oktober dan yang tertinggi pada bulan Februari sebesar 96%. Keadaan klimatologi di Kota Batu dapat dilihat dalam Tabel 14 berikut ini:

Tabel 14 Karakteristik cuaca Kota Batu tahun 2003

No.	Bulan	Temperatur Udara ($^{\circ}\text{C}$)			Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (hari)
		Rata-Rata	Maksimum	Minimum		
1	Januari	21.7	26.1	19.0	229	22
2	Februari	21.8	26.0	19.1	481	26
3	Maret	21.8	26.7	18.5	281	22
4	April	22.2	27.1	18.5	32	8
5	Mei	21.6	26.2	17.9	103	10
6	Juni	20.9	26.1	16.5	19	5
7	Juli	19.0	25.8	15.1	1	2
8	Agustus	19.1	26.3	15.3	-	-
9	September	21.2	27.0	16.6	-	-
10	Oktober	22.0	27.4	18.0	46	8
11	November	22.1	27.1	19.1	49	18
12	Desember	21.4	25.6	18.9	285	25

Sumber: BPS dan Bapeko Kota Batu (2004).

Dilihat dari kondisi hidrologi, Kota Batu merupakan daerah resapan air sehingga di daerah ini terdapat 111 sumber mata air produktif. Air permukaan berupa air sungai maupun sumber mata air dan air tanah di Kota Batu memiliki kualitas dan kuantitas yang baik. Potensi ketersediaan air di Kota Batu dapat dilihat sebagai berikut:

1. Ketersediaan air hujan dapat dihitung dari ketersediaan air sungai berdasarkan curah hujan mencapai 10 361 liter per detik, mengalami peningkatan 37.5% dari keadaan kemarau. Ketersediaan air sungai diperoleh dari 5 (lima) buah sungai yang keseluruhannya bermuara pada Sungai Brantas yang mampu mengairi daerah-daerah sekitarnya.
2. Ketersediaan sumber-sumber mata air yang cukup potensial, baik untuk dikonsumsi oleh masyarakat Kota Batu sendiri maupun wilayah sekitarnya

seperti Kota dan Kabupaten Malang. Debit air yang dikelola PDAM sebanyak 145 398 m³.

Visi, Misi, Strategi, dan Tujuan Pembangunan Kota Batu

Dalam rangka merealisasikan Pembangunan Kota Batu, maka melalui proses penggalangan aspirasi masyarakat, telah ditetapkan visi sebagai berikut: “Batu, Agropolitan bernuansa pariwisata dengan masyarakat madani”. Sedangkan untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Batu tersebut, maka telah ditetapkan misi pembangunan Kota Batu yang meliputi (Pemko Batu 2004):

1. Peningkatan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan Pancasila secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang madani.
2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia, yang ditandai dengan meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, keterampilan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna menghadapi era globalisasi serta mengelola sumberdaya alam berbasis pada pertanian dan pariwisata yang berwawasan lingkungan.
3. Pengembangan sistem ekonomi kerakyatan yang selaras dengan berkembangnya dunia usaha melalui kemitraan usaha ekonomi lemah dengan industri pariwisata dan pertanian dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat serta mengurangi kesenjangan sosial, ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran.
4. Perwujudan pelayanan prima pada masyarakat yang meliputi penyediaan utilitas, kemudahan perijinan dan fasilitas umum lainnya.
5. Perwujudan kehidupan sosial yang dinamis dan berkembangnya seni budaya serta olahraga untuk menunjang pariwisata daerah.
6. Perwujudan kelestarian lingkungan hidup dan terkontrolnya tata ruang wilayah.
7. Perwujudan peningkatan kualitas kehidupan berpolitik yang demokratis dan dewasa serta penegakan hukum dan hak asasi manusia.
8. Perwujudan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*).
9. Perwujudan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sasaran Pembangunan Kota Batu sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Meningkatnya kualitas SDM masyarakat dan aparatur pemerintah.
3. Menurunnya tingkat degradasi sumberdaya alam demi terciptanya kualitas lingkungan hidup yang seimbang.
4. Terciptanya kesempatan kerja guna meningkatkan pendapatan masyarakat.
5. Terciptanya penegakan hukum dan kehidupan politik yang demokratis.
6. Terciptanya pelayanan prima kepada masyarakat.
7. Berkembangnya pariwisata Kota Batu yang berbasis sumberdaya lokal.

Tujuan pembangunan Kota Batu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman dan pengalaman ajaran agama serta kerukunan hidup umat beragama.
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia masyarakat dan aparatur pemerintah.
3. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan.
4. Meningkatkan pemerataan kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat melalui pengembangan sistem ekonomi kerakyatan.
5. Memperluas kesempatan memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.
6. Menciptakan keunggulan kompetitif di bidang pariwisata.
7. Meningkatkan kesadaran demokrasi dan penegakan hukum di kalangan masyarakat dan aparatur pemerintah.

Kondisi Sosial Budaya Kota Batu.

Wilayah Kota Batu umumnya dihuni oleh masyarakat yang relatif homogen, yaitu masyarakat bersuku bangsa Jawa, walaupun sejak berdirinya kota ini mulai banyak berdatangan masyarakat dari luar daerah seperti dari Kota dan Kabupaten Malang, Kediri, Blitar, Pasuruan, dan kabupaten di pulau Madura, bahkan dari luar Provinsi Jawa Timur. Mereka adalah para pegawai negeri sipil yang bermutasi ke lingkungan Pemerintah Kota Batu dan para pedagang yang mencoba mengadu nasib dengan membuka usaha di kawasan wisata di Kota Batu.

Masyarakat Kota Batu bersifat religius. Mayoritas atau sebagian besar penduduknya memeluk agama Islam, yaitu 159 521 orang, pemeluk agama Katholik 2 455 orang, pemeluk agama Kristen 6 864 orang, pemeluk agama Hindu 347 orang, dan pemeluk agama Budha 690 orang. Walaupun demikian, rasa toleransi dan kerukunan antar umat beragama sangat tinggi. Masyarakat Kota Batu masih memiliki sifat kekeluargaan dan gotong royong yang sangat kuat. Hal ini masih dapat dirasakan jika pada saat salah satu anggota masyarakat mempunyai hajatan atau sedang mengalami musibah maka anggota masyarakat yang lain secara spontan akan segera membantu.

Tabel 15 Penyebaran penduduk antar desa di Kota Batu tahun 2004 (jiwa)

No.	Desa dan Kelurahan	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Kepadatan Penduduk
			Laki	Wanita	Jumlah	
I.	Kec. Batu	45.46	39 294	40 063	79 357	1 745
1.	Oro-Oro Ombo	16.92	3 479	3 286	6 765	399
2.	Termas	4.61	5 829	6 151	11 980	2 598
3.	Sisir	2.63	9 747	9 668	19 415	7 382
4.	Ngaglik	3.2	5 023	4 935	9 958	3 111
5.	Pesanggrahan	6.99	5 549	5 314	10 863	1 554
6.	Songgokerto	5.67	3 004	3 130	6 134	1 081
7.	Sumberejo	2.92	3 133	3 943	7 076	2 423
8.	Sidomulyo	2.52	3 530	3 636	7 166	2 843
II.	Kec. Junrejo	25.65	20 064	20 222	40 286	1 570
1.	Tlekung	8.73	1 832	1 872	3 704	424
2.	Junrejo	3.52	1 853	1 873	3 726	1 058
3.	Mojorejo	1.93	3 485	3 497	6 982	3 617
4.	Torongrejo	3.39	2 502	2 539	5 041	1 487
5.	Beji	2.41	3 105	2 850	5 955	2 470
6.	Pendem	3.60	4 756	4 908	9 664	2 684
7.	Dadaprejo	2.07	2 531	2 683	5 214	2 518
III.	Kec. Bumiaji	127.98	24 920	25 304	50 224	392
1.	Pandanrejo	6.28	2 956	2 961	5 917	942
2.	Bumiaji	8.45	2 423	2 448	4 871	576
3.	Bulukerto	10.07	2 712	2 678	5 390	535
4.	Gunungsari	6.88	2 958	3 003	5 961	866
5.	Punten	2.46	2 556	2 513	5 069	2 060
6.	Tulungrejo	70.24	5 784	5 859	11 643	166
7.	Sumbergondo	13.79	1 551	1 719	3 270	237
8.	Giripurno	9.81	3 980	4 123	8 103	825
Total		199.09	84 278	85 589	169 867	853

Sumber: - Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Tenaga Kerja Kota Batu.
- Bapeko Batu (2003).

Dari Tabel 15 di atas terlihat bahwa jumlah penduduk Kota Batu pada tahun 2004 adalah 169 867 jiwa terdiri dari 84 278 jiwa laki-laki (49.62%) dan 85 589 jiwa perempuan (50.38%). Diantara tiga kecamatan di Kota Batu, Kecamatan Batu memiliki jumlah penduduk terbesar, yaitu 79 357 jiwa dan yang terkecil adalah kecamatan Junrejo dengan jumlah penduduk 40 286 jiwa. Tingkat kepadatan penduduk Kota Batu pada tahun 2004 mencapai 853 jiwa per Km². Kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan terbesar adalah Kecamatan Batu dengan tingkat kepadatan sekitar 1 745 jiwa per Km². Sedangkan kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan terendah adalah Kecamatan Bumiaji dengan tingkat kepadatan sekitar jiwa per 392 Km².

Struktur jumlah penduduk Kota Batu menurut kelompok umur cenderung mengarah pada kelompok berusia muda. Ini ditunjukkan dengan angka beban ketergantungan penduduk muda sebesar 32.68%. Dengan demikian angka beban ketergantungan secara keseluruhan mencapai 41.22% atau dengan angka absolut dikatakan bahwa setiap seratus penduduk usia produktif akan menanggung sekitar 42 orang bukan usia produktif (BPS dan Bapeko Kota Batu 2004). Bila dilihat dari angka beban ketergantungan ini sudah baik, namun realitas secara ekonomis di lapangan sangat bergantung pada sumberdaya manusia penduduk usia produktif dan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam yang ada. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Tabel 16 berikut ini:

Tabel 16 Jumlah penduduk Kota Batu tahun 2004 berdasarkan usia (jiwa)

No.	Usia (tahun)	Batu	Bumiaji	Junrejo	Jumlah	Persen
1.	< 5	4 341	2 524	2 301	9 166	5.4
2.	5 – 9	5 104	3 306	2 303	10 713	6.31
3.	10 – 17	9 726	6 374	4 888	20 988	12.36
4.	18 – 25	12 140	7 472	5 810	25 422	14.97
5.	26 – 40	22 742	13 720	11 742	48 204	28.38
6.	41 – 60	17 578	11 419	9 167	38 164	22.47
7.	> 60	7 726	5 409	4 075	17 210	10.13
Jumlah		79 357	50 224	40 286	169 867	100

Sumber: Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Tenaga Kerja Kota Batu.

Penduduk Kota Batu umumnya memiliki mata pencaharian sebagai petani, pengrajin, pegawai negeri, TNI, Polri, dan lain-lain. Mata pencaharian yang terbanyak adalah petani dengan 27 513 jiwa atau 16% dari keseluruhan penduduk

Kota Batu. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian masih merupakan sektor dominan di Kota Batu. Komposisi penduduk menurut mata pencaharian dapat dilihat dalam Tabel 17 berikut ini:

Tabel 17 Jumlah penduduk Kota Batu menurut mata pencaharian tahun 2004

No.	Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)	Persen
1.	Petani	27 513	16.20
2.	Pedagang	4 680	2.76
3.	PNS	1 918	1.13
4.	TNI	870	0.51
5.	Polisi	147	0.09
6.	Purnawirawan	418	0.25
7.	Pensiunan	1.141	0.67
8.	Karyawan Swasta	16 363	9.63
9.	Wiraswasta	20 328	11.97
10.	Dokter	116	0.07
11.	Tenaga Medis	159	0.09
12.	Buruh	11 446	6.74
13.	Pembantu	407	0.24
	Lain-lain	84 361	49.66
	Jumlah	169 867	100

Sumber: Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Tenaga Kerja Kota Batu.

Tinjauan struktur penduduk menurut mata pencaharian sangat berperan dalam memperkirakan kebutuhan akan penyediaan lapangan kerja, distribusi atau penyebaran tenaga kerja, dan penyebaran penduduk serta dalam penyediaan fasilitas yang bersifat meningkatkan kemampuan kerja.

Sedangkan bila ditinjau dari struktur mata pencaharian per kecamatan, ternyata Kecamatan Batu dan Kecamatan Junrejo bisa dikatakan sebagai wilayah perkotaan karena penduduknya sebagian besar bermata pencaharian nonpertanian, dengan perincian Kecamatan Batu sebesar 73.94% dan Kecamatan Junrejo 62.35%. Sedangkan untuk Kecamatan Bumiaji, penduduknya dominan bermata pencaharian di sektor pertanian, yaitu sebesar 70.64%. Untuk konsentrasi penduduk yang bermata pencaharian di sektor nonpertanian terdapat di Kecamatan Batu diikuti oleh Kecamatan Junrejo dan Bumiaji, begitu juga sebaliknya yang bekerja di sektor pertanian terkonsentrasi di Kecamatan Bumiaji, lalu Kecamatan Batu, dan Kecamatan Junrejo. Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas dirinci menurut lapangan usaha dapat dilihat pada Tabel 18 berikut:

Tabel 18 Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas dirinci menurut lapangan usaha tahun 2003

No.	Pekerjan	Batu	Persen	Junrejo	Persen	Bumiaji	Persen	Jumlah	Persen
1.	Pertanian	6 374	16.28	6 851	34.62	13 461	48.24	26 686	30.73
2.	Perkebunan	269	0.69	34	0.17	523	1.87	826	0.95
3.	Perikanan	60	0.15	18	0.09	27	0.10	105	0.12
4.	Peternakan	669	1.71	312	1.58	377	1.35	1 358	1.56
	Pertanian								
5.	Lainnya	2 833	7.23	236	1.19	5 322	19.07	8 391	9.66
6.	Industri	1 603	4.09	3 011	15.21	300	1.08	4 914	5.66
7.	Perdagangan	6 885	17.58	2 757	13.93	2 414	8.65	12 056	13.88
8.	Jasa-jasa	13 162	33.61	4 082	20.63	2 090	7.49	19 334	22.26
9.	Angkutan	1 304	3.33	944	4.77	443	1.59	2 691	3.10
10.	Lainnya	6 002	15.33	1 545	7.81	2 946	10.56	10 493	12.08
	Total	39 161	100	19 790	100	27 903	100	86 854	100

Sumber: BPS dan Bapeko Batu (2004).

Kebijakan Perwilayahan dan Pengembangan Tata Ruang Kota Batu

Prospek pengembangan Kota Batu ke depan tidak terlepas baik dari potensi dan prospek pengembangannya serta kedudukan Kota Batu sendiri dengan daerah lain yang ada di sekitarnya. Untuk itu, diperlukan suatu skenario kebijakan perwilayahan pembangunan dan pengembangan tata ruang yang sesuai dengan potensi dan prospek pengembangannya serta kelestarian lingkungan yang sudah terbentuk di Kota Batu.

Adapun kebijakan pengembangan Kota Batu berdasarkan kondisi fisik, ekonomi, dan sosial budaya terdapat pada (Bapeko Batu 2003):

1. Pengembangan Kota Batu ke arah utara, barat laut, timur laut, dan barat daya adalah:
 - a. Pengembangan pada kawasan lindung terkait dengan keberadaan hutan yang ada di sekitar Gunung Rawung, Anjasmoro, Tunggangan, Welirang, Kembar, Arjuno, Panderman dan Srandil. Selain itu, kawasan ini juga banyak terdapat sumber mata air dan hulu sungai yang keberadaannya perlu diperhatikan dan dilestarikan.

b. Pengembangan pada kawasan budidaya untuk jenis kegiatan pertanian, objek wisata alam, dan wisata rekreasi terutama di Desa Tulungrejo, Sumbergondo, Gunungsari, Bulukerto, dan Bumiaji.

2. Pengembangan Kota Batu ke arah barat, timur, dan tenggara adalah:

a. Pengembangan pada kegiatan perkotaan dengan mengelompoknya kegiatan permukiman yang didukung sarana dan prasarana perkotaan terutama di desa dan kelurahan di Kecamatan Batu dan Junrejo.

b. Pengembangan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan pariwisata.

Sesuai potensi dan prospek pengembangan Kota Batu sebagai kota orde III dalam lingkup Provinsi Jawa Timur dan berdasarkan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan visi pembangunan Kota Batu, maka fungsi dan peran Kota Batu dalam lingkup wilayah Kota Batu dan regional diarahkan sebagai:

1. Kota pertanian dengan pengembangan kegiatan:

a. Sentra pertanian pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

b. Peningkatan sumberdaya petani dan kelembagaan.

c. Pengembangan mutu produksi pertanian, dan peningkatan serta pengembangan pengolahan intensifikasi yang didukung sarana dan prasarana pertanian serta teknologi pertanian.

d. Pengembangan pemasaran produksi pertanian yang terpadu dengan pembangunan pasar agribisnis.

e. Pengembangan industri pertanian (*agro industry*).

2. Kota pariwisata dengan pengembangan kegiatan sebagai:

a. Pengembangan kawasan wisata yang berbasis pada alam dengan dilengkapi fasilitas dan prasarana wisata yang memadai.

b. Pengembangan wisata budaya hasil peninggalan bersejarah, atraksi kesenian tradisional, dan industri kerajinan rakyat.

c. Pengembangan usaha jasa wisata di kawasan wisata dan di pusat pelayanan wisata yang ada di kawasan pusat kota.

d. Pengembangan promosi wisata melalui media cetak maupun elektronik dan pengembangan kalender even wisata.

- e. Pengembangan pariwisata Kota Batu diarahkan pada kawasan wisata dengan didukung usaha sarana wisata yang disesuaikan dengan kondisi fisik dan permukiman penduduk yang ada di dalam kawasan wisata tersebut.

Rencana pola struktur pusat pelayanan Kota Batu diarahkan membentuk pola radial yang memusat ke pusat Kota Batu dan menyebar pada pusat pelayanan pembantu baik dalam lingkup bagian wilayah kota maupun unit lingkungan. Adapun pusat pelayanan yang ada di Kota Batu ditetapkan sebagai berikut:

1. Pusat kota sebagai pusat pelayanan dengan skala pelayanan kota dan regional.
2. Pusat pelayanan bagian wilayah kota (BWK) sebagai pusat pelayanan pembantu dari pusat kota dengan kegiatan skala pelayanan tertentu untuk menghindari konsentrasi kegiatan di pusat kota.
3. Pusat pelayanan unit lingkungan (UL) sebagai pusat pelayanan pembantu dari pusat pelayanan bagian wilayah kota (BWK) dengan kegiatan skala pelayanan terbatas pada kawasan permukiman tertentu.

Bagian wilayah kota dan unit lingkungan di Kota Batu dibagi atas:

1. BWK I sebagai pusat kota sekaligus pusat BWK kawasan pusat kota dengan pusat pelayanan berada di sekitar Alun-alun dan jalan-jalan utama. Wilayah pelayanan BWK I seluas 4 002.61 ha. Sedangkan untuk unit lingkungan (UL) di BWK I berdasarkan batas administrasi desa, yaitu:
 - a. UL I (Kelurahan Sisir) dengan pusat pelayanan di Krajan.
 - b. UL II (Kelurahan Temas) dengan pusat pelayanan di Genengan.
 - c. UL III (Kelurahan Songgokerto) dengan pusat pelayanan di Songgoriti.
 - d. UL IV (Kelurahan Ngaglik) dengan pusat pelayanan di Ngaglik.
 - e. UL V (Desa Pesanggrahan) dengan pusat pelayanan di Srebet.
 - f. UL VI (Desa Oro-Oro Ombo) dengan pusat pelayanan di Oro-Oro Ombo.
2. BWK II dengan pusat pelayanan di Desa Junrejo. Wilayah pelayanan BWK II seluas 2 565.02 ha. Sedangkan untuk unit lingkungan (UL) di BWK II berdasarkan batas administrasi desa, yaitu:
 - a. UL I (Desa Junrejo) dengan pusat pelayanan di Junwatu merangkap pusat pelayanan BWK.
 - b. UL II (Desa Tlekung) dengan pusat pelayanan di Gangsiran Putuk.
 - c. UL III (Desa Dadaprejo) dengan pusat pelayanan di Areng-Areng.

- d. UL IV (Desa Mojorejo) dengan pusat pelayanan di Ngandat.
 - e. UL V (Desa Beji) dengan pusat pelayanan di Beji.
 - f. UL VI (Desa Torongrejo) dengan pusat pelayanan di Krajan.
 - g. UL VII (Desa Pendem) dengan pusat pelayanan di Pendem.
3. BWK III dengan pusat pelayanan di Desa Punten. Wilayah pelayanan BWK III seluas 2 484.40 ha. Sedangkan untuk unit lingkungan (UL) di BWK IV berdasarkan batas administrasi desa, yaitu:
 - a. UL I (Desa Punten) dengan pusat pelayanan di Punten merangkap pusat pelayanan BWK.
 - b. UL II (Desa Sidomulyo) dengan pusat pelayanan di Sidorembug.
 - c. UL III (Desa Bulukerto) dengan pusat pelayanan di Gemulo.
 - d. UL IV (Desa Gunungsari) dengan pusat pelayanan di Talangrejo.
 - e. UL V (Desa Sumberejo) dengan pusat pelayanan di Satrian.
 4. BWK IV dengan pusat pelayanan di Desa Giripurno. Wilayah pelayanan BWK IV seluas 2 453.54 ha. Sedangkan untuk unit lingkungan (UL) di BWK III berdasarkan batas administrasi desa, yaitu:
 - a. UL I (Desa Giripurno) dengan pusat pelayanan di Giripurno merangkap pusat pelayanan BWK.
 - b. UL II (Desa Bumiaji) dengan pusat pelayanan di Banaran.
 - c. UL III (Desa Pandanrejo) dengan pusat pelayanan di Kajar.
 5. BWK V dengan pusat pelayanan di Desa Tulungrejo. Wilayah pelayanan BWK V seluas 8 434.23 ha. Sedangkan untuk Unit Lingkungan (UL) di BWK V adalah:
 - a. UL I (Desa Tulungrejo bagian tengah) dengan pusat pelayanan di Junggo merangkap pusat pelayanan BWK.
 - b. UL II (Desa Tulungrejo utara) dengan pusat pelayanan di Sumber Brantas.
 - c. UL III (Desa Tulungrejo selatan) dengan pusat pelayanan di Gondang.
 - d. UL IV (Desa Sumbergondo) dengan pusat pelayanan di Tegalsari. Untuk lebih jelasnya rencana struktur pusat pelayanan Kota Batu dapat dilihat pada Lampiran 5.

STRUKTUR KETERKAITAN ANTARSEKTOR

Langkah awal dalam analisis ini adalah menyusun tabel yang berisi keterangan-keterangan tentang bagaimana output suatu sektor terdistribusi ke sektor-sektor lainnya sebagai input dan ke pemakai akhir sebagai barang konsumsi. Dalam tesis ini, analisis keterkaitan antarsektor akan menggunakan tabel Input-Output 16 X 16 sektor yang disajikan dalam Lampiran 6.

Struktur Output

Output merupakan nilai produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi di Kota Batu. Oleh karena itu, dengan menelaah besaran output yang diciptakan masing-masing sektor, berarti akan diketahui pula sektor-sektor mana yang mampu memberikan sumbangan yang besar dalam membentuk output secara keseluruhan di Kota Batu. Tabel 19 di bawah ini menunjukkan sektor berdasarkan nilai output di Kota Batu tahun 2003.

Tabel 19 Sektor berdasarkan nilai output di Kota Batu tahun 2003

Sektor	Nilai Output (Juta Rp)	Kontribusi (%)
Industri pengolahan	451 046	31.14
Perdagangan	349 997	24.16
Pertanian bahan makanan	164 724	11.37
Peternakan	93 750	6.47
Jasa-jasa	83 205	5.74
Hotel	81 307	5.61
Angkutan dan komunikasi	48 546	3.35
Lembaga keuangan	41 934	2.89
Pemerintahan umum	40 189	2.77
Restoran	28 577	1.97
Listrik dan air bersih	26 587	1.84
Bangunan	24 669	1.70
Kehutanan	8 447	0.58
Penggalian	2 549	0.18
Perkebunan	2 360	0.16
Perikanan	634	0.04
Jumlah	1 448 521	100

Sumber: BPS Jawa Timur (2000), BPS Kota Batu (2004a), dan diolah sendiri.

Dari Tabel 19 di atas, terlihat bahwa sektor industri pengolahan, perdagangan, pertanian bahan makanan, peternakan, jasa, dan hotel memberikan kontribusi masing-masing sebesar 31.14%, 24.16%, 11.37%, 6.47%, 5.74%, dan 5.74%. Dengan demikian, apabila dilihat dari segi outputnya, keenam sektor tersebut merupakan *leading sector* yang perlu mendapatkan perhatian dalam pengembangan perekonomian wilayah Kota Batu.

Struktur Nilai Tambah Bruto

Nilai tambah bruto (NTB) merupakan balas jasa terhadap faktor produksi yang tercipta dari aktivitas produksi dalam perekonomian wilayah. Dalam tabel Input-Output, nilai tambah ini dirinci menurut upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan, dan pajak tak langsung neto. Besarnya nilai tambah masing-masing sektor ditentukan oleh besarnya output yang dihasilkan dan jumlah biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi. Oleh sebab itu, suatu sektor yang memiliki output yang besar belum tentu memiliki nilai tambah yang besar juga karena harus ditentukan oleh seberapa besar biaya produksi yang dipergunakannya. Tabel 20 di bawah ini menunjukkan urutan sektor berdasarkan nilai tambah bruto.

Tabel 20 Sektor berdasarkan nilai tambah bruto di Kota Batu tahun 2003

Sektor	NTB (Juta Rp)	Kontribusi (%)
Perdagangan	262 345	37.9
Industri pengolahan	86 114	12.4
Pertanian bahan makanan	75 127	10.8
Jasa-jasa	57 016	8.2
Pemerintahan umum	40 189	5.8
Hotel	37 843	5.5
Lembaga keuangan	33 910	4.9
Angkutan dan komunikasi	32 607	4.7
Peternakan	23 730	3.4
Listrik dan air bersih	14 602	2.1
Bangunan	12 532	1.8
Restoran	11 545	1.7
Penggalian	2 235	0.3
Perkebunan	1 355	0.2
Kehutanan	1 345	0.2
Perikanan	307	0.0
Jumlah	692 804	100

Sumber: BPS Jawa Timur (2000), BPS Kota Batu (2004a), dan diolah sendiri.

Dari Tabel 20 di atas terlihat bahwa sektor perdagangan merupakan sektor terbesar dalam penciptaan nilai tambah, yaitu mencapai 262 345 juta rupiah atau mempunyai kontribusi sebesar 37.9%. Sektor berikutnya yang memberikan nilai tambah terbesar adalah sektor industri pengolahan dengan nilai mencapai 86 114 juta rupiah atau mempunyai kontribusi sebesar 12.4%. Kemudian diikuti sektor pertanian bahan makanan dengan nilai 75 127 juta rupiah mempunyai kontribusi sebesar 10.8%. Sektor berikut yang termasuk sektor penyumbang nilai tambah terbesar adalah sektor: jasa, pemerintahan umum, dan hotel yang masing-masing memberikan kontribusi sebesar 8.2%, 5.8%, dan 5.5%.

Derajat Kepekaan (Keterkaitan ke Depan)

Dengan model Input-Output, dapat diidentifikasi sektor-sektor yang mampu mendorong pertumbuhan sektor-sektor lain dengan cepat atau sering dikenal dengan istilah sektor unggulan. Proses identifikasi tersebut menggunakan analisis keterkaitan antarsektor (*interindustrial linkages analysis*). Keterkaitan tersebut berupa keterkaitan ke depan (*forward linkages*) maupun keterkaitan ke belakang (*backward analysis*). Dalam hal ini, sektor unggulan diartikan sebagai sektor yang mempunyai tingkat keterkaitan ke depan dan ke belakang yang tinggi. Disebut sektor unggulan karena sektor tersebut mampu mendorong pertumbuhan atau perkembangan bagi sektor-sektor lainnya, baik sektor yang menyuplai inputnya maupun sektor yang memanfaatkan output sektor unggulan tersebut sebagai input dalam proses produksinya.

Keterkaitan ke depan (*forward linkages*) suatu sektor menunjukkan keberadaan sektor tersebut sebagai pemasok input bagi sektor-sektor lain di Kota Batu. Semakin tinggi keterkaitan ke depan berarti bahwa sektor tersebut dibutuhkan sebagai pemasok input oleh sektor lain. Keterkaitan ke depan menghitung total output yang tercipta akibat meningkatnya output suatu sektor melalui mekanisme distribusi output dalam perekonomian. Jika terjadi kenaikan output produksi suatu sektor misalnya pertanian bahan makanan, maka tambahan output tersebut akan didistribusikan ke sektor-sektor produksi di perekonomian tersebut, termasuk ke sektor pertanian bahan makanan itu sendiri. Selanjutnya peningkatan tidak hanya berhenti di situ saja. Ada pula efek lanjutan dari

peningkatan output yang langsung tadi, yaitu efek tidak langsung dari keterkaitan ke depan. Tabel 21 di bawah ini menunjukkan besarnya keterkaitan ke depan langsung dan tidak langsung untuk masing-masing sektor.

Tabel 21 Derajat kepekaan (keterkaitan ke depan)

Forward Linkages:	Direct Forward Linkage	Direct & Indirect Forward Linkage	Standardized Direct Forward Linkage	Standardized Direct & Indirect Forward Linkage
Industri pengolahan	0.64	1.80	4.45	1.53
Peternakan	0.42	1.49	2.87	1.27
Perdagangan	0.30	1.37	2.07	1.17
Angkutan dan komunikasi	0.27	1.33	1.88	1.13
Listrik dan air bersih	0.17	1.21	1.20	1.03
Pertanian	0.15	1.16	1.04	0.99
Lembaga keuangan	0.13	1.16	0.89	0.98
Jasa-jasa	0.10	1.11	0.66	0.95
Hotel	0.08	1.09	0.54	0.93
Restoran	0.03	1.04	0.21	0.88
Penggalian	0.01	1.02	0.09	0.87
Kehutanan	0.01	1.01	0.07	0.86
Perkebunan	0.00	1.01	0.03	0.86
Perikanan	0.00	1.00	0.01	0.85
Bangunan	0.00	1.00	0.00	0.85
Pemerintahan umum	0.00	1.00	0.00	0.85
Rata-rata	0.14	1.17	1.00	1.00

Sumber: BPS Jawa Timur (2000), BPS Kota Batu (2004a), dan diolah sendiri.

Sektor industri pengolahan memiliki keterkaitan ke depan langsung dan tidak langsung paling tinggi, yang kemudian diikuti sektor peternakan, perdagangan, angkutan dan komunikasi, listrik dan air bersih, pertanian bahan makanan, lembaga keuangan, jasa-jasa, hotel, restoran, penggalian, kehutanan, perkebunan, perikanan, bangunan, dan pemerintahan umum.

Angka rata-rata keterkaitan langsung ke depan adalah 0.14 yang berarti rata-rata 14% dari output kegiatan produksi yang ada di Kota Batu tersalurkan ke dalam kegiatan produksi itu sendiri (sebagai permintaan antara). Sedangkan sisanya 86%, tersalurkan untuk permintaan akhir. Dari angka ini jelas bahwa sebagian besar kegiatan produksi di Kota Batu adalah untuk produksi barang akhir dan sebagian kecil saja yang memproduksi barang antara. Kendati demikian, ada

pula sektor yang memiliki keterkaitan ke depan langsung lebih dari 50%, yaitu sektor industri pengolahan yang memiliki keterkaitan ke depan langsung sebesar 0.64. Ini berarti bahwa sektor ini lebih banyak memasok outputnya untuk kegiatan produksi daripada permintaan akhir.

Dari Tabel 21 di atas terlihat bahwa sektor industri pengolahan memiliki keterkaitan langsung dan tidak langsung ke depan sebesar 1.80. Hal ini berarti bahwa jika kenaikan permintaan produksi sektor industri pengolahan sebesar Rp1 menyebabkan kenaikan output produksi sektor-sektor yang menggunakan produk dari sektor industri pengolahan. Total kenaikan tersebut adalah Rp1.80. Angka-angka dalam Tabel 21 dapat diinterpretasikan seperti di atas.

Daya Penyebaran (Keterkaitan ke Belakang)

Keterkaitan ke belakang (*backward linkages*) suatu sektor menunjukkan keberadaan sektor tersebut sebagai pengguna output sektor lain. Semakin tinggi keterkaitan ke belakang berarti bahwa sektor tersebut dibutuhkan sebagai pengguna output sektor lain. Adanya peningkatan output suatu sektor tertentu akan mendorong peningkatan output sektor-sektor lainnya. Peningkatan output sektor-sektor lainnya tersebut dapat terlaksana melalui 2 cara, yaitu: pertama, misalnya peningkatan output sektor pertanian bahan makanan akan meningkatkan permintaan input sektor pertanian bahan makanan tersebut. Kedua, input sektor pertanian bahan makanan tadi ada yang berasal dari sektor pertanian bahan makanan itu sendiri misalnya berupa benih padi, ada pula yang berasal dari sektor lain misalnya industri pupuk. Oleh karenanya, sektor pertanian bahan makanan akan meminta output pupuk lebih banyak dari sebelumnya. Berarti harus ada peningkatan output industri pupuk. Peningkatan output industri pupuk ini pada gilirannya akan meningkatkan permintaan input sektor industri pupuk tersebut, yang berarti harus ada peningkatan output sektor-sektor lainnya. Begitu seterusnya, terjadi keterkaitan antarsektor tersebut. Keterkaitan antarsektor yang seperti itu disebut keterkaitan ke belakang karena keterkaitannya bersumber dari mekanisme penggunaan input produksi.

Tabel 22 di bawah ini menunjukkan besarnya keterkaitan ke belakang langsung dan tidak langsung untuk masing-masing sektor. Sektor Restoran

memiliki keterkaitan ke belakang langsung dan tidak langsung paling tinggi, yang kemudian diikuti sektor bangunan, hotel, industri pengolahan, listrik dan air bersih, lembaga keuangan, jasa-jasa, perdagangan, peternakan, pertanian bahan makanan, penggalian, perkebunan, angkutan dan komunikasi, perikanan, kehutanan, dan pemerintahan umum.

Tabel 22 Daya penyebaran (keterkaitan ke belakang)

Backward Linkages	Direct Backward Linkage (DBL)	Direct & Indirect Backward Linkage (DIBL)	Standardized DBL (SDBL)	Standardized DIBL (SDIBL)
Restoran	0.39	1.44	2.72	1.23
Bangunan	0.33	1.42	2.31	1.21
Hotel	0.32	1.37	2.23	1.17
Industri pengolahan	0.28	1.35	1.95	1.15
Listrik dan air bersih	0.25	1.31	1.76	1.12
Lembaga keuangan	0.14	1.18	0.97	1.00
Jasa-jasa	0.14	1.17	0.95	1.00
Perdagangan	0.13	1.16	0.89	0.98
Peternakan	0.08	1.09	0.53	0.93
Pertanian bahan makanan	0.06	1.08	0.44	0.92
Penggalian	0.05	1.06	0.36	0.91
Perkebunan	0.05	1.06	0.34	0.90
Angkutan dan komunikasi	0.04	1.05	0.29	0.89
Perikanan	0.03	1.04	0.20	0.88
Kehutanan	0.01	1.01	0.07	0.86
Pemerintahan	0.00	1.00	0.00	0.85
Rata-Rata	0.14	1.17	1.00	1.00

Sumber: BPS Jawa Timur (2000), BPS Kota Batu (2004a), dan diolah sendiri.

Angka rata-rata keterkaitan langsung ke belakang adalah 0.14 yang berarti kegiatan produksi yang ada di Kota Batu mendapatkan input dari kegiatan produksi Kota Batu sendiri sebesar 14%. Sedangkan sisanya sebesar 86% berasal dari impor dan input primer (upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan, dan pajak tak langsung). Sektor restoran memiliki keterkaitan ke belakang langsung tertinggi, yaitu sebesar 0.39. Ini berarti bahwa input sektor restoran sebesar 39% berasal dari kegiatan input antara. Kenaikan kegiatan pada sektor ini akan menaikkan pula kegiatan pada sektor-sektor yang lain sesuai besarnya daya serap sektor restoran, yaitu 39%.

Sektor restoran memiliki keterkaitan langsung dan tidak langsung sebesar 1.44. Ini berarti bahwa jika kenaikan permintaan akhir sektor restoran sebesar Rp1 menyebabkan peningkatan output total sebesar Rp1.44 melalui peningkatan penggunaan input sektor ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Angka Pengganda Output

Adanya peningkatan permintaan akhir pada suatu sektor akan meningkatkan output sektor itu sendiri dan sektor-sektor lain dalam perekonomian. Peningkatan output sektor-sektor lain ini tercipta akibat adanya efek langsung dan tidak langsung dari peningkatan permintaan akhir. Besarnya kelipatan perubahan output regional sebagai akibat dari perubahan permintaan akhir suatu sektor dikenal dengan istilah angka pengganda output. Angka pengganda output adalah nilai total dari output yang dihasilkan oleh perekonomian untuk memenuhi atau akibat adanya perubahan satu unit uang permintaan akhir sektor tersebut.

Tabel 23 Angka pengganda output Kota Batu tahun 2003

Sektor	Pengganda Output	Standarisasi
Restoran	1.44	1.00
Bangunan	1.42	0.97
Hotel	1.37	0.84
Industri pengolahan	1.35	0.79
Listrik dan air bersih	1.31	0.71
Lembaga keuangan	1.18	0.41
Jasa-jasa	1.17	0.39
Perdagangan	1.16	0.35
Peternakan	1.09	0.21
Pertanian bahan makanan	1.08	0.17
Penggalian	1.06	0.14
Perkebunan	1.06	0.14
Angkutan dan komunikasi	1.05	0.11
Perikanan	1.04	0.08
Kehutanan	1.01	0.03
Pemerintahan umum	1.00	0.00
Rata-rata	1.17	0.40

Sumber: BPS Jawa Timur (2000), BPS Kota Batu (2004a), dan diolah sendiri.

Dari Tabel 23 di atas terlihat bahwa rata-rata angka pengganda output adalah sebesar 1.17. Ini berarti bahwa kenaikan permintaan akhir Rp1 pada sektor ini akan menyebabkan kenaikan output total perekonomian sebesar Rp1.17.

Semakin tinggi angka pengganda output suatu sektor berarti sektor tersebut semakin memiliki peran yang penting dalam penciptaan output perekonomian.

Untuk Kota Batu, sektor restoran mempunyai angka pengganda output yang tertinggi, yaitu 1.44 yang berarti bahwa setiap kenaikan Rp1 permintaan akhir akan menyebabkan total output perekonomian naik sebesar $1.44 \times \text{Rp1} = \text{Rp1.44}$. Kemudian diikuti sektor bangunan, hotel, industri pengolahan, listrik dan air bersih, dan lembaga keuangan yang masing-masing mempunyai angka pengganda output sebesar 1.42, 1.37, 1.35, 1.31, dan 1.18.

Angka Pengganda Pendapatan

Peningkatan permintaan akhir suatu sektor juga akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Besarnya pelipatgandaan peningkatan ini dapat dilihat dari angka pengganda pendapatan. Angka pengganda pendapatan rumah tangga suatu sektor menunjukkan jumlah pendapatan rumah tangga total yang tercipta akibat adanya tambahan permintaan akhir Rp1 pada sektor tersebut. Angka pengganda pendapatan rumah tangga ini diterjemahkan sebagai peningkatan permintaan akhir dalam bentuk pendapatan rumah tangga.

Jika terdapat perubahan permintaan akhir, terjadi pula perubahan output yang diproduksi oleh setiap sektor produksi yang terkait di perekonomian, Hal ini ditunjukkan oleh angka pengganda output. Perubahan jumlah output yang diproduksi tersebut tentunya akan pula mengubah permintaan tenaga kerja yang dibutuhkan. Karena balas tenaga kerja tersebut merupakan sumber pendapatan rumah tangga (upah), maka perubahan permintaan tenaga kerja akan mempengaruhi pendapatan rumah tangga. Hubungan antara total output setiap sektor dengan balas jasa tenaga kerja tersebut ditunjukkan dengan komponen upah dan gaji di matriks input primer. Biasanya hal ini disebut dengan koefisien upah dan gaji yang besarnya adalah rasio antara nilai upah dan gaji dengan total inputnya.

Dari Tabel 24 di bawah terlihat bahwa rata-rata angka pengganda pendapatan adalah sebesar 1.16. Ini berarti bahwa kenaikan permintaan akhir Rp1 pada sektor ini akan menyebabkan kenaikan pendapatan sebesar Rp1.16. Di Kota Batu, sektor restoran mempunyai angka pengganda pendapatan yang tertinggi,

yaitu 1.57 yang berarti bahwa apabila terdapat kenaikan Rp1 permintaan akhir akan menyebabkan kenaikan pendapatan rumah tangga keseluruhan sebesar $1.57 \times \text{Rp}1 = \text{Rp}1.57$. Sektor industri pengolahan mempunyai angka pengganda pendapatan terbesar kedua sebesar 1.56 kemudian diikuti sektor hotel, listrik dan air bersih serta sektor bangunan yang masing-masing mempunyai angka pengganda pendapatan sebesar 1.31, 1.29, dan 1.19.

Tabel 24 Angka pengganda pendapatan Kota Batu tahun 2003

Sektor	Pengganda Pendapatan	Standarisasi
Restoran	1.57	1.00
Industri pengolahan	1.56	0.98
Hotel	1.31	0.55
Listrik dan air bersih	1.29	0.51
Bangunan	1.19	0.34
Lembaga keuangan	1.14	0.24
Perdagangan	1.13	0.22
Jasa-jasa	1.12	0.21
Peternakan	1.11	0.20
Angkutan dan komunikasi	1.05	0.09
Pertanian bahan makanan	1.05	0.08
Perkebunan	1.03	0.05
Penggalian	1.03	0.05
Perikanan	1.02	0.03
Kehutanan	1.02	0.03
Pemerintahan umum	1.00	0.00
Rata-rata	1,16	0.29

Sumber: BPS Jawa Timur (2000), BPS Kota Batu (2004a), dan diolah sendiri.

Angka Pengganda Tenaga Kerja

Efek lain dari adanya peningkatan permintaan akhir adalah perubahan kesempatan kerja sebagai akibat adanya peningkatan produksi. Besarnya efek tersebut dapat diperhitungkan dari angka pengganda kesempatan kerja. Angka pengganda kesempatan kerja merupakan efek total dari perubahan lapangan pekerjaan di perekonomian akibat adanya Rp1 perubahan permintaan akhir suatu sektor. Untuk dapat menangkap efek dari satu unit perubahan permintaan akhir di suatu sektor produksi terhadap perubahan lapangan pekerjaan di seluruh perekonomian, diperlukan jumlah lapangan pekerjaan awal, atau jumlah tenaga kerja awal pada masing-masing sektor produksi yang memang telah digunakan untuk melakukan proses produksi selama ini. Data tersebut digunakan untuk

menghitung berapa kontribusi setiap pekerja, secara rata-rata, dalam memproduksi output sektornya masing-masing. Tabel 25 di bawah ini menunjukkan angka pengganda tenaga kerja Kota Batu tahun 2003.

Tabel 25 Angka pengganda tenaga kerja Kota Batu tahun 2003

Sektor	Pengganda Tenaga Kerja	Standarisasi
Industri pengolahan	2.88	1.00
Perdagangan	1.70	0.37
Hotel	1.31	0.16
Restoran	1.26	0.14
Listrik dan air bersih	1.25	0.13
Peternakan	1.16	0.09
Lembaga keuangan	1.14	0.07
Bangunan	1.13	0.07
Jasa-jasa	1.05	0.03
Pertanian bahan makanan	1.03	0.02
Angkutan dan komunikasi	1.03	0.02
Perikanan	1.02	0.01
Perkebunan	1.01	0.00
Penggalian	1.00	0.00
Kehutanan	1.00	0.00
Pemerintahan umum	1.00	0.00
Rata-rata	1.25	0.13

Sumber: BPS Jawa Timur (2000), BPS Kota Batu (2004a), dan diolah sendiri.

Dari Tabel 25 di atas terlihat bahwa rata-rata angka pengganda tenaga kerja adalah sebesar 1.25. Jika terjadi kenaikan permintaan akhir Rp1 pada sektor ini akan menyebabkan kenaikan kesempatan kerja sebesar Rp1.25. Di Kota Batu, sektor industri mempunyai angka pengganda tenaga kerja yang tertinggi, yaitu 2.88 yang berarti bahwa apabila terdapat kenaikan Rp1 permintaan akhir akan meningkat kesempatan kerja sebesar $2.88 \times \text{Rp}1 = \text{Rp}2.88$. Sektor perdagangan mempunyai angka pengganda pendapatan terbesar kedua sebesar 1.7, kemudian diikuti sektor hotel dan restoran, yang masing-masing mempunyai angka pengganda tenaga kerja sebesar 1.31 dan 1.26.

Angka Pengganda Pajak Tak Langsung Neto

Dari Tabel 26 di bawah terlihat bahwa rata-rata angka pengganda pajak tak langsung neto adalah sebesar 1.41. Jika terjadi kenaikan permintaan akhir Rp1 pada sektor ini akan menyebabkan kenaikan kesempatan kerja sebesar Rp1.41. Di

Kota Batu, sektor bangunan mempunyai angka pengganda pajak tak langsung neto yang tertinggi, yaitu 3.55 yang berarti bahwa jika terdapat kenaikan Rp1 permintaan akhir menyebabkan pajak tak langsung neto akan meningkat sebesar $3.55 \times \text{Rp}1 = \text{Rp}3.55$. Sektor pertanian bahan makanan mempunyai angka pengganda pajak tak langsung neto terbesar kedua sebesar 1.60 kemudian diikuti sektor jasa, industri, dan perikanan yang masing-masing mempunyai angka pengganda pajak tak langsung neto sebesar 1.53, 1.44, dan 1.41.

Tabel 26 Angka pengganda pajak tak langsung Neto Kota Batu tahun 2003

Sektor	Angka Pengganda
Bangunan	3.55
Pertanian bahan makanan	1.60
Jasa-jasa	1.53
Industri pengolahan	1.44
Perikanan	1.41
Lembaga keuangan	1.35
Penggalian	1.29
Restoran	1.22
Listrik dan air bersih	1.20
Hotel	1.16
Peternakan	1.15
Perdagangan	1.09
Angkutan dan komunikasi	1.07
Kehutanan	1.03
Perkebunan	1.03
Rata-rata	1.41

Sumber: BPS Jawa Timur (2000), BPS Kota Batu (2004a), dan diolah sendiri.

Angka Pengganda Nilai Tambah Total

Dari Tabel 27 di bawah ini terlihat bahwa rata-rata angka pengganda nilai tambah total adalah sebesar 1.18. Ini berarti bahwa kenaikan permintaan akhir Rp1 pada sektor ini akan menyebabkan kenaikan nilai tambah total sebesar Rp1.18. Di Kota Batu, sektor industri pengolahan mempunyai angka pengganda nilai tambah total yang tertinggi, yaitu 1.72, yang berarti bahwa apabila terdapat kenaikan Rp1 permintaan akhir menyebabkan nilai tambah total akan meningkat sebesar $1.72 \times \text{Rp}1 = \text{Rp}1.72$. Sektor restoran mempunyai angka pengganda nilai tambah total terbesar kedua sebesar 1.45 kemudian diikuti bangunan, listrik dan

air bersih, dan hotel yang masing-masing mempunyai angka pengganda tenaga kerja sebesar 1.33, 1.32, dan 1.31.

Tabel 27 Angka pengganda nilai tambah total Kota Batu tahun 2003

Sektor	Pengganda Nilai Tambah Total
Industri pengolahan	1.72
Restoran	1.45
Bangunan	1.33
Listrik dan air bersih	1.32
Hotel	1.31
Jasa-jasa	1.13
Perdagangan	1.12
Peternakan	1.11
Lembaga keuangan	1.11
Pertanian bahan makanan	1.07
Angkutan dan komunikasi	1.05
Perkebunan	1.04
Kehutanan	1.04
Penggalian	1.03
Perikanan	1.03
Pemerintahan umum	1.00
Rata-rata	1.18

Sumber: BPS Jawa Timur (2000), BPS Kota Batu (2004a), dan diolah sendiri.

Tabel 28 di bawah ini merangkum sektor-sektor yang memiliki derajat kepekaan, daya penyebaran, angka pengganda output, angka pengganda tenaga kerja, angka pengganda pendapatan, dan angka pengganda pajak tak langsung sebagai hasil analisis Input-Output Kota Batu tahun 2003.

Tabel 28 Rangkuman Analisis Input-Output Kota Batu tahun 2003

Ranking	Derajat Kepekaan	Daya Penyebaran	Angka Pengganda			
			Output	Tenaga Kerja	Pendapatan	Pajak Tak Langsung Neto
1	Industri pengolahan	Restoran	Restoran	Industri pengolahan	Restoran	Bangunan
2	Peternakan	Bangunan	Bangunan	Perdagangan	Industri pengolahan	Pertanian bahan makanan
3	Perdagangan	Hotel	Hotel	Hotel	Hotel	Lembaga keuangan
4	Angkutan dan komunikasi	Industri pengolahan	Industri pengolahan	Restoran	Listrik dan air bersih	Industri pengolahan
5	Listrik dan air bersih	Listrik dan air bersih	Listrik dan air bersih	Listrik dan air bersih	Bangunan	Perikanan
6	Pertanian bahan makanan	Lembaga keuangan	Lembaga keuangan	Peternakan	Lembaga keuangan	Jasa-jasa
7	Lembaga keuangan	Jasa-jasa	Jasa-jasa	Lembaga keuangan	Perdagangan	Penggalian
8	Jasa-jasa	Perdagangan	Perdagangan	Bangunan	Jasa-jasa	Restoran
9	Hotel	Peternakan	Peternakan	Jasa-jasa	Peternakan	Listrik dan air bersih
10	Restoran	Pertanian bahan makanan	Pertanian bahan makanan	Pertanian bahan makanan	Lembaga keuangan	Hotel
11	Penggalian	Penggalian	Penggalian	Angkutan dan komunikasi	Pertanian bahan makanan	Peternakan
12	Kehutanan	Perkebunan	Perkebunan	Perikanan	Perkebunan	Perdagangan
13	Perkebunan	Angkutan dan komunikasi	Lembaga keuangan	Perkebunan	Penggalian	Lembaga keuangan
14	Perikanan	Perikanan	Perikanan	Penggalian	Perikanan	Kehutanan
15	Bangunan	Kehutanan	Kehutanan	Kehutanan	Kehutanan	Perkebunan
16	Pemerintahan umum	Pemerintahan umum	Pemerintahan umum	Pemerintahan umum	Pemerintahan umum	Pemerintahan umum

Sumber: Diolah sendiri.

Kontribusi Sektor dalam PDRB

Pada dasarnya setiap sektor mempunyai andil dalam proses dan pelaksanaan pembangunan di Kota Batu. Dalam Tabel 29 di bawah ini tersaji kontribusi masing-masing sektor dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Batu tahun 2003 atas dasar harga berlaku dan harga konstan sebagai berikut:

Tabel 29 Kontribusi masing-masing sektor dalam PDRB Kota Batu tahun 2003 atas dasar harga berlaku dan konstan (juta rupiah)

Sektor	Harga Berlaku	Kontribusi (%)	Harga Konstan 1993	Kontribusi (%)	Urutan
Pertanian bahan makanan	75 126.95	10.84	25 027.00	12.11	3
Perkebunan	1 354.87	0.20	448.32	0.22	14
Peternakan	23 729.84	3.43	5 016.57	2.43	9
Kehutanan	1 344.97	0.19	332.03	0.16	15
Perikanan	307.14	0.04	61.96	0.03	16
Penggalian	2 235.44	0.32	496.11	0.24	13
Industri pengolahan	86 114.20	12.43	23 446.76	11.34	2
Listrik dan air bersih	14 602.43	2.11	5 195.78	2.51	10
Bangunan	12 532.13	1.81	3 491.17	1.69	11
Perdagangan	262 345.07	37.87	73 483.48	35.54	1
Hotel	37 843.38	5.46	13 803.53	6.68	6
Restoran	11 544.83	1.67	3 491.45	1.69	12
Angkutan dan komunikasi	32 607.34	4.71	12 458.53	6.03	8
Lembaga keuangan	33 910.08	4.89	11 236.23	5.43	7
Pemerintahan umum	40 189.07	5.80	11 760.99	5.69	5
Jasa-jasa	57 015.85	8.23	16 990.08	8.22	4
Jumlah	692 803.59	100	206 739.99	100	

Sumber: BPS Kota Batu (2004a) dan diolah sendiri.

Dari tabel 29 di atas terlihat bahwa sektor perdagangan merupakan sektor yang paling besar memberikan kontribusi dalam PDRB, yaitu sebesar 37.87% atas dasar harga berlaku dan sebesar 35.54% atas dasar harga konstan tahun 1993. Kemudian diikuti oleh sektor industri pengolahan, pertanian bahan makanan, jasa-jasa, hotel, angkutan dan komunikasi, dan lembaga keuangan.

Penentuan Sektor Unggulan

Sektor unggulan di Kota Batu ditentukan berdasarkan hasil perhitungan Input-Output Kota Batu tahun 2003 dan Analisis Komponen Utama (Principal Component Analysis, PCA). Faktor-faktor yang digunakan sebagai pertimbangan

mengurangi tingkat pengangguran baik secara lokal, regional, maupun nasional. Di samping itu, pengembangan sektor-sektor unggulan diharapkan mampu mengembangkan dan memperkuat institusi atau kelembagaan khususnya kelembagaan masyarakat pedesaan di Kota Batu.

Di samping aspek-aspek ekonomi tersebut di atas maka pemilihan sektor-sektor unggulan di Kota Batu secara kualitatif juga mempertimbangkan beberapa aspek lain seperti aspek sosial, kelembagaan, dan keberlanjutan. Keberlanjutan selain sebagai salah satu aspek yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan sektor unggulan juga harus mendapatkan perhatian serius dalam mengembangkan sektor unggulan. Keberlanjutan usaha-usaha ekonomi sektor unggulan harus diiringi dengan pengelolaan pembangunan keseluruhan secara arif dan bijaksana dengan memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga dalam pelaksanaannya tetap berpedoman pada paradigma pembangunan berkelanjutan.

Berikut ini disajikan hasil Analisis Komponen Utama sebagai berikut:

1. Eigenvalue

Eigenvalue dalam analisis ini ditunjukkan dalam Tabel 30 di bawah ini:

Tabel 30 Eigenvalue

Value	Eigenvalue	Persentase Total Variance	Cumulative Eigenvalue	Cumulative Persentase
Faktor 1	3.63	60.44	5.379214	59.76905
Faktor 2	1.50	25.05	6.695485	74.39428

Sumber: Diolah sendiri.

Dari tabel di atas dapat diinterpretasikan bahwa:

- Faktor 1 mempunyai eigenvalue 3.63 sedangkan Faktor 2 mempunyai eigenvalue 1.50 sehingga kedua faktor tersebut memiliki kandungan informasi setara dengan informasi yang ada dalam satu variabel asal.
- Perbedaan eigenvalue antar dua faktor tersebut begitu signifikan dimana $(\lambda_{\alpha} - \lambda_{(\alpha-1)}) > 1$, yaitu sebesar 2.13. Sehingga variabel-variabel dalam faktor 1 dan Faktor 2 memiliki perbedaan yang signifikan antara satu dengan lainnya.

2. *Communalities* dan *Factor Loading*

Nilai *Communalities* dan *Factor Loading* dalam analisis ini ditunjukkan dalam Tabel 31 di bawah ini:

Tabel 31 *Communalities* dan *Factor Loading*

Variabel	<i>Communalities</i>			<i>Factor Loading</i>	
	From 1 Factors	From 2 Factors	Multiple R Square	Faktor 1	Faktor 2
SDIBL	0.14	0.93	0.92	0.373851	0.887272
SDIFL	0.77	0.81	0.72	0.879283	-0.200897
Pengganda Pendapatan	0.51	0.88	0.97	0.716430	0.603188
Pengganda Tenaga Kerja	0.86	0.88	0.89	0.927784	0.154831
Pengganda Pajak	0.08	0.65	0.77	-0.289892	0.752416
Pengganda NTB	0.56	0.98	0.98	0.750331	0.643542
Expl.Var				2.933992	2.195697
Prp.Totl				0.488999	0.365949

Sumber: Diolah sendiri.

Keterangan:

SDIBL = *Standardized Direct and Indirect Backward Linkages*

SDIFL = *Standardized Direct and Indirect Forward Linkages*

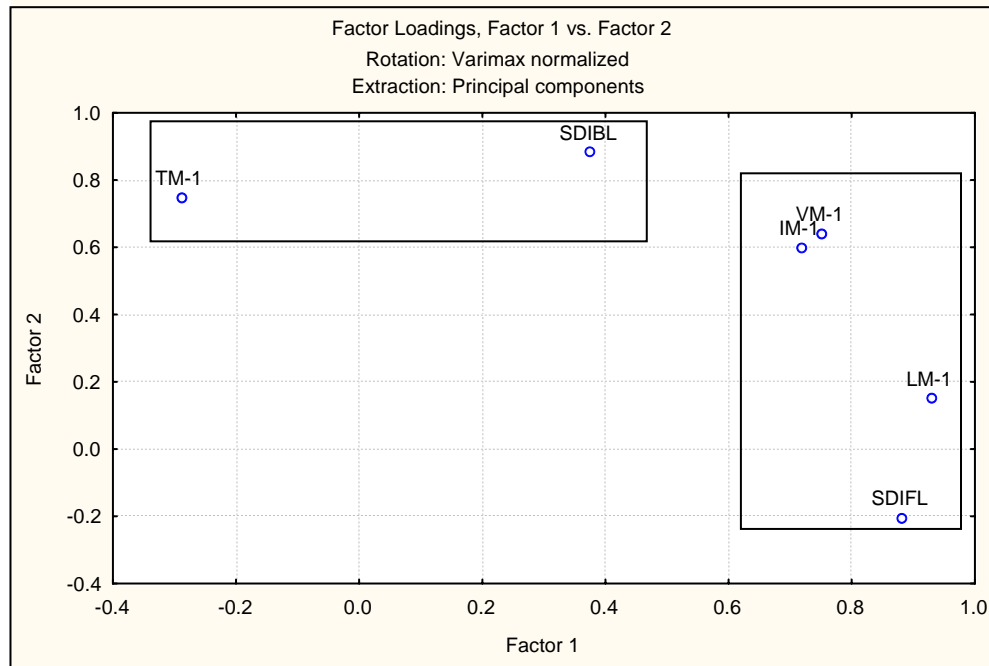
NTB = Nilai Tambah Bruto

Dari Tabel 31 di atas dapat diinterpretasikan bahwa:

- SDIFL, pengganda pendapatan, pengganda tenaga kerja, dan pengganda NTB mempunyai *communalities* yang tinggi mendekati 1. Sedangkan SDIBL dan pengganda pajak mempunyai *communalities* yang rendah.
- Di dalam faktor 1, variabel SDIFL, pengganda pendapatan, pengganda tenaga kerja, dan pengganda NTB mempunyai *factor loading* yang tinggi, yaitu di atas 0.7 sehingga faktor 1 dicirikan oleh variabel tersebut, sedangkan faktor 2 dicirikan oleh variabel SDIBL dan pengganda pajak.
- Variabel SDIFL, pengganda pendapatan, pengganda tenaga kerja, dan pengganda NTB dalam faktor 1 masing-masing mempunyai keterkaitan nyata dan positif.
- Antara variabel SDIFL, pengganda pendapatan, pengganda tenaga kerja, dan pengganda NTB dengan variabel SDIBL dan pengganda pajak dalam faktor 1 mempunyai keterkaitan nyata dan negatif.

Dari Gambar 8 di bawah terlihat jelas bahwa:

- Di dalam faktor 1, variabel SDIFL, pengganda pendapatan, pengganda tenaga kerja, dan pengganda NTB menggerombol dan sebagai penciri faktor 1.
- Di dalam faktor 2, variabel SDIBL dan pengganda pajak menggerombol dan sebagai penciri faktor 2.



Gambar 8 *Factor loading*, faktor 1 Vs faktor 2.

3. *Factor Score*

Factor score dalam analisis ini ditunjukkan dalam Tabel 32 di bawah ini:

Tabel 32 *Factor score*

Sektor	FS 1	FS 2
Pertanian bahan makanan	-0.51831	-0.35056
Perkebunan	-0.60949	-0.66884
Peternakan	0.43454	-0.93322
Kehutanan	-0.60565	-0.82550
Perikanan	-0.78290	-0.46884
Penggalian	-0.70978	-0.48801
Industri	3.05525	0.40451
Listrik dan air bersih	0.33616	0.42690
Bangunan	-1.16510	2.63533
Perdagangan	0.64426	-0.74141
Hotel	0.20145	0.69270
Restoran	0.42134	1.41883
Angkutan dan komunikasi	-0.03014	-1.03215
Lembaga keuangan	-0.22896	-0.13044
Jasa-jasa	-0.44267	0.06070

Sumber: Diolah sendiri.

4. Sektor unggulan

Sektor unggulan dalam analisis ini ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 33 Sektor unggulan

Sektor	Skor 1	Skor 2	Total	Rescalling	Basis SD	Nilai Akhir
Industri	1.75	0.17	1.92	1.00	1	1
Restoran	0.24	0.61	0.85	0.59	1	0.59
Bangunan	-0.67	1.13	0.46	0.44	1	0.44
Hotel	0.12	0.30	0.41	0.42	1	0.42
Listrik dan air bersih	0.19	0.18	0.38	0.41	1	0.41
Perdagangan	0.37	-0.32	0.05	0.29	1	0.29

Sumber: Diolah sendiri.

Ikhtisar

Dari uraian di atas, dapat disusun rangkuman sebagai berikut:

1. Dengan memanfaatkan matriks di bawah ini, dapat ditentukan sektor-sektor yang memiliki keterkaitan ke depan maupun ke belakang yang tinggi dan sektor yang hanya tinggi di salah satu keterkaitannya saja. Selain itu, dapat diketahui sektor-sektor yang memiliki keterkaitan ke depan dan ke belakang yang rendah. Rendahnya keterkaitan ke belakang atau ke depan tidak berarti bahwa sektor tersebut jelek, tetapi lebih menunjukkan rendahnya penggunaan output atau input dari sektor-sektor lain di Kota Batu. Kemungkinan sektor tersebut menggunakan input dari daerah lain atau menjual output ke daerah lain. Untuk Kota Batu, matriks tersebut ditunjukkan oleh Tabel 34 berikut:

Tabel 34 Matriks keterkaitan antarsektor

		Forward Linkages	
		Tinggi	Rendah
Backward Linkages	Tinggi	7. Industri pengolahan 8. Listrik dan air bersih	9. Bangunan 11. Hotel 12. Restoran 14. Lembaga keuangan
	Rendah	3. Peternakan 10. Perdagangan 13. Angkutan dan komunikasi	1. Pertanian bahan makanan 2. Perkebunan 4. Kehutanan 5. Perikanan 6. Penggalian 15. Pemerintahan umum 16. Jasa-jasa

Sumber: Diolah sendiri.

Dari Tabel 34 di atas terlihat bahwa hampir semua sektor pertanian mempunyai keterkaitan ke depan dan ke belakang yang rendah. Padahal jika dilihat dari struktur PDRB dan penyerapan tenaga kerja, sektor ini mempunyai kontribusi yang besar dalam PDRB dan dalam penyerapan tenaga kerja. Ini menunjukkan bahwa sektor pertanian di Kota Batu masih merupakan sektor yang subsisten dan hampir tidak ada keterkaitan dengan sektor lain khususnya industri. Hal ini disebabkan masih banyak komoditas pertanian yang diekspor ke luar daerah tanpa melalui proses pengolahan lebih lanjut di Kota Batu sehingga sejumlah nilai tambah tidak tercipta di wilayah Kota Batu. Selain itu, selama ini belum terjalin keterkaitan antara sektor pertanian dan sektor industri pengolahan di Kota Batu.

Kelembagaan dalam pengertian ; perilaku, aturan, dan organisasi panen dan pascapanen di tingkat petani belum berkembang. Pengetahuan dan kesadaran petani sebagai produsen dan juga sebagai salah satu pelaku pasar masih kurang. Pada umumnya mereka masih memperlakukan hasil produksinya secara apa adanya.

Lokasi usaha tani yang terpencar-pencar dengan luasan yang sempit serta jauh dari lokasi agroindustri yang mengolah, menyebabkan kurang terintegrasinya bahan baku dengan industri pengolah. Perusahaan agroindustri pada umumnya tidak mempunyai lahan budidaya sendiri, tetapi sangat tergantung kepada pasokan bahan baku dan petani sekitarnya. Keadaan ini menyebabkan kesulitan manajemen yang tinggi karena beragamnya masing-masing usaha dan lemahnya kemitraan akibat kurangnya pemahaman pihak petani dan pengusaha agroindustri dalam pengelolaan hasil yang baik.

Pemerintah Kota Batu harus membuat suatu kebijakan pembangunan pengembangan wilayah dengan mengembangkan sistem agropolitan yang diharapkan dapat memperkuat keterkaitan antara sektor pertanian dengan sektor lainnya khususnya sektor industri, perdagangan, dan pariwisata dengan mengembangkan program:

- a. Pengembangan kawasan agribisnis komoditas unggulan berdasarkan keunggulan komparatif yang terintegrasi dengan pembangunan pedesaan.

- b. Pengembangan kelembagaan petani komoditas yang mandiri sehingga mampu meningkatkan posisi tawar petani, petani dapat akses terhadap teknologi, modal, dan pasar.
 - c. Pengembangan inovasi teknologi agribisnis yang spesifik untuk meningkatkan keunggulan komparatif dan kompetitif komoditas pertanian Kota Batu.
 - d. Peningkatan nilai tambah pertanian melalui pengembangan agroindustri skala kecil maupun agrowisata.
 - e. Pengembangan dan penataan pasar agribisnis baik di pasar domestik maupun di pasar internasional.
 - f. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani melalui sekolah pertanian lapang.
 - g. Peningkatan layanan informasi teknologi, perkreditan, dan sarana produksi kepada petani seperti permodalan, sarana, dan prasarana pertanian
 - h. Perlindungan petani melalui peraturan pemerintah khususnya yang berkaitan harga output, harga input, maupun perdagangan internasional komoditas pertanian.
 - i. Pengembangan ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumberdaya lokal.
 - j. Pendayagunaan sumberdaya alam dan lingkungan.
2. Tabel 35 di bawah ini menyajikan matriks sektor yang dapat dikembangkan berdasarkan skenario kebijakan pembangunan pengembangan wilayah ekonomi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Batu.

Tabel 35 Matriks sektor yang dikembangkan berdasarkan skenario kebijakan pembangunan pengembangan wilayah Kota Batu

Skenario Peningkatan		
Pertumbuhan Ekonomi	Penyerapan Tenaga Kerja dan Pendapatan	Penerimaan Daerah dan Kontribusi PDRB
Sektor Industri	Sektor Industri	Sektor Industri
Sektor Restoran	Sektor Restoran	Sektor Bangunan
Sektor Bangunan	Sektor Hotel	Sektor Perdagangan
Sektor Hotel	Sektor Perdagangan	Sektor Pertanian
Sektor Perdagangan	Sektor Bangunan	Sektor Restoran

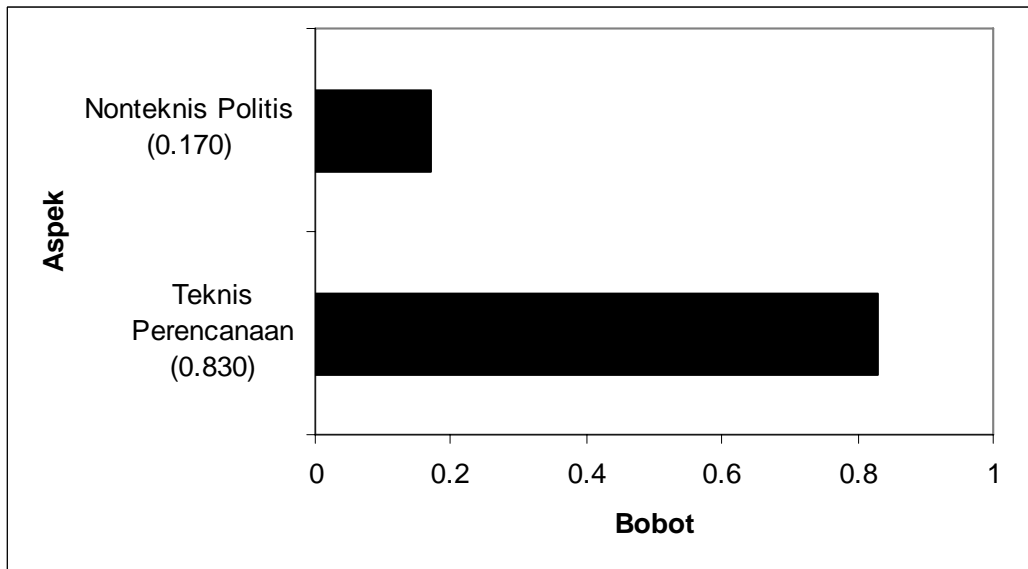
Sumber: Diolah sendiri.

3. Dari hasil analisis komponen utama (PCA) di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sektor unggulan yang ada di Kota Batu adalah industri, restoran, bangunan, hotel, listrik dan air bersih, serta perdagangan.
4. Sektor pertanian yang memiliki kontribusi cukup tinggi terhadap PDRB dan memiliki banyak tenaga kerja, ternyata bila dilihat dari indikator-indikator yang dianalisis tidak muncul sebagai sektor unggulan kecuali untuk indikator angka pengganda pajak tak langsung neto. Hal ini menunjukkan bahwa elastisitas sektor pertanian untuk meningkatkan penerimaan daerah dari pajak tak langsung neto cukup tinggi yang artinya bahwa dengan sedikit pengembangan sektor pertanian akan meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak. Apabila Pemerintah Kota Batu ingin meningkatkan penerimaan daerahnya, maka dapat dilakukan dengan mengembangkan sektor pertanian.
5. Pada dasarnya seluruh sektor ekonomi perlu dikembangkan, namun karena ada keterbatasan sumberdaya, maka prioritas pengembangannya perlu dipertimbangkan secara arif dan hati-hati serta tidak hanya mengacu kepada pertimbangan ekonomi semata, tetapi juga pertimbangan lainnya. Dalam analisis ini, sektor yang direkomendasikan adalah sektor-sektor yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, penerimaan daerah dan kontribusi dalam PDRB, yang secara paralel juga dikembangkan sektor-sektor yang memperkuat struktur ekonomi wilayah yang mampu merangsang sektor-sektor ekonomi lainnya untuk berkembang.

SISTEM MEKANISME PENYUSUNAN DAN STRUKTUR BELANJA PEMBANGUNAN APBD

Sistem Mekanisme Penyusunan Belanja Pembangunan APBD

Analisis pendapat gabungan para informan menunjukkan bahwa aspek teknis perencanaan (nilai bobot 0.83) merupakan aspek penting yang diperhatikan dalam mekanisme penyusunan belanja pembangunan APBD Kota Batu. Aspek yang lain yang mempengaruhi adalah faktor nonteknis politis (nilai bobot 0.17). Setiap aspek yang dipertimbangkan dalam penyusunan belanja pembangunan APBD Kota Batu beserta nilai bobotnya disajikan dalam Gambar 9 berikut:

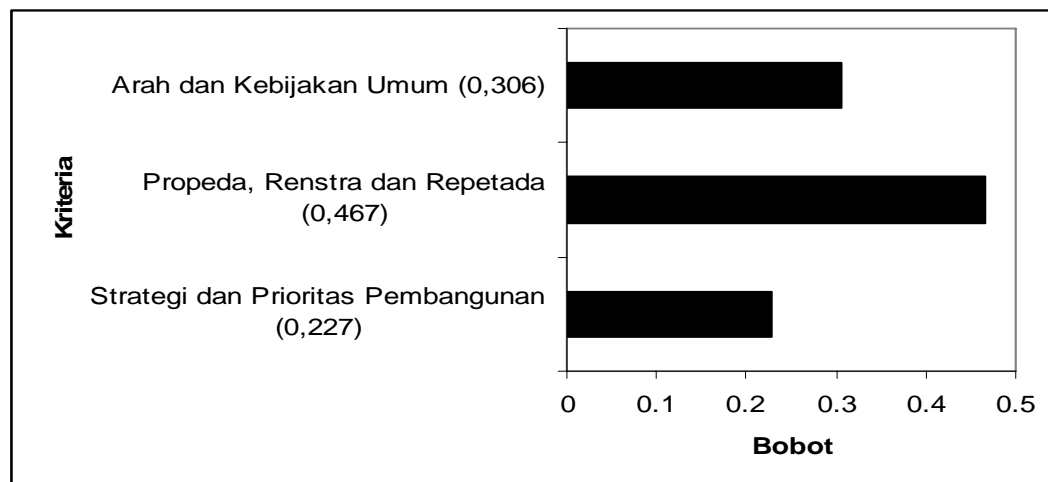


Gambar 9 Aspek yang dipertimbangkan dan menentukan dalam penyusunan belanja pembangunan APBD Kota Batu.

Terpilihnya aspek teknis perencanaan sebagai prioritas utama yang harus diperhatikan mencerminkan bahwa penyusunan belanja pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batu didasarkan kepada dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Batu, yaitu: (1) Strategi dan prioritas pembangunan Kota Batu; (2) Propeda, renstrada, dan repetada Kota Batu; dan (3) Arah dan kebijakan umum Kota Batu.

Dari ketiga dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Batu tersebut, yang dipandang utama oleh para informan dalam mekanisme penyusunan belanja pembangunan APBD Kota Batu adalah propeda, renstra, dan repetada Kota Batu

(nilai bobot 0.467) kemudian diikuti oleh arah dan kebijakan umum Kota Batu (nilai bobot 0.306) dan strategi dan prioritas pembangunan (nilai bobot 0.227). Secara singkat kriteria dalam aspek teknis perencanaan beserta nilainya dapat dilihat pada Gambar 10 berikut:



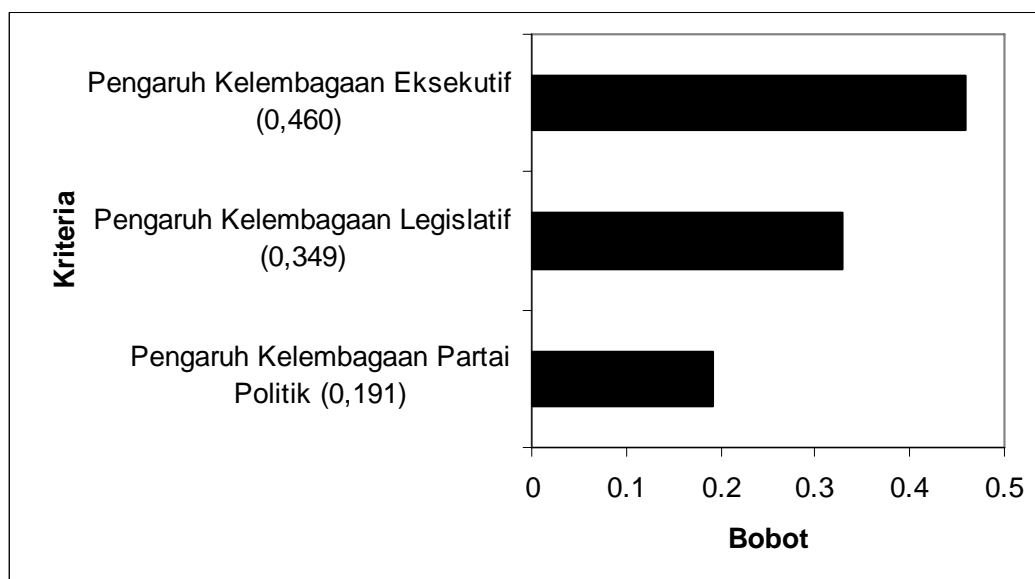
Gambar 10 Kriteria dalam aspek teknis perencanaan dan bobot nilainya.

Secara implisit hal ini menunjukkan bahwa dokumen perencanaan propeda, renstrada, dan repetada yang telah ditetapkan, menjadi pedoman dalam penyusunan belanja pembangunan APBD Kota Batu. Ini dikarenakan propeda, renstrada, dan repetada disusun antara lain melalui proses penjaringan aspirasi masyarakat. Penjaringan aspirasi masyarakat dilakukan untuk mengetahui kebutuhan masyarakat secara lebih obyektif dan untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat yang setiap saat bisa berubah yang ada kemungkinan berbeda dengan rencana strategis dan visi misi walikota yang telah ditetapkan.

Proses penjaringan aspirasi masyarakat dilakukan dengan melibatkan semua unsur masyarakat dan LSM untuk mengetahui kearah mana pembangunan Kota Batu ini akan dilaksanakan. Penjaringan aspirasi masyarakat (jaring asmara) dilaksanakan dengan menggunakan berbagai metode, baik aktif maupun pasif. Jaring asmara secara aktif antara lain melalui musyawarah pembangunan kelurahan, diskusi UDKP, dan musyawarah perencanaan pembangunan. Sedangkan Jaring asmara yang dilaksanakan secara pasif dengan menggunakan berbagai metode, antara lain, dialog interaktif melalui radio, televisi lokal, dan media massa lainnya yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan keluhan, usulan, dan lain-lain.

Aspek lain yang selama ini terjadi dalam penyusunan belanja pembangunan APBD Kota Batu adalah aspek nonteknis politis. Dalam aspek ini, dikemukakan tiga kriteria, yaitu: (1) Pengaruh kelembagaan eksekutif; (2) Pengaruh kelembagaan legislatif; dan (3) Pengaruh kelembagaan partai politik

Dari ketiga kriteria dalam aspek nonteknis politis tersebut, yang dipandang utama oleh para informan dalam mekanisme penyusunan belanja pembangunan APBD Kota Batu adalah pengaruh kelembagaan eksekutif (nilai bobot 0.460) kemudian diikuti oleh pengaruh kelembagaan legislatif (nilai bobot 0.349) dan pengaruh partai politik (nilai bobot 0.191). Secara singkat setiap kriteria dalam aspek nonteknis politis beserta nilainya dapat dilihat pada Gambar 11 berikut:



Gambar 11 Kriteria dalam aspek nonteknis politis dan bobot nilainya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam penyusunan APBD Kota Batu terdapat hal-hal yang bersifat politis yang dilakukan oleh Tim Anggaran (kelembagaan eksekutif) dan Panitia Anggaran (kelembagaan legislatif). Pengaruh kelembagaan eksekutif terjadi karena pihak eksekutif yang tergabung dalam Tim Anggaran berusaha agar satuan kerjanya mendapatkan porsi anggaran yang lebih besar.

Sedangkan pengaruh kelembagaan legislatif terjadi karena anggota DPRD yang tergabung dalam Panitia Anggaran berusaha untuk mewujudkan janji-janji mereka yang mereka sampaikan kepada massa konstituennya pada saat kampanye pemilihan umum yang lalu.. Sebagai contoh misalnya pada saat kampanye di suatu daerah, seorang anggota DPRD (saat itu masih calon) menjanjikan kepada

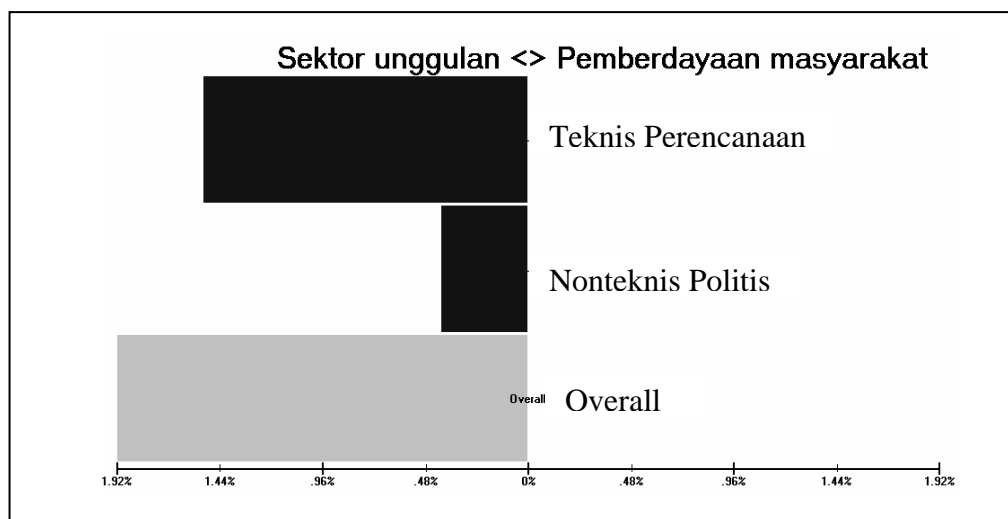
massa konstituennya apabila terpilih dia akan mengusahakan pembangunan prasarana jalan di daerah tersebut. Karena janjinya tersebut, anggota DPRD yang bersangkutan berusaha mewujudkannya dalam pembahasan APBD.

Menyikapi permasalahan nonteknis politis ini, tidak semua usulan dapat diterima. Hanya usulan yang benar-benar diharapkan oleh masyarakat, dipandang mampu menyelesaikan permasalahan, dan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat serta dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang dapat diterima setelah melalui suatu koordinasi dan pembahasan yang menyeluruh dan intensif terhadap semua usulan.

Berdasarkan pertimbangan setiap aspek dan kriteria yang dikemukakan dalam studi Analytic Hierarchy Process, dapat dianalisis mekanisme penyusunan belanja pembangunan APBD Kota Batu yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah Kota Batu dan DPRD Kota Batu. Analisis yang dilakukan memberikan hasil sebagai berikut:

1. Penentuan skala prioritas antara sektor unggulan dan pemberdayaan masyarakat.

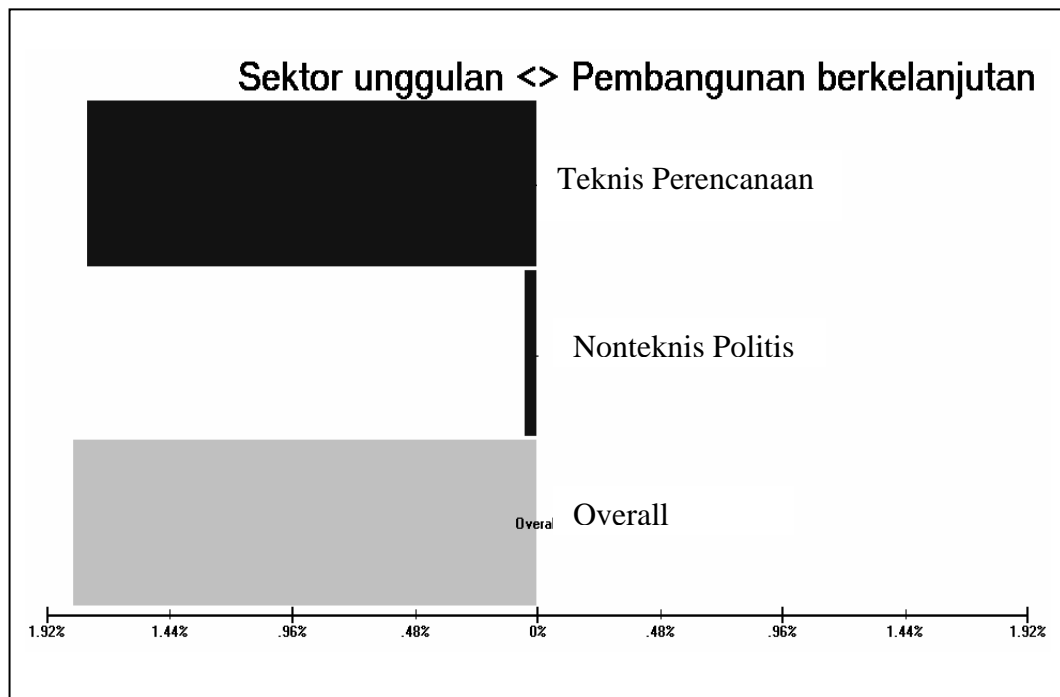
Jika ditinjau dari aspek teknis perencanaan dan nonteknis politis, sektor unggulan lebih merupakan prioritas dibandingkan dengan pemberdayaan masyarakat. Hal ini terlihat dalam Gambar 12 berikut:



Gambar 12 Perbandingan skala prioritas antara sektor unggulan dan pemberdayaan masyarakat.

2. Penentuan skala prioritas antara sektor unggulan dan pembangunan berkelanjutan.

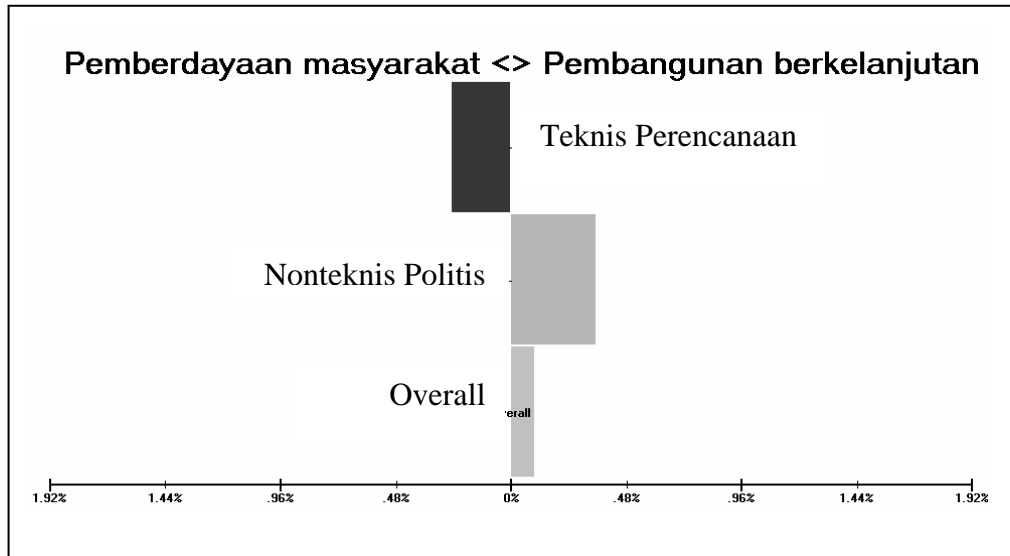
Jika ditinjau dari aspek teknis perencanaan dan nonteknis politis, sektor unggulan lebih merupakan prioritas dibandingkan dengan pembangunan berkelanjutan. Hal ini terlihat dalam Gambar 13 berikut:



Gambar 13 Perbandingan skala prioritas antara sektor unggulan dan pembangunan berkelanjutan.

3. Penentuan skala prioritas antara pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.

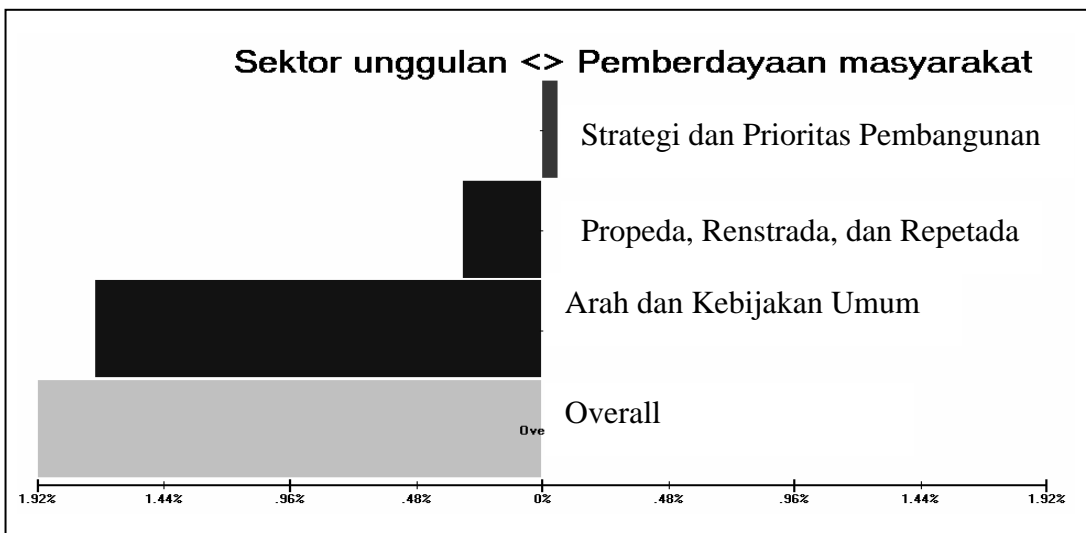
Jika ditinjau dari aspek teknis perencanaan, pemberdayaan masyarakat lebih merupakan prioritas dibandingkan dengan pembangunan berkelanjutan. Sedangkan dari aspek nonteknis politis, pembangunan berkelanjutan lebih merupakan prioritas dibandingkan dengan pemberdayaan masyarakat. Hal ini terlihat dalam Gambar 14 berikut:



Gambar 14 Perbandingan skala prioritas antara pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.

4. Penentuan skala prioritas antara sektor unggulan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan kriteria dalam aspek teknis perencanaan.

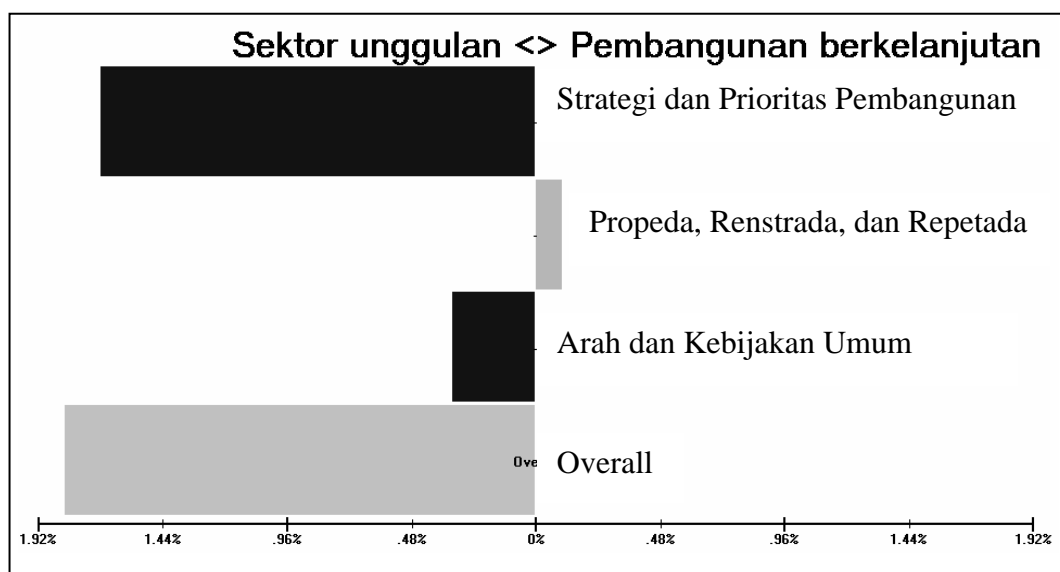
Berdasarkan kriteria propeda, renstrada, dan repetada serta kriteria arah dan kebijakan umum Kota Batu, sektor unggulan lebih merupakan prioritas dibandingkan dengan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan berdasarkan kriteria strategi dan prioritas pembangunan, pemberdayaan masyarakat lebih merupakan prioritas dibandingkan dengan sektor unggulan. Hal ini terlihat dalam Gambar 15 berikut:



Gambar 15 Perbandingan skala prioritas antara sektor unggulan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan kriteria dalam aspek teknis perencanaan.

5. Penentuan skala prioritas antara sektor unggulan dan pembangunan berkelanjutan berdasarkan kriteria dalam aspek teknis perencanaan.

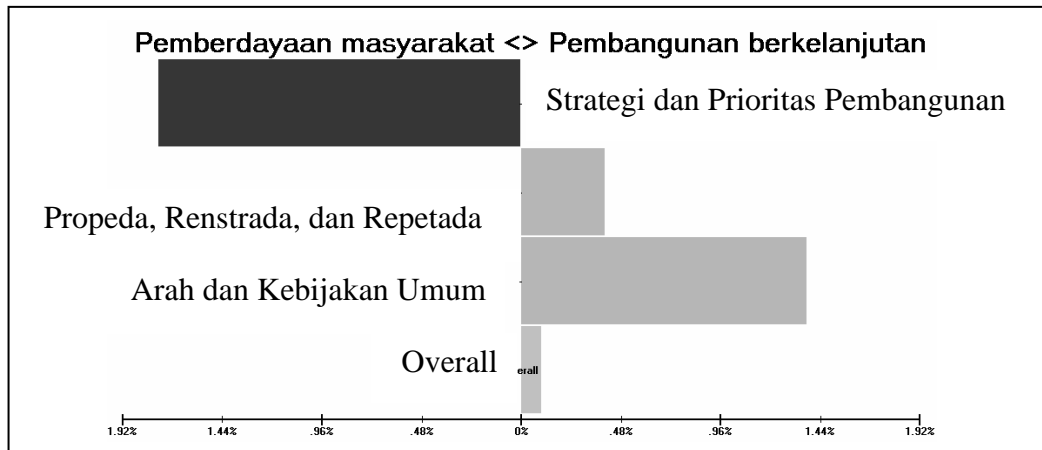
Berdasarkan kriteria strategi dan prioritas pembangunan serta kriteria arah dan kebijakan umum Kota Batu, sektor unggulan lebih merupakan prioritas dibandingkan dengan pembangunan berkelanjutan. Sedangkan berdasarkan kriteria propeda, renstrada, dan repetada, pembangunan berkelanjutan lebih merupakan prioritas dibandingkan dengan sektor unggulan. Hal ini terlihat dalam Gambar 16 berikut:



Gambar 16 Perbandingan skala prioritas antara sektor unggulan dan pembangunan berkelanjutan berdasarkan kriteria dalam aspek teknis perencanaan.

6. Penentuan skala prioritas antara pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan berdasarkan kriteria dalam aspek teknis perencanaan.

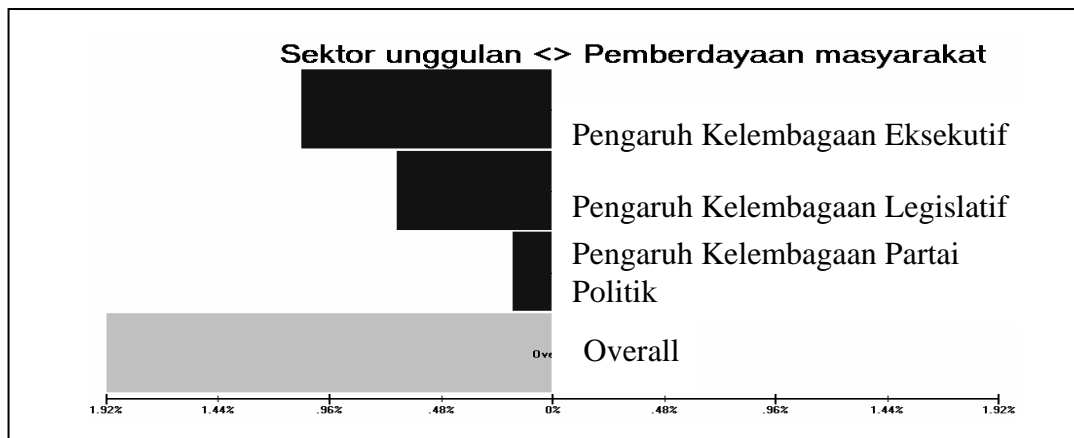
Berdasarkan kriteria strategi dan prioritas pembangunan, pemberdayaan masyarakat lebih merupakan prioritas dibandingkan dengan pembangunan berkelanjutan. Sedangkan berdasarkan kriteria Propeda, Renstrada, dan Repetada serta kriteria arah dan kebijakan umum Kota Batu, pembangunan berkelanjutan lebih merupakan prioritas dibandingkan dengan pemberdayaan masyarakat. Hal ini terlihat dalam Gambar 17 berikut:



Gambar 17 Perbandingan skala prioritas antara pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan berdasarkan kriteria dalam aspek teknis perencanaan.

7. Penentuan skala prioritas antara sektor unggulan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan kriteria dalam aspek nonteknis politis.

Berdasarkan semua kriteria pada aspek nonteknis politis (pengaruh kelembagaan eksekutif, pengaruh kelembagaan legislatif, dan pengaruh partai politik), sektor unggulan lebih merupakan prioritas dibandingkan dengan pemberdayaan masyarakat. Hal ini terlihat dalam Gambar 18 berikut:

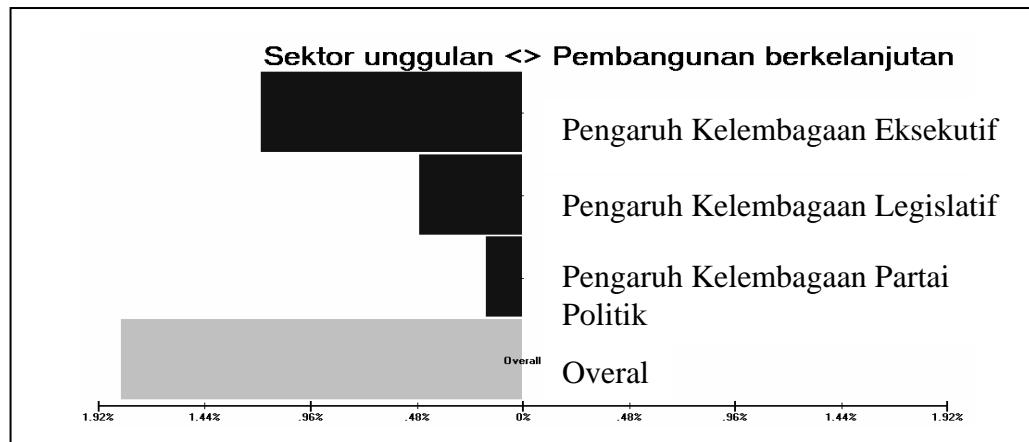


Gambar 18 Perbandingan skala prioritas antara sektor unggulan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan kriteria dalam aspek nonteknis politis.

8. Penentuan skala prioritas antara sektor unggulan dan pembangunan berkelanjutan berdasarkan kriteria dalam aspek nonteknis politis.

Berdasarkan semua kriteria pada aspek nonteknis politis (pengaruh kelembagaan eksekutif, pengaruh kelembagaan legislatif, dan pengaruh partai

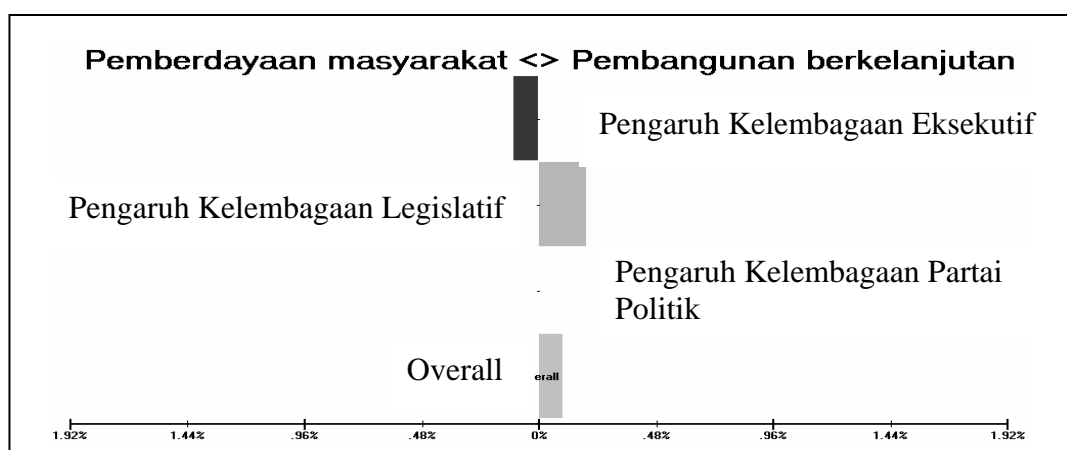
politik), sektor unggulan lebih merupakan prioritas dibandingkan dengan pembangunan berkelanjutan. Hal ini terlihat dalam Gambar 19 berikut:



Gambar 19 Perbandingan skala prioritas antara sektor unggulan dan pembangunan berkelanjutan berdasarkan kriteria dalam aspek nonteknis politis.

9. Penentuan skala prioritas antara pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan berdasarkan kriteria dalam aspek nonteknis politis.

Berdasarkan kriteria pengaruh kelembagaan eksekutif, pemberdayaan masyarakat lebih merupakan prioritas dibandingkan dengan pembangunan berkelanjutan. Sementara berdasarkan kriteria pengaruh kelembagaan legislatif, pembangunan berkelanjutan lebih merupakan prioritas dibandingkan dengan pemberdayaan masyarakat. Hal ini terlihat dalam Gambar 20 berikut:



Gambar 20 Perbandingan skala prioritas antara pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan berdasarkan kriteria dalam aspek nonteknis politis.

Struktur Belanja Pembangunan APBD

Belanja pembangunan Kota Batu tahun 2003 dikelompokkan kedalam 21 sektor dengan rinciannya yang disebut subsektor. Dalam Tabel 36 di bawah ini disajikan struktur belanja pembangunan APBD Kota Batu tahun 2002 dan 2003 sebagai berikut:

Tabel 36 Struktur belanja pembangunan APBD Kota Batu tahun 2002 dan 2003 (Rp)

Jenis Pengeluaran	APBD	
	Tahun 2002	Tahun 2003
Anggaran Rutin	15 336 424 800	62 242 697 000
Anggaran Pembangunan	30 523 892 900	59 332 672 000
1. Sektor Industri	144 950 000	305 000 000
2. Sektor Pertanian dan Kehutanan	504 815 000	1 860 730 000
3. Sektor Sumberdaya Air dan Irigasi	233 323 900	1 065 079 000
4. Sektor Tenaga Kerja	124 893 700	220 000 000
5. Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan dan Koperasi	103 900 000	1 610 000 000
6. Sektor Transportasi, Meteorologi, dan Geofisika	3 660 100 000	9 183 460 000
7. Sektor Pertambangan dan Energi	24 999 500	0
8. Sektor Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi	407 650 000	2 300 465 000
9. Sektor Pembangunan Daerah dan Transmigrasi	4 203 780 000	9 119 064 000
10. Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	409 790 000	1 430 875 000
11. Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Pemuda, dan Olahraga	927 805 000	4 316 198 000
12. Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera	127 500 000	673 630 000
13. Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial dan Peranan Wanita, Anak, dan Remaja	469 027 900	2 938 595 000
14. Sektor Perumahan dan Pemukiman	831 276 000	1 714 997 000
15. Sektor Agama	434 975 000	2 845 500 000
16. Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.	417 648 000	1 408 850 000
17. Sektor Hukum	264 990 000	725 000 000
18. Sektor Aparat Pemerintah dan Pengawasan	15 113 326 900	13 056 935 000
19. Sektor Politik, Penerangan, Komunikasi, dan Media Masa	2 019 142 000	3 275 000 000
20. Sektor Keamanan dan Ketertiban	100.000 000	1 283 294 000
21. Sektor Kepada Bawahan Daerah	0	0
Jumlah	45 860 317 700	121 575 369 000

Sumber: BPS Kota Batu (2004b).

Dalam kaitannya dengan hasil analisis Input-Output, maka perlu ditinjau proporsi alokasi belanja pembangunan khususnya alokasi untuk sektor-sektor unggulan. Dalam pembahasan penelitian ini hanya menganalisis struktur belanja pembangunan APBD tahun 2002 dan 2003. Dari tabel di atas terlihat bahwa anggaran belanja rutin APBD tahun 2002 Kota Batu sebesar Rp15 336 424 800,- atau 33.44% dari seluruh anggaran yang tersedia. Sedangkan belanja

pembangunan sebesar Rp30 523 892 900,- atau 66.56% dari seluruh anggaran yang tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi belanja pembangunan lebih besar 2 kali dari belanja rutin.

Hal ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan APBD daerah lain dimana alokasi untuk belanja rutin justru lebih besar daripada alokasi untuk belanja pembangunan. Akan tetapi untuk tahun 2003, persentase ini mulai bergeser dimana alokasi untuk belanja rutin naik menjadi sebesar Rp62 242 697 000,- atau 51.2% dari seluruh anggaran yang tersedia. Sedangkan belanja pembangunan mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp59 332 672 000,- namun secara persentase mengalami penurunan menjadi 48,8% dari seluruh anggaran yang tersedia.

Dalam pengalokasian anggaran pembangunan terlihat bahwa sektor aparat pemerintah dan pengawasan mendapatkan alokasi yang terbesar, yaitu sebesar Rp13 056 935 000,- atau sebesar 22.01% dari total belanja pembangunan. Kemudian diikuti oleh sektor transportasi, meteorologi, dan geofisika yang mendapatkan alokasi sebesar Rp9 183 460 000,- atau sebesar 15.48% dari total belanja pembangunan serta sektor pembangunan daerah dan transmigrasi yang mendapatkan alokasi sebesar Rp9 119 064 000,- atau sebesar 15.37% dari total belanja pembangunan.

Sektor industri pengolahan merupakan sektor unggulan yang sangat potensial untuk dikembangkan dalam pembangunan ekonomi di Kota Batu karena mempunyai angka pengganda output sebesar 1.35, angka pengganda pendapatan sebesar 1.56, angka pengganda tenaga kerja sebesar 2.88, derajat kepekaan sebesar 0.643, dan daya penyebaran sebesar 0.28 serta kontribusi ke PDRB sebesar 12.43. Pembangunan sektor ini tidak mendapatkan dukungan alokasi anggaran pembangunan yang memadai sebab dalam alokasi belanja pembangunan Kota Batu tahun 2003 hanya mendapatkan anggaran sebesar Rp305 000 000,- atau sebesar 0.51% dari total belanja pembangunan atau hanya mengalami kenaikan sebesar 0.04% dari tahun anggaran 2002.

Sektor pertanian dan kehutanan yang meliputi subsektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan hanya memperoleh alokasi biaya pembangunan sebesar Rp1 860 730 000,- atau sebesar

3.14% dari total belanja pembangunan atau hanya mengalami kenaikan sebesar 1.5% dari tahun anggaran 2002. Padahal sektor ini termasuk sektor unggulan karena merupakan salah satu sektor yang banyak menyerap tenaga kerja dan memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB Kota Batu. Selama krisis ekonomi, sektor ini menjadi penyelamat perekonomian nasional. Terlebih lagi Kota Batu terkenal dengan citra sebagai kota penghasil produk pertanian tanaman hortikultura.

Sektor pariwisata dalam hal ini hotel, restoran, perdagangan, dan jasa penunjangnya yang merupakan salah satu sektor unggulan di Kota Batu karena banyak menyerap tenaga kerja dan memberikan kontribusi ke dalam PDRB Kota Batu hanya mendapatkan alokasi sebesar Rp2 300 465 000,- atau sebesar 3.88% dari total belanja pembangunan atau hanya mengalami kenaikan sebesar 2.5% dari tahun anggaran 2002.

Sektor transportasi, meteorologi, dan geofisika merupakan sektor yang termasuk dalam sektor yang mendapatkan alokasi belanja pembangunan yang besar, yaitu sebesar Rp9 183 460 000,-. Meskipun pengembangan sektor ini dapat mendukung sektor-sektor lainnya seperti industri, pertanian, dan pariwisata, namun dengan alokasi sebesar 15,48% dari total belanja pembangunan dipandang tidak proporsional dan terlalu besar dibandingkan dengan sektor-sektor lain yang pada dasarnya lebih mempunyai prioritas untuk dikembangkan dan memberi kontribusi yang signifikan dalam PDRB Kota Batu. Sedangkan kontribusi sektor ini dalam PDRB Kota batu tahun 2003 hanya sebesar 4.71%.

Struktur APBD Kota Batu tahun 2003 belum menunjukkan adanya *power sharing* antara pemerintah dan masyarakat. Sektor-sektor yang banyak terkait dengan masyarakat, yaitu sektor pendidikan, kesehatan, kependudukan, dan sektor perumahan hanya mendapat alokasi berkisar antara 1-4%. Bahkan sektor kependudukan dan kesejahteraan masyarakat hanya mendapatkan alokasi sebesar Rp673 630 000,- atau 1.14% dari belanja pembangunan APBD Kota Batu tahun 2003. Hal ini sangat kecil jika dibandingkan dengan dana yang disiapkan untuk Persatuan Sepakbola Kota Batu yang diperkirakan lebih dari 1 milyar rupiah.

Dalam proses penyusunannya masih mengabaikan partisipasi masyarakat. Praktik perencanaan (penganggaran) pembangunan, masih menggunakan pola dan

aturan lama. Pola ini justru paradoks dengan semangat partisipasi, yaitu mengedepankan mekanisme *top-down*.

Masalah utama dalam penganggaran di Kota Batu dan di daerah lain saat ini adalah umumnya masyarakat tidak dapat mengakses informasi mengenai proses perencanaan dan alokasi anggaran. Dengan adanya asimetri informasi maka sudah dapat dipastikan terjadi asimetri anggaran. Masyarakat awam yang memiliki informasi yang sedikit dibandingkan dengan birokrasi dan dunia usaha, tentu saja tidak memiliki kesempatan yang memadai untuk mengagregasi kepentingannya.

Meskipun proses perencanaan dan penganggaran secara yuridis diklaim menggunakan pendekatan *bottom-up* dan partisipatif, dalam prakteknya unsur-unsur masyarakat yang terlibat bukanlah representasi yang sesungguhnya. Masyarakat yang terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran kebanyakan adalah masyarakat yang dipilih atau memiliki hubungan yang dekat dengan birokrasi. Karena itu, orientasi mereka lebih pada kepentingan penguasa atau birokrat yang dekat dengan mereka. Untuk memperbaiki proses ini, perlu segera diperbaharui sistem representasi di satu sisi, dan mendorong kesadaran masyarakat di sisi lain untuk memperjuangkan nasib mereka melalui instrumen anggaran, yang meliputi pemilihan wakil yang merepresentasikan kepentingan masyarakat dan mendorong pengalokasian anggaran agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

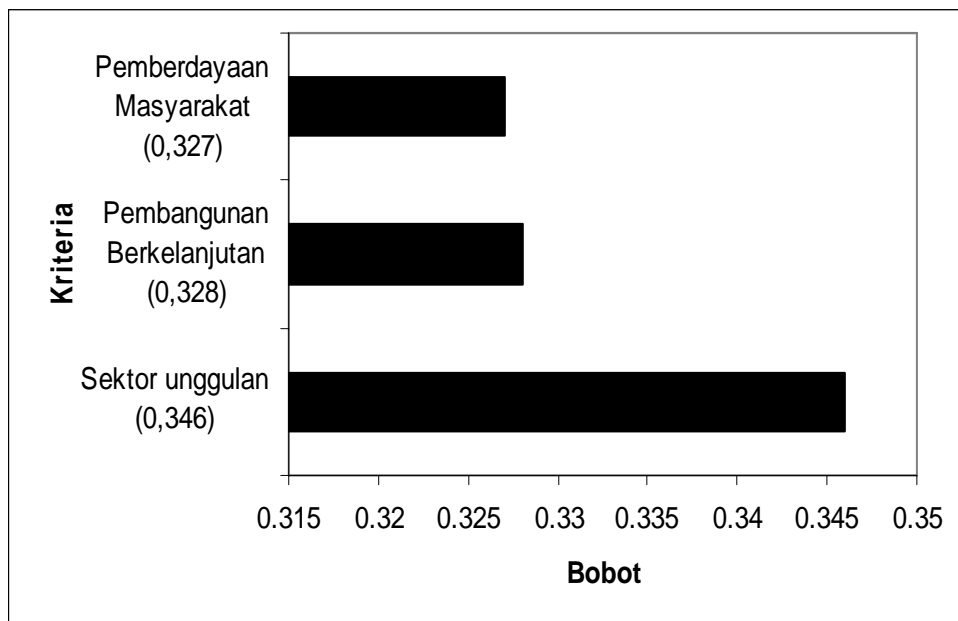
Pemerintah Kota Batu harus menjalankan perencanaan partisipatif termasuk dalam penyusunan anggarannya (*participatory budgeting*). Perencanaan anggaran partisipatif adalah sebuah proses perencanaan anggaran belanja, dengan keputusan tentang alokasi anggaran ada di tangan publik. Dalam prosesnya, publik berpartisipasi secara otonom. Partisipasi dilakukan dalam berbagai forum, dimana posisi publik mampu mengontrol dan mengarahkan pemerintah daerah dalam penentuan kebijakan alokasi anggaran.

Pemerintah daerah tetap bertanggungjawab dalam proses penyusunan anggaran partisipatif. Namun dalam prosesnya, sepenuhnya publik yang berperan. Dari mulai penyampaian usulan hingga penentuan alokasi anggaran. Praktik anggaran partisipatif, tidak membedakan secara tegas antara domain pemerintah dan publik. Namun, secara konsisten publik dilibatkan penuh sejak pendefinisian

program prioritas, pemilihan delegasi, penyusunan rencana anggaran belanja, hingga proses pembahasan di tingkat legislatif. Hal yang menarik, pemerintah daerah mendukung penuh melalui fasilitas, pengawasan, dan asistensi teknis.

Ikhtisar

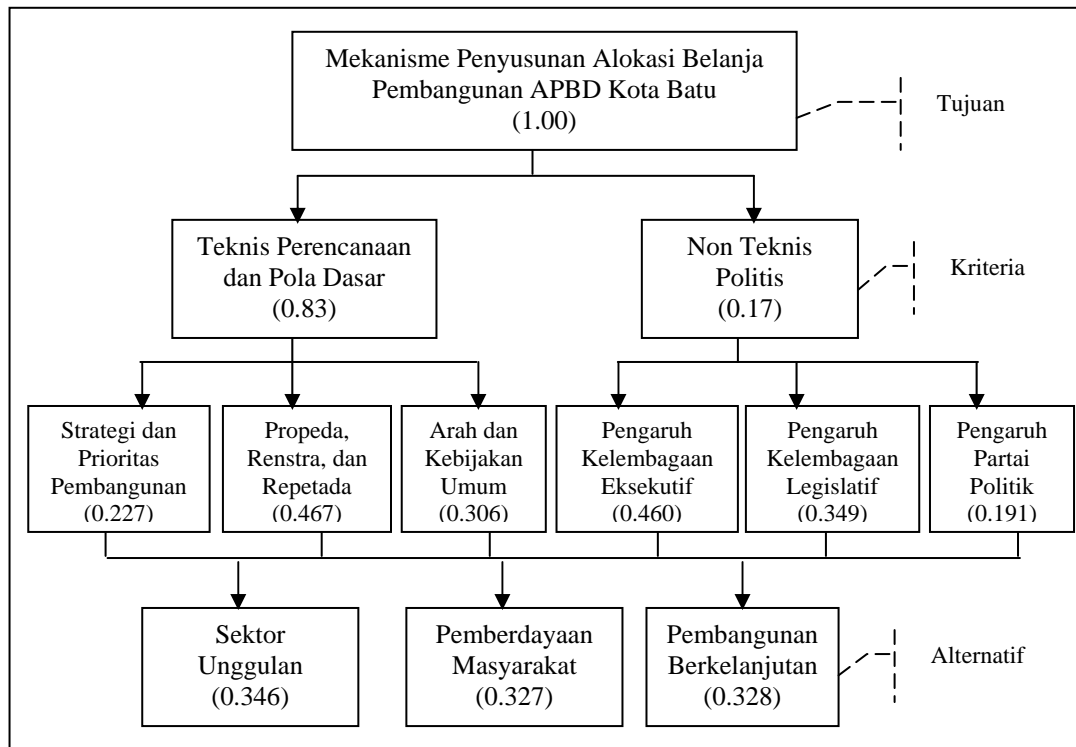
Dari hasil studi Analytic Hierarchy Process yang dilakukan, menunjukkan bahwa dalam penyusunan belanja pembangunan APBD Kota Batu yang mendapat prioritas utama atau mempunyai nilai bobot tertinggi adalah adalah sektor unggulan dengan nilai bobot 34,6%, kemudian pembangunan berkelanjutan dengan nilai bobot 32,8% dan pemberdayaan masyarakat dengan nilai bobot 32,7%, seperti yang dapat dilihat dalam Gambar 23 berikut ini:



Gambar 21 Nilai bobot yang menunjukkan skala prioritas dalam penyusunan belanja pembangunan APBD Kota Batu.

Nilai *consistency ratio* pada kriteria strategi dan prioritas pembangunan adalah 0.02. Sedangkan untuk kriteria propeda, renstrada, dan repetada, kriteria arah dan kebijakan umum, kriteria pengaruh kelembagaan eksekutif, kriteria pengaruh kelembagaan legislatif dan kriteria pengaruh partai politik, nilai *consistency ratio* masing-masing adalah 0.01.

Hasil proses hierarki analitik secara keseluruhan beserta nilai bobot kriteria dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 22 Hasil proses hierarki analitik beserta nilai bobot kriteria.

Dari Gambar 22 di atas, terlihat bahwa kelembagaan eksekutif mempunyai pengaruh cukup besar dalam penyusunan anggaran belanja APBD Kota Batu. Hal ini menunjukkan lemahnya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan anggaran. Seharusnya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan anggaran cukup kuat karena anggaran sebagai instrumen terpenting dari kebijakan fiskal merupakan formulasi kebijakan untuk mengalokasikan sumber daya publik. Selain itu, proses kebijakan untuk alokasi sumberdaya publik bukan semata-mata persoalan administrasi dan manajerial. Proses kebijakan harus dipandang sebagai produk dari hubungan sosial yang kompleks, sebagai wahana masyarakat yang berpolitik untuk mengartikulasikan ide dan pemikirannya yang kemudian akan menuntut ke arah pemanfaatan sumberdaya bersama dan penegakan aturan-aturan. Dengan demikian, pelaksanaan pemerintahan dan keputusan publik harus dibuat seterbuka mungkin dengan partisipasi aktif dari masyarakat yang dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan tersebut (Suhirman dan Dedi 2001).

Anggaran merupakan dokumen kebijakan ekonomi pemerintah yang sangat penting. Untuk alasan ini, maka transparansi dan partisipasi dalam proses anggaran menjadi sangat penting karena:

1. Bisa mengidentifikasi sedini mungkin terhadap kelemahan dan kekuatan dari suatu kebijakan.
2. Meningkatkan akuntabilitas dalam praktek pemerintahan.
3. Meningkatkan kohesi sosial dan komitmen dari setiap *stakeholder* dalam pilihan-pilihan sosial dari kebijakan anggaran yang saling meniadakan.
4. Meningkatkan iklim investasi karena adanya keamanan yang tercipta melalui kejelasan dari kebijakan pemerintah.

Oleh karena itu, perlu pergeseran paradigma dari yang tadinya berpusat pada negara kepada pendekatan yang lebih berorientasi pada masyarakat. Dengan paradigma ini, maka perencanaan baik dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang mengharuskan adanya *governance* yang bersifat kolaboratif. Dalam paradigma berpusat pada negara, kolaborasi hanya terdiri dari pemerintah dengan unsur teknokratik, dimana sang ahli itu yang hanya memiliki sedikit sekali kepentingan terhadap sektor publik, terpisah dari kepentingan partai-partai yang merepresentasikan keinginan masyarakat.

Hal ini menyebabkan kecilnya dasar bagi modal sosial maupun intelektual untuk menghadapi tantangan pembangunan di masa mendatang. Sedangkan dalam paradigma berpusat masyarakat, kolaborasi dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan berbagai elemen yang mewakili masyarakat. Dengan demikian, modal sosial akan semakin besar untuk menghadapi tantangan yang ada di masa depan.

Akhirnya, dengan paradigma berpusat masyarakat, maka harus dilakukan pergeseran pada tataran perencanaan dari konsep rasional dalam pengambilan keputusan menuju pendekatan yang lebih kolaboratif karena terbukti paling efektif dalam menangani persoalan pembangunan. Sebagai konsekwensi dari pendekatan berpusat masyarakat warga, maka perlu dilakukan penguatan pada masyarakat sipil karena praktek politik dan pembangunan selama ini telah menempatkan masyarakat dalam posisi yang lemah dan terpinggirkan. Ada dua pendekatan yang dapat dilakukan untuk menguatkan masyarakat sipil, yaitu:

1. Pendekatan struktural yang dilakukan dengan cara mengadvokasikan berbagai instrumen hukum dan kelembagaan yang memberi peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi, mengakses informasi, dan mengontrol akuntabilitas pemerintahan. Instrumen hukum yang sangat penting untuk menjamin

partisipasi dan akuntabilitas anggaran adalah undang-undang atau peraturan daerah mengenai partisipasi masyarakat dan hak warga untuk mendapatkan informasi mengenai perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Sedangkan instrumen kelembagaan yang penting adalah penumbuhan organisasi lokal dan fungsional yang dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

2. Pendekatan sosiokultural dilakukan melalui proses pendidikan, pengorganisasian, dan pendampingan masyarakat agar masyarakat dapat mengakselerasi aspirasi dan kepentingan mereka.

Dalam kurun waktu dua tahun (2002-2003) belanja pembangunan Kota Batu meningkat hampir dua kali lipat (194%), dari Rp30 523 892 900,- menjadi Rp58 332 672 000,-. Tabel 37 di bawah ini menampilkan proporsi masing-masing sektor dalam struktur anggaran pembangunan APBD Kota Batu tahun 2002 dan 2003.

Tabel 37 Persentase masing-masing sektor dalam struktur belanja pembangunan APBD Kota Batu tahun 2002 dan 2003 (%)

Jenis Pengeluaran	Persentase terhadap Anggaran Pembangunan APBD	
	Tahun 2002	Tahun 2003
1. Sektor Industri.	0.47	0.51
2. Sektor Pertanian dan Kehutanan.	1.65	3.14
3. Sektor Sumberdaya Air dan Irigasi.	0.76	1.80
4. Sektor Tenaga Kerja.	0.41	0.37
5. Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan dan Koperasi.	0.34	2.71
6. Sektor Transportasi, Meteorologi, dan Geofisika.	11.99	15.48
7. Sektor Pertambangan dan Energi.	0.08	0
8. Sektor Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi.	1.34	3.88
9. Sektor Pembangunan Daerah dan Transmigrasi.	13.77	15.37
10. Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang.	1.34	2.41
11. Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Pemuda, dan Olahraga.	3.04	7.27
12. Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera.	0.42	1.14
13. Sektor Kesehatan. Kesejahteraan Sosial dan Peranan Wanita, Anak, dan Remaja.	1,54	4.95
14. Sektor Perumahan dan Pemukiman.	2.72	2.89
15. Sektor Agama.	1.43	4.80
16. Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.	1.37	2.37
17. Sektor Hukum.	0.87	1.22
18. Sektor Aparat Pemerintah dan Pengawasan.	49.51	22.01
19. Sektor Politik, Penerangan, Komunikasi, dan Media Masa.	6.61	5.52
20. Sektor Keamanan dan Ketertiban.	0.33	2.16
21. Sektor Kepada Bawahan Daerah.	0.00	0.00
Jumlah	100	100

Sumber: Diolah sendiri.

Selama kurun waktu 2002 - 2003 dapat diamati beberapa hal menarik, yaitu:

1. Proporsi untuk sektor aparat pemerintah dan pengawasan menunjukkan penurunan dari 49.51% menjadi 22.01%. Namun demikian, proporsi sebesar itu tetap menjadikan sektor tersebut sebagai sektor yang menempati prioritas pertama.
2. Selama periode yang sama, pembangunan untuk sektor pembangunan daerah dan transmigrasi mendapatkan alokasi dana yang paling besar kedua dengan proporsi 13.77% di tahun 2002 yang kemudian meningkat menjadi 15.37% di tahun 2003. Begitu juga untuk belanja pembangunan sektor transportasi, meteorologi dan geofisika meningkat dari 11.99% menjadi 15.48%. Dengan demikian, kedua sektor ini dilihat dari segi alokasi anggaran, mendapatkan prioritas utama dalam pembangunan Kota Batu.
3. Proporsi belanja pembangunan untuk sektor:
 - a. Industri hanya meningkat dari 0.47% menjadi 0.51%.
 - b. Pertanian hanya meningkat dari 1.65% menjadi 3.14%.
 - c. Perdagangan hanya meningkat dari 0.34% menjadi 2.71%.
 - d. Pariwisata hanya meningkat dari 1.34% menjadi 3.88%.
 - e. Perumahan hanya meningkat dari 1.81% menjadi 2.89%.
4. Sedangkan sektor lain yang mengalami penurunan alokasi belanja pembangunannya adalah sektor:
 - a. Tenaga kerja yang mengalami penurunan dari 0.41% menjadi 0.37%.
 - b. Pertambangan dan energi yang mengalami penurunan dari 0.08% menjadi 0%.
 - c. Politik, penerangan, komunikasi, dan media massa yang mengalami penurunan dari 6.61% menjadi 5.52%.
5. Penyusunan APBD Kota Batu tahun 2003 masih tetap mengabaikan partisipasi publik. Meskipun proses perencanaan dan penganggaran secara yuridis diklaim menggunakan pendekatan *bottom-up* dan partisipatif, dalam prakteknya unsur-unsur masyarakat yang terlibat bukanlah representasi yang sesungguhnya.

SUMBERDAYA DASAR POTENSIAL

Hasil Analisis SWOT

Dalam menentukan sumberdaya dasar potensial dalam hal ini sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan yang ada di Kota Batu serta peluang pengembangannya dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, dan threats*). Identifikasi dilakukan dengan cara melakukan studi data sekunder hasil kajian yang ada keterkaitannya dengan potensi sumberdaya dasar di Kota Batu. Kemudian dilakukan identifikasi dengan cara mengadakan wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat dan perangkat desa/kelurahan di Kota Batu serta melakukan pengamatan di lapangan untuk mencocokkan data sekunder dengan kenyataan di lapangan dan mendapatkan data yang obyektif.

Data dan informasi yang diperoleh, baik primer dan sekunder, dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan dengan tujuan untuk mendeskripsikan kesimpulan yang didapat setelah melakukan *cross check* antara data primer yang didapat di lapangan dengan data sekunder.

Untuk menghasilkan keputusan yang lebih tepat, proses dalam pembuatan analisis SWOT dilakukan melalui berbagai tahap sebagai berikut:

1. Tahap pengambilan data, yaitu evaluasi faktor eksternal dan internal.
2. Tahap analisis, yaitu pembuatan matriks internal-eksternal dan matriks SWOT.
3. Tahap pengambilan keputusan.

Dari hasil analisis didapatkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman masing-masing desa dan kelurahan sebagai berikut :

Kecamatan Batu

1. Desa Oro-Oro Ombo

Kekuatan:

- a. Tersedia lahan pertanian cukup luas, yaitu seluas 45 Ha untuk sawah, 196 Ha untuk tegalan dan 21 Ha untuk kebun.
- b. Penghasil tanaman pangan dan hortikultura serta daerah penghasil susu sapi.

- c. Daerah pariwisata berupa kawasan wisata Coban Rais dan bumi perkemahan.
- d. Jumlah penduduk 6 765 dengan kepadatan 399 jiwa/Km².
- e. Sarana akomodasi dan transportasi yang mudah serta jalan beraspal.
- f. Tersedia jaringan telepon, air bersih dan listrik.

Kelemahan:

- a. Belum adanya kelembagaan dalam mengelola potensi ekonomi, sehingga penduduk belum mencapai taraf kehidupan yang layak.
- b. Belum adanya sarana pendukung pertanian yang memadai seperti sistem irigasi dan pola pertanian.
- c. Sarana pendukung pariwisata Coban Rais dan bumi perkemahan yang masih kurang memadai dimana hanya terdapat satu tempat pemondokan.
- d. Belum ada dukungan peraturan daerah yang menjamin usaha masyarakat.

Peluang:

- a. Diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 *juncto* No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Diberlakukannya Undang-Undang nomor 11 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu.
- c. Potensi sebagai daerah agropolitan.

Ancaman:

- a. Adanya pesaing oleh kelompok pemodal besar sehingga dapat mengancam kelangsungan usaha masyarakat setempat.

2. Kelurahan Temas

Kekuatan:

- a. Tersedia lahan pertanian cukup luas, yaitu seluas 50 Ha untuk sawah, 27 Ha untuk tegalan dan 10 Ha untuk kebun.
- b. Penghasil hortikultura sayur dan buah jeruk serta peternakan ayam potong.
- c. Banyak terdapat *home industry*
- d. Kegiatan perdagangan berkembang pesat karena adanya pasar kota.
- e. Jumlah penduduk 11 980 dengan kepadatan 2 598 jiwa/Km².
- f. Sarana akomodasi dan transportasi yang mudah serta fasilitas perbankan.
- g. Tersedia jaringan telepon, air bersih dan listrik.

Kelemahan:

- a. Belum adanya kelembagaan dalam mengelola potensi ekonomi, sehingga penduduk belum mencapai taraf kehidupan yang layak.
- b. Belum adanya sarana pendukung pertanian yang memadai seperti sistem irigasi dan pola pertanian.
- c. Belum ada dukungan peraturan daerah yang menjamin usaha masyarakat.

Peluang:

- a. Diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 *juncto* No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Diberlakukannya Undang-Undang nomor 11 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu.
- c. Berpotensi sebagai pusat perdagangan dan kawasan bisnis.

Ancaman:

- a. Maraknya prostitusi, narkoba, dan tindak kejahatan.
- b. Adanya pesaing oleh kelompok pemodal besar sehingga dapat mengancam kelangsungan usaha masyarakat setempat.

3. Kelurahan Sisir

Kekuatan:

- a. Tersedia lahan pertanian cukup luas, yaitu seluas 100 Ha untuk sawah, 70 Ha untuk tegalan, 10 Ha untuk kebun, dan 50 Ha untuk hutan.
- b. Penghasil hortikultura sayur mayur.
- c. Terdapat sarana wisata yang cukup banyak, yaitu Jatim Park, Torong Park, Agro Kusuma, Klub Bunga, dan Paderman Hill.
- d. Berada di daerah yang cukup strategis di jantung Kota Batu.
- e. Kegiatan perdagangan dan jasa berkembang pesat.
- f. Jumlah penduduk 19 415 dengan kepadatan 7 382 jiwa/Km².
- g. Tersedia jaringan telepon, air bersih dan listrik.
- h. Sarana akomodasi dan transportasi yang mudah serta fasilitas perbankan.

Kelemahan:

- a. Belum adanya kelembagaan dalam mengelola potensi ekonomi, sehingga penduduk belum mencapai taraf kehidupan yang layak.

- b. Belum adanya sarana pendukung pertanian yang memadai seperti sistem irigasi dan pola pertanian.
- c. Belum ada dukungan peraturan daerah yang menjamin usaha masyarakat.

Peluang:

- a. Diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 *juncto* No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Diberlakukannya Undang-Undang nomor 11 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu.
- c. Potensi sebagai daerah agropolitan.

Ancaman:

- a. Maraknya prostitusi, narkoba, dan tindak kejahatan.
- b. Adanya pesaing oleh kelompok pemodal sehingga dapat mengancam kelangsungan usaha masyarakat setempat.

4. Kelurahan Ngaglik

Kekuatan:

- a. Tersedia lahan pertanian cukup luas, yaitu seluas 15 Ha untuk sawah, 20 Ha untuk tegalan dan 10 Ha untuk kebun.
- b. Penghasil hortikultura sayur mayur, bunga, apel dan jeruk.
- c. Tersedia fasilitas pergudangan.
- d. Jumlah penduduk 9 958 dengan kepadatan 3 111 jiwa/Km².
- e. Tersedia jaringan telepon, air bersih dan listrik.
- f. Sarana akomodasi dan transportasi yang mudah serta fasilitas perbankan.

Kelemahan:

- a. Belum adanya kelembagaan dalam mengelola potensi ekonomi, sehingga penduduk belum mencapai taraf kehidupan yang layak.
- b. Kelembagaan petani yang masih lemah dan perlu mendapat perhatian yang lebih serius.
- c. Belum adanya sarana pendukung pertanian yang memadai seperti sistem irigasi dan pola pertanian.
- d. Belum ada dukungan peraturan daerah yang menjamin usaha masyarakat.

Peluang:

- a. Potensi sebagai daerah agropolitan.

- b. Diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 *juncto* No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- c. Diberlakukannya Undang-Undang nomor 11 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu.

Ancaman:

- a. Adanya pesaing oleh kelompok pemodal besar sehingga dapat mengancam kelangsungan usaha masyarakat setempat.

5. Desa Pesanggrahan

Kekuatan:

- a. Tersedia lahan pertanian cukup luas, yaitu adalah seluas 22 Ha untuk sawah, 164 Ha untuk tegalan, 10 Ha untuk kebun, dan 21.6 Ha hutan.
- b. Penghasil tanaman pangan dan hortikultura sayur, bunga, buah dan susu sapi.
- c. Terdapat hutan kota untuk menunjang kegiatan konservasi alam.
- d. Pasar sayur dan buah-buahan.
- e. Wisata Gunung Panderman dan Kusuma Agro.
- f. Jumlah penduduk 10 863 dengan kepadatan 1 554 jiwa/Km².
- g. Terdapat industri garmen PT. Wastra Indah.
- h. Tersedia jaringan telepon, air bersih dan listrik.
- i. Sarana transportasi yang mudah dan jalan yang sudah beraspal.

Kelemahan:

- a. Belum adanya kelembagaan dalam mengelola potensi ekonomi, sehingga penduduk belum mencapai taraf kehidupan yang layak.
- b. Belum adanya sarana pendukung pertanian yang memadai seperti sistem irigasi dan pola pertanian.
- c. Belum ada industri yang mengolah susu sapi perah.
- d. Banyak *home industry* yang belum memiliki rantai pemasaran yang baik.
- e. Belum ada dukungan peraturan daerah yang menjamin usaha masyarakat.

Peluang:

- a. Diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 *juncto* No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Diberlakukannya Undang-Undang nomor 11 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu.

c. Potensi sebagai daerah agropolitan.

Ancaman:

- a. Adanya pesaing oleh kelompok pemodal besar pada kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat sehingga dapat mengancam kelangsungan usaha masyarakat setempat.
- b. Permasalahan norma dan pranata sosial yang terjadi akibat maraknya prostitusi yang terjadi.

6. Kelurahan Songgokerto

Kekuatan:

- a. Tersedia lahan pertanian cukup luas, yaitu seluas 54.8 Ha untuk sawah, 55.5 Ha untuk tegalan dan 294 Ha untuk hutan.
- b. Penghasil tanaman pangan dan hortikultura serta rumput untuk pakan ternak.
- c. Pasar sayur dan buah.
- d. Daerah wisata Songgoriti.
- e. Jumlah penduduk 6 134 dengan kepadatan 1 081 jiwa/Km².
- f. Tersedia jaringan telepon, air bersih dan listrik.
- g. Sarana akomodasi dan transportasi yang mudah serta fasilitas perbankan.

Kelemahan:

- a. Belum adanya kelembagaan dalam mengelola potensi ekonomi, sehingga penduduk belum mencapai taraf kehidupan yang layak.
- b. Belum adanya sarana pendukung pertanian yang memadai seperti sistem irigasi dan pola pertanian.
- c. Belum ada dukungan peraturan daerah yang menjamin usaha masyarakat.

Peluang:

- a. Diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 *juncto* No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Diberlakukannya Undang-Undang nomor 11 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu.
- c. Potensi sebagai daerah agropolitan.

Ancaman:

- a. Adanya pesaing oleh kelompok pemodal besar sehingga dapat mengancam kelangsungan usaha masyarakat setempat.

- b. Permasalahan norma dan pranata sosial yang terjadi akibat maraknya prostitusi, narkoba, dan tindak kejahatan.

7. Desa Sumberejo

Kekuatan:

- a. Tersedia lahan pertanian cukup luas, yaitu seluas 84.3 Ha untuk sawah, 58.9 Ha untuk tegalan, 14 Ha untuk kebun dan 169 Ha untuk hutan.
- b. Penghasil pertanian hortikultura sayur mayur, apel dan bunga.
- c. Terdapat banyak *home industry*.
- d. Jumlah penduduk 7 076 dengan kepadatan 2 423 jiwa/Km².
- e. Tersedia jaringan telepon, air bersih dan listrik.
- f. Sarana transportasi yang mudah dan jalan yang sudah beraspal.

Kelemahan:

- a. Belum adanya kelembagaan dalam mengelola potensi ekonomi, sehingga penduduk belum mencapai taraf kehidupan yang layak.
- b. Kelembagaan petani yang masih lemah dan perlu mendapat perhatian yang lebih serius.
- c. Belum adanya sarana pendukung pertanian yang memadai seperti sistem irigasi dan pola pertanian.
- d. Banyak *home industry* yang belum memiliki rantai pemasaran yang baik.
- e. Belum ada dukungan peraturan daerah yang menjamin usaha masyarakat.

Peluang:

- a. Diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 *juncto* No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Diberlakukannya Undang-Undang nomor 11 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu.

Ancaman:

- a. Adanya pesaing oleh kelompok pemodal besar sehingga dapat mengancam kelangsungan usaha masyarakat setempat.
- b. Pemasaran produk banyak bergantung pada tengkulak.

8. Desa Sidomulyo

Kekuatan:

- a. Jumlah penduduk 7 166 dengan kepadatan 2 843 jiwa/Km².

- b. Tersedia lahan pertanian cukup luas, yaitu seluas 184 Ha untuk sawah, dan 10 Ha untuk kebun.
- c. Penghasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura sayur mayur, buah dan bunga hias.
- d. Perdagangan bunga hias berkembang pesat.
- e. Tersedia jaringan telepon, air bersih dan listrik.
- a. Sarana transportasi yang mudah dan jalan yang sudah beraspal.

Kelemahan:

- a. Kelembagaan petani yang masih lemah.
- b. Belum adanya kelembagaan dalam mengelola potensi ekonomi, sehingga penduduk belum mencapai taraf kehidupan yang layak.
- c. Belum adanya sarana pendukung pertanian yang memadai seperti sistem irigasi dan pola pertanian.
- d. Belum ada dukungan peraturan daerah yang menjamin usaha masyarakat.

Peluang:

- a. Diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 *juncto* No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Diberlakukannya Undang-Undang nomor 11 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu.
- c. Potensi sebagai sentra produksi dan perdagangan bunga hias dan bunga potong.

Ancaman:

- a. Adanya pesaing oleh kelompok pemodal besar sehingga dapat mengancam kelangsungan usaha masyarakat setempat.

Kecamatan Bumiaji

9. Desa Pandanrejo

Kekuatan:

- a. Tersedia lahan pertanian cukup luas, yaitu seluas 162 Ha untuk sawah, 126 Ha untuk kebun.
- b. Penghasil pertanian tanaman hortikultura sayur, apel dan stroberi.
- c. Daerah peternakan sapi perah dan potong.
- d. Banyak terdapat *home industry*.

- e. Jumlah penduduk 5 917 dengan kepadatan 942 jiwa/Km².
- f. Tersedia jaringan telepon, air bersih dan listrik.
- g. Sarana transportasi yang mudah dan jalan yang sudah beraspal.

Kelemahan:

- a. Belum adanya kelembagaan dalam mengelola potensi ekonomi, sehingga penduduk belum mencapai taraf kehidupan yang layak.
- b. Kelembagaan petani yang masih lemah dan perlu mendapat perhatian yang lebih serius.
- c. Belum adanya sarana pendukung pertanian yang memadai. Sistem irigasi masih banyak nonteknis dan pola pertanian subsisten.
- d. Akses permodalan dan pemasaran hasil produk masih lemah.
- e. Belum ada dukungan peraturan daerah yang menjamin usaha masyarakat.

Peluang:

- a. Diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 *juncto* No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- a. Diberlakukannya Undang-Undang nomor 11 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu.
- b. Potensi sebagai sentra produksi pertanian tanaman hortikultura dan peternakan.

Ancaman:

- a. Adanya pesaing oleh kelompok pemodal besar sehingga dapat mengancam kelangsungan usaha masyarakat setempat.

10. Desa Bumiaji

Kekuatan:

- a. Tersedia lahan pertanian cukup luas, yaitu seluas 100 Ha untuk sawah, 300 Ha untuk kebun.
- b. Penghasil pertanian tanaman hortikultura sayur dan buah apel
- c. Banyak terdapat *home industry*.
- d. Jumlah penduduk 4 871 dengan kepadatan 576 jiwa/Km².
- e. Tersedia jaringan telepon, air bersih dan listrik.
- f. Sarana transportasi yang mudah dan jalan yang sudah beraspal.

Kelemahan:

- a. Belum adanya kelembagaan dalam mengelola potensi ekonomi, sehingga penduduk belum mencapai taraf kehidupan yang layak.
- b. Kelembagaan petani yang masih lemah dan perlu mendapat perhatian yang lebih serius.
- c. Belum adanya sarana pendukung pertanian yang memadai seperti sistem irigasi dan pola pertanian.
- d. Akses permodalan dan pemasaran hasil produk masih lemah.
- e. Belum ada dukungan peraturan daerah yang menjamin usaha masyarakat.

Peluang:

- a. Diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 *juncto* No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Diberlakukannya Undang-Undang nomor 11 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu.
- c. Potensi sebagai daerah agropolitan.

Ancaman:

- a. Adanya pesaing oleh kelompok pemodal besar sehingga dapat mengancam kelangsungan usaha masyarakat setempat.

11. Desa Bulukerto

Kekuatan:

- a. Tersedia lahan pertanian cukup luas, yaitu seluas 22 Ha untuk sawah, 445 Ha untuk tegalan dan 47 Ha untuk kebun.
- b. Penghasil tanaman hortikultura sayur mayur, buah dan bunga hias.
- c. Sentra peternakan kelinci.
- d. Jumlah penduduk 5 390 dengan kepadatan 535 jiwa/Km².
- e. Tersedia jaringan telepon, air bersih dan listrik.
- f. Sarana transportasi yang mudah dan jalan yang sudah beraspal.

Kelemahan:

- a. Belum adanya kelembagaan dalam mengelola potensi ekonomi, sehingga penduduk belum mencapai taraf kehidupan yang layak.
- b. Kelembagaan petani yang masih lemah.

- c. Belum adanya sarana pendukung pertanian yang memadai seperti sistem irigasi dan pola pertanian.
- d. Akses permodalan dan pemasaran hasil produk masih lemah.
- e. Belum ada dukungan peraturan daerah yang menjamin usaha masyarakat.

Peluang:

- a. Diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 *juncto* No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- a. Diberlakukannya Undang-Undang nomor 11 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu.
- b. Potensi sebagai sentra pengembangan peternakan.

Ancaman:

- a. Adanya pesaing oleh kelompok pemodal besar sehingga dapat mengancam kelangsungan usaha masyarakat setempat.

12. Desa Gunungsari

Kekuatan:

- a. Tersedia lahan pertanian cukup luas, yaitu seluas 126 Ha untuk sawah, 65 Ha untuk tegalan, 18 Ha untuk kebun dan 3 244 untuk hutan.
- b. Penghasil tanaman hortikultura sayur mayur, buah dan bunga hias.
- c. Daerah pengembangan perikanan air tawar.
- d. Keterampilan petani yang cukup baik
- e. Jumlah penduduk 5 961 dengan kepadatan 866 jiwa/Km².
- f. Tersedia jaringan telepon, air bersih dan listrik.
- g. Sarana transportasi yang mudah dan jalan yang sudah beraspal.

Kelemahan:

- a. Belum adanya kelembagaan dalam mengelola potensi ekonomi, sehingga penduduk belum mencapai taraf kehidupan yang layak.
- b. Kelembagaan petani yang masih lemah.
- c. Belum adanya sarana pendukung pertanian yang memadai seperti sistem irigasi dan pola pertanian.
- d. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup.
- e. Belum ada dukungan peraturan daerah yang menjamin usaha masyarakat.

Peluang:

- a. Diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 *juncto* No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Diberlakukannya Undang-Undang nomor 11 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu.
- c. Potensi sebagai daerah agropolitan.

Ancaman:

- a. Adanya pesaing oleh kelompok pemodal besar sehingga dapat mengancam kelangsungan usaha masyarakat setempat.
- b. Degradasi dan kerusakan lingkungan.

13. Desa Punten

Kekuatan:

- a. Tersedia lahan pertanian cukup luas, yaitu seluas 106 Ha untuk sawah dan kebun serta 125 Ha untuk hutan.
- b. Penghasil tanaman hortikultura sayur mayur, buah dan bunga hias.
- c. Keberadaan Hotel Purnama dan Wijaya yang tingkat huniannya tinggi.
- d. Banyak terdapat *home industry* konveksi dan bubut kayu.
- e. Jumlah penduduk 5 069 dengan kepadatan 2 060 jiwa/Km².
- f. Tersedia jaringan telepon, air bersih dan listrik.
- g. Sarana transportasi yang mudah dan jalan yang sudah beraspal.

Kelemahan:

- a. Belum adanya kelembagaan dalam mengelola potensi ekonomi, sehingga penduduk belum mencapai taraf kehidupan yang layak.
- b. Kelembagaan petani yang masih lemah.
- c. Belum adanya sarana pendukung pertanian yang memadai seperti sistem irigasi dan pola pertanian.
- d. Belum ada dukungan peraturan daerah yang menjamin usaha masyarakat.

Peluang:

- a. Diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 *juncto* No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Diberlakukannya Undang-Undang nomor 11 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu.

c. Potensi sebagai sentra produksi pertanian tanaman hortikultura.

Ancaman:

- a. Adanya pesaing oleh kelompok pemodal besar sehingga dapat mengancam kelangsungan usaha masyarakat setempat.
- b. Maraknya prostitusi, narkoba, dan tindak kejahatan.

14. Desa Tulungrejo

Kekuatan:

- a. Tersedia lahan pertanian cukup luas, yaitu seluas 360 Ha untuk tegalan, 736 Ha untuk kebun, dan 98 276 Ha untuk hutan.
- b. Penghasil tanaman hortikultura sayur mayur, buah, jamur, dan bunga hias.
- c. Terdapat banyak kawasan wisata seperti Seleкта, pemandian air panas Cangar, kawasan wisata Coban Talun, Arboretum hulu Sungai Brantas dan bumi perkemahan Raden Suryo.
- d. Jumlah penduduk 11 643 dengan kepadatan 166 jiwa/Km².
- e. Tersedia jaringan telepon, air bersih dan listrik.
- f. Sarana transportasi yang mudah dan jalan yang sudah beraspal.

Kelemahan:

- a. Belum adanya kelembagaan dalam mengelola potensi ekonomi, sehingga penduduk belum mencapai taraf kehidupan yang layak.
- b. Kelembagaan petani yang masih lemah dan perlu mendapat perhatian yang lebih serius.
- c. Belum adanya sarana pendukung pertanian yang memadai seperti sistem irigasi dan pola pertanian.
- d. Belum ada dukungan peraturan daerah yang menjamin usaha masyarakat.

Peluang:

- a. Diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 *juncto* No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Diberlakukannya Undang-Undang nomor 11 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu.
- c. Potensi sebagai daerah agropolitan.

Ancaman:

- a. Maraknya prostitusi, narkoba, dan tindak kejahatan.

- b. Adanya pesaing oleh kelompok pemodal besar pada kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat sehingga dapat mengancam kelangsungan usaha masyarakat setempat.

15. Desa Sumbergondo

Kekuatan:

- a. Tersedia lahan pertanian cukup luas, yaitu seluas 34 Ha untuk sawah, 103 Ha untuk kebun, dan 367 Ha untuk hutan.
- b. Penghasil tanaman hortikultura sayur mayur, buah, jamur, dan bunga hias.
- c. Terdapat banyak *home industry* berupa pengolahan kripik apel dan jamur.
- d. Terdapat fasilitas pergudangan.
- e. Jumlah penduduk 3 270 dengan kepadatan 237 jiwa/Km².
- f. Tersedia jaringan telepon, air bersih dan listrik.
- g. Sarana transportasi yang mudah dan jalan yang sudah beraspal.

Kelemahan:

- a. Belum adanya kelembagaan dalam mengelola potensi ekonomi, sehingga penduduk belum mencapai taraf kehidupan yang layak.
- b. Kelembagaan petani yang masih lemah dan perlu mendapat perhatian yang lebih serius.
- c. Belum adanya sarana pendukung pertanian yang memadai seperti sistem irigasi dan pola pertanian.
- d. Jaringan pemasaran hasil produksi yang masih lemah dan kualitas produksi apel yang semakin menurun.
- e. Belum ada dukungan peraturan daerah yang menjamin usaha masyarakat.

Peluang:

- a. Diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 *juncto* No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Diberlakukannya Undang-Undang nomor 11 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu.
- c. Potensi sebagai sentra produksi pertanian tanaman hortikultura.

Ancaman:

- a. Adanya pesaing oleh kelompok pemodal besar sehingga dapat mengancam kelangsungan usaha masyarakat setempat.

16. Desa Giripurno

Kekuatan:

- a. Tersedia lahan pertanian cukup luas, yaitu seluas 158 Ha untuk sawah, 192 Ha untuk tegalan, 148 Ha untuk kebun, dan 898 Ha untuk hutan.
- b. Penghasil tanaman pangan dan hortikultura sayur mayur dan buah.
- c. Daerah pengembangan peternakan ayam petelur dan potong.
- d. Jumlah penduduk 8 103 dengan kepadatan 825 jiwa/Km².
- e. Tersedia jaringan telepon, air bersih dan listrik.
- f. Sarana transportasi yang mudah dan jalan yang sudah beraspal.

Kelemahan:

- a. Belum adanya kelembagaan dalam mengelola potensi ekonomi, sehingga penduduk belum mencapai taraf kehidupan yang layak.
- b. Kelembagaan petani yang masih lemah dan perlu mendapat perhatian yang lebih serius.
- c. Belum adanya sarana pendukung pertanian yang memadai seperti sistem irigasi dan pola pertanian.
- d. Belum ada dukungan peraturan daerah yang menjamin usaha masyarakat.

Peluang:

- a. Diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 *juncto* No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Diberlakukannya Undang-Undang nomor 11 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu.
- c. Potensi sebagai daerah agropolitan.

Ancaman:

- a. Adanya pesaing oleh kelompok pemodal besar sehingga dapat mengancam kelangsungan usaha masyarakat setempat.

Kecamatan Junrejo

17. Desa Tlekung

Kekuatan:

- a. Tersedia lahan pertanian cukup luas, yaitu seluas 46 Ha untuk sawah, 131 Ha untuk tegalan dan 19.5 Ha untuk kebun.
- b. Penghasil pertanian tanaman hortikultura sayur mayur dan buah.

- c. Daerah pengembangan peternakan ayam petelur dan sapi perah.
- d. Jumlah penduduk 3 704 dengan kepadatan 424 jiwa/Km².
- e. Tersedia jaringan telepon, air bersih dan listrik.
- f. Sarana transportasi yang mudah dan jalan yang sudah beraspal.

Kelemahan:

- a. Belum adanya kelembagaan dalam mengelola potensi ekonomi, sehingga penduduk belum mencapai taraf kehidupan yang layak.
- b. Kelembagaan petani yang masih lemah dan perlu mendapat perhatian yang lebih serius.
- c. Belum adanya sarana pendukung pertanian yang memadai seperti sistem irigasi dan pola pertanian.
- d. Belum ada tata niaga yang mengatur pemasaran produksi susu sapi.
- e. Belum ada dukungan peraturan daerah yang menjamin usaha masyarakat.

Peluang:

- a. Diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 *juncto* No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Diberlakukannya Undang-Undang nomor 11 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu.
- c. Potensi sebagai daerah agropolitan.

Ancaman:

- a. Adanya pesaing oleh kelompok pemodal besar sehingga dapat mengancam kelangsungan usaha masyarakat setempat.
- b. Terdapat banyak praktek rentenir.

18. Desa Junrejo

Kekuatan:

- a. Tersedia lahan pertanian cukup luas, yaitu seluas 200 Ha untuk sawah, 125 Ha untuk tegalan, dan 367 Ha untuk hutan.
- b. Penghasil pertanian hortikultura sayur, sentra peternakan sapi perah dan kerajinan kayu serta batu.
- c. Jumlah penduduk 3 726 dengan kepadatan 1 058 jiwa/Km².
- d. Tersedia jaringan telepon, air bersih dan listrik.
- e. Sarana transportasi yang mudah dan jalan yang sudah beraspal.

Kelemahan:

- a. Belum adanya kelembagaan dalam mengelola potensi ekonomi, sehingga penduduk belum mencapai taraf kehidupan yang layak.
- b. Kelembagaan kelompok industri kecil yang masih lemah dan perlu mendapat perhatian yang lebih serius.
- c. Belum adanya sarana pendukung pertanian yang memadai seperti sistem irigasi dan pola pertanian.
- d. Belum ada dukungan peraturan daerah yang menjamin usaha masyarakat.

Peluang:

- a. Diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 *juncto* No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Diberlakukannya Undang-Undang nomor 11 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu.
- c. Potensi sebagai sentra pengembangan industri kecil.

Ancaman:

- a. Adanya pesaing oleh kelompok pemodal besar sehingga dapat mengancam kelangsungan usaha masyarakat setempat.

19. Desa Mojorejo

Kekuatan:

- a. Tersedia lahan pertanian cukup luas, yaitu seluas 141 Ha untuk sawah dan 34 Ha untuk tegalan.
- b. Penghasil pertanian tanaman hortikultura sayur mayur dan bunga.
- c. Sistem pertanian yang cukup maju dengan pola intensifikasi dan pertanian semi modern.
- d. Jumlah penduduk 6 982 dengan kepadatan 3 617 jiwa/Km².
- e. Tersedia jaringan telepon, air bersih dan listrik.
- f. Sarana transportasi yang mudah dan jalan yang sudah beraspal.

Kelemahan:

- a. Belum adanya kelembagaan dalam mengelola potensi ekonomi, sehingga penduduk belum mencapai taraf kehidupan yang layak.
- b. Kelembagaan petani yang masih lemah.
- c. Belum ada dukungan peraturan daerah yang menjamin usaha masyarakat.

Peluang:

- a. Diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 *juncto* No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Diberlakukannya Undang-Undang nomor 11 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu.
- c. Potensi sebagai sentra kerajinan kayu dan bunga hias.

Ancaman:

- a. Adanya pesaing oleh kelompok pemodal besar sehingga dapat mengancam kelangsungan usaha masyarakat setempat.

20. Desa Torongrejo

Kekuatan:

- a. Tersedia lahan pertanian cukup luas, yaitu adalah seluas 213 Ha untuk sawah dan 103 Ha untuk tegalan.
- b. Penghasil pertanian tanaman hortikultura sayur mayur.
- c. Banyak terdapat *home industry*.
- d. Jumlah penduduk 5 041 dengan kepadatan 1 487 jiwa/Km².
- e. Tersedia jaringan telepon, air bersih dan listrik.
- f. Sarana transportasi yang mudah dan jalan yang sudah beraspal.

Kelemahan:

- a. Belum adanya kelembagaan dalam mengelola potensi ekonomi, sehingga penduduk belum mencapai taraf kehidupan yang layak.
- b. Kelembagaan petani yang masih lemah dan perlu mendapat perhatian yang lebih serius.
- c. Belum adanya sarana pendukung pertanian yang memadai seperti sistem irigasi dan pola pertanian.
- d. Belum ada dukungan peraturan daerah yang menjamin usaha masyarakat.

Peluang:

- a. Diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 *juncto* No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Diberlakukannya Undang-Undang nomor 11 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu.
- c. Potensi sebagai sentra souvenir dan industri kecil.

Ancaman:

- a. Adanya pesaing oleh kelompok pemodal besar sehingga dapat mengancam kelangsungan usaha masyarakat setempat.

21. Desa Beji

Kekuatan:

- a. Tersedia lahan pertanian cukup luas, yaitu seluas 20 Ha untuk sawah dan 20 Ha untuk tegalan.
- b. Sistem pertanian yang cukup maju dengan pola intensifikasi dan pertanian semi modern.
- c. Penghasil tanaman hortikultura sayur mayur dan peternakan ayam.
- d. Jumlah penduduk 5 955 dengan kepadatan 2 470 jiwa/Km².
- e. Tersedia jaringan telepon, air bersih dan listrik.
- f. Sarana transportasi yang mudah dan jalan yang sudah beraspal.

Kelemahan:

- a. Belum adanya kelembagaan dalam mengelola potensi ekonomi, sehingga penduduk belum mencapai taraf kehidupan yang layak.
- b. Kelembagaan petani yang masih lemah dan perlu mendapat perhatian yang lebih serius.
- c. Belum adanya sarana pendukung pertanian yang memadai seperti sistem irigasi dan pola pertanian.
- d. Belum ada dukungan peraturan daerah yang menjamin usaha masyarakat.

Peluang:

- a. Diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 *juncto* No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Diberlakukannya Undang-Undang nomor 11 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu.
- c. Potensi sebagai sentra peternakan.

Ancaman:

- a. Adanya pesaing oleh kelompok pemodal besar sehingga dapat mengancam kelangsungan usaha masyarakat setempat.

22. Desa Pendem

Kekuatan:

- a. Tersedia lahan pertanian cukup luas, yaitu seluas 15 Ha untuk sawah dan 34 Ha untuk tegalan.
- b. Penghasil pertanian tanaman hortikultura sayur mayur.
- c. Jumlah penduduk 9 664 dengan kepadatan 2 684 jiwa/Km².
- d. Tersedia jaringan telepon, air bersih dan listrik.
- e. Sarana transportasi yang mudah dan jalan yang sudah beraspal.

Kelemahan:

- a. Belum adanya kelembagaan dalam mengelola potensi ekonomi, sehingga penduduk belum mencapai taraf kehidupan yang layak.
- b. Kelembagaan petani yang masih lemah dan perlu mendapat perhatian yang lebih serius.
- c. Belum adanya sarana pendukung pertanian yang memadai seperti sistem irigasi dan pola pertanian.
- d. Belum ada dukungan peraturan daerah yang menjamin usaha masyarakat.

Peluang:

- a. Diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 *juncto* No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Diberlakukannya Undang-Undang nomor 11 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu.
- c. Potensi sebagai sentra pertanian tanaman hortikultura.

Ancaman:

- a. Adanya pesaing oleh kelompok pemodal besar sehingga dapat mengancam kelangsungan usaha masyarakat setempat.

23. Desa Dadaprejo

Kekuatan:

- a. Tersedia lahan pertanian cukup luas, yaitu seluas 80 Ha untuk sawah dan 14 Ha untuk tegalan
- b. Sistem pertanian yang cukup maju dengan pola intensifikasi dan pertanian semi modern.
- c. Penghasil tanaman hortikultura sayur mayur dan perikanan air tawar.

- d. Terdapat fasilitas pergudangan.
- e. Banyak industri kerajinan onyx.
- f. Jumlah penduduk 5 214 dengan kepadatan 2 518 jiwa/Km².
- g. Tersedia jaringan telepon, air bersih dan listrik.
- h. Sarana akomodasi dan transportasi yang mudah, serta fasilitas perbankan.

Kelemahan:

- a. Belum adanya kelembagaan dalam mengelola potensi ekonomi, sehingga penduduk belum mencapai taraf kehidupan yang layak.
- b. Kelembagaan petani yang masih lemah dan perlu mendapat perhatian yang lebih serius.
- c. Belum ada dukungan peraturan daerah yang menjamin usaha masyarakat.

Peluang:

- a. Diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 *juncto* No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Diberlakukannya Undang-Undang nomor 11 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu.
- c. Potensi sebagai sentra perikanan air tawar.

Ancaman:

- a. Adanya pesaing oleh kelompok pemodal besar sehingga dapat mengancam kelangsungan usaha masyarakat setempat.
- b. Adanya praktik rentenir.

Sumberdaya Potensial

Berdasarkan uraian di atas, dalam Tabel 37 berikut ini disajikan mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada di Kota Batu.

Tabel 38 Identifikasi variabel kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman

No.	Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman
1.	Tanah yang cukup luas dan sesuai untuk pertanian serta tersedia sumber air bersih dalam kapasitas yang besar.	Belum adanya sarana pendukung pertanian yang memadai.	Potensi sebagai daerah agropolitan dan sentra pertanian tanaman hortikultura.	Degradasi dan kerusakan lingkungan.
2.	Banyak terdapat kawasan wisata alam dan buatan.	Belum adanya kelembagaan dalam mengelola potensi ekonomi dan belum optimalnya fungsi kelembagaan aparatur pemerintah.	Citra Kota Batu sebagai kota pariwisata.	Maraknya prostitusi, narkoba, dan tindak kejahatan.
3.	Banyak <i>home industry</i> .	Kesulitan dalam akses permodalan dan pemasaran hasil dan belum adanya dukungan peraturan daerah yang menjamin usaha masyarakat.	Besarnya minat investor untuk menanam modal.	Adanya praktik rentenir dan tengkulak dan pesaing oleh kelompok pemodal besar.
4.	Dukungan sarana transportasi dan komunikasi.	Pemanfaatan tata ruang belum dilaksanakan secara terpadu.	Perkembangan teknologi dan informasi.	Globalisasi di seluruh aspek kehidupan.
5.	Potensi tenaga kerja dan SDM di bidang pertanian.	Orientasi kebijakan pembangunan belum mengarah kepada pemberdayaan masyarakat.	Diberlakukannya UU No. 22/1999 juncto No. 32/2004 dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2001.	Masuknya tenaga kerja dari daerah lain.

Sumber: Diolah sendiri.

Tabel 39 Matriks SWOT

Internal audit Eksternal Environment	Kekuatan (<i>Strength</i>)	Kelemahan (<i>Weakness</i>)
	<ul style="list-style-type: none"> - Tanah cukup luas dan sesuai untuk pertanian serta tersedia tersedianya air bersih dalam jumlah banyak - Banyak terdapat kawasan wisata alam dan buatan. - Banyak <i>home industry</i>. - Dukungan sarana transportasi, komunikasi, dan perbankan. - Potensi tenaga kerja dan SDM yang berkualitas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya sarana pendukung pertanian yang memadai. - Belum adanya kelembagaan dalam mengelola potensi ekonomi. - Kesulitan dalam akses permodalan dan pemasaran hasil - Belum ada dukungan perda yang menjamin usaha masyarakat
Peluang (<i>Opportunity</i>)	Strategi SO	Strategi WO
<ul style="list-style-type: none"> - Diberlakukannya Undang-Undang No. 22/1999 juncto No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. - Diberlakukannya Undang-Undang nomor 11 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu - Potensi sebagai daerah agropolitan dan sentra pertanian tanaman hortikultura. - Besarnya minat investor untuk menanam modal. - Citra Kota Batu sebagai kota pariwisata. - Perkembangan teknologi informasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan dan penataan sektor yang memiliki karakteristik unik. - Meningkatkan kemitraan masyarakat, pemerintah, dan industri strategis. - Pengembangan kawasan wisata dan pasar tradisional yang integral yang melibatkan masyarakat lokal dan nilai-nilai lokal. - Memperluas lapangan dan kesempatan kerja. - Melakukan pembangunan desa-kota berimbang. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan pola pertanian terpadu dengan penguatan kelembagaan dan kapasitas masyarakat. - Meningkatkan promosi dan menata sistem pemasaran hasil produksi pertanian dan kerajinan. - Penguatan kelembagaan dalam mengelola potensi ekonomi.
Ancaman (<i>Threat</i>)	Strategi ST	Strategi WT
<ul style="list-style-type: none"> - Degradasi dan kerusakan lingkungan. - Maraknya prostitusi, narkoba, dan tindak kejahatan. - Adanya praktik rentenir dan tengkulak. - Adanya pesaing oleh kelompok pemodal besar. - Masuknya tenaga kerja dari daerah lain. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan lahan yang berwawasan lingkungan dengan melakukan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan. - Meningkatkan fasilitas perbankan dan koperasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Perlunya regulasi yang menjamin usaha masyarakat. - Meningkatkan akses permodalan dengan memberikan fasilitas kemudahan kredit dan pinjaman. - Penguatan kelembagaan dan kapasitas masyarakat dalam menumpas penyakit masyarakat.

Sumber: Diolah sendiri.

Dari analisis di atas terlihat bahwa sumberdaya dasar yang potensial di Kota Batu adalah kondisi tanahnya sebagian besar sesuai untuk lahan pertanian dan tersedia dalam jumlah cukup luas, terdapat banyak sumber mata air dengan kapasitas debit air yang besar, banyak terdapat kawasan wisata alam dan buatan, banyak terdapat *home industry*, adanya dukungan sarana akomodasi, transportasi, komunikasi, dan perbankan serta potensi tenaga kerja dan kualitas sumberdaya manusia di bidang pertanian.

Potensi sumberdaya dasar tersebut perlu disinergikan dan dioptimalkan melalui serangkaian program intensifikasi pertanian, mekanisme perlindungan melalui peraturan perundang-undangan yang berpihak dan pengembangan wisata yang menonjolkan karakteristik tertentu. Juga diperlukan adanya regulasi yang memberikan perlindungan dan jaminan usaha masyarakat sehingga pemodal besar dari luar daerah, para tengkulak, dan aktifitas ekonomi yang meningkatkan biaya transaksi dapat dikurangi. Investor pemodal besar dapat menanamkan modalnya tetapi melalui pola kemitraan strategis dengan masyarakat lokal. Sementara peran tengkulak dapat dikurangi melalui cara penguatan kapasitas dan kelembagaan lokal dengan menata aspek produksi dan pemasarannya.

Dalam upaya meminimalisir terjadinya penyakit masyarakat yang bisa menjadi ancaman diperlukan adanya penguatan kelembagaan dan kapasitas masyarakat lokal. Sementara untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah maka perlu dilakukan pembangunan desa-kota yang berimbang.

Kegiatan investasi dan penguatan kelembagaan ekonomi serta kapasitas masyarakat dilakukan berdasarkan keunggulan kompetitif guna memperluas kesempatan kerja melalui program penciptaan iklim usaha yang kondusif, memfasilitasi dan mendukung investasi di bidang pertanian, pariwisata, jasa, dan perdagangan dengan pola kemitraan yang sinergis antara pengusaha dan masyarakat dengan sistem regulasi yang konsisten dan memadai.

Dalam konteks kelokalan perlu memberikan penguatan terhadap kapasitas dan kelembagaan masyarakat lokal dengan mengembangkan Badan Usaha Milik Daerah hingga ke tingkat desa (BUMDes) yang efisien, profesional dan transparan terutama berkaitan dengan usaha yang berhubungan dengan kepentingan umum dalam penyediaan fasilitas publik dan pengelolaan aset strategis.

Ikhtisar

Analisis SWOT setiap desa dan kelurahan menunjukkan bahwa secara akumulasi sumberdaya potensial ada di wilayah Kecamatan Batu dengan domain kegiatan ekonomi utama adalah bidang pertanian, wisata, jasa, dan perdagangan. Sedangkan Kecamatan Bumiaji dan Kecamatan Junrejo sebagai daerah penyangga (*hinterland*) Kecamatan Batu mempunyai sumberdaya potensial di bidang pertanian, peternakan, kawasan wisata alam, industri kecil, dan perdagangan hasil pertanian.

Dari Tabel 39 di atas dapat dijelaskan bahwa untuk memanfaatkan kekuatan agar dapat meraih peluang bisa ditempuh dengan strategi: (1) Mengembangkan dan menata sektor-sektor yang memiliki karakteristik unik; (2) Meningkatkan kemitraan masyarakat, pemerintah, dan industri strategis; (3) Mengembangkan kawasan wisata dan pasar tradisional yang integral yang melibatkan masyarakat lokal dan nilai-nilai lokal; (4) Memperluas lapangan dan kesempatan kerja; dan (5) Melakukan strategi pembangunan desa-kota yang berimbang.

Untuk memanfaatkan kekuatan secara maksimal guna mengantisipasi ancaman dan berusaha menjadikannya sebagai peluang dapat ditempuh dengan strategi: (1) Memanfaatkan lahan yang berwawasan lingkungan dengan melakukan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan; dan (2) Meningkatkan fasilitas perbankan dan koperasi.

Agar dapat meminimalkan kelemahan guna meraih peluang dapat ditempuh dengan cara: (1) Mengembangkan pola pertanian terpadu dengan menguatkan kelembagaan dan kapasitas masyarakat; (2) Meningkatkan promosi dan menata sistem pemasaran hasil produksi pertanian dan kerajinan; dan (3) Menguatkan kelembagaan dalam mengelola potensi ekonomi.

Sedangkan untuk meminimalkan kelemahan agar terhindar dari ancaman dapat ditempuh dengan cara: (1) Menciptakan regulasi yang menjamin usaha masyarakat; (2) Meningkatkan akses permodalan dengan memberikan fasilitas kemudahan kredit dan pinjaman; dan (3) Menguatkan kelembagaan dan kapasitas masyarakat dalam menumpas penyakit masyarakat.

KETERKAITAN POLA PENGANGGARAN, SEKTOR UNGGULAN, DAN SUMBERDAYA DASAR

Dengan desentralisasi, maka pemerintah daerah harus menyusun perencanaan pembangunannya sendiri. Ada tiga elemen dalam perencanaan daerah, yaitu fisik, sosial, dan fiskal. Ketiganya merupakan hal yang saling membutuhkan dan tidak bisa dipisahkan. Kesuksesan sebuah proses perencanaan sangat tergantung kepada keseimbangan yang tepat antara ketiganya serta kompetensi dalam menggabungkan ketiga hal tersebut. Sektor fisik merupakan sektor yang dominan dalam perencanaan sampai paruh pertama tahun 1960-an, setelah beberapa tahun kemudian, sektor fisik digabungkan dengan kajian mengenai dampak sosial dari perencanaan. Baru kemudian elemen fiskal menjadi pusat perhatian. Perhatian terhadap fiskal meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan terhadap upaya untuk memproyeksikan pendapatan dan biaya-biaya baik yang dikeluarkan untuk rutin dan pembangunan.

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi menuntut perencanaan terpadu antarsektor. Pengambil keputusan tidak hanya melihat pengaruh kebijakan sektor tertentu pada perkembangan sektor tersebut, tetapi juga harus melihat pengaruhnya terhadap sektor-sektor lainnya. Pengaruh perkembangan sektor terhadap sektor lain bisa positif atau negatif. Pengaruh positif berarti bahwa peningkatan output sektor tertentu menyebabkan peningkatan output sektor lain. Di sini dapat dikatakan bahwa kedua sektor tersebut memiliki hubungan komplementer. Sebaliknya, pengaruh negatif berarti bahwa peningkatan output sektor tertentu menyebabkan penurunan output sektor lain. Kedua sektor tersebut memiliki hubungan substitusi. Hubungan negatif ini dapat disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah dukungan ketersediaan sumberdaya wilayah yang terbatas, sehingga setiap kegiatan ekonomi memiliki biaya oportunitas. Ini berarti bahwa pihak eksekutif dan legislatif dituntut untuk mampu memperhitungkan bagaimana kebijakan yang diterapkan pada suatu sektor akan berpengaruh pada sektor lain dan perekonomian makro daerah.

Perencanaan pembangunan ekonomi daerah terintegrasi antarsektor diharapkan mampu memberikan pedoman bagi arah pembangunan daerah.

Pencapaian hasil pembangunan daerah merupakan isu utama bagi masyarakat. Perubahan keadaan yang lebih baik karena adanya pembangunan daerah akan meningkatkan apresiasi masyarakat kepada pemerintah daerah yang selanjutnya akan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah.

Untuk mengetahui prestasi ekonomi makro suatu daerah dapat dinilai dengan berbagai ukuran agregat. Secara umum, prestasi tersebut diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Meskipun bukan merupakan satu-satunya ukuran untuk menilai prestasi ekonomi suatu daerah, PDRB cukup representatif dan sangat lazim digunakan. PDRB bukan hanya berguna untuk menilai perkembangan ekonomi suatu daerah dari waktu ke waktu, tetapi juga membandingkannya dengan daerah lain. Rincian sektoral dapat menerangkan struktur perekonomian daerah yang bersangkutan. Di samping itu, dari angka PDRB selanjutnya dapat pula diperoleh ukuran turunannya seperti pertumbuhan ekonomi, yang menunjukkan perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang terjadi dari tahun ke tahun dan pendapatan PDRB perkapita.

Dari hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu analisis keterkaitan antar sektor dengan metode input-output, analisis sistem mekanisme penyusunan belanja pembangunan APBD Kota Batu dengan metode *Analytic Hierarchy Process*, analisis struktur belanja pembangunan APBD Kota Batu, dan analisis sumberdaya potensial Kota Batu, menunjukkan bahwa pembangunan dan pengembangan wilayah Kota Batu selama ini belum sepenuhnya memperhatikan sektor unggulan dan sumberdaya yang ada di Kota Batu. Mengingat dari hasil analisis sistem mekanisme penyusunan belanja pembangunan APBD Kota Batu dengan metode *Analytic Hierarchy Process* menunjukkan bahwa sektor unggulan menjadi prioritas yang diperhatikan dalam penyusunan belanja pembangunan APBD Kota Batu, namun jika melihat struktur APBD Kota Batu terlihat bahwa dukungan anggaran terhadap pengembangan sektor unggulan sangat lemah. Hal ini menunjukkan adanya permasalahan dalam basis pengetahuan sehingga terjadi kekurang-sadaran tentang apa yang dipikirkan dengan apa yang dilakukan. Kenyataan yang terjadi di lapangan adalah kekurang-tepatan dalam menempatkan orang yang ditugaskan untuk menyusun plafon dan prioritas APBD.

Sektor-sektor unggulan dan sumberdaya yang ada di Kota Batu selama ini belum mendapatkan dukungan dari kebijakan anggaran yang memadai. Sebagaimana terlihat dalam Tabel 40 berikut ini:

Tabel 40 Sektor unggulan, sumberdaya dasar, dan dukungan anggaran

Sektor Unggulan dan Sumberdaya Dasar	Dukungan Anggaran	
	Nominal (Rp)	Persentase
A. Sektor unggulan:		
1. Industri.	305 000 000	0.51
2. Pariwisata.	2 300 465 000	3.88
3. Perdagangan.	1 610 000 000	2.71
4. Bangunan.	1 714 997 000	2.89
5. Pertanian.	1 860 730 000	3.14
B. Sumberdaya dasar		
1. Kondisi tanahnya sebagian besar sesuai untuk lahan pertanian dan tersedia dalam jumlah cukup luas.	1 860 730 000	3.14
2. Banyak sumber mata air.	1 065 079 000	1.8
3. Banyak terdapat kawasan wisata.	2 300 465 000	3.88
4. Banyak terdapat <i>home industry</i> .	305 000 000	0.51
5. Potensi tenaga kerja dan kualitas sumberdaya manusia.	220 000 000	0.37

Sektor industri pengolahan yang merupakan sektor unggulan yang sangat potensial untuk dikembangkan dalam pembangunan ekonomi di Kota Batu karena mempunyai angka pengganda output sebesar 1.35, angka pengganda pendapatan sebesar 1.56, angka pengganda tenaga kerja sebesar 2.88, derajat kepekaan sebesar 0.64 dan daya penyebaran sebesar 0.28 serta kontribusi ke PDRB sebesar 12.43. Pembangunan sektor ini tidak mendapat dukungan alokasi anggaran pembangunan yang memadai sebab dalam alokasi belanja pembangunan Kota Batu tahun 2003 hanya mendapatkan anggaran sebesar Rp305 000 000,- atau sebesar 0.51% dari total belanja pembangunan atau hanya mengalami kenaikan sebesar 0.04% dari tahun anggaran 2002.

Begitu juga dengan sektor pertanian yang hanya memperoleh alokasi biaya pembangunan sebesar Rp1 860 730 000,- atau sebesar 3.14% dari total belanja pembangunan atau hanya mengalami kenaikan sebesar 1.5% dari tahun anggaran 2002. Padahal sektor ini termasuk sektor unggulan karena merupakan salah sektor

yang banyak menyerap tenaga kerja dan memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB Kota Batu.

Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena berkaitan dengan tujuan dari pemerintahan itu sendiri untuk mensejahterakan masyarakatnya. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang terintegrasi. Oleh karenanya, output dari perencanaan adalah penganggaran. Jika diilustrasikan dalam proses pemupukan tanaman maka sektor unggulan dianalogkan sebagai tanaman, sumberdaya dasar sebagai lahannya, dan pola penganggaran sebagai pupuknya. Agar tanaman dapat tumbuh dengan baik tentunya harus ditanam di lahan yang sesuai dan dengan pola pemupukan yang tepat. Artinya bahwa pemberian pupuk harus dalam jumlah dosis yang tepat (tidak kurang atau lebih), waktu pemupukan yang tepat, dan jenis pupuk serta lokasi pemupukan yang sesuai. Jika pemberian pupuk tidak tepat dalam jumlah dosis, waktu, dan tempat pemupukan serta jenis pupuk, maka tanaman tidak akan tumbuh dengan baik dan sempurna malah mungkin tanaman akan mati. Begitu juga dalam proses pembangunan dan pengembangan wilayah. Agar berhasil dengan baik, maka pola penganggaran harus tepat (tidak kurang atau lebih), waktu pelaksanaan anggaran yang tepat, jenis pengeluaran dan penerimaan anggaran dan lokasi atau daerah yang sesuai.

Oleh sebab itu, sudah saatnya Pemerintah Kota Batu untuk meninjau ulang kebijakan pembangunan khususnya mengenai penyusunan pola penganggarnya dengan memperhatikan sektor unggulan dan sumberdaya yang ada. Pembangunan Kota Batu semestinya diarahkan kepada peningkatan daya saing produk, bukan lagi pada upaya maksimisasi ekstraksi transfer surplus daerah pertanian seperti yang terjadi di masa lalu. Pembangunan di Kota Batu harus didesain dengan lebih mengutamakan program pemberdayaan masyarakat perdesaan agar mampu mandiri dan bersaing dalam persaingan global. Dengan demikian, Pemerintah Kota Batu dituntut mampu menggali dan mengembangkan keunggulan lokal serta menciptakan sinergi antar kawasan di Kota Batu dengan didukung oleh pola penganggaran yang tepat dan memadai.

Selain itu juga, Pemerintah Kota Batu dapat memanfaatkan sumberdaya dasar yang ada di Kota Batu untuk pengembangan industri agrowisata dengan

cara menata kembali berbagai potensi dan kekayaan alam dan hayati berbasis pada pengembangan kawasan secara terpadu. Potensi wisata alam, baik alami maupun buatan, seharusnya dikembangkan secara baik dan menjadi andalan. Banyak potensi alam yang belum tergarap secara optimal. Pengembangan kawasan wisata alam dan agro mampu memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah, membuka peluang usaha, dan kesempatan kerja serta sekaligus berfungsi menjaga dan melestarikan kekayaan alam dan hayati. Apalagi kebutuhan pasar wisata agro dan alam cukup besar dan menunjukkan peningkatan di seluruh dunia.

Kota Batu memiliki sumberdaya yang cukup besar yang mampu memenuhi persyaratan untuk dikembangkan menjadi kawasan agrowisata, yaitu:

1. Memiliki sumberdaya lahan dengan agroklimat yang sesuai untuk mengembangkan komoditi pertanian yang akan dijadikan komoditi unggulan.
2. Memiliki prasarana dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pengembangan sistem dan usaha agrowisata, seperti misalnya: jalan, sarana irigasi, sumber air baku, pasar, terminal, jaringan telekomunikasi, fasilitas perbankan, pusat informasi pengembangan agribisnis, sarana produksi pengolahan hasil pertanian, dan fasilitas umum serta fasilitas sosial lainnya.
3. Memiliki sumberdaya manusia yang berkemauan dan berpotensi untuk mengembangkan kawasan agrowisata.
4. Pengembangan agrowisata tersebut mampu mendukung upaya-upaya konservasi alam dan kelestarian lingkungan hidup bagi kelestarian sumberdaya alam, kelestarian sosial budaya maupun ekosistem secara keseluruhan.

Pengembangan industri pariwisata khususnya agrowisata memerlukan kreativitas dan inovasi, kerjasama dan koordinasi serta promosi dan pemasaran yang baik. Pengembangan agrowisata berbasis kawasan berarti juga adanya keterlibatan unsur-unsur wilayah dan masyarakat secara intensif.

ARAHAN OPTIMALISASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BATU

Untuk optimalisasi kinerja pembangunan daerah Kota Batu, hendaknya kebijakan pembangunan diarahkan kepada sektor-sektor yang memiliki keunggulan yang menjadi prioritas daerah. Prioritas pembangunan disesuaikan dengan visi, misi, dan kondisi keuangan daerah Kota Batu. Hasil analisis menunjukkan bahwa sektor industri, restoran, bangunan, hotel, listrik dan air bersih, perdagangan, dan pertanian merupakan sektor yang memiliki struktur keterkaitan antarsektor yang kuat di Kota Batu sehingga memberikan *multiplier effects* yang tinggi terhadap pendapatan, penyerapan tenaga kerja, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Batu diharapkan dapat mendorong perkembangan sektor tersebut.

Sektor pertanian yang memiliki kontribusi cukup tinggi terhadap PDRB dan menyerap banyak tenaga kerja bila dilihat dari indikator-indikator yang dianalisis tidak muncul sebagai sektor unggulan kecuali untuk indikator angka pengganda pajak tak langsung neto. Namun begitu, sektor ini tetap menjadi sektor prioritas yang harus mendapatkan perhatian dalam pembangunan wilayah Kota Batu mengingat bahwa sektor ini merupakan sektor penyedia bahan pangan. Selain itu, banyak penduduk Kota Batu yang bekerja di sektor ini dan ketersediaan lahan yang luas serta cocok untuk pertanian maupun perkebunan. Cara yang dapat dilaksanakan adalah dengan menciptakan sentra produksi pertanian atau membangun kawasan agropolitan mengingat bahwa kondisi dan sumberdaya dasar Kota Batu sangat mendukung dibangunnya kawasan agropolitan.

Penyusunan APBD harus disinkronkan dengan target kinerja yang akan dicapai. Seandainya problem yang akan diselesaikan adalah masalah pengangguran, maka alokasi anggaran diarahkan untuk sektor yang mempunyai angka pengganda tertinggi dalam menyerap tenaga kerja. Jika problem yang akan diselesaikan adalah masalah kemiskinan, maka alokasi anggaran diarahkan untuk sektor yang mempunyai angka pengganda tertinggi dalam meningkatkan pendapatan. Tetapi jika yang akan diselesaikan adalah masalah penerimaan

daerah, maka alokasi anggaran Kota Batu diarahkan untuk sektor yang mempunyai angka pengganda tertinggi dalam meningkatkan penerimaan daerah.

Selama ini penyusunan APBD Kota Batu belum sepenuhnya memperhatikan sektor unggulan dan sumberdaya dasar yang ada di Kota Batu. Sebagai kota yang baru terbentuk, pembangunannya diprioritaskan untuk sektor belanja aparatur pemerintahan dan pembangunan fisik sektor perhubungan. Untuk ke depannya, penyusunan APBD Kota Batu sepenuhnya harus memperhatikan sektor unggulan dan sumberdaya dasar yang ada di Kota Batu seperti industri pengolahan, pariwisata, pertanian dan tenaga kerja.

Perencanaan terintegrasi antarsektor menuntut koordinasi antar perencanaan di dinas, kantor, dan instansi lainnya di Kota Batu. Kerjasama dan koordinasi antar berbagai *stakeholder* terkait dalam perencanaan pembangunan wilayah sangat penting dan menjadi faktor kunci keberhasilan dalam optimalisasi kinerja pembangunan daerah Kota Batu. Kerjasama dan koordinasi antar berbagai *stakeholder* dapat bervariasi, mulai dari informasi sampai dengan bentuk kerjasama yang legal dan formal. Sedangkan areal kerjasama juga sangat luas meliputi semua proses pengembangan wilayah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan termasuk operasional sampai kepada pemantauan kegiatan agar dapat dicapai sasaran secara berkelanjutan dengan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Peran perguruan tinggi sebagai *center of excellence* dapat menjadi mitra pemerintah daerah dalam pengembangan riset di berbagai bidang termasuk dalam pengembangan wilayah baik yang berkaitan dengan budidaya pertanian, peternakan, perikanan, industri, kerajinan dan pengembangan wisata. Studi, penelitian, dan pengembangan maupun konsultasi diharapkan dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Pengembangan wilayah juga memerlukan peran dari lembaga swadaya masyarakat yang memiliki cukup banyak data dan informasi yang dapat dijadikan referensi dan bahan penunjang untuk perencanaan dan pengembangan wilayah. Masyarakat, LSM, dan pemerintah diharapkan memiliki interaksi yang konstruktif untuk pengembangan wilayah. Fungsi LSM antara lain dapat berperan untuk:

1. Memberikan fungsi kontrol dan pengawasan terhadap program pemerintah.

2. Memberikan masukan, kritik, dan saran atas pedoman perencanaan wilayah yang ada dan sedang berjalan, sehingga diharapkan akan memberikan *feedback* yang baik untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Stakeholder yang mempunyai peranan sangat penting dalam pengembangan wilayah adalah masyarakat dan dunia usaha. Dalam rangka mewujudkan optimalisasi kinerja pembangunan wilayah maka perlu terus didorong keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dengan pendekatan *community driven planning*. Dengan pendekatan ini diharapkan:

1. Terciptanya kesadaran, kesepakatan, dan ketaatan masyarakat dan dunia usaha terhadap aturan tata ruang dan sarana-sarana pendukungnya.
2. Masyarakat dan dunia usaha ikut merencanakan, menggerakkan, melaksanakan, dan juga mengontrol pelaksanaan program pengembangan wilayah dan penataan ruang kawasannya.
3. Adanya kesadaran hukum dan budaya masyarakat akan pentingnya tata ruang kawasan, sehingga masyarakat dan dunia usaha selalu berkoordinasi dan berhubungan dengan instansi pemerintah terkait jika melakukan kegiatan yang berkaitan dan berhubungan dengan usaha agribisnis dan agrowisata.
4. Meningkatkan legitimasi program pembangunan wilayah.
5. Masyarakat dan dunia usaha menjadi subjek dan objek langsung dari program pengembangan wilayah.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah dan desentralisasi, Pemerintah Kota Batu juga harus mulai menjalankan perencanaan partisipatif dalam perencanaan pengembangan wilayah Kota Batu. Forum-forum koordinasi, baik untuk penyusunan kebijakan dan dokumen perencanaan jangka panjang, menengah, maupun jangka pendek harus melibatkan pihak-pihak terkait. Partisipasi diartikan sebagai suatu motivasi dan keterlibatan masyarakat secara aktif dan terorganisasikan dalam seluruh tahap pembangunan. Partisipasi masyarakat biasanya diwujudkan dalam bentuk kemampuan dalam mengenali kebutuhan dan kemampuan mereka sendiri. Berdasarkan atas kebutuhan dan potensi itu mereka mampu menganalisis tentang masalah mereka. Selanjutnya mereka mampu mencari jalan untuk mengatasi masalah itu dengan melaksanakan kegiatan yang mereka rencanakan sendiri.

Selama ini, dalam berbagai hal, peran masyarakat dalam pembangunan seringkali tidak dihiraukan dan dianggap tidak penting. Banyak pemerintah daerah tidak mengetahui bagaimana cara untuk mendorong sekaligus membangun peran masyarakat agar mampu mempengaruhi proses pengambilan kebijakan. Beberapa masalah yang menghambat partisipasi masyarakat di Kota Batu antara lain adalah:

1. Kurangnya kemauan politik (*political will*) dari pemerintah.
2. Minimnya pengetahuan pemerintah tentang kekuatan, kegiatan, dan kapasitas masyarakat.
3. Minimnya rasa saling percaya diantara para pelaku.
4. Perbedaan kepentingan yang tidak dapat dikompromikan.
5. Perbedaan posisi tawar masing-masing pelaku.
6. Perbedaan persepsi diantara para pelaku mengenai bentuk, mekanisme, serta proses partisipasi itu sendiri.
7. Minimnya transparansi.
8. Ketidakmampuan dalam mengorganisasikan partisipasi.
9. Adanya inkonsistensi antara kesepakatan-kesepakatan yang merupakan hasil partisipasi dengan implementasinya.

Hambatan-hambatan tersebut di atas harus dihilangkan mengingat bahwa optimalisasi kinerja pembangunan daerah akan tercipta jika masyarakat berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembangunan.

Kota Batu secara matang harus siap menerima perubahan bentuk masyarakat yang makin pluralistik dalam arti manusia dan kemanusiaan. Sifat pluralistik ini diantisipasi dengan pola otonomi daerah atas dasar demokrasi dan kedaulatan rakyat. Sifat pluralistik ini harus dimanfaatkan dan dijadikan sebagai kekuatan karena ada lebih banyak pilihan yang terbaik. Ini penting untuk mendukung ketangguhan bersaing yang lebih baik.

Pembangunan Kota Batu ke depan harus membuat masyarakat makin mampu membaca peluang dari keadaan yang berlaku. Peluang ini kemudian harus mampu ditransformasikan menjadi rencana tindakan yang nyata. Pelaksanaan rencana tindakan ini perlu melibatkan makin banyak *stakeholder* Kota Batu yang handal dan profesional serta dengan wawasan nasionalisme yang kental, bahwa desa harus ikut maju dan imbang sesuai dengan kemajuan kotanya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat ditarik kesimpulan umum bahwa keterkaitan pola penganggaran, sektor unggulan, dan sumberdaya dasar untuk optimalisasi kinerja pembangunan daerah Kota Batu selama ini masih sangat lemah. Sedangkan untuk kesimpulan khusus adalah sebagai berikut:

1. Sektor ekonomi yang memiliki struktur keterkaitan antarsektor yang kuat (sektor unggulan) di Kota Batu sehingga memberikan *multiplier effects* yang tinggi terhadap pendapatan, penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat adalah sektor industri, pariwisata (hotel dan restoran), bangunan, listrik dan air bersih, perdagangan, dan pertanian.
2. Menurut pendapat gabungan para informan, selama ini sistem mekanisme penyusunan belanja pembangunan APBD Kota Batu lebih memberi prioritas kepada sektor unggulan dengan nilai bobot 34.6%, kemudian pembangunan berkelanjutan dengan nilai bobot 32.8%, dan pemberdayaan masyarakat dengan nilai bobot 32.7%.
3. Dari hasil analisis struktur belanja pembangunan APBD Kota Batu terlihat bahwa sektor aparat pemerintah dan pengawasan, sektor transportasi, meteorologi, dan geofisika, serta sektor pembangunan daerah dan transmigrasi mendapatkan alokasi belanja pembangunan masing-masing sebesar 22.01%, 15.48%, dan 15.37% dari total belanja pembangunan.
4. Sumberdaya dasar yang potensial di Kota Batu adalah kondisi tanahnya sebagian besar sesuai untuk lahan pertanian dan tersedia dalam jumlah cukup luas, terdapat banyak sumber mata air dengan kapasitas debit air yang besar, banyak terdapat kawasan wisata alam dan buatan, banyak terdapat *home industry*, adanya dukungan sarana akomodasi, transportasi, komunikasi, dan perbankan serta potensi tenaga kerja dan kualitas sumberdaya manusia di bidang pertanian.
5. Pola penyusunan belanja pembangunan APBD Kota Batu selama ini belum sepenuhnya memperhatikan sektor unggulan dan sumberdaya yang ada di Kota Batu.

Saran

1. Pemerintah Kota Batu harus meninjau ulang kebijakan pembangunan khususnya mengenai penyusunan pola penganggarnya dengan memperhatikan sektor unggulan dan sumberdaya yang ada. Pembangunan di Kota Batu harus didesain dengan lebih mengutamakan program pemberdayaan masyarakat perdesaan agar mampu mandiri dan bersaing dalam persaingan global. Dengan demikian, Pemerintah Kota Batu dituntut untuk mampu menggali dan mengembangkan keunggulan lokal serta menciptakan sinergi antarkawasan di Kota Batu dengan didukung oleh pola penganggaran yang tepat dan memadai.
2. Aspek penguatan kapasitas dan kelembagaan masyarakat memerlukan perhatian yang serius dari pemerintah untuk ditindaklanjuti dengan menata kelembagaan ekonomi serta mengoptimalkan sektor unggulan dan sumberdaya potensial guna meminimalisir terjadinya perangkap kemiskinan di masyarakat,
3. Diperlukan adanya regulasi yang memberikan perlindungan dan jaminan usaha masyarakat sehingga institusi pemodal besar dari luar daerah, para tengkulak, dan aktifitas ekonomi yang meningkatkan biaya transaksi dapat dikurangi. Investor pemodal besar dapat menanamkan modalnya tetapi melalui pola kemitraan strategis dengan masyarakat lokal. Sementara peran tengkulak dapat dikurangi dengan cara penguatan kapasitas dan kelembagaan lokal serta menata aspek produksi dan pemasarannya.
4. Selain itu, Pemerintah Kota Batu dapat memanfaatkan sumberdaya dasar yang ada di Kota Batu untuk pengembangan industri agrowisata dengan cara menata kembali berbagai potensi dan kekayaan alam yang berbasis pada pengembangan kawasan secara terpadu. Potensi wisata seharusnya dikembangkan secara baik dan menjadi andalan. Banyak potensi alam yang belum tergarap secara optimal. Pengembangan kawasan wisata mampu memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah, membuka peluang usaha dan kesempatan kerja serta sekaligus berfungsi menjaga dan melestarikan kekayaan alam dan hayati.

DAFTAR PUSTAKA

Arsyad L. 1999. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Edisi Pertama. Yogyakarta: PT BPFPE.

Ary S.1999. Peranan Sumberdaya Manusia dalam Pengembangan Wilayah di Indonesia. Di dalam : Alkadri, Muchdie, dan Suhandoyo (Penyunting). Tiga Pilar Pengembangan Wilayah : Sumberdaya Alam, Sumberdaya Manusia, Teknologi. Jakarta: Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

[Bappenas] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2004. Tata Cara Perencanaan Pengembangan Kawasan Untuk Percepatan Pembangunan Daerah. Jakarta: Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal Bappenas.

[Bapeko] Badan Perencanaan Kota Batu. 2003. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu (RTRW) Tahun 2003-2013. Batu: Bapeko Batu.

[BPS] Badan Pusat Statistik. 1999. Kerangka Teori dan Analisis Tabel Input – Output. Jakarta: BPS.

-----, 2000. Teknik Penyusunan Tabel Input – Output. Jakarta: BPS.

[BPS] Badan Pusat Statistik Jawa Timur. 2002. Tabel Input – Output Provinsi Jawa Timur Tahun 2000. Surabaya: BPS Jawa Timur.

[BPS] Badan Pusat Statistik Kota Batu. 2002a. Potensi Kecamatan Batu Kota Batu Tahun 2002. Batu: BPS Kota Batu.

-----, 2002b. Potensi Kecamatan Bumiaji Kota Batu Tahun 2002. Batu: BPS Kota Batu.

-----, 2002c. Potensi Kecamatan Junrejo Kota Batu Tahun 2002. Batu: BPS Kota Batu.

-----, 2004a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Batu tahun 2003. Batu: BPS Kota Batu.

-----, 2004b. Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kota Batu tahun 2003. Batu: BPS Kota Batu.

[BPS] Badan Pusat Statistik dan Bapeko Kota Batu. 2004. Kota Batu Dalam Angka tahun 2003. Batu: BPS dan Bapeko Kota Batu.

Barata AA, Trihartanto B. 2004. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Christanto J. 2002. Otonomi Daerah dan Skenario Indonesia 2010 dalam Konteks Pembangunan Daerah dengan Pendekatan Kewilayahan (*Regional Development Approach*). <http://rudycr.tripod.com>. [27 Apr 2005].

David R. 2002. Manajemen Strategis. Jakarta: PT. Prenhallindo.

- [Depkeu] Departemen Keuangan RI. 2005. *Prosedur Penyusunan Anggaran*. <http://www.djpkpd.go.id/sakpd/buku4flow5.htm>. [17 Mei 2005].
- [Deptan] Departemen Pertanian. 2005. *Landasan Teoritis dan Fakta Empiris*. <http://www.deptan.go.id/konsep/landasan.htm>. [28 Feb 2005].
- Dinas Pertanian Kota Batu. 2005. *Database Pertanian Kota Batu Tahun 2004*. Batu: Dinas Pertanian Kota Batu.
- Elmi B. 2002. *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*. Jakarta: UI-Press.
- Fitanto B, Pratomo DS. 2004. *Model Location Quotients dan Shift-Share dalam Perencanaan Ekonomi Regional (Studi Empiris pada Tiga Kabupaten Di Jawa Timur)*. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial (Social Sciences)*16: 187-195.
- Johnson RA, Dean WW. 1928. *Applied Multivariate Statistical Analysis*. New Jersey: Prenticehall International.
- Khoirunrofik. 2002. *Membedah APBD*. [http://www.adkasi.or.id/data/artikel/makalah_Seminar_Adkasi_Medan_\(Rofik\).pdf](http://www.adkasi.or.id/data/artikel/makalah_Seminar_Adkasi_Medan_(Rofik).pdf). [13 Mei 2005].
- [LP EM] Lembaga Penelitian Ekonomi dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang. 2004a. *Studi dan Kajian Potensi Sarana Perekonomian Kota Batu*. Batu: Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Batu.
- , 2004b. *Inventarisasi dan Pemetaan Potensi Sarana Ekonomi di Kota Batu*. Batu: Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Batu.
- Mangiri K. 2000. *Perencanaan Terpadu Pembangunan Ekonomi Daerah Otonom (Pendekatan Input – Output)*. Jakarta: BPS.
- Marimin. 2004. *Teknik dan Aplikasi Pengambilan Keputusan Kriteria Majemuk*. Jakarta: Grasindo.
- Mubyarto. 1989. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta: LP3ES.
- , 1999. *Pengembangan Wilayah, Pembangunan Perdesaan, dan Otonomi Daerah*. Di dalam : Suhandoyo, Sri Handoyo Mukti, dan Tukiyyat (penyunting). *Pengembangan Wilayah Perdesaan dan Kawasan Tertentu; Sebuah Kajian Eksploratif*. Jakarta: Direktorat Kebijakan Teknologi Untuk Pengembangan Wilayah. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- Muchdie. 2002. *Aplikasi Model Input Output Dalam Analisis Perekonomian Wilayah*. Di dalam : Ambardi UM dan Priwantoro (penyunting). *Pembangunan Wilayah dan Otonomi Daerah Kajian Konsep dan Pengembangan*. Jakarta: Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah. Deputi Pengkajian Kebijakan Teknologi. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- Mustopadidjaja AR. 2004. *Sistem Perencanaan, Keserasian Kebijakan, dan Dinamika Pelaksanaan Otonomi Daerah*. <http://www.bappenas.go.id/pnData/ContentExpress/405/Mustopadidjaja%20AR.doc>. [3 Mei 2005].

- Nachrowi ND. 1999. Analisis Sumberdaya Manusia, Otonomi Daerah dan Pengembangan Wilayah. Di dalam : Alkadri, Muchdie, dan Suhandjo (Penyunting). Tiga Pilar Pengembangan Wilayah : Sumberdaya Alam, Sumberdaya Manusia, Teknologi. Jakarta: Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- Nasution T. 1996. Analisis dan Penggunaan Model Input-output dalam Perencanaan. http://www.elfan.net/other/deparsenibud/ind/artikel_.html. [1 Maret 2005].
- Nazara S. 1997. Analisis Input Output. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Nazaruddin, 2004. Memahami APBD dengan Benar - Bagaimana Pelaksanaannya oleh Pemerintah Daerah? http://www.exindo.com/?x=artikel_detil&id_berita=31032005221153 [15 Jul 2005].
- [Pemko] Pemerintah Kota Batu. 2004. Arah dan Kebijakan Umum (AKU) APBD Kota Batu Tahun Anggaran 2005. Batu: Pemko Batu.
- [PSEKP] Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada. 2003. Perencanaan Pembangunan Terintegrasi Antarsektor di Kabupaten Malang. Malang: Badan Perencanaan Kabupaten Malang.
- Riyadi DMM. 2000. Pembangunan Daerah Melalui Pengembangan Wilayah. Jakarta: Deputi Regional dan Sumberdaya Alam Bappenas.
- Riyadi DS. 2002. Pengembangan Wilayah: Teori dan Konsep Dasar. Didalam : Ambardi UM dan Priwantoro (penyunting). Pembangunan Wilayah dan Otonomi Daerah Kajian: Konsep dan Pengembangan. Jakarta: Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah. Deputi Pengkajian Kebijakan Teknologi. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- Saaty. TL. 1983. The Analytic Hierarchy Process. New York: McGraw-Hill International Book Company.
- Saefulhakim S. 2004. Model Input – Output. Bahan Perkuliahan Analisis Kuantitatif Sosial Ekonomi Spasial. Program Studi Perencanaan Wilayah. Sekolah Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor.
- Suhirman, Dedi H. 2001. Distorsi Proses Anggaran dan Penguatan Masyarakat Sipil. www.bigs.com. [11 Jul 2005].
- Tarigan R. 2002. Perencanaan Pembangunan Wilayah Pendekatan Ekonomi dan Ruang. Jakarta: Proyek Peningkatan Penelitian Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Departemen Pendidikan Nasional.
- Triutomo S. 1999. Pengembangan Wilayah Melalui Pembentukan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu. Di dalam: Alkadri, Muchdie, dan Suhandjo (Penyunting). Tiga Pilar Pengembangan Wilayah: Sumberdaya Alam, Sumberdaya Manusia, Teknologi. Jakarta: Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

Wahid AHK. 2001. Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun 2001. <http://www.indonesia.com/bpost/122000/12/opini/opini1.htm>. [17 Mei 2005].

Zen MT. 1999. Falsafah Dasar Pengembangan Wilayah : Memberdayakan Manusia. Di dalam : Alkadri, Muchdie, dan Suhandjo (Penyunting). Tiga Pilar Pengembangan Wilayah : Sumberdaya Alam, Sumberdaya Manusia, Teknologi. Jakarta: Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Batu.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.



Hal Cipta (Hak Cipta) Unsur-unsur:

1. Diciptakan sebagai suatu jalinan karya seni, sastra, ilmu pengetahuan dan pengetahuan umum ;
2. Berwujud sebagai suatu kesatuan intelektual, intelektual, perwujudan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan buku, atau tulisan atau media;
3. Berwujud sebagai suatu kesatuan intelektual yang wajar (IPB University);
4. Berwujud sebagai suatu kesatuan intelektual yang wajar (IPB University);
5. Berwujud sebagai suatu kesatuan intelektual yang wajar (IPB University);
6. Berwujud sebagai suatu kesatuan intelektual yang wajar (IPB University);
7. Berwujud sebagai suatu kesatuan intelektual yang wajar (IPB University);
8. Berwujud sebagai suatu kesatuan intelektual yang wajar (IPB University);
9. Berwujud sebagai suatu kesatuan intelektual yang wajar (IPB University);
10. Berwujud sebagai suatu kesatuan intelektual yang wajar (IPB University);
11. Berwujud sebagai suatu kesatuan intelektual yang wajar (IPB University);
12. Berwujud sebagai suatu kesatuan intelektual yang wajar (IPB University);

LAMPIRAN

Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2001



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2001

TENTANG PEMBENTUKAN KOTA BATU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Provinsi Jawa Timur pada umumnya dan Kabupaten Malang pada khususnya serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dengan mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan pada masa yang akan datang;
- b. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas dan kemajuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya di Kota Administratif Batu Kabupaten Malang, meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah di Kabupaten Malang, perlu membentuk Kota Batu sebagai daerah otonom;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk undang-undang tentang pembentukan Kota Batu untuk mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kota Administratif Batu;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;



4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3811);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
8. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3959);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KOTA BATU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Provinsi Jawa Timur adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur.
3. Kabupaten Malang adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur.

4. Kota Administratif Batu adalah Kota Administratif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kota Administratif Batu.

BAB II PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan undang-undang ini dibentuk Kota Batu di wilayah Provinsi Jawa Timur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Kota Batu berasal dari sebagian daerah Kabupaten Malang yang terdiri atas:

- a. Kecamatan Batu;
- b. Kecamatan Bumiaji; dan
- c. Kecamatan Junrejo.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kota Batu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Malang dikurangi dengan wilayah Kota Batu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

Dengan terbentuknya Kota Batu, Kota Administratif Batu dalam wilayah Kabupaten Malang dihapus.

Pasal 6

(1) Kota Batu mempunyai batas wilayah:

1. sebelah utara dengan Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto dan Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan;
2. sebelah timur dengan Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang;
3. sebelah selatan dengan Kecamatan Dau, Kabupaten Malang; dan
4. sebelah barat dengan Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang.

(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini.

(3) Penentuan batas wilayah Kota Batu dan Kabupaten Malang secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Pasal 7

- (1) Dengan terbentuknya Kota Batu, Pemerintah Kota Batu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terpadu dan tidak terpisahkan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota di sekitarnya.

BAB III KEWENANGAN DAERAH

Pasal 8

- (1) Kewenangan Kota Batu sebagai daerah otonom mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, termasuk kewenangan wajib, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewenangan wajib, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja.

BAB IV PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Pertama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 9

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan, selambat-lambatnya satu tahun setelah peresmian Kota Batu.
- (2) Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu dilakukan dengan cara:
 - a. penetapan berdasarkan pertimbangan hasil perolehan suara partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 1999 yang dilaksanakan di daerah tersebut; dan
 - b. pengangkatan anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.
- (3) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Dengan terbentuknya Kota Batu, jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang tidak berubah sampai dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai hasil pemilihan umum berikutnya.
- (2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang, yang keanggotaannya mewakili kecamatan yang termasuk dalam wilayah Kota Batu dengan sendirinya menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu.
- (3) Pengisian kekurangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang ditetapkan berdasarkan jumlah dan komposisi anggota yang berpindah ke Kota Batu.
- (4) Pengisian kekurangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan setelah peresmian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu.

Bagian Kedua Pemerintah Daerah

Pasal 11

Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kota Batu, dipilih dan disahkan seorang Walikota dan Wakil Walikota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pada saat terbentuknya Kota Batu, pejabat Walikota Batu diangkat oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah atas nama Presiden.
- (2) Walikota Administratif Batu diangkat sebagai pejabat Walikota Batu.

Bagian Ketiga Perangkat Pemerintahan Daerah

Pasal 13

Untuk kelengkapan perangkat pemerintahan Kota Batu, dibentuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota, Sekretariat Kota, Dinas Kota, dan Lembaga Teknis Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Kota Batu, Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang terkait, Gubernur Jawa Timur,

dan Bupati Malang sesuai dengan kewenangannya menginventarisasi dan menyerahkan kepada Pemerintah Kota Batu hal-hal yang meliputi:

- a. pegawai yang karena tugasnya diperlukan oleh Pemerintah Kota Batu;
 - b. barang milik/kekayaan negara/daerah yang berupa tanah, bangunan, barang bergerak dan barang tidak bergerak lainnya yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Malang yang berada di Kota Batu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Malang yang kedudukan dan kegiatannya berada di Kota Batu;
 - d. utang-piutang Kabupaten Malang yang kegunaannya untuk Kota Batu; dan
 - e. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kota Batu.
- (2) Pelaksanaan penyerahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya diselesaikan dalam waktu satu tahun, terhitung sejak pelantikan Pejabat Walikota Batu.
- (3) Tata cara inventarisasi dan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk pembentukan Kota Batu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.
- (2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan, terhitung sejak diresmikannya pembentukan Kota Batu, pembiayaan yang diperlukan pada tahun pertama sebelum tersusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang berdasarkan hasil pendapatan yang diperoleh dari Kota Batu.

Pasal 16

Semua peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku bagi Kabupaten Malang tetap berlaku bagi Kota Batu sebelum peraturan perundang-undangan dimaksud diubah, diganti, atau dicabut berdasarkan undang-undang ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan undang-undang ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2001

**SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 91

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2001**

TENTANG

PEMBENTUKAN KOTA BATU

I. UMUM

Kota Administratif Batu dengan luas wilayah keseluruhan mencapai 15.137 ha, yang merupakan bagian dari Kabupaten Malang, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, telah menunjukkan perkembangan yang pesat, khususnya di bidang pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk, yang pada tahun 1993 berjumlah 147.037 jiwa dan pada tahun 2000 meningkat menjadi 156.681 jiwa dengan pertumbuhan rata-rata 0,9 % per tahun. Hal ini mengakibatkan bertambahnya beban tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya peningkatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kota Administratif Batu Kabupaten Malang, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kota Administratif Batu.

Secara geografis wilayah Kota Administratif Batu mempunyai kedudukan strategis, baik dari segi ekonomi maupun sosial budaya. Dari segi potensi pertanian, industri dan perdagangan, serta pariwisata, Kota Administratif Batu mempunyai prospek yang baik bagi pemenuhan kebutuhan pasar di dalam dan luar negeri.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang, wilayah Kota Administratif Batu yang meliputi Kecamatan Batu, Kecamatan Bumiaji, dan Kecamatan Junrejo perlu dibentuk menjadi Kota Batu.

Dalam rangka mengembangkan wilayah dan potensi yang dimiliki Kota Batu serta memenuhi kebutuhan pada masa yang akan datang, terutama dalam hal peningkatan sarana dan prasarana serta kesatuan perencanaan dan pembinaan wilayah, maka sistem Tata Ruang Wilayah Kota Batu harus dioptimalkan penataannya serta dikonsolidasikan jaringan sarana dan prasarananya dalam satu sistem kesatuan pengembangan terpadu dengan Provinsi Jawa Timur dan kabupaten lainnya di Jawa Timur, khususnya Kabupaten Malang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Peta sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah peta wilayah Kota Batu dalam bentuk lampiran undang-undang ini.

Ayat (3)

Penentuan batas wilayah secara pasti di lapangan antara Kabupaten Malang dan Kota Batu ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah setelah mempertimbangkan usul Bupati Malang dan Walikota Batu yang didasarkan atas hasil penelitian, pengukuran, dan pematokan di lapangan.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam rangka pengembangan Kota Batu sesuai dengan potensi daerah, khususnya guna perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan pada masa yang akan datang, serta pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan dan pembangunan, diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu harus serasi dan terpadu penyusunannya dalam suatu kesatuan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi Jawa Timur, Kabupaten, dan Kota di sekitarnya.

Pasal 8
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *kewenangan bidang lain* adalah kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang meliputi kebijakan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standarisasi nasional.

Selain itu, yang termasuk pengecualian kewenangan wajib adalah kewenangan lintas Kabupaten dan Kota serta kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan *daerah tersebut* adalah Kecamatan Batu, Kecamatan Bumiaji, dan Kecamatan Junrejo.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, pejabat Walikota Batu melaksanakan tugas sampai dengan pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Batu hasil pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu.

Pasal 13

Pembentukan Dinas Kota dan Lembaga Teknis Kota harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Kota.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *pembiayaan* adalah biaya yang diperuntukkan bagi pembangunan gedung perkantoran, rumah dinas, perlengkapan kantor, sarana mobilitas, serta biaya operasional bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

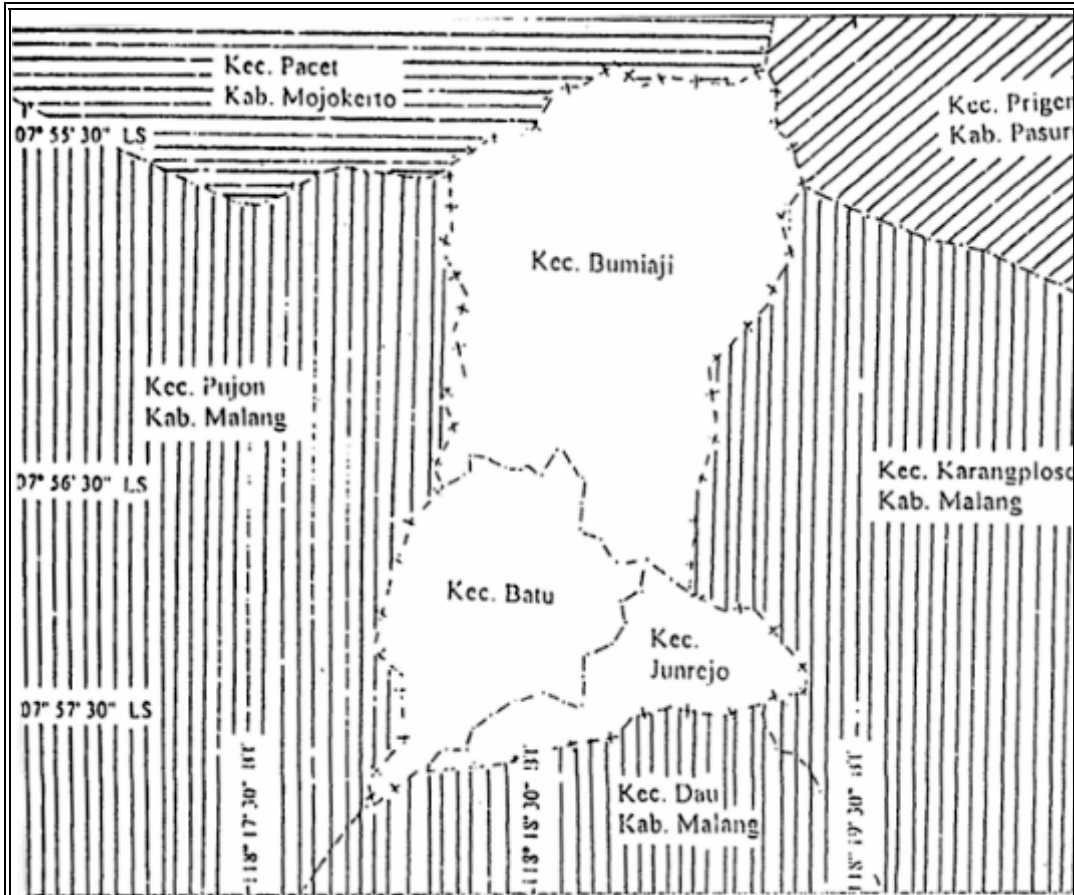
Pasal 19
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
4118

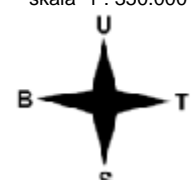



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2001 TANGGAL 21 JUNI 2001



PETA KOTA BATU

<p>KETERANGAN : + - + - + - + : Batas Kota - . - . - . - : Batas Kecamatan</p>	<p>skala 1 : 350.000</p>  
---	--

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

ABDURRACHMAN WAHID

Hal Guru Pustakawati Universitas
 1. Di dalam lingkungan sebagian atau seluruhnya yang terdapat pemukiman dan perdagangan umum
 2. Pergerakan lalu lintas yang menimbulkan gangguan, kecelakaan, penderitaan besar, bahaya, pencemaran lingkungan, gangguan kerja atau penghambatan produksi
 3. Pergerakan lalu lintas yang menimbulkan gangguan yang wajar bagi IPB University
 4. Pergerakan lalu lintas yang menimbulkan gangguan yang wajar bagi IPB University
 5. Di dalam lingkungan dan pemukiman sebagian atau seluruhnya yang terdapat pemukiman dan perdagangan umum

G. Hikmah Miftah, IPB University

Lampiran 2 Perincian 16 sektor

Perincian 16 sektor meliputi :

1. Pertanian.
Termasuk ke dalam sektor ini adalah padi, jagung, ketela pohon, kedele, sayur-sayuran, buah-buahan, umbi-umbian, kacang tanah dan kacang-kacangan lainnya.
2. Tanaman Perkebunan.
Termasuk ke dalam sektor ini adalah perkebunan tebu, tembakau, kelapa, kopi, teh, dan tanaman perkebunan lain.
3. Peternakan.
Sektor ini meliputi usaha pemeliharaan ternak : sapi potong dan perah, kerbau, kambing, domba, kuda, unggas, dan ternak lainnya. Produk utamanya susu, telur, daging, anak ternak, dan pertambahan berat sedang produk ikutannya terdiri dari tulang, kulit, jeroan, dan kotoran dan tenaga pengolahan lahan / pengangkut. Juga termasuk dalam sektor ini adalah kegiatan pemotongan hewan.
4. Kehutanan.
Sektor ini meliputi hasil penebangan kayu hutan berupa gelondongan, kayu bakar dan arang, balok, papan, kaso, reng dan sejenisnya. Juga termasuk bambu dan hasil buruan hutan.
5. Perikanan.
Sektor ini meliputi hasil perikanan darat, produk utamanya berupa ikan dan hewan perairan darat lainnya.
6. Penggalian.
Sektor ini meliputi kegiatan penambangan galian tipe C.
7. Industri.
Sektor ini meliputi : industri pengolahan makanan, minuman, dan tembakau; industri tekstil, barang dari kulit, dan alas kaki; industri barang dari kayu dan hasil hutan lainnya; industri kertas dan barang cetakan; industri pupuk, kimia, dan barang dari karet; industri semen dan barang galian bukan logam; industri alat angkut, mesin, dan peralatan; dan industri barang lainnya.

8. Listrik, Gas, dan Air.

Sektor ini meliputi kegiatan pembangkit dan distribusi tenaga listrik, produksi dan penyediaan gas serta kegiatan pembersihan dan pemurnian untuk menghasilkan air minum atau air bersih.

9. Bangunan dan Konstruksi.

Sektor ini mencakup pembuatan, perluasan, perombakan, perbaikan dari bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, irigasi, jembatan, instalasi listrik dan telepon, dan selokan.

10. Perdagangan.

Sektor ini meliputi kegiatan pengumpulan dan pendistribusian barang oleh pedagang mulai dari loco gudang produsen sampai barang tersebut sampai ke konsumen. Produk sektor ini dalam bentuk jasa perdagangan barang yang dinyatakan dalam margin perdagangan.

11. Hotel.

Sektor ini meliputi penyediaan akomodasi seperti tempat penginapan, losmen, villa dan bungalow.

12. Restoran.

Sektor ini meliputi penyediaan makanan dan minuman yang siap untuk segera dikonsumsi baik yang berasal dari restoran, rumah makan, depot, warung, kafe, bar, klub malam dan sebagainya.

13. Angkutan.

Sektor ini meliputi angkutan jalan raya, jasa penunjang angkutan, pos dan telekomunikasi, dan jasa penunjang komunikasi.

14. Lembaga Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan.

Sektor ini meliputi bank dan lembaga keuangan, koperasi, asuransi, jasa penunjang keuangan lainnya, sewa bangunan, dan jasa perusahaan.

15. Pemerintahan.

Sektor ini meliputi pemerintahan umum dan pertahanan.

16. Jasa-Jasa.

Sektor ini meliputi jasa : pendidikan, kesehatan, kemasyarakatan lainnya, hiburan dan kebudayaan, perorangan dan rumah tangga.

Lampiran 3 Prosedur *updating* Tabel Input-Output Jawa Timur tahun 2003

* PENDUGAAN KOEFISIAN TEKNIS TABEL I-O JAWA TIMUR TAHUN 2003 44 SEKTOR

* METODE RAS

SETS

i sektor input antara / 1*44 / ;

ALIAS (i,j) ;

SCALAR TotM Total Impor 2003 / 127672992 /
 TotF Total Final Demand 2003 / 382053750 /
 TotV Total PDRB 2003 / 254380758 / ;

PARAMETERS

Q2003(j) total input tabel I-O 2003 44 Sektor

/ 1	14021000
2	4861930
3	1686876
4	1160949
5	4864694
6	8809252
7	1097299
8	1887137
9	1043223
10	3519212
11	1044817
12	11330622
13	27941091
14	6087775
15	9138899
16	1536354
17	1536354
18	5179341
19	106564101
20	28480115
21	15825276
22	17569990
23	29165157
24	10904190
25	24304573
26	33963347
27	11296035
28	9511461
29	13574716

30 21194001
 31 67953798
 32 3246151
 33 28545475
 34 894482
 35 10837427
 36 1441749
 37 435671
 38 2948311
 39 5809787
 40 3407299
 41 1386688
 42 12640340
 43 10452817
 44 18246714 /

PDRB2003(j) PDRB tiap sektor tahun 2003

/ 1 12219759
 2 4171919
 3 1406571
 4 1045377
 5 1743168
 6 5669091
 7 448292
 8 1172566
 9 616278
 10 2670811
 11 830652
 12 6446606
 13 7072437
 14 969396
 15 4424545
 16 350156
 17 44040
 18 4540872
 19 35968523
 20 6684441
 21 4773294
 22 4599855
 23 2212330
 24 3095614
 25 4279273
 26 4589476
 27 741471
 28 77539
 29 7455509
 30 10766553
 31 50935747

- 32 1510866
- 33 11532160
- 34 197541
- 35 5713910
- 36 574018
- 37 75963
- 38 826044
- 39 4385936
- 40 3225509
- 41 1138753
- 42 10221630
- 43 10452817
- 44 12503450 / ;

TABLE A2000(i,j) Koefisien Teknis 2000 44 Sektor

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0.0348	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	0.0413	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	0.0912	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	0.0167	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	0.0238	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	0.0122	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	0.0288	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	0.0453	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0262
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	0.0025	0.0018	0.0037	0.0023	0.0013	0.0012	0.0027	0.0030
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-	0.0020	0.0018
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	0.0000	0.0020	0.0034	0.0031	0.0001	0.0000	0.0008	0.0001	0.0001
22	-	-	-	-	-	0.0001	-	-	-
23	0.0558	0.0594	0.0222	0.0386	0.0213	0.0088	0.0283	0.0236	0.0012
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-	-	0.0000	0.0000
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	0.0009	0.0041	0.0056	0.0052	0.0002	0.0001	0.0008	-	-
29	0.0000	-	-	-	-	-	-	-	-

30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	0.0180	0.0196	0.0155	0.0118	0.0060	0.0034	0.0060	0.0003	0.0015
32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	0.0010	0.0007	0.0019	0.0029	0.0001	0.0000	0.0004	-	-
34	-	-	-	-	0.0000	-	-	-	-
35	0.0011	0.0040	0.0122	0.0071	0.0031	0.0007	0.0057	0.0151	0.0046
36	-	-	-	-	-	-	-	-	9
37	-	-	-	-	0.0000	-	-	0.0015	-
38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	-	-	-	-	-	-	-	0.0022	-
40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	0.0012	0.0049	0.0082	0.0060	0.0004	0.0002	0.0014	0.0003	-
43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	0.0022	0.0017	0.0013	0.0039	0.0001	0.0001	0.0019	0.0027	-
+	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	-	-	-	0.0003	-	-	-	-	-
2	-	-	-	0.0035	-	0.0001	-	-	-
3	-	-	-	0.0002	-	0.0001	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	0.0001	-	0.0000	-	-	-
6	-	-	-	0.0005	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	0.0000	-	-	-
8	-	-	-	0.0001	-	0.0000	-	-	-
9	-	-	-	0.0001	-	0.0000	-	-	-
10	0.0362	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	0.0152	-	-	-	-	-	-	-
12	0.0001	0.0007	0.0138	0.0023	0.0000	0.0000	-	-	-
13	0.0036	0.0034	0.0002	0.0293	-	0.0000	-	-	-
14	0.0002	0.0003	0.0001	-	0.0029	0.0015	0.0776	0.0000	0.0014
15	-	-	-	-	-	0.0049	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	0.0043	-	-
17	-	-	-	-	-	-	0.0428	0.0007	-
18	-	-	-	-	-	-	0.0271	0.0004	-
19	-	0.0008	0.0000	0.0160	-	0.0146	0.0428	0.0004	-
20	0.0000	0.0017	0.0014	0.0123	-	0.0008	0.0001	0.0000	-
21	0.0010	0.0001	0.0007	0.0009	-	0.0003	-	-	0.0101
22	0.0003	0.0015	0.0002	0.0004	-	0.0002	0.0037	0.0000	0.0000
23	0.1011	0.1042	0.0199	0.0009	0.0002	0.0014	0.0766	0.0012	0.0072
24	-	0.0001	0.0001	-	-	0.0004	-	-	0.0111
25	0.0032	0.0018	0.0028	0.0001	0.0001	0.0010	0.0198	0.0003	0.0315
26	0.0036	0.0020	0.0002	-	-	0.0090	0.0027	0.0000	0.0000
27	0.0005	0.0000	0.0000	0.0000	-	0.0009	0.0007	0.0000	-

28	0.0076	0.0011	0.0005	-	-	0.0086	0.0080	0.0000	0.0043
29	0.0011	0.0036	0.0006	0.0001	0.0000	0.0012	0.0040	0.0004	0.0002
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	0.0003	0.0269	0.0030	0.0047	0.0004	0.0041	0.0523	0.0006	0.0094
32	0.0016	0.0005	0.0000	-	-	0.0000	0.0043	0.0001	-
33	0.0015	0.0001	0.0003	-	-	0.0005	0.0064	0.0001	0.0003
34	0.0008	0.0003	0.0000	0.0002	0.0003	0.0002	-	-	-
35	0.0318	0.0074	0.0072	0.0021	0.0035	0.0017	0.0402	0.0007	0.0126
36	-	-	-	0.0002	0.0000	0.0001	0.0000	0.0001	-
37	0.0019	-	-	0.0001	0.0001	0.0005	0.0000	-	0.0005
38	-	0.0020	-	0.0001	-	-	0.0000	0.0000	-
39	0.0007	0.0175	0.0079	0.0008	0.0004	0.0003	0.0001	0.0001	0.0001
40	-	0.0019	0.0003	0.0001	-	-	0.0002	0.0000	0.0000
41	-	0.0000	-	0.0000	-	-	0.0000	0.0001	-
42	0.0003	0.0152	0.0059	0.0013	0.0002	0.0002	0.0015	0.0016	0.0037
43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	0.0121	0.0097	0.0191	0.0023	0.0006	0.0015	0.0028	0.0001	0.0036
+	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	0.0373	-	-	-	-	-	-	-	-
2	0.0075	-	-	-	-	-	-	-	-
3	0.0001	-	-	-	-	-	-	-	-
4	0.0020	-	-	-	-	-	-	-	-
5	0.0001	-	-	-	-	-	-	-	-
6	0.0007	-	-	-	-	-	-	-	-
7	0.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
8	0.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
9	0.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
10	0.0142	-	-	-	-	-	-	-	-
11	0.0035	-	-	-	-	-	-	-	-
12	0.0147	0.0062	0.0001	-	0.0248	-	0.0000	-	0.0002
13	0.0027	0.2252	-	-	-	-	-	-	0.0016
14	-	0.0004	0.3634	0.0033	0.0019	0.0000	-	-	0.0008
15	0.0156	-	-	-	-	-	-	-	0.0007
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	0.0002	-	0.0145	-	-
18	0.0002	-	-	-	0.0009	0.2039	0.0009	0.0000	0.0003
19	0.1277	0.0002	0.0001	0.0010	0.0016	0.0002	0.0000	-	0.0007
20	0.0004	0.0831	0.0051	0.0010	0.0017	0.0040	0.0003	0.0029	0.0032
21	0.0000	0.0000	0.0373	0.0044	0.0001	0.0002	0.0008	0.0020	0.0126
22	0.0122	0.0057	0.0062	0.2004	0.0046	0.0152	0.0003	0.0025	0.0050
23	0.0027	0.0852	0.0257	0.0806	0.1010	0.0911	0.0063	0.0181	0.0066
24	0.0000	0.0000	-	0.0000	0.0006	0.1338	0.0004	0.0121	0.0004
25	0.0013	0.0228	0.0248	0.0014	0.0112	0.0092	0.1083	0.0893	0.0223

26	0.0002	0.0072	0.0050	0.0014	0.0005	0.0017	0.0002	0.0622	0.0030
27	0.0000	0.0004	0.0007	0.0173	0.0035	0.0094	0.0000	0.0003	0.0466
28	0.0038	0.0101	0.0001	0.0273	0.0141	0.0011	0.0000	0.0003	0.0000
29	0.0071	0.0210	0.0024	0.0244	0.0125	0.0131	0.0014	0.0025	0.0040
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	0.0252	0.0297	0.0542	0.0836	0.0386	0.0711	0.0197	0.0346	0.0123
32	0.0001	0.0010	0.0001	0.0009	0.0008	0.0006	0.0001	0.0001	0.0003
33	0.0003	0.0021	0.0002	0.0014	0.0011	0.0021	0.0003	0.0001	0.0009
34	0.0002	0.0005	0.0004	0.0003	0.0005	0.0004	0.0002	0.0002	0.0008
35	0.0143	0.0243	0.0071	0.0245	0.0233	0.0143	0.0041	0.0037	0.0074
36	0.0010	0.0012	0.0051	0.0097	0.0034	0.0069	0.0005	0.0041	0.0044
37	0.0001	0.0021	0.0003	0.0008	0.0005	0.0003	0.0001	0.0001	0.0003
38	0.0029	0.0161	-	0.0044	0.0028	0.0028	0.0009	0.0003	0.0013
39	0.0106	0.0227	0.0330	0.0586	0.0157	0.0166	0.0029	0.0021	0.0024
40	0.0007	0.0035	0.0003	0.0049	0.0044	0.0036	0.0005	0.0006	0.0005
41	0.0003	0.0009	-	0.0007	0.0003	0.0002	0.0000	0.0000	0.0002
42	0.0012	0.0069	0.0040	0.0089	0.0088	0.0088	0.0014	0.0011	0.0054
43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	0.0010	0.0039	0.0029	0.0053	0.0034	0.0057	0.0009	0.0012	0.0045
+	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	0.0125	0.0093	-	-	0.0003
3	-	-	-	-	0.0042	0.0087	-	-	0.0002
4	-	-	-	-	0.0026	0.0047	-	-	0.0002
5	-	-	-	-	0.0048	0.0457	-	-	0.0007
6	-	-	-	-	0.0115	0.0517	-	-	0.0006
7	-	-	-	-	0.0005	0.0036	-	-	0.0002
8	-	-	-	-	0.0004	0.0021	-	-	0.0004
9	-	-	-	-	0.0001	0.0005	-	-	0.0002
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	0.0021	0.0163	-	-	0.0003
13	-	-	-	-	0.1686	0.1785	-	-	0.0022
14	-	-	-	0.0000	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	0.0286	0.0430	-	-	0.0010
16	0.0067	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	0.0004	0.0032	0.0469	-	-	-	-	-	-
19	-	0.0037	-	0.0049	0.0282	0.0358	0.0018	0.0004	0.0096
20	0.0012	0.0030	0.0000	0.0066	0.0150	0.0021	0.0129	0.0014	0.0026
21	0.0001	0.0032	0.0407	0.0022	0.0005	0.0005	0.0004	0.0001	0.0001
22	0.0002	0.0053	0.0057	0.0663	0.0007	0.0089	0.0033	0.0016	0.0045
23	0.0004	0.0196	0.0126	0.0115	0.0067	0.0035	0.0004	0.0001	0.0530

24	0.0001	-	0.0951	-	-	-	-	-	0.0026
25	-	0.0064	0.0553	0.0032	0.0011	0.0000	0.0189	0.0001	0.0021
26	0.0002	0.0026	0.0000	0.0003	0.0026	0.0012	0.0498	0.0207	0.0447
27	0.0000	0.0030	0.0992	0.0020	0.0044	0.0025	0.0113	-	0.0019
28	0.0004	0.0747	0.0021	0.0110	0.0085	0.0037	0.0481	0.1790	0.1240
29	0.0003	0.1149	0.0140	0.0170	0.0307	0.0063	0.0019	0.0005	0.0008
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	0.0005	0.0130	0.0437	0.0092	0.0167	0.0356	0.0201	0.0336	0.0303
32	0.0000	0.0168	0.0006	0.0019	0.0049	0.0013	0.0018	0.0003	0.0022
33	0.0002	0.0208	0.0016	0.0061	0.0072	0.0144	0.0194	0.0016	0.0008
34	0.0002	0.0012	0.0000	0.0036	0.0004	0.0001	0.0084	0.0000	0.0000
35	0.0008	0.0372	0.0178	0.0282	0.0203	0.0339	0.0056	0.0013	0.0232
36	0.0001	0.0009	0.0029	0.0107	0.0096	0.0011	0.0001	-	0.0013
37	0.0002	0.0007	0.0000	0.0034	0.0020	0.0020	0.0001	0.0000	-
38	0.0007	0.0108	0.0001	0.0035	0.0082	0.0043	0.0007	-	0.0024
39	-	0.0080	0.0120	0.0124	0.0133	0.0149	0.0002	0.0003	0.0096
40	0.0005	0.0222	0.0236	0.0058	0.0053	0.0033	0.0015	0.0000	0.0007
41	0.0001	0.0034	0.0000	0.0001	0.0012	0.0007	-	-	0.0006
42	0.0002	0.0255	0.0154	0.0284	0.0101	0.0084	0.0010	0.0000	0.0005
43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	0.0002	0.0108	0.0025	0.0121	0.0103	0.0047	0.0002	0.0000	0.0039
+	37	38	39	40	41	42	43	44	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	0.0001	-
3	-	-	-	-	-	-	-	0.0000	-
4	-	-	-	-	-	-	-	0.0001	-
5	0.0002	-	-	-	-	-	-	0.0013	-
6	0.0004	0.0005	-	-	-	-	-	0.0013	-
7	0.0000	-	-	-	-	-	-	0.0001	-
8	0.0002	-	-	-	-	-	-	0.0003	-
9	-	-	-	-	-	-	-	0.0002	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	0.0004	-	-	-	-	-	-	0.0001	-
13	0.0010	0.0001	0.0000	-	-	-	-	0.0024	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	0.0016	-	-	-	-	-	-	0.0002	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	0.0120	0.0069	0.0003	0.0002	0.0005	0.0010	-	0.0028	-
20	0.0019	0.0038	0.0083	0.0012	0.0012	0.0025	-	0.0019	-
21	0.0004	0.0003	0.0002	0.0002	0.0011	0.0003	-	0.0003	-



Has Cera, Pindora, Unsurung, ...
 1. Ditinjau mengenai sebagai ...
 2. Ditinjau mengenai ...

22	0.0015	0.0038	0.0026	0.0009	0.0028	0.0241	-	0.0268
23	0.0024	0.0135	0.0014	0.0005	0.0014	0.0245	-	0.0187
24	0.0001	0.0027	0.0002	-	-	0.0000	-	0.0001
25	0.0003	0.0015	0.0046	0.0002	0.0005	0.0005	-	0.0004
26	0.0085	0.0528	0.0134	0.0013	0.0038	0.0042	-	0.0029
27	0.0003	0.0031	0.0053	0.0039	0.0080	0.0039	-	0.0112
28	0.1625	0.1709	0.0463	0.0053	0.0043	0.0050	-	0.0435
29	0.0002	0.0023	0.0006	0.0014	0.0082	0.0082	-	0.0214
30	-	-	-	-	-	-	-	-
31	0.0281	0.0313	0.0083	0.0020	0.0210	0.0288	-	0.0289
32	0.0002	0.0611	0.0052	0.0006	-	0.0402	-	0.0094
33	0.0032	0.0358	0.0019	0.0011	0.0010	0.0060	-	0.0169
34	0.0004	0.0004	0.0004	0.0007	0.0004	0.0001	-	0.0000
35	0.0028	0.0201	0.0135	0.0015	0.0023	0.0074	-	0.0069
36	-	0.0001	0.0006	0.0003	-	0.0007	-	0.0001
37	0.0005	-	0.0001	0.0002	-	0.0000	-	0.0000
38	-	0.0311	0.0003	0.0010	-	0.0021	-	0.0001
39	0.0007	0.0080	0.0011	0.0006	0.0008	0.0057	-	0.0007
40	0.0000	0.0063	0.0009	0.0004	0.0622	0.0015	-	0.0000
41	-	0.0008	0.0003	0.0001	0.0009	0.0002	-	0.0000
42	0.0008	0.0226	0.0010	0.0023	0.0343	0.0134	-	0.0027
43	-	-	-	-	-	-	-	-
44	0.0008	0.0164	0.0015	0.0071	0.0232	0.0100	-	0.0193

PARAMETERS

- TB(i) Original estimates for Sectoral Total Output or Input cells 2003
 QB(i,j) Original estimates for Intersectoral I-O Transaction cells 2003
 VB(j) Original estimates for Sectoral Value-Added cells 2003
 MB(j) Original estimates for Sectoral Import cells 2003
 FB(i) Original estimates for Sectoral Final Demand cells 2003
 TW(i) Weight for Sectoral Total Output or Input cells
 QW(i,j) Weight for Intersectoral I-O Transaction cells
 VW(j) Weight for Sectoral Value-Added Cells
 MW(j) Weight for Sectoral Import Cells
 FW(i) Weight for Sectoral Final Demand Cells;

$$\begin{aligned}
 TB(i) &= Q2003(i) ; \\
 QB(i,j) &= A2000(i,j) * TB(j) ; \\
 VB(j) &= PDRB2003(j) ; \\
 MB(j) &= TB(j) - VB(j) - \text{Sum}(i, QB(i,j)) ; \\
 FB(i) &= TB(i) - \text{Sum}(j, QB(i,j)) ;
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 TW(i) \$(TB(i) \text{ GT } 0) &= 1 ; \\
 QW(i,j) \$(QB(i,j) \text{ GT } 0) &= 1 ; \\
 VW(j) \$(VB(j) \text{ GT } 0) &= 1 ; \\
 MW(j) \$(MB(j) \text{ GT } 0) &= 1 ;
 \end{aligned}$$

$$FW(i) \$(FB(i) \ GT 0) = 1 ;$$

$$TW(i) \$(TB(i) \ EQ 0) = 0 ;$$

$$QW(i,j) \$(QB(i,j) \ EQ 0) = 0 ;$$

$$VW(j) \$(VB(j) \ EQ 0) = 0 ;$$

$$MW(j) \$(MB(j) \ EQ 0) = 0 ;$$

$$FW(i) \$(FB(i) \ EQ 0) = 0 ;$$

VARIABLES

SSDEV Sums of Squared Deviation estimating Information Gain

T(i) Optimal estimates for Sectoral Total Output or Input cells 2003

Q(i,j) Optimal estimates for Intersectoral I-O Transaction cells 2003

M(j) Optimal estimates for Sectoral Import cells 2003

F(i) Optimal estimates for Sectoral Final Demand cells 2003

FM Optimal estimates for Final Demand for Import Goods-Services

FF Optimal estimates for Final Demand for Final Demand ;

POSITIVE VARIABLES T, Q, M, FM, FV, FF ;

EQUATIONS

OBJ Objective Function

CBal(j) Column Balance Constraint Function

RBal(i) Row Balance Constraint Function

TBal Total Balance Constraint Function

TM Total Import Constraint Function

TF Total Final Demand Constraint Function ;

$$\begin{aligned} \text{OBJ} \quad .. \quad \text{SSDEV} = & E = \text{Sum}((i,j) \$(QW(i,j) \ GT 0), QW(i,j) * \text{SQR}(Q(i,j) - \\ & QB(i,j)) / QB(i,j)) + \\ & \text{Sum}(i \$(TW(i) \ GT 0), TW(i) * \text{SQR}(T(i) - TB(i) \\ & / TB(i)) + \\ & \text{Sum}(j \$(MW(j) \ GT 0), MW(j) * \text{SQR}(M(j) - MB(j) \\ & / MB(j)) + \\ & \text{Sum}(i \$(FW(i) \ GT 0), FW(i) * \text{SQR}(F(i) - FB(i) \\ & / FB(i)) ; \end{aligned}$$

$$\text{CBal}(j) \quad .. \quad T(j) = E = \text{Sum}(i \$(QB(i,j) \ GT 0), Q(i,j)) + M(j) + VB(j) ;$$

$$\text{RBal}(i) \quad .. \quad T(i) = E = \text{Sum}(j \$(QB(i,j) \ GT 0), Q(i,j)) + F(i) ;$$

$$\text{TM} \quad .. \quad \text{Sum}(j, M(j)) + \text{FM} = E = \text{TotM} ;$$

$$\text{TF} \quad .. \quad \text{Sum}(i, F(i)) + \text{FF} = E = \text{TotF} ;$$

$$\text{TBal} \quad .. \quad \text{TotV} + \text{TotM} - \text{TotF} = E = 0 ;$$

MODEL ModelRAS /All/ ;

$Q.L(i,j) = QB(i,j) \$ QW(i,j) ;$
 $T.L(i) = TB(i) \$ TW(i) ;$
 $M.L(i) = MB(i) \$ MW(i) ;$
 $F.L(i) = FB(i) \$ FW(i) ;$

OPTION NLP = MINOS5;
 OPTION RESLIM = 9000;
 OPTION ITERLIM = 100000;
 SOLVE ModelRAS USING NLP MINIMIZING SSDEV ;

SETS Item / MP2003, FD2003, TO2003 / ;

PARAMETERS

HslL(i, Item) Tabel Hasil Level Optimal
 HslM(i, Item) Tabel Hasil Marginal value ;

$HslL(i, "MP2003") = M.L(i) ;$
 $HslL(i, "FD2003") = F.L(i) ;$
 $HslL(i, "TO2003") = T.L(i) ;$

$HslM(i, "MP2003") = M.M(i) ;$
 $HslM(i, "FD2003") = F.M(i) ;$
 $HslM(i, "TO2003") = T.M(i) ;$

DISPLAY Q.L, Q.M, HslL, HslM, FM.L, FM.M, FF.L, FF.M ;

Lampiran 4 Prosedur pendugaan Tabel Input-Output Kota Batu tahun 2003

* PENDUGAAN KOEFISIAN TEKNIS TABEL I-O KOTA BATU TAHUN 2003 44 SEKTOR

* METODE RAS

SETS

i sektor input antara / $1*44$ / ;

ALIAS (i,j) ;

SCALAR TotV Total PDRB 2003 / 692804 / ;

PARAMETERS

Q2003(j) total input tabel I-O 2003 44 Sektor

/ 1	5166
2	2182
3	139
4	0
5	113864
6	42552
7	186
8	0
9	635
10	63
11	0
12	2297
13	93750
14	8447
15	634
16	0
17	0
18	2549
19	94122
20	76138
21	14187
22	7815
23	168611
24	48955
25	0
26	10886
27	30332
28	0
29	26587
30	24669
31	349997

32	81307
33	28577
34	0
35	31492
36	0
37	0
38	0
39	616
40	16264
41	174
42	41934
43	40189
44	83205 /

PDRB2003(j) PDRB tiap sektor tahun 2003

/ 1	4502
2	1872
3	116
4	0
5	40801
6	27384
7	76
8	0
9	375
10	48
11	0
12	1307
13	23730
14	1345
15	307
16	0
17	0
18	2235
19	31769
20	17870
21	4279
22	2046
23	12790
24	13898
25	0
26	1471
27	1991
28	0
29	14602
30	12532
31	262345
32	37843
33	11545

34	0
35	16604
36	0
37	0
38	0
39	465
40	15396
41	143
42	33910
43	40189
44	57016 / ;

TABLE A2000(i,j) Koefisien Teknis 2003 44 Sektor

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0.00481	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	0.00693	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	0.00282	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	0.03094	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	0.01490	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	0.00232	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00376
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	0.00216	0.00152	0.00320	0.00286	0.00153	0.00146	0.00299	0.00179
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-	0.00076	0.00037
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	0.00000	0.00065	0.00107	0.00099	0.00004	0.00001	0.00037	0.00004	0.00002
22	-	-	-	-	-	0.00002	-	-	-
23	0.05042	0.05250	0.01894	0.03401	0.02705	0.01013	0.03494	0.02597	0.00139
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	0.00001	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	0.01878	0.02017	0.01542	0.01202	0.00862	0.00445	0.00842	0.00034	0.00101

32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	0.00037	0.00026	0.00069	0.00110	0.00005	0.00002	0.00023	-	-
34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	0.00099	0.00358	0.01051	0.00638	0.00392	0.00080	0.00710	0.01688	0.00275
36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	-	-	-	-	-	-	-	0.00011	0.01871
40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	0.00124	0.00508	0.00818	0.00615	0.00063	0.00022	0.00192	0.00038	0.00020
43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	0.00231	0.00172	0.00124	0.00394	0.00008	0.00012	0.00256	0.00335	0.00813
+	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	-	-	-	0.00006	-	-	-	-	-
2	-	-	-	0.00084	-	0.00003	-	-	-
3	-	-	-	0.00001	-	0.00000	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	0.00019	-	0.00006	-	-	-
6	-	-	-	0.00070	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	0.00000	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	0.00003	-	0.00000	-	-	-
10	0.00024	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	0.00001	0.00005	0.00125	0.00023	-	0.00000	-	-	-
13	0.00335	0.00306	0.00020	0.03789	-	0.00004	-	-	-
14	0.00008	0.00012	0.00003	-	0.00185	0.00087	0.03920	0.00002	0.00058
15	-	-	-	-	-	0.00016	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	0.00591	0.00012	-
19	-	0.00026	0.00001	0.00718	-	0.00616	0.01620	0.00021	-
20	0.00003	0.00166	0.00184	0.01704	-	0.00111	0.00014	-	-
21	0.00032	0.00002	0.00029	0.00040	-	0.00013	-	-	0.00340
22	0.00005	0.00024	0.00005	0.00009	-	0.00004	0.00071	0.00001	0.00000
23	0.09363	0.09480	0.02357	0.00121	0.00028	0.00176	0.08325	0.00167	0.00664
24	-	0.00007	0.00014	-	-	0.00053	-	-	0.01161
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	0.00041	0.00023	0.00003	-	-	0.00133	0.00035	0.00001	0.00000
27	0.00046	0.00004	0.00005	0.00004	-	0.00112	0.00074	0.00001	-
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	0.00081	0.00263	0.00052	0.00009	0.00004	0.00116	0.00343	0.00040	0.00012

30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	0.00029	0.02835	0.00396	0.00686	0.00068	0.00561	0.06497	0.00100	0.00998
32	0.00170	0.00052	0.00005	-	-	0.00003	0.00514	0.00011	-
33	0.00058	0.00005	0.00013	-	-	0.00025	0.00292	0.00006	0.00012
34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	0.02988	0.00681	0.00861	0.00280	0.00477	0.00208	0.04415	0.00094	0.01172
36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	0.00076	0.00034	0.00004	0.00002	0.00002	0.00000	0.00030	0.00000	0.00000
40	0.00198	0.00033	0.00017	-	-	0.00030	0.00237	0.00006	0.00001
41	0.00000	-	0.00000	-	-	0.00000	0.00038	0.00001	-
42	0.01627	0.00618	0.00169	0.00031	0.00030	0.00206	0.05724	0.00245	0.00397
43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	0.01026	0.01981	0.00300	0.00085	0.00228	0.00386	0.01000	0.00011	0.00380
+	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	0.00625	-	-	-	-	-	-	-	-
2	0.00155	-	-	-	-	-	-	-	-
3	0.00000	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	0.00012	-	-	-	-	-	-	-	-
6	0.00084	-	-	-	-	-	-	-	-
7	0.00000	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	0.00000	-	-	-	-	-	-	-	-
10	0.00011	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	0.00125	0.00049	0.00001	-	0.00235	-	0.00000	-	0.00002
13	0.00293	0.23191	-	-	-	-	-	-	0.00211
14	-	0.00017	0.17633	0.00153	0.00112	0.00001	-	-	0.00478
15	0.00045	-	-	-	-	-	-	-	0.00002
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	0.00005	-	-	-	0.00021	0.03921	0.00023	-	0.00007
19	0.04924	0.00006	0.00003	0.00036	0.00068	0.00008	0.00000	-	0.00032
20	0.00049	0.09324	0.00576	0.00113	0.00230	0.00419	0.00041	0.00385	0.00441
21	0.00001	0.00001	0.01419	0.00160	0.00004	0.00006	0.00037	0.00088	0.00589
22	0.00237	0.00104	0.00114	0.03543	0.00099	0.00255	0.00007	0.00055	0.00113
23	0.00295	0.08817	0.02685	0.08111	0.12513	0.08652	0.00808	0.02254	0.00871
24	0.00005	0.00006	-	0.00002	0.00088	0.14350	0.00062	0.01667	0.00058
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	0.00002	0.00091	0.00064	0.00017	0.00008	0.00020	0.00003	0.00945	0.00048
27	0.00004	0.00037	0.00076	0.01739	0.00429	0.00886	0.00006	0.00038	0.06046

28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	0.00624	0.01733	0.00203	0.01957	0.01219	0.00996	0.00137	0.00242	0.00414
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	0.03177	0.03518	0.06497	0.09640	0.05395	0.07794	0.02834	0.04878	0.01800
32	0.00017	0.00113	0.00016	0.00104	0.00108	0.00059	0.00011	0.00008	0.00043
33	0.00013	0.00093	0.00011	0.00058	0.00055	0.00085	0.00015	0.00006	0.00047
34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	0.01604	0.02544	0.00749	0.02494	0.02920	0.01379	0.00535	0.00460	0.00976
36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	0.00054	0.00109	0.00161	0.00274	0.00088	0.00074	0.00017	0.00012	0.00014
40	0.00085	0.00409	0.00033	0.00550	0.00598	0.00392	0.00064	0.00083	0.00073
41	0.00002	0.00005	-	0.00004	0.00002	0.00001	0.00000	0.00000	0.00001
42	0.00147	0.00824	0.00476	0.01026	0.01234	0.00964	0.00200	0.00158	0.00792
43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	0.00118	0.00453	0.00338	0.00598	0.00470	0.00621	0.00125	0.00173	0.00656
+	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	0.00229	0.00166	-	-	0.00006
3	-	-	-	-	0.00015	0.00030	-	-	0.00001
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	0.00486	0.04447	-	-	0.00082
6	-	-	-	-	0.01206	0.05270	-	-	0.00066
7	-	-	-	-	0.00003	0.00022	-	-	0.00001
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	0.00001	0.00011	-	-	0.00006
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	0.00016	0.00119	-	-	0.00002
13	-	-	-	-	0.16410	0.16826	-	-	0.00232
14	-	-	-	0.00000	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	0.00073	0.00107	-	-	0.00003
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	0.00010	0.00060	0.00851	-	-	-	-	-	-
19	-	0.00123	-	0.00151	0.00968	0.01190	0.00077	0.00016	0.00360
20	0.00172	0.00309	0.00004	0.00632	0.01593	0.00212	0.01715	0.00169	0.00310
21	0.00003	0.00109	0.01333	0.00071	0.00019	0.00016	0.00018	0.00003	0.00003
22	0.00004	0.00089	0.00090	0.01033	0.00012	0.00148	0.00071	0.00031	0.00086
23	0.00053	0.01852	0.01123	0.01013	0.00655	0.00332	0.00054	0.00009	0.05708
24	0.00018	-	0.09638	-	-	-	-	-	0.00310
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Halaman ini adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh IPB University dan tidak boleh disalin atau diperjualbelikan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi website resmi IPB University di www.ipb.ac.id.
 IPB University is a leading institution in Indonesia, providing high-quality education and research. We are committed to excellence and innovation in all our programs.
 © Hak cipta milik IPB University

26	0.00004	0.00030	0.00000	0.00003	0.00031	0.00013	0.00750	0.00282	0.00590
27	0.00004	0.00282	0.08832	0.00175	0.00433	0.00240	0.01396	-	0.00206
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	0.00031	0.08670	0.01007	0.01203	0.02397	0.00480	0.00180	0.00041	0.00071
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	0.00071	0.01417	0.04531	0.00944	0.01884	0.03906	0.02811	0.04274	0.03752
32	0.00006	0.01759	0.00064	0.00189	0.00529	0.00135	0.00249	0.00036	0.00258
33	0.00010	0.00831	0.00060	0.00229	0.00298	0.00577	0.00992	0.00074	0.00034
34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	0.00106	0.03556	0.01606	0.02519	0.02013	0.03259	0.00704	0.00146	0.02532
36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	-	0.00035	0.00051	0.00052	0.00061	0.00066	0.00001	0.00001	0.00048
40	0.00081	0.02358	0.02392	0.00576	0.00584	0.00355	0.00207	0.00001	0.00082
41	0.00001	0.00017	0.00000	0.00000	0.00006	0.00004	-	-	0.00004
42	0.00034	0.02780	0.01597	0.02910	0.01135	0.00926	0.00141	0.00004	0.00066
43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	0.00032	0.01164	0.00260	0.01225	0.01147	0.00504	0.00025	0.00003	0.00479
+	37	38	39	40	41	42	43	44	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	0.00002	-
3	-	-	-	-	-	-	-	0.00000	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	0.25887	-	-	-	-	-	-	0.00127	-
6	0.00054	0.00059	-	-	-	-	-	0.00129	-
7	0.00000	-	-	-	-	-	-	0.00001	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	0.00003	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	0.00003	-	-	-	-	-	-	0.00001	-
13	0.00104	0.00010	0.00003	-	-	-	-	0.00227	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	0.00004	-	-	-	-	-	-	0.00001	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	0.00421	0.00258	0.00011	0.00006	0.00016	0.00030	-	0.00095	-
20	0.00201	0.00438	0.00865	0.00114	0.00113	0.00241	-	0.00200	-
21	0.00013	0.00010	0.00007	0.00008	0.00035	0.00010	-	0.00012	-
22	0.00026	0.00072	0.00044	0.00014	0.00042	0.00374	-	0.00455	-
23	0.00307	0.01435	0.00130	0.00048	0.00122	0.02143	-	0.01802	-

24	0.00018	0.00319	0.00026	-	-	0.00002	-	0.00009
25	-	-	-	-	-	-	-	-
26	0.00104	0.00688	0.00157	0.00014	0.00040	0.00046	-	0.00034
27	0.00030	0.00324	0.00498	0.00347	0.00681	0.00337	-	0.01077
28	-	-	-	-	-	-	-	-
29	0.00013	0.00194	0.00046	0.00100	0.00562	0.00577	-	0.01651
30	-	-	-	-	-	-	-	-
31	0.03209	0.03805	0.00908	0.00210	0.02090	0.02933	-	0.03210
32	0.00016	0.07173	0.00550	0.00064	-	0.03930	-	0.01002
33	0.00133	0.01594	0.00075	0.00044	0.00035	0.00222	-	0.00686
34	-	-	-	-	-	-	-	-
35	0.00280	0.02162	0.01297	0.00140	0.00201	0.00657	-	0.00672
36	-	-	-	-	-	-	-	-
37	-	-	-	-	-	-	-	-
38	-	-	-	-	-	-	-	-
39	0.00003	0.00040	0.00005	0.00003	0.00003	0.00024	-	0.00003
40	0.00005	0.00748	0.00094	0.00040	0.06041	0.00151	-	0.00005
41	-	0.00004	0.00001	0.00001	0.00004	0.00001	-	0.00000
42	0.00088	0.02748	0.00111	0.00238	0.03418	0.01361	-	0.00294
43	-	-	-	-	-	-	-	-
44	0.00089	0.01973	0.00168	0.00731	0.02272	0.01006	-	0.02115

PARAMETERS

TB(i)	Original estimates for Sectoral Total Output or Input cells 2003
QB(i,j)	Original estimates for Intersectoral I-O Transaction cells 2003
VB(j)	Original estimates for Sectoral Value-Added cells 2003
MB(j)	Original estimates for Sectoral Import cells 2003
FB(i)	Original estimates for Sectoral Final Demand cells 2003
TW(i)	Weight for Sectoral Total Output or Input cells
QW(i,j)	Weight for Intersectoral I-O Transaction cells
VW(j)	Weight for Sectoral Value-Added Cells
MW(j)	Weight for Sectoral Import Cells
FW(i)	Weight for Sectoral Final Demand Cells;

$$TB(i) = Q2003(i) ;$$

$$QB(i,j) = A2000(i,j) * TB(j) ;$$

$$VB(j) = PDRB2003(j) ;$$

$$MB(j) = TB(j) - VB(j) - \text{Sum}(i, QB(i,j)) ;$$

$$FB(i) = TB(i) - \text{Sum}(j, QB(i,j)) ;$$

$$TW(i) * (TB(i) \geq 0) = 1 ;$$

$$QW(i,j) * (QB(i,j) \geq 0) = 1 ;$$

$$VW(j) * (VB(j) \geq 0) = 1 ;$$

$$MW(j) * (MB(j) \geq 0) = 1 ;$$

$$FW(i) * (FB(i) \geq 0) = 1 ;$$

$$\begin{aligned} TW(i) & (TB(i) \text{ EQ } 0) = 0 ; \\ QW(i,j) & (QB(i,j) \text{ EQ } 0) = 0 ; \\ VW(j) & (VB(j) \text{ EQ } 0) = 0 ; \\ MW(j) & (MB(j) \text{ EQ } 0) = 0 ; \\ FW(i) & (FB(i) \text{ EQ } 0) = 0 ; \end{aligned}$$

VARIABLES

SSDEV	Sums of Squared Deviation estimating Information Gain
T(i)	Optimal estimates for Sectoral Total Output or Input cells 2003
Q(i,j)	Optimal estimates for Intersectoral I-O Transaction cells 2003
M(j)	Optimal estimates for Sectoral Import cells 2003
F(i)	Optimal estimates for Sectoral Final Demand cells 2003
FM	Optimal estimates for Final Demand for Import Goods-Services
FF	Optimal estimates for Final Demand for Final Demand
TotM	Optimal Estimates for Final for Total Impor
TotF	Optimal Estimates for Final for Total Final Demand ;

POSITIVE VARIABLES T, Q, M, FM, FV, FF ;

EQUATIONS

OBJ	Objective Function
CBal(j)	Column Balance Constraint Function
RBal(i)	Row Balance Constraint Function
TBal	Total Balance Constraint Function
TM	Total Import Constraint Function
TF	Total Final Demand Constraint Function ;

$$\begin{aligned} \text{OBJ} \quad .. \quad SSDEV = E = & \text{Sum}((i,j) (QW(i,j) \text{ GT } 0), QW(i,j) * \text{SQR}(Q(i,j) - \\ & QB(i,j)) / QB(i,j)) + \\ & \text{Sum}(i (TW(i) \text{ GT } 0), TW(i) * \text{SQR}(T(i) - TB(i)) / \\ & TB(i)) + \\ & \text{Sum}(j (MW(j) \text{ GT } 0), MW(j) * \text{SQR}(M(j) - MB(j)) / \\ & MB(j)) + \\ & \text{Sum}(i (FW(i) \text{ GT } 0), FW(i) * \text{SQR}(F(i) - FB(i)) / \\ & FB(i)) ; \end{aligned}$$

$$\text{CBal}(j) \quad .. \quad T(j) = E = \text{Sum}(i (QB(i,j) \text{ GT } 0), Q(i,j)) + M(j) + VB(j) ;$$

$$\text{RBal}(i) \quad .. \quad T(i) = E = \text{Sum}(j (QB(i,j) \text{ GT } 0), Q(i,j)) + F(i) ;$$

$$\text{TM} \quad .. \quad \text{Sum}(j, M(j)) + \text{FM} = E = \text{TotM} ;$$

$$\text{TF} \quad .. \quad \text{Sum}(i, F(i)) + \text{FF} = E = \text{TotF} ;$$

$$\text{TBal} \quad .. \quad \text{TotV} + \text{TotM} - \text{TotF} = E = 0 ;$$

MODEL ModelRAS /All/ ;

$Q.L(i,j) = QB(i,j) \$ QW(i,j) ;$
 $T.L(i) = TB(i) \$ TW(i) ;$
 $M.L(i) = MB(i) \$ MW(i) ;$
 $F.L(i) = FB(i) \$ FW(i) ;$

OPTION NLP = MINOS5;
 OPTION RESLIM = 9000;
 OPTION ITERLIM = 100000;

SOLVE ModelRAS USING NLP MINIMIZING SSDEV ;

SETS Item / MP2003, FD2003, TO2003 / ;

PARAMETERS

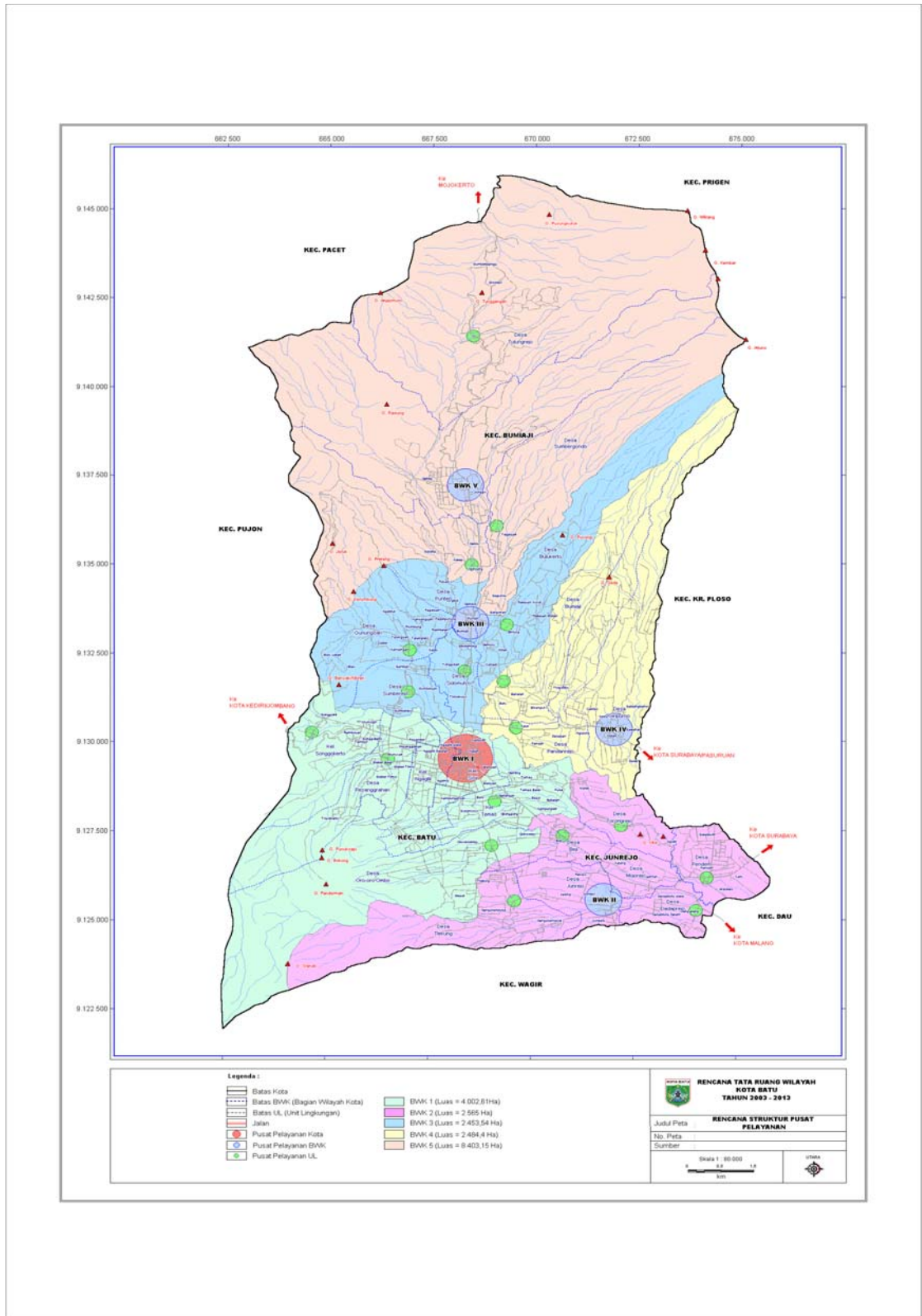
HslL(i, Item) Tabel Hasil Level Optimal
 HslM(i, Item) Tabel Hasil Marginal value ;

$HslL(i, "MP2003") = M.L(i) ;$
 $HslL(i, "FD2003") = F.L(i) ;$
 $HslL(i, "TO2003") = T.L(i) ;$

$HslM(i, "MP2003") = M.M(i) ;$
 $HslM(i, "FD2003") = F.M(i) ;$
 $HslM(i, "TO2003") = T.M(i) ;$

DISPLAY Q.L, Q.M, HslL, HslM ;

Lampiran 5 Peta rencana struktur pusat pelayanan Kota Batu



Lampiran 5 Tabel Input-Output Kota Batu atas dasar harga produsen tahun 2003, 16x16 sektor (juta rupiah)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	180	310	700
1	4 200	-	171	-	0	-	826	-	-	-	1 578	2 842	-	-	-	219	9 836	154 888	164 724
2	-	3	21	-	0	-	564	-	-	-	13	34	-	-	-	0	635	1 725	2 360
3	397	1	3 552	-	0	-	17 998	-	-	-	13 343	4 808	0	-	-	189	40,287	53 463	93 750
4	-	0	-	16	1	1	2 863	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2 882	5 565	8 447
5	-	-	-	-	0	-	43	-	-	-	60	31	-	-	-	0	134	500	634
6	-	-	-	-	-	-	1 962	16	210	-	-	-	-	-	-	-	2 188	361	2 549
7	3 903	66	2 433	2	8	55	58 760	743	5 186	10 771	3 016	615	263	1 334	-	3 065	90 220	360 826	451 046
8	0	1	9	0	1	0	4 785	2 305	248	4 209	1 949	137	30	242	-	1 373	15 291	11 296	26 587
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 669	24 669
10	1 316	9	643	6	4	25	21 337	377	1 118	3 304	1 532	1 116	1 389	1 230	-	2 671	36 077	313 920	349 997
11	-	0	-	-	0	-	339	468	16	661	430	39	25	1 648	-	834	4 459	76 848	81 307
12	10	0	-	-	0	0	238	221	15	803	242	165	31	93	-	571	2 390	26 187	28 577
13	510	22	265	40	2	30	11 745	1 586	999	11 012	2 167	1 053	96	349	-	567	30 443	18 103	48 546
14	100	5	29	3	1	10	3 725	739	394	10 186	923	265	47	571	-	245	17 242	24 692	41 934
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 189	40 189
16	36	8	80	19	2	10	1 867	310	64	4 288	932	144	125	422	-	1 760	10 067	73 138	83 205
190	10 473	115	7 203	86	18	132	127 051	6 764	8 249	45 237	26 185	11 248	2 006	5 889	-	11 494	262 150	1 186 371	1 448 521
200	79 125	890	62 817	7 016	309	182	237 881	5 221	3 888	42 415	17 279	5 784	13 932	2 135	-	14 695	493 569		
201	47 070	611	7 642	794	158	775	34 065	4 638	6 531	66 439	12 046	3 449	8 209	8 131	38 275	17 923	256 759		
202	25 103	473	12 008	377	129	1 072	32 505	4 661	5 453	103 424	14 025	5 989	19 067	23 098	-	35 394	282 776		
203	2 366	49	2 256	47	18	365	4 955	2 858	378	65 395	5 384	525	3 107	1 545	1 914	2 353	93 516		
204	588	221	1 824	127	2	23	14 590	2 445	170	27 087	6 388	1 582	2 224	1 136	-	1 346	59 753		
209	154 252	2 245	86 547	8 361	616	2 417	323 995	19 823	16 420	304 760	55 122	17 329	46 540	36 045	40 189	71 711	1 186 372		
210	164 725	2 360	93 750	8 447	634	2 549	451 046	26 587	24 669	349 997	81 307	28 577	48 545	41 934	40 189	83 205	1 448 523		

Sumber : BPS Jawa Timur (2002); BPS Kota Batu (2004a); diolah sendiri.

Keterangan : 1 = Pertanian Bahan Makanan, 2 = Perkebunan, 3 = Peternakan, 4 = Kehutanan, 5 = Perikanan, 6 = Penggalian, 7 = Industri Pengolahan, 8 = Listrik dan Air Bersih, 9 = Bangunan, 10 = Perdagangan, 11 = Hotel, 12 = Restoran, 13 = Angkutan dan Komunikasi, 14 = Lembaga Keuangan, 15 = Pemerintahan, 16 = Jasa-Jasa, 180= Jumlah Permintaan Antara, 190 = Jumlah Input Antara, 200 = Impor, 201 = Upah dan Gaji, 202 = Surplus Usaha, 203 = Penyusutan, 204 = Pajak Tak Langsung Neto, 209 = Jumlah Input Primer, 210 = Total Input, 310 = Total Permintaan Akhir, dan 700 = Total Output.